SALINAN

WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruangpada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenapunsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD.
8. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal .....

Pasal 2

(1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dan RTRW.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum Daerah;
    c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
    d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. penutup.
(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta kondisi lingkungan strategis Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN :B.HK.02.036.25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan penyusunan RKPD Kota Parepare setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Parepare lainnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pemerintah Kota Parepare

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan itu, maka dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dengan terpilihnya Wali Kota Parepare dan Wakil Wali Kota Parepare masa bakti periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka

melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Parepare Tahun2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan RPJPD Kota Parepare 2025-2045 di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan visi daerah, yaitu: Kota Parepare Maju, Berdaya Saing, Tangguh dan Berkelanjutan, yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030-2034), Tahap III (2035-2039), dan Tahap IV (2040-2045).

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen

perencanaan di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2026 hingga tahun 2029 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029.

RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 memperhatikan Rancangan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Parepare ini adalah pemahaman awal posisi Kota Parepare yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 di landasan pada beberapa peraturan perundang- undangan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri dan peraturan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan

Peratuarn Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 9 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 6 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 8 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengharustamaan Gender di Daerah (Berita Acara Republik Indinesia Tahun 2011 Nomor 9 2 7);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah ;

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

34. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

44. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025- 2029, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041. Agar RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

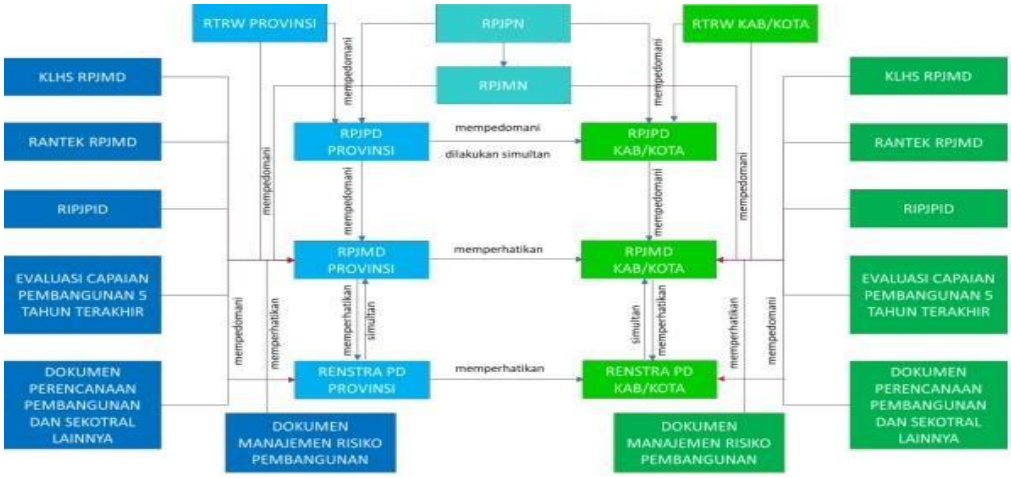

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025- 2029 dengan Rencana Tata Ruang Nasional

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada RTRN. Hasil telaah terhadap Peraturan Pemeritah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mengatur secara umum tentang pengembangan wilayah nasional dan daerah, namun tidak secara khusus menyampaikan tentang arah pengembangan Kawasan Sulawesi Selatan pada umumnya maupun Kota Parepare khususnya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagi pengembangan Kawasan Kota Parepare, yaitu;

1. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam Pasal 7 ayat 2, hurufb, poin 4 menyatakan Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKN) dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Kriteria : kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Rancangan teknokratik RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode 2025-2045 yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Visi tersebut didukung oleh empat misi negara yang merupakan tujuan bangsa, pertama melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketig, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025- 2029 juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana RTRWP Sulawesi Selatan mengamanatkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Dan pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan sekitarnya, yaitu meliputi: Kawasan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Kawasan Watampone dan sekitarnya, Kawasan Parepare dan sekitarnya, serta Kawasan Palopo dan sekitarnya.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025- 2029 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan

RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dimana Visi RPJD Prov Sulsel Tahun 2025-2045 yaitu "Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru" , yang dijabarkan kedalam 8 Misi yaitu : 1. Mewujudkan transformasi sosial, 2. Mewujudkan transformasi ekonomi, 3. Mewujudkan transformasi tata kelola, 4. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro, 4. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro, 5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi, 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, 7. Mewujudkan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, 8. Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

Dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2025- 2029 merupakan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang masuk dalam periode Pertama dari periodesasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025- 2029. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045, dalam rangka mendukung Visi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 yaitu "Kota Parepare Maju, Berdaya Saing, Tangguh Dan Berkelanjutan" yang dijabarkan kedalam 8 Misi yaitu : 1. Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat, 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berkualitas, 3. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Strategis dan Merata, 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul, 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance), 6. Mewujudkan* Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana, 7. Mewujudkan Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan , 8. Mewujudkan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025- 2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare.

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 juga menyelaraskan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041. Penyusunan dokumen teknokratik RPJMD senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kota Parepare sebagai dasar untuk menetapkan lokasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan pola ruang daerah di Kota Parepare.

Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan DokumenPerencanaan Lainnya sebagai Satu Kesatuan Sistem

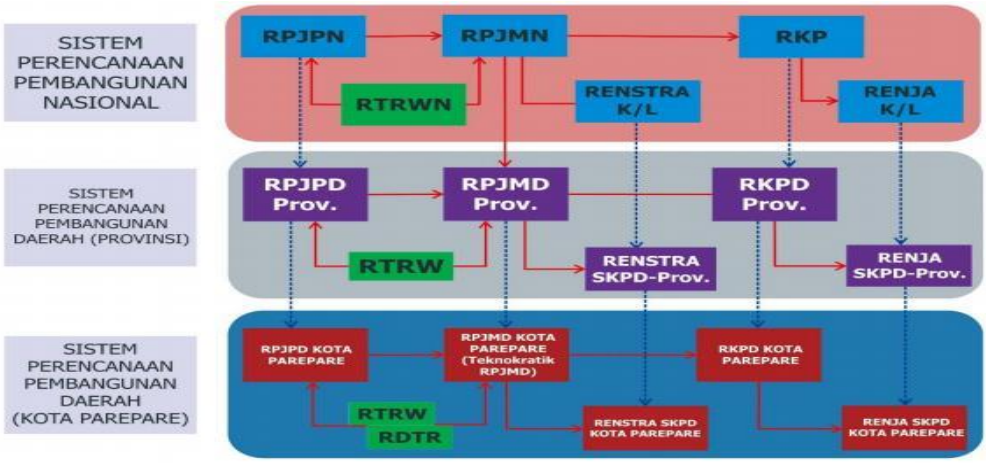

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017;

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Parepare sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Parepare, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029, bertujuan antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dalam menyusun Renstra perangkat daerah periode 2018-2023;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025- 2029.
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Parepare periode 2025-2029.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Parepare.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi Kota Parepare secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi , (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek pelayanan umum termasuk standar pelayanan minimal dan kerjasama daerah, serta (4) Aspek daya saing daerah.

Subbab Gambaran Keuangan Daerah

Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yaitu tahun 2020-2024 dan (2) Proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2029.

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Subbab Visi, Misi, Tujuan dan sasaran

Bagian ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasarn RPJMD Tahun 2025-2029, Program-

program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Subbab Program Perangkat Daerah

Subbab ini memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; Indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029.

Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Subbab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU); Target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan tentang kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah maka perlu terlebih dahulu memahami karakteristik daerah tersebut. Dengan memahami karakteristik daerah maka diharapkan perumusan perencanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah tersebut serta akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1.1 Administrasi dan Geografis Wilayah

Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara-Selatan maupun arah Timur-Barat. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 3°57'39"-4°04'49" 119° 36'24"-119°43'40" Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Kota Parepare merupakan salah satu kota dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di Sulawesi Selatan dan merupakan pusat distribusi barang dan jasa di bagian tengah Sulawesi Selatan dan menjangkau wilayah Sulawesi Barat.

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Wilayah Kota Parepare

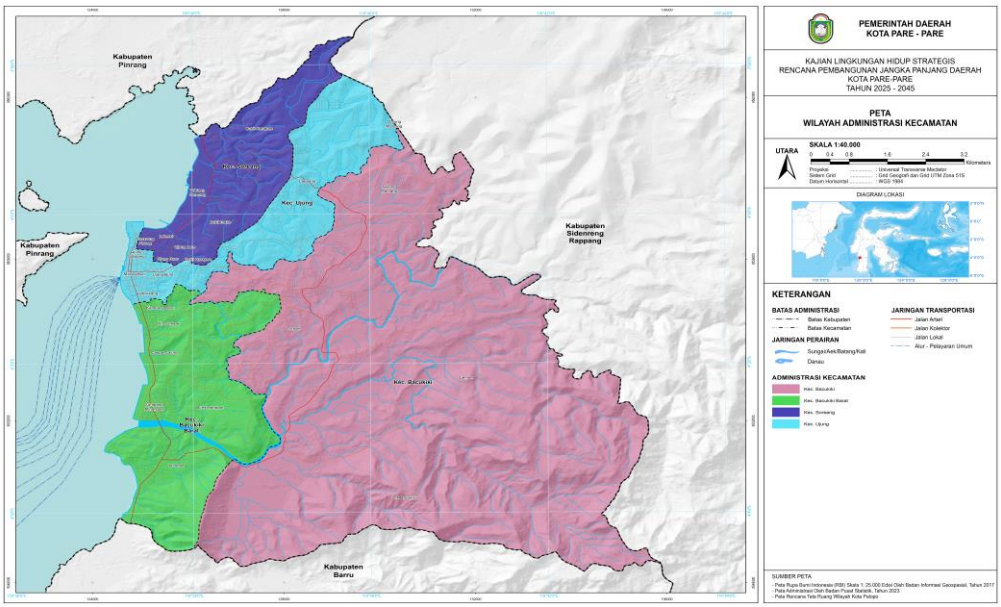

Sumber : KLHS RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

Secara Administrasi Kota Parepare terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Kecamatan Ujung. Wilayah Kota Parepare di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah barat yaitu berbatasan dengan Teluk Parepare/Selat Makassar.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Bacukiki	5.933,93
2	Bacukiki Barat	1.361,11
3	Ujung	891,95
4	Soreang	846,52
	TOTAL LUAS WILAYAH	**9.033,52**

Sumber : BPS Kota Parepare

Kota Parepare terdiri atas 4 kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu:

- Kecamatan Bacukiki: kel. Lompoe, kel. WT. Bacukiki, kel. Lemoe, dan kel. Galung Maloang;
- Kecamatan Ujung: kel. Labukkang, kel. Ujung Sabbang, kel.

Ujung Bulu, kel. Lapadde, dan kel. Mallusetasi;

- Kecamatan Soreang: kel. Lakessi, kel. Ujung Baru, kel. Watang Soreang, kel. Kampung Pisang, kel. Ujung Lare, kel. Bukit Indah, dan kel. Bukin Harapan;
- Kecamatan Bacukiki Barat: kel. Kampung Baru, kel. Cappa Galung, kel. Lumpue, kel. Tiro Sompe, kel. Sumpang Minangae, dan Bumi Harapan.

Berdasarkan data luas wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2.2038 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kota Parepare memiliki luas wilayah sebesar 89.626 Km^2 (berdasarkan Undang-undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Silawesi Selatan).

Khusus untuk batas wilayah Parepare-Pinrang dan Parepare-Barru masih dalam proses penetapan batas wilayah melalui keputusan menteri dalam negeri.

2.1.1.1.2 Kondisi Fisik Wilayah

2.1.1.1.2.1 Topografi

Dari aspek topografi Wilayah Kota Parepare memiliki kondisi topografi berupa dataran rendah yang membentang sepanjang garis pantai, menjadikannya wilayah pesisir yang strategis untuk aktivitas pelabuhan, perdagangan, dan transportasi laut.

Sebagian besar kawasan perkotaan berkembang di atas dataran rendah yang landai, dengan kontur yang relatif stabil dan mudah diakses. Kota Parepare memiliki garis pantai yang menghadap ke Selat Makassar. Kondisi topografi ini mendukung pembangunan infrastruktur, pemukiman, serta pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan. Sedangkan di bagian pesisir biasanya lebih datar dan memiliki pantai berpasir. Aktivitas nelayan juga umum di daerah pesisir ini.

Meskipun sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah, pada bagian timur dan beberapa wilayah pinggiran kota mulai dijumpai kontur yang sedikit berbukit hingga pengunungan, namun tidak signifikan.

Topografi Kota Parepare berada pada ketinggian wilayah antrara 0 hingga >500 mdpl. Sebagian besar kondisi topografi Kota Parepare yang mencakup seluruh kecamatan dengan ketinggian 50 hingga 100 mdpl seluas 2.812,44 hektar. Adapun Kecamatan Bacukiki yang memiliki kondisi topografi tertinggi hingga >500 mdpl seluas 529,47 hektar. Selengkapnya peta dan sebaran luasan topografi dapat dilihat pada peta dan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Topografi Kota Parepare Ditinjau Dari Ketinggiannya

Kecamatan	Topografi (ha)			
	<0 mdpl	0 - 20 mdpl	20 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl
Bacukiki	0	494,53	1.046,51	1.594,84
Bacukiki Barat	31,86	385,79	433,32	357,30
Soreang	11,02	276,98	215,84	321,13
Ujung	4,65	108,38	184,13	539,17
Grand Total	**47,53**	**1.265,69**	**1.879,79**	**2.812,44**

Kecamatan	Topografi (ha)			Luas (ha)
	100 - 200 mdpl	200 - 500 mdpl	>500 mdpl	
Bacukiki	803,10	1.465,47	529,47	5.933,93
Bacukiki Barat	125,67	27,17	0	1.361,11
Soreang	21,5	0	0	846,52
Ujung	55,63	0	0	891,95
Grand Total	**1.005,95**	**1.492,64**	**529,47**	**9.033,52**

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Parepare

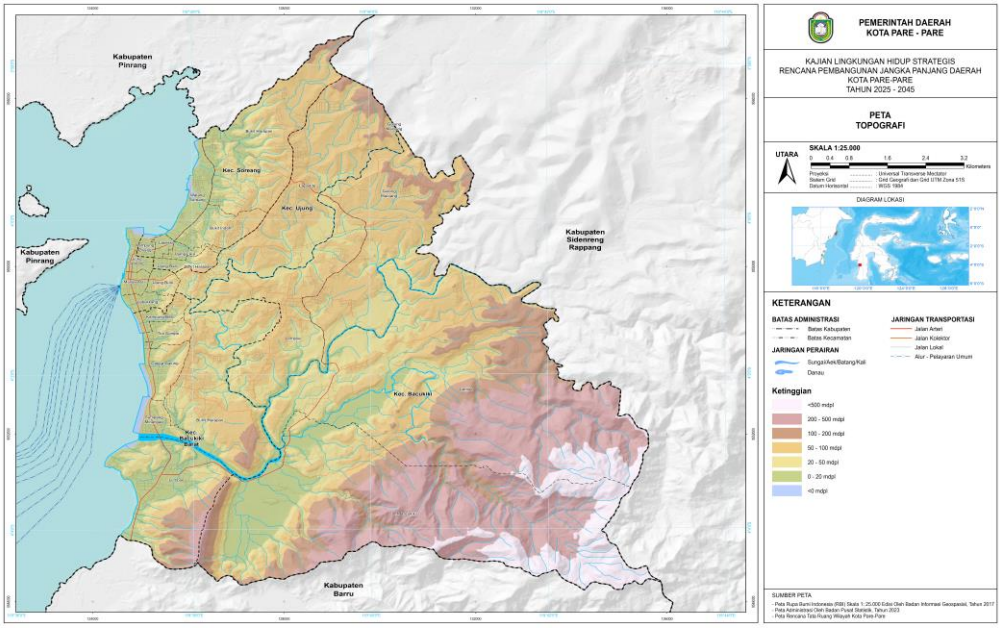

Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare 2025-2045

Kota Parepare memiliki kondisi kemiringan lereng yang beragam di wilayahnya. Kota Parepare dapat dikarakteristikkan dengan adanya kemiringan lereng dapat bervariasi dari datar hingga curam. Secara umum kondisi kemiringan lereng Kota Parepare didominasi oleh kemiringan lereng yang datar 0% hingga 25% dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Parepare cenderung lebih datar dengan kemiringan lereng yang lebih ringan. Sedangkan persentase kelerengan sangat curam tertinggi berada pada interval >40% yang berada pada Kecamatan Bacukiki. Secara detail kondisi kemringan lereng di Kota Parepare, yang diinterpresentasikan kelerengan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.3 Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kota Parepare

Kecamatan	Kemiringan Lereng (ha)					Luas (ha)
	Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
Kec. Bacukiki	1.085,82	931,04	1.108,35	1.503,99	1.304,73	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	355,44	316,70	320,98	271,09	96,90	1.361,11
Kec. Soreang	301,38	245,92	201,60	95,45	2,18	846,52
Kec. Ujung	346,38	242,49	214,91	87,14	1,04	891,95
Grand Total	**2.089,03**	**1.736,15**	**1.845,84**	**1.957,67**	**1.404,84**	**9.033,52**

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Parepare

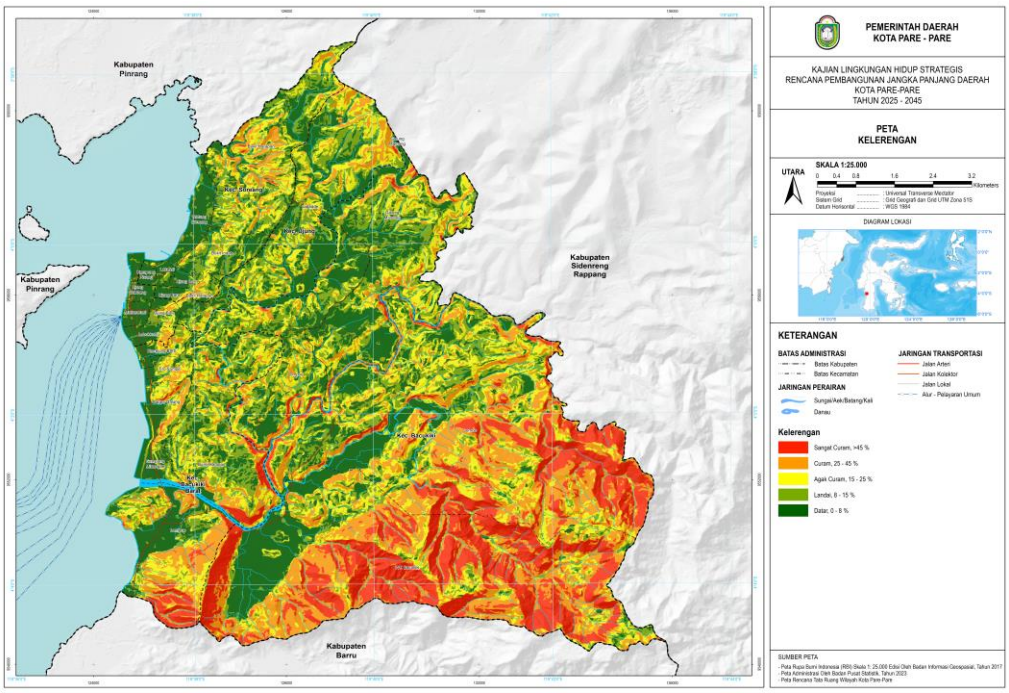

Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2045

Tanah di Kota Parepare didominasi oleh jenis tanah Mediteran Merah Kuning, Litosol/Regosol yang tersebar diseluruh Kecamatan Kota Parepare dengan luas 6.998,26 hektar atau 77% dari luas keseluruhan wilayah Kota Parepare. Kemudian jenis tanah Aluvial seluas 164,93 hektar yang hanya terdapat di Kecamatan Soreang.

Tanah di wilayah Mediteran Merah Kuning, termasuk Litosol dan Regosol, memiliki beberapa karakteristik umum yakni memiliki kandungan mineral yang tinggi, dengan banyak fragmen batuan dan kerikil, kurangnya lapisan tanah yang berkembang, kandungan organik rendah, Mediteran sering memiliki kemampuan penyimpanan air yang terbatas. Ini bisa menjadi tantangan dalam pertanian, terutama di wilayah yang sering mengalami musim panas yang panas dan kering. Meskipun demikian masih ada beberapa wilayah yang memiliki lahan pertanian produktif untuk tanaman pangan, holtikultura serta tanaman perkebunan. Produktivitas pertanian yang relatif tinggi di wilayah terbatas ini

yang membuat Parepare unggul dalam intensifikasi pertanian. Selengkapnya untuk peta dan sebaran luasan jenis tanah di Kota Parepare dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.4 Jenis Tanah Kabupaten Kota Parepare

Kecamatan	Jenis Tanah (ha)			Luas (ha)
	Aluvial	Mediteran Merah Kuning, Latosol	Mediteran Merah Kuning, Litosol/Regosol	
Kec. Bacukiki	-	1.870,33	4.063,60	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	-	-	1.361,11	1.361,11
Kec. Soreang	164,93	-	681,60	846,52
Kec. Ujung	-	-	891,95	891,95
Grand Total	**164,93**	**1.870,33**	**6.998,26**	**9.033,52**

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kota Parepare

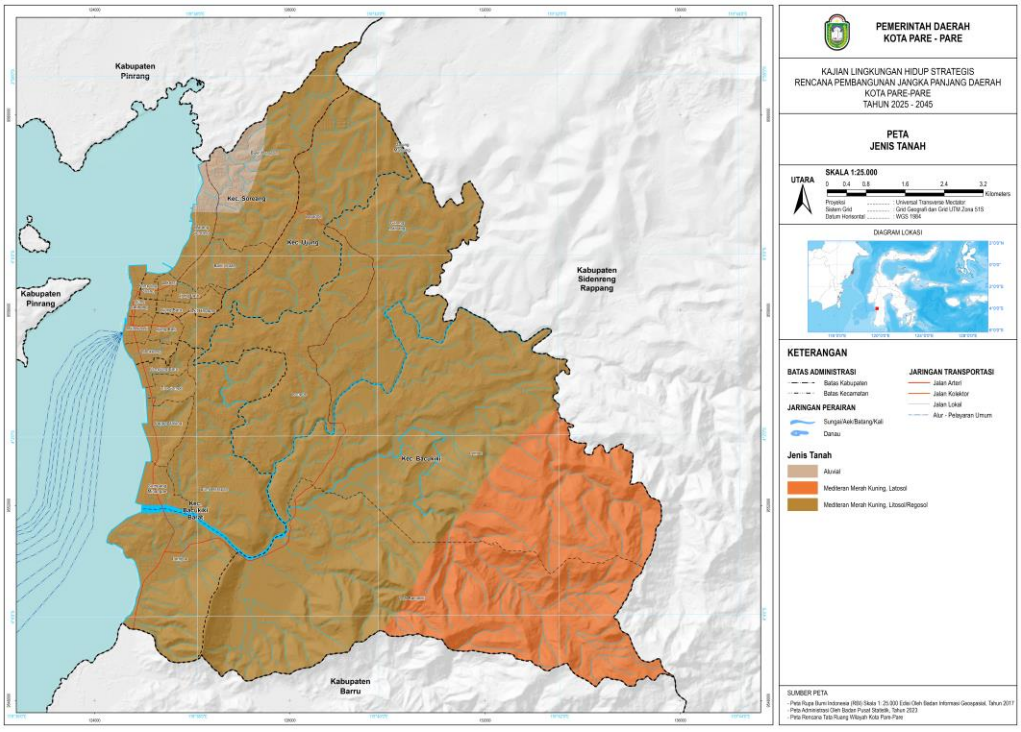

Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2045

2.1.1.1.2.2 Geologi

Kondisi fisik struktur batuan geologi di Kota Parepare di dominasi oleh luas batuan Aliran Lava dengan luasan 4.493,17 hektar yang tersebar di seluruh wilayah kota Parepare. Batuan geologi aliran lava adalah jenis batuan vulkanik yang terbentuk ketika lava cair mengalir di permukaan Bumi dan kemudian mendingin dan membeku. Batuan aliran lava memiliki tekstur yang halus hingga kasar tergantung pada seberapa cepat lava mendingin. Ketika lava mendingin dengan cepat, seperti dalam aliran lava yang relatif tipis, batuan cenderung memiliki tekstur halus. Ketika lava mendingin lebih lambat, seperti dalam aliran lava yang tebal, batuan bisa memiliki tekstur yang lebih kasar. Batuan aliran lava biasanya memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi, yang membuatnya tahan terhadap erosi. Namun, teksturnya yang kasar dapat mempengaruhi kemampuan potong dan pemotongan batuan ini. Batuan aliran lava memiliki berbagai penggunaan, termasuk sebagai bahan bangunan, paving, dan bahan seni hiasan. Batu basal dari Hawaii sering digunakan dalam lanskap dan arsitektur, dan batuan aliran lava yang lebih keras juga digunakan dalam konstruksi jalan. Secara detail untuk peta dan pesebaran luasan struktur batuan geologi pada Kota Parepare setiap kecamatan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.5 Formasi Geologi Struktur Batuan Wilayah Kota Parepare

Kecamatan	Geologi (ha)					Luas (ha)
	Aliran Lava	Alluvium	Batuan Gunungapi	Endapan Permukaan Tak Bernama	Formasi Camba	
Kec. Bacukiki	2.282,70	389,82	216,18		3.045,24	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	854,94	67,88	152,35	3,72	282,22	1.361,11
Kec. Soreang	533,64			312,88		846,52
Kec. Ujung	821,89			70,06		891,95
Grand Total	**4.493,17**	**457,70**	**368,52**	**386,67**	**3.327,46**	**9.033,52**

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Gambar 2.5 Peta Geologi Wilayah Kota Parepare

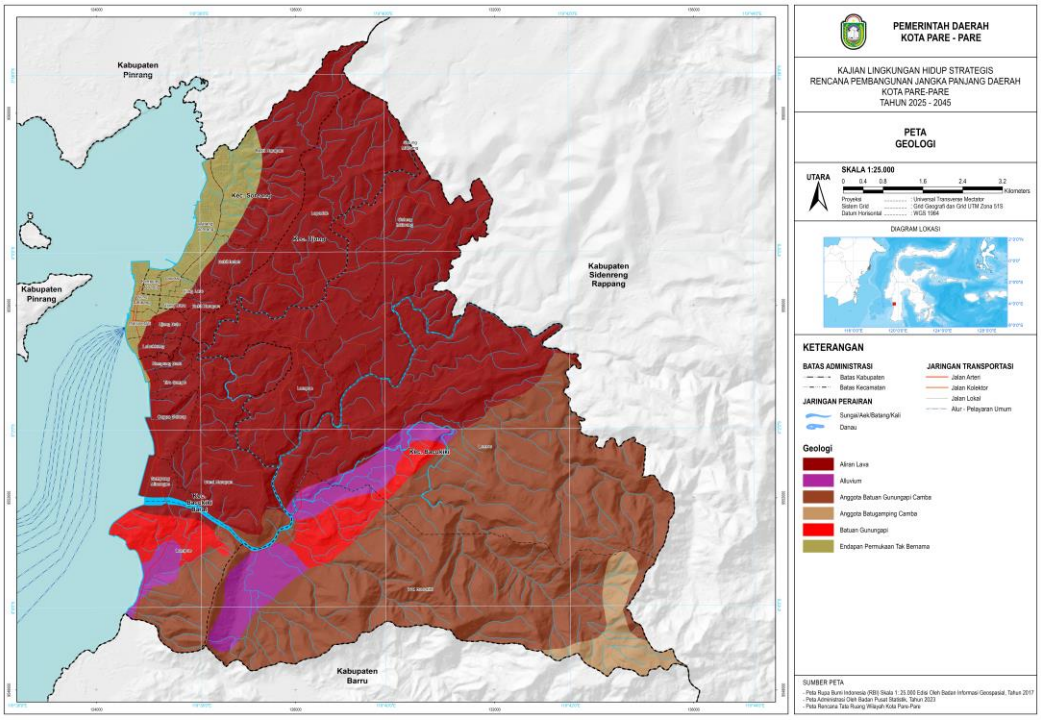

Sumber: KLHS RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2045

2.1.1.1.2.3 Hidrologi

Air tanah adalah bagian air di alam yang ada di bawah permukaan tanah. Pembentukan air tanah terjadi selama siklus peredaran air di bumi yang dikenal sebagai daur hidrologi, yang merupakan proses alamiah di mana air di alam berpindah tempat secara berurutan dan terus menerus (Kodoatie, 2012). Beberapa sumber air digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Parepare antara lain:

1. Sungai dan Sungai Bawah Tanah: Sungai dan sungai bawah tanah seringkali menjadi sumber utama air bersih untuk pemukiman kota. Air dari sungai ini dapat diambil dan diolah untuk digunakan sebagai air minum dan pasokan air kota.
2. Sumur Gali: Banyak rumah di daerah perkotaan memiliki sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Sumur-sumur ini biasanya mengambil air dari akuifer di bawah tanah.

3. Sumber Air Gunung: Kota Parepare, seperti banyak kota di daerah pegunungan, mungkin memiliki akses ke sumber air dari pegunungan di sekitarnya. Sumber air gunung sering kali dianggap sebagai air yang jernih dan berkualitas tinggi.
4. Danau dan Waduk: Beberapa kota memiliki akses ke danau atau waduk besar yang digunakan sebagai sumber air. Air dari danau atau waduk ini dapat diambil, diolah, dan didistribusikan ke kota.
5. Air Tanah: Air tanah yang berasal dari akuifer di bawah tanah juga dapat digunakan sebagai sumber air kota. Air ini mungkin perlu dipompa ke permukaan dan diolah sebelum digunakan.
6. Mata Air: Kota-kota di daerah pegunungan atau dataran tinggi sering memiliki mata air alami yang merupakan sumber air bersih. Mata air ini dapat dijaga dan dijadikan sumber air minum

Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air sungai yang melintas di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu Sumur Dalam P-1 F Harapan, Sumur Dalam P-1 G Harapan, Sumur Dalam P-2 G Soreang, Sumur Dalam P-4 C Takkalao, Sumur Dalam P-4 D Takkalao, Sumur Dalam P-5 C Wekke'e, Sumur Dangkal Labatu, Sumur Dalam P-8 A Ladoma 2, Sumur Dalam P-9 A Lapadde, Sumur Dalam P-10 A

Lanyer, Sumur Dalam P-11 A Tegal, Sumur Dalam P-12 A Gudang Obat, Sumur Dalam P-13a Gelora Mandir. Gambaran perkembangan kapasitas air bawah tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Perkembangan Kapasitas Produksi Air Tanah Dalam

Instalasi Air Tanah Dalam	2020 (ltr/dt)	2021 (ltr/dt)	2022 (ltr/dt)	2023 (ltr/dt)	2024 (ltr/dt)
Sumur Dalam P-1D Harapan	-	-	-	-	-
Sumur Dalam P-1E Harapan	-	-	-	-	-
Sumur Dalam P-1F Harapan	21,40	14,50	12,90	20,00	*20,00*
Sumur Dalam P-1G Harapan	7,43	4,70	5,30	5,00	*5,00*
Sumur Dalam P-2F Soreang	-	-	-	-	-
Sumur Dalam P-2G Soreang	26,10	22,50	19,63	30,00	*30,00*
Sumur Dalam P-4C Takkalao	17,87	12,10	9,95	10,00	*10,00*
Sumur Dalam P-4D Takkalao	21,62	17,00	18,70	20,00	*20,00*
Sumur Dalam P-5C Wekke'e	20,73	17,20	19,45	20,00	*20,00*
Sumur Dangkal Labatu	3,25	3,25	3,10	-	-
Sumur Dalam P-6A Korem	-	-	-	-	-
Sumur Dalam P-7A Laupe	-	-	-	-	-
Sumur Dalam P-8A Ladoma	16,67	-	-	-	-
Sumur Dalam P-8B Ladoma	17,68	15,50	16,85	20,00	*20,00*
Sumur Dalam P-9A Lapadde	14,48	14,20	16,60	10,00	*10,00*
Sumur Dalam P-10A Larianyareng	9,44	5,00	5,56	10,00	*10,00*
Sumur Dalam P-11A Tegal	18,37	15,80	14,78	20,00	*20,00*
Sumur Dalam P-12A Gudang Obat	19,39	13,70	14,30	20,00	*20,00*
Sumur Dalam P-13A Glora Mandiri	10,67	7,00	6,10	10,00	*10,00*
Sumur Dalam P-14A Bambu Runcing	-	-	-	12,00	*12,00*
Jumlah	**225,10**	**162,45**	**163,22**	**207,00**	***207,00***

Sumber: Profil PDAM Kota Parepare tahun 2024

Gambaran perkembangan kapasitas produksi air permukaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7 Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan

Air Permukaan	2020 (ltr/dt)	2021 (ltr/dt)	2022 (ltr/dt)	2023 (ltr/dt)	2024 (ltr/dt)
IPA 1 Sungai Karajae	29,58	30,10	25,30	40,00	*40,00*
IPA 2 Sungai Karajae	27,38	21,30	17,20	30,00	*30,00*
IPA 3 Sungai Karajae	14,00	19,30	16,67	20,00	*20,00*

Air Permukaan	2020 (ltr/dt)	2021 (ltr/dt)	2022 (ltr/dt)	2023 (ltr/dt)	2024 (ltr/dt)
IPA 4 Sungai Karajae	21,16	17,30	14,17	20,00	*20,00*
IPA 5 Sungai Karajae	20,56	19,70	16,05	20,00	*20,00*
Jumlah	**112,68**	**107,70**	**89,89**	**130,00**	***130,00***

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare tahun 2024

Ditinjau dari keadaan hidrologisnya, Kota Parepare dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai KarajaE. Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 meter yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah.

2.1.1.1.2.4 Klimatologi

Iklim sebagai unsur Iingkungan yang dapat memberikan informasi mengenai potensi suatu daerah, diantaranya bermanfaat untuk mendukung pengelolaan suatu kawasan kaitannya dengan kebutuhan air baik untuk pertumbuhan suatu tanaman maupun untuk rumah tangga. Unsur iklim yang terpenting adalah curah hujan, suhu, kelembaban udara dan kecepatan angin. Curah hujan dan had hujan rata-rata bulanan banyak digunakan untuk menilai besarnya erosivitas hujan dan klasifikasi iklim, sedangkan suhu dan kelembaban udara banyak digunakan untuk pemilihan jenis tanaman. Kajian klimatologi kaitannya untuk sektor pertanian dikenal dengan istilah agroklimat.

Wilayah Kota Parepare memiliki dua pola musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari data curah hujan yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV menunjukkan bahwa curah hujan tahunan mencapai

5998 mm^3/thn untuk 2 lokasi pos data hujan, yaitu Data Pos Hujan Bukit Harapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, dan Data Pos Hujan Bulu Dua Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 249,9 mm^3 dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan April dan tertinggi pada bulan November.

Tabel 2.8 Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan Kota Parepare

Tahun	**2024**		
Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm^3)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	693,40	30	3,2
Februari	491,40	26	5,3
Maret	415,50	27	4,4
April	82,30	22	5,3
Mei	65,00	15	6,7
Juni	111,40	16	7,2
Juli	99,00	27	6,1
Agustus	0,80	31	7,7
September	7,60	29	7,2
Oktober	194,40	31	7,2
November	337,40	29	6,1
Desember	1377,50	31	2,7

Sumber: Observation of Climate Elements By Months at Sultan Hasanuddin Meteorology Station, 2024

Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV terkait jumlah curah hujan dan hari hujan bulanan Kota Parepare bersumber dari data pos hujan yaitu terdapat dua pos ketersediaan peralatan perhitungan curah hujan yakni berlokasi di Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang dan Bulu Dua, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki.

2.1.1.1.2.5 Penggunaan Lahan

Zonasi Penggunaan Lahan, Teori ini mencakup konsep tentang zonasi penggunaan lahan dalam kota. Kota Parepare akan memiliki zona-zona yang berbeda untuk perumahan, perdagangan, industri,

dan mungkin zona-zona khusus lainnya. Konsep ini membantu mengorganisir kota dan menentukan di mana aktivitas-aktivitas ekonomi dan sosial tertentu harus ditempatkan dalam kota.

Penutupan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Identifikasi yang dilakukan untuk melihat kondisi penutupan lahan di Kota Parepare, menggunakan data penutupan lahan berdasarkan data KLHK Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. VII Makassar Tahun 2022.

Berdasarkan data penutupan lahan Kota Parepare terjadi deforestasi penurunan luasan pada kelas penutupan hutan lahan kering sekunder seluas 96,88 hektar pada tahun 2022. Selain itu kelas penutupan lahan pertanian lahan kering campur semak juga mengalami pengurangan luasan seluas 2.229,50 hektar. Kemudian kelas penutupan lahan permukiman dan Sawah mengalami penambahan luasan yg secara signifikan dengan penambahan permukiman seluas 1.293,76 hektar dan Sawah 441,14 hektar. Dalam hal ini kebutuhan lahan pemukiman dan kebutuhan lahan sumber pangan yang semakin bertambah yang ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selengkapnya untuk peta dan luas perubahan penutupan lahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.9 Penutupan Lahan Wilayah Kota Parepare

Penutupan Lahan	Penutupan Lahan	Perubahan	Persentase Perubahan
	Tahun 2022	2018-2022	2018-2022
Hutan Lahan Kering Sekunder	957,15	-35,70	-4%
Lahan Terbuka	28,18	0	0%
Permukiman	1.888,10	+ 466,61	33%
Pertanian Lahan Kering	109,59	+ 4,73	5%
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	2.897,76	-1.121,50	-28%
Savana/Rumput	1.438,94	+ 746,74	>100%
Sawah	1.072,82	+ 251,15	31%
Semak Belukar	478,85	-357,83	-43%
Tambak	76,98	+ 44,43	>100%
Tubuh Air	85,15	+ 1,33	2%

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. VII Makassar (BPKHTL), Tahun 2014, 2018 dan 2022

Gambar 2.6 Peta Penutupan Lahan Tahun 2022 Kota Parepare

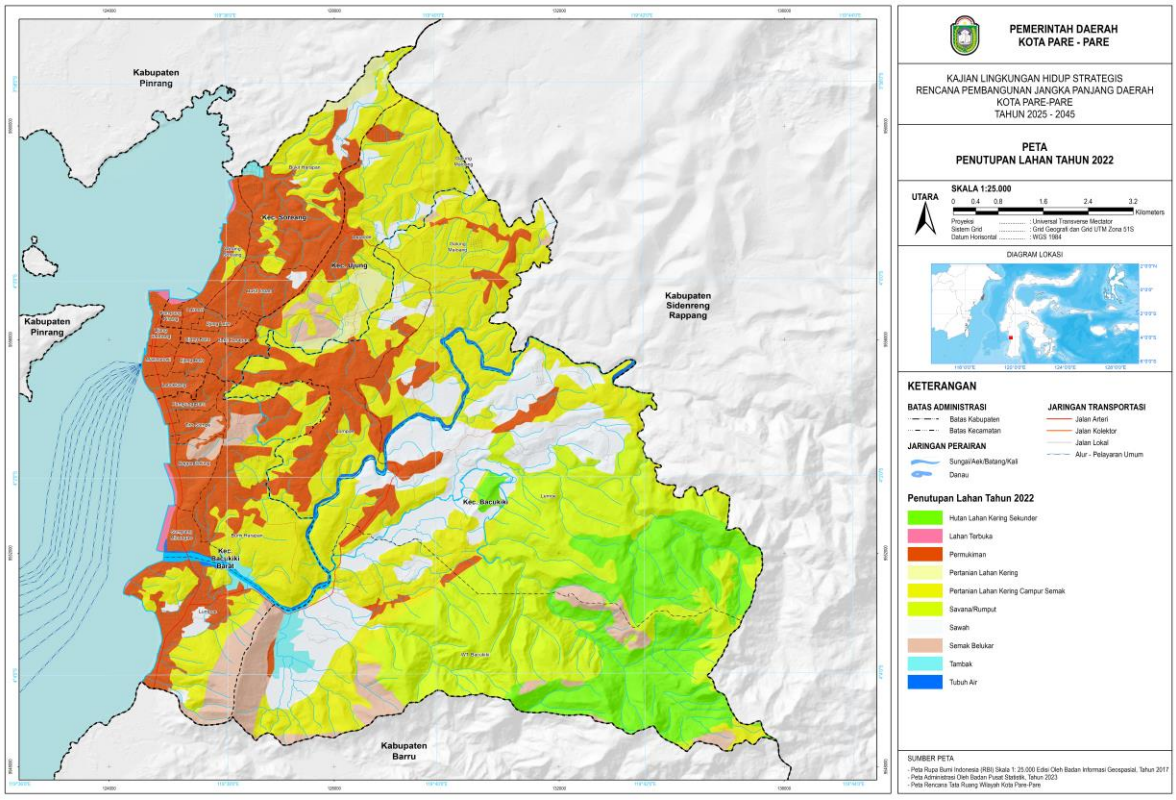

Sumber: KLHK Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wil. VII Makassar tahun 2022

Penggunaan Lahan di Kota Parepare terdiri atas beberapa bagian diantaranya yaitu Lahan Hutan, Lahan Permukiman dan Lahan Ladang. Namun untuk lebih jelasnya komposisi penggunan lahan

di Kota Parepare pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Komposisi Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Ha	persentase
1	Bangunan Industri	33,39	0,34
2	Belukar	858,13	8,67
3	Hamparan Pasir Pantai	0,9813	0,01
4	Hutan Campuran	2.135,85	21,58
5	Jaringan Jalan	6,91	0,07
6	Ladang	4.290,13	43,34
7	Pelabuhan Laut	8,40	0,08
8	Perkebunan	105,22	1,06
9	Permukiman	1.169,02	11,81
10	Pertambangan	18,28	0,18
11	Peternakan	37,72	0,38
12	Sawah Irigasi	908,07	9,17
13	Sungai	79,28	0,8
14	Tambak Ikan	95,55	0,97
15	Tanah Kosong	147,24	1,49
16	Tempat Penimbunan Sampah	4,97	0,05
	Jumlah	**9.933,22**	**100,00**

Sumber data: Peta Revisi RTRW Kota Parepare_ Peta RBI Skala 1:25.000_Citra, Satelit SPOT7 Tahun 2024

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah Kota Parepare diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

Kota Parepare, Sulawesi Selatan, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup beragam, meskipun tidak sebesar daerah lain. Kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan dengan potensi perikanan yang cukup besar, serta memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang potensial. Selain itu, Parepare juga memiliki potensi di sektor pariwisata, terutama wisata bahari. Mengoptimalkan sektor kreatif dan kegiatan ekonomi lokal juga dapat menjadi penggerak kenaikan PAD.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan di Kota Parepare merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pada tabel 2.10 terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di kota Parepare sebesar (43,34%) merupakan Ladang dengan jenis tanaman sebagai berikut :

Tabel 2.11 Produktivitas Tanaman Palawija di Kota Parepare

No	Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jagung	4,61	5,23	6,42	5,93	5,95
2	Keledai	0	0	0	0	0
3	Kacang Tanah	1,40	1,24	1,34	1,43	1,17
4	Kacang Hijau	0,24	0,61	0	0,80	1,80
5	Ubi Jalar	0	0	0	0	21,19
6	Ubi Kayu	26,54	24,58	28,54	27,75	26,10

Sumber : Kota Parepare dalam Angka 2025

Berdasarkan data produksi tanaman pangan Kota Parepare selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika dalam pengembangan beberapa komoditas utama. Produksi jagung menunjukkan tren yang cukup stabil dan cenderung meningkat, mencerminkan upaya penguatan sektor pertanian tanaman pangan. Sementara itu, kedelai belum menunjukkan perkembangan produksi, menandakan perlunya kebijakan atau stimulus khusus jika komoditas ini ingin dikembangkan.

Produksi kacang tanah dan kacang hijau mengalami fluktuasi, namun kacang hijau mencatat peningkatan signifikan pada tahun 2024, yang dapat menjadi indikator potensi untuk diperluas. Perkembangan luar biasa terjadi pada komoditas ubi jalar yang pada tahun 2024 mencatat produksi sebesar 21,19 ton setelah nihil dalam empat tahun sebelumnya. Hal ini patut menjadi perhatian

dalam perencanaan pertanian ke depan karena menunjukkan potensi hasil yang tinggi.

Ubi kayu tetap menjadi salah satu komoditas unggulan dengan volume produksi terbesar secara konsisten selama lima tahun. Stabilitas ini menunjukkan bahwa ubi kayu masih menjadi pilihan utama petani dan memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Secara keseluruhan, tren produksi tanaman pangan di Kota Parepare memperlihatkan adanya peluang pengembangan lebih lanjut pada komoditas tertentu, khususnya ubi jalar dan kacang hijau, di samping menjaga konsistensi hasil pada jagung dan ubi kayu. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendukung petani melalui penyediaan sarana produksi, pembinaan teknis, serta perluasan lahan tanam agar potensi pertanian semakin optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS Parepare Dalam Angka Tahun 2025, Tanaman sayuran semusim yang paling banyak dihasilkan di Kota Parepare adalah kangkung Dimana dari luas panen 42 hektar mampu menghasilkan 208 kuintal pada tahun 2024. Lokasi produksi terbesar kangkung berada di Kecamatan Soreang dengan total produksi sebesar 144 kuintal. Sedangkan untuk jenis buah-buahan semusim yang paling banyak dihasilkan di Kota Parepare pada tahun 2024 adalah semangka dengan luas panen 3 hektar dan produksi sebanyak 80 kuintal. keseluruhan produksi semangka berasal dari Kecamatan Bacukiki. Tanaman biofarmaka yang dihasilkan di Kota Parepare Adalah kunyit dengan luas panen selama tahun 2024 sebesar 60.000 m dengan produksi sebanyak 36.000 kg. Sentra 2 produksi kunyit tersebut berada di Kecamatan Bacukiki. Tanaman buah-buahan tahunan yang paling banyak dihasilkan di Kota Parepare pada tahun 2024 adalah mangga dengan produksi sebanyak 8.313 kuintal. Kecamatan penghasil

mangga terbesar adalah Kecamatan Ujung dan Kecamatan Bacukiki.

Tabel 2.12 Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak

NO	KELOMPOK BAHAN PANGAN	ENERGI (KALORI)	PROTEIN (GRAM)	LEMAK (GRAM)
1	Padi-padian/*Cereals*	1.898,39	46,16	8,49
2	Makanan Berpati/*Starchy Food*	13,03	0,09	0,04
3	Gula/*Sugar*	57,34	0	0,01
4	Buah Biji Berminyak/*Pulses Nut and Oil Seeds*	31,89	2,69	1,78
5	Buah-buahan/*Fruits*	41,80	0,59	0,27
6	Sayur-sayuran/*Vegetables*	63,03	2,97	0,44
7	Daging/*Meat*	101,97	6,36	8,33
8	Telur/*Eggs*	33,12	2,64	2,34
9	Susu/*Milk*	3,56	0,19	0,20
10	Ikan/*Fish*	92,13	16,46	2,11
11	Minyak & Lemak/*Oils & Fats*	243,45	0,01	12,97
	TOTAL HEWANI	**474,24**	**25,65**	**25,96**
	TOTAL NABATI	**2.092,45**	**52,41**	**10,98**
	TOTAL	**2.579,72**	**78,15**	**36,97**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan Tabel 2.12 tentang ketersediaan energi, protein, dan lemak menurut kelompok bahan pangan, terlihat bahwa total energi yang tersedia mencapai 2.579,72 kalori dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok padi-padian sebesar 1.898,39 kalori. Sementara itu, total protein yang tersedia adalah 78,15 gram, dengan sumbangan tertinggi berasal dari kelompok ikan sebesar 16,48 gram, diikuti oleh padi-padian sebesar 46,16 gram. Untuk lemak, total ketersediaan mencapai 36,97 gram, yang sebagian besar diperoleh dari kelompok minyak dan lemak sebesar 12,97 gram serta daging sebesar 8,33 gram. Jika dilihat berdasarkan sumbernya, pangan nabati memberikan kontribusi energi sebesar

2.092,45 kalori, protein 52,41 gram, dan lemak 10,98 gram, sedangkan pangan hewani menyumbang 474,24 kalori energi, 25,65 gram protein, dan 25,96 gram lemak. Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan masih didominasi oleh sumber nabati, khususnya padi-padian, dengan kontribusi penting dari pangan hewani dalam penyediaan protein dan lemak.

b. Pengembangan Kawasan Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan di Kota Parepare merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta penguatan perekonomian lokal. Dengan letak geografis yang strategis sebagai kota pelabuhan di pesisir barat Sulawesi Selatan, Parepare memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya.

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya perikanan melalui penguatan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Wattang Soreang, tempat pendaratan kapal, cold storage, serta sistem logistik yang terintegrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas nelayan juga menjadi fokus melalui program pemberdayaan, pelatihan, dan penyediaan akses terhadap teknologi modern penangkapan ikan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk perikanan tangkap Kota Parepare, memperluas jaringan distribusi, serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dengan pengelolaan yang terarah, pengembangan kawasan perikanan Kota Parepare diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Grafik. 2.1 Produksi Perikanan (Ton)

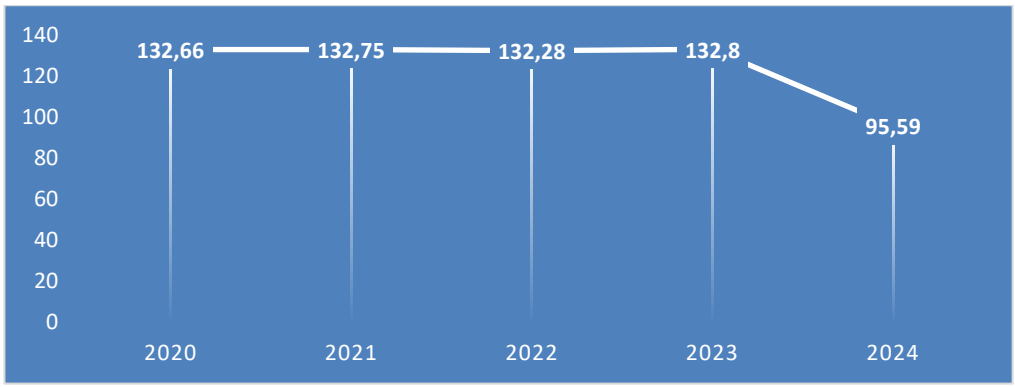

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare

Berdasarkan data pada **Grafik 2.1 Produksi Perikanan (Ton)** dapat dilihat bahwa produksi perikanan di Kota Parepare selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan tren yang cenderung menurun pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi perikanan tercatat sebesar 132,66 ton dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 132,75 ton. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tipis menjadi 132,28 ton, meskipun kembali naik pada tahun 2023 dengan capaian 132,8 ton, yang merupakan angka tertinggi selama periode empat tahun tersebut. Kondisi ini berubah signifikan pada tahun 2024, di mana produksi perikanan turun cukup tajam hingga mencapai 95,59 ton atau berkurang sekitar 37 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi sektor perikanan, baik dari segi ketersediaan sumber daya ikan, perubahan kondisi lingkungan perairan, maupun faktor eksternal lainnya seperti cuaca, iklim, maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi penurunan produksi ini melalui peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan, penguatan teknologi penangkapan dan budidaya, serta pengembangan sistem distribusi

dan pasar yang lebih efisien guna menjaga stabilitas produksi perikanan di Kota Parepare.

c. Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Kota Parepare memiliki fungsi penting sebagai penyangga ekosistem sekaligus sumber daya yang mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Meskipun luasannya relatif terbatas, keberadaan hutan tetap berperan strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mengendalikan tata air, mencegah erosi, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati lokal.

- kawasan hutan lindung berlokasi tersebar di Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) hektar.
- Kawasan hutan produksi berupa hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 119 hektar meliputi: taman hutan penelitian dan wanawisata (Alitta 1) yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang; taman hutan penelitian dan wanawisata (Alitta 2) yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang; dan hutan produksi yang tersebar di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kelurahan Galung Maloang dan Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.
- Kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 312 hektar terdiri atas:
  - kawasan cagar budaya dengan luasan kurang lebih 1,60 hektar yang terdiri dari: rumah jabatan Wakil Walikota di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung; makam datu la cincing di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung; GPIB immanuel di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung; rumah tahanan pertama di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung; kantor pos pertama di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung; rumah tempat lahir B. J.

Habibie di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung; hotel siswa di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung; dan kantor dinas pendidikan di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung

- kawasan ekosistem mangrove dengan luasan kurang lebih 6,5 hektar berada pada Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Bukit Harapan di Kecamatan Soreang;
- dan Kawasan RTH kota dengan luasan kurang lebih 304 hektar yang terdiri dari: rimba kota yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Tiro Sompe dan Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat; taman kota yang tersebar di seluruh wilayah Kota Parepare kecuali Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang; dan pemakaman di Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki; Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah di Kecamatan Soreang; Kelurahan Labukkang, Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung.

Penetapan fungsi kawasan hutan di Kota Parepare mencerminkan adanya pemanfaatan ruang yang beragam, dengan total luas wilayah sebesar 9.033,52 hektar. Dari luasan tersebut, kawasan hutan mencakup 2.539,71 hektar, yang terdiri atas Hutan Lindung seluas 2.417,12 hektar dan Hutan Produksi Terbatas sebesar 122,59 hektar. Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan mendominasi dengan luas 6.493,80 hektar.

Kecamatan Bacukiki merupakan wilayah dengan kawasan hutan terluas, yakni 5.933,93 hektar, terdiri dari 2.417,12 hektar Hutan Lindung, 66,36 hektar Hutan Produksi Terbatas, dan 3.450,45 hektar APL. Kecamatan Bacukiki Barat tidak memiliki kawasan hutan, seluruh wilayahnya yang seluas 1.361,11 hektar merupakan APL. Kecamatan Soreang memiliki total luas 846,52 hektar, yang terdiri dari 56,23 hektar Hutan Produksi Terbatas dan 790,29 hektar APL. Adapun Kecamatan Ujung sepenuhnya terdiri atas APL dengan luas 891,95 hektar dan tidak memiliki kawasan hutan.

Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan hutan berada di Kecamatan Bacukiki, sementara tiga kecamatan lainnya lebih didominasi oleh areal penggunaan lain. Oleh karena itu, strategi pengelolaan lingkungan dan konservasi hutan di Parepare sangat perlu difokuskan pada wilayah Bacukiki untuk menjaga keseimbangan ekologis kota secara keseluruhan.

Tabel 2.13 Distribusi Kawasan Hutan

Kecamatan	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Total (Ha)
	Kawasan Hutan		Bukan Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain)	
	Hutan Lindung	Hutan Produksi terbatas		
Kec. Bacukiki	2.417,12	66,36	3.450,45	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	-	-	1.361,11	1.361,11
Kec. Soreang	-	56,23	790,29	846,52
Kec. ujung	-	-	891,95	891,95
Kota Parepare	2.417,12	122,59	6.493,80	9.033,52

Sumber : KLHS RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029

d. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kota Parepare memiliki peran strategis sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan citra daerah sebagai destinasi wisata maritim dan

budaya di Sulawesi Selatan. Dengan letak geografis yang berada di pesisir barat Sulawesi, Parepare menawarkan daya tarik wisata bahari, panorama pesisir, serta potensi wisata buatan dan budaya yang semakin berkembang.

Kawasan pariwisata dengan luasan kurang lebih 310 hektar, terdiri atas:

- Kawasan pariwisata di Kelurahan Lemoe, Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki; Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Ujung Lare di Kecamatan Soreang; Kelurahan Ujung Sabbang di Kecamatan Ujung
- Pengembangan daya tarik wisata lainnya, meliputi:
  - Museum Labangenge di Kecamatan Bacukiki Barat;
  - Museum BJ. Habibie di Kecamatan Ujung;
  - Desa Wisata Bacukiki di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki;
  - Saoraja di Kecamatan Ujung;
  - Monumen Alam Batu Kiki' di Kecamatan Bacukiki;
  - Pesisir Tonrangeng di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
  - Taman wisata Lappa Anging di Kecamatan Bacukiki;
  - Kawasan wisata alam ladoma di Kecamatan Bacukiki;
  - Kawasan Keanekaragaman Hayati di Bilalangge (goa kelelawar/air terjun) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan bacukiki;
  - Kawasan Cempae/Sumur Jodoh di Kecamatan Soreang;
  - Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bacukiki;
  - Kolam Renang Jompie di Kecamatan Soreang;
  - Kolam Renang/Water Boom Ujung Lare di Kecamatan Soreang;

- Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun dan Kawasan Alun-alun Kota Lapangan A. Makkasau di Kecamatan Ujung; dan
- Taman Bermain Lamario di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.3.1. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Parepare Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara spasial menggunakan grid dengan resolusi 5”x5” (≈ 150 m x 150 m), sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

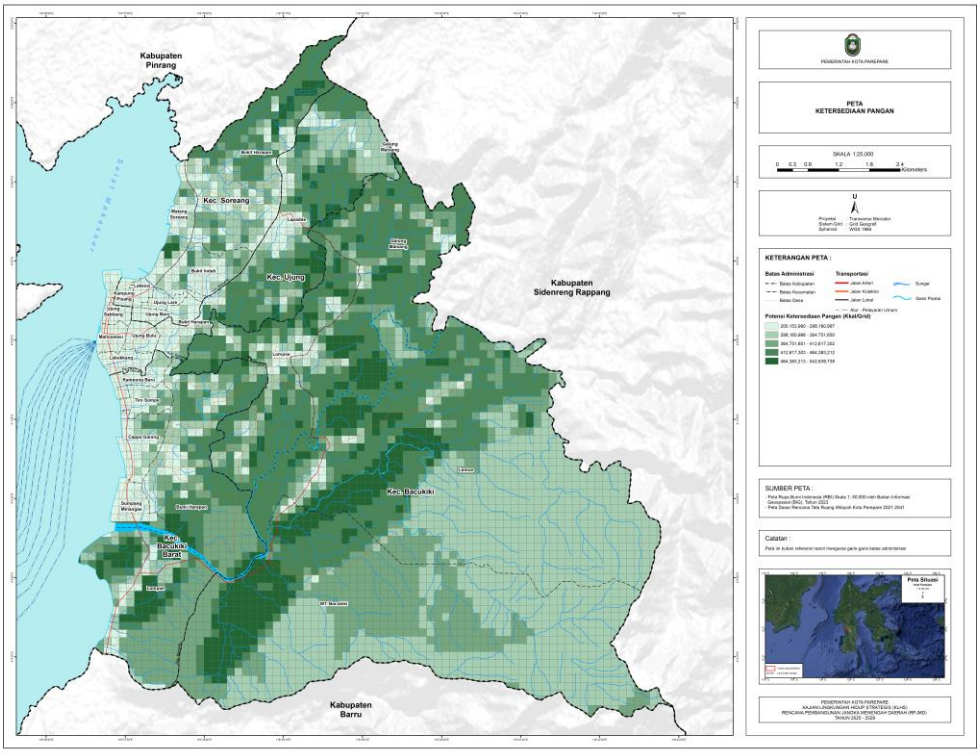

Gambar 1. Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2023

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kota Parepare dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Berdasarkan peta ketersediaan pangan Kota Parepare di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan tertinggi di Kota Parepare terdapat di Kecamatan Bacukiki, yaitu sebesar 1.125.833.022.131 kkal. Ketersediaan pangan di wilayah lain tersebar relatif merata untuk setiap wilayah kecamatan. Total ketersediaan pangan di Kota Parepare yaitu sebesar 1.724.973.048.402 kkal dari keseluruhan wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dilakukan perhitungan kebutuhan pangan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut.

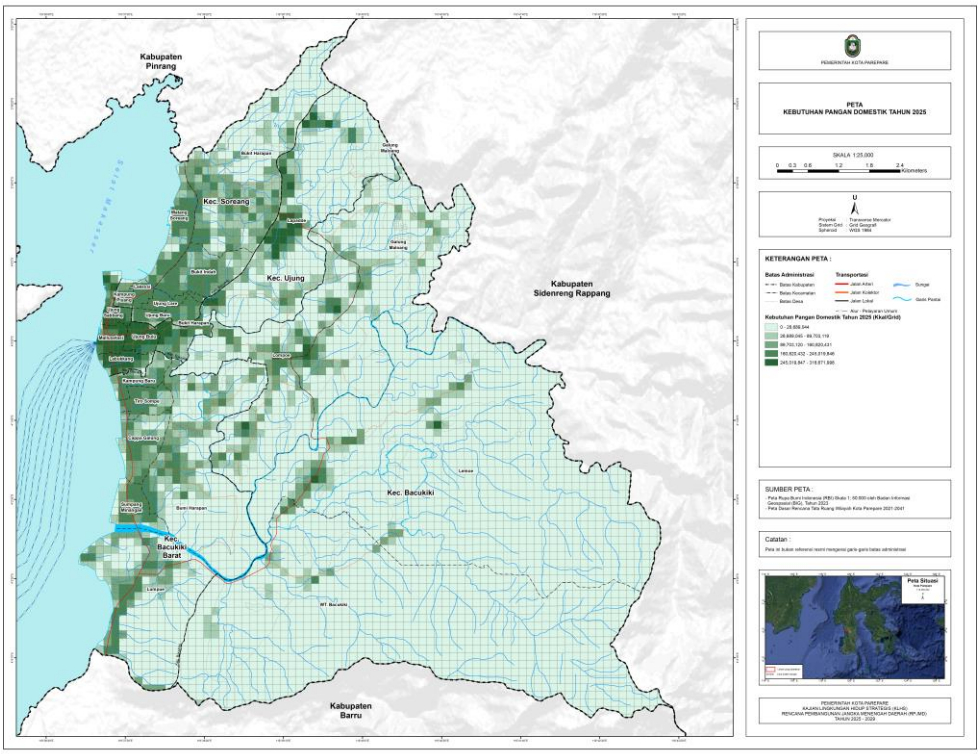

Gambar 2. Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

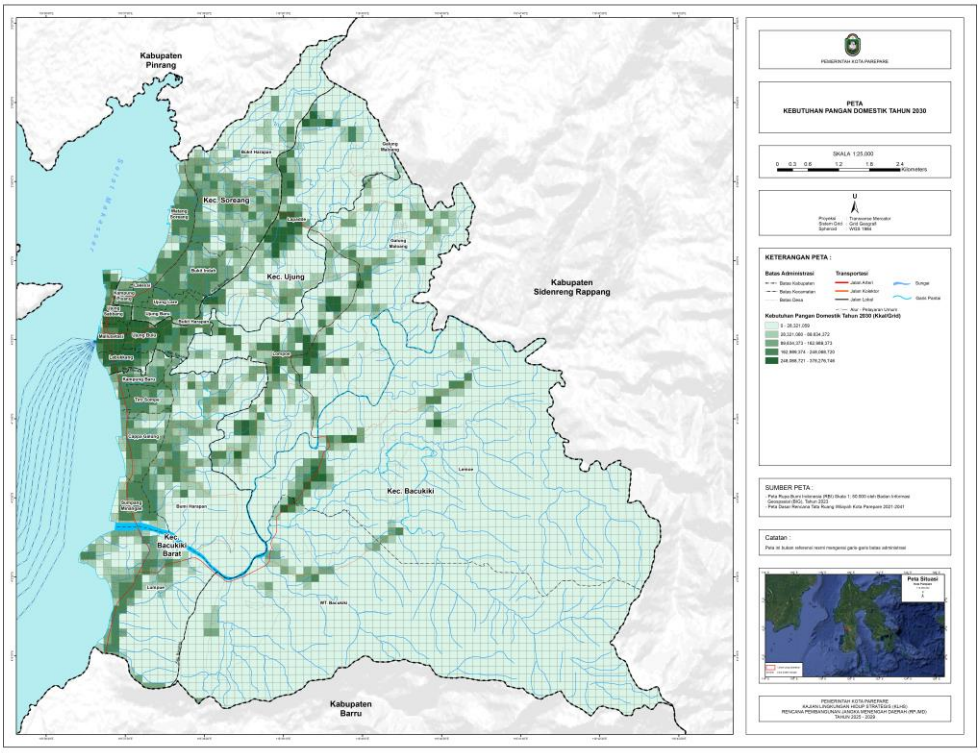

Gambar 3. Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2030

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Kota Parepare secara keseluruhan memiliki selisih ketersediaan yang bernilai positif di setiap wilayah kecamatan, dengan jumlah total 4 (empat) kecamatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan Kota Parepare masih dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep *in situ*, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Parepare tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak sepenuhnya mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan akibat kekurangan bahan pangan.

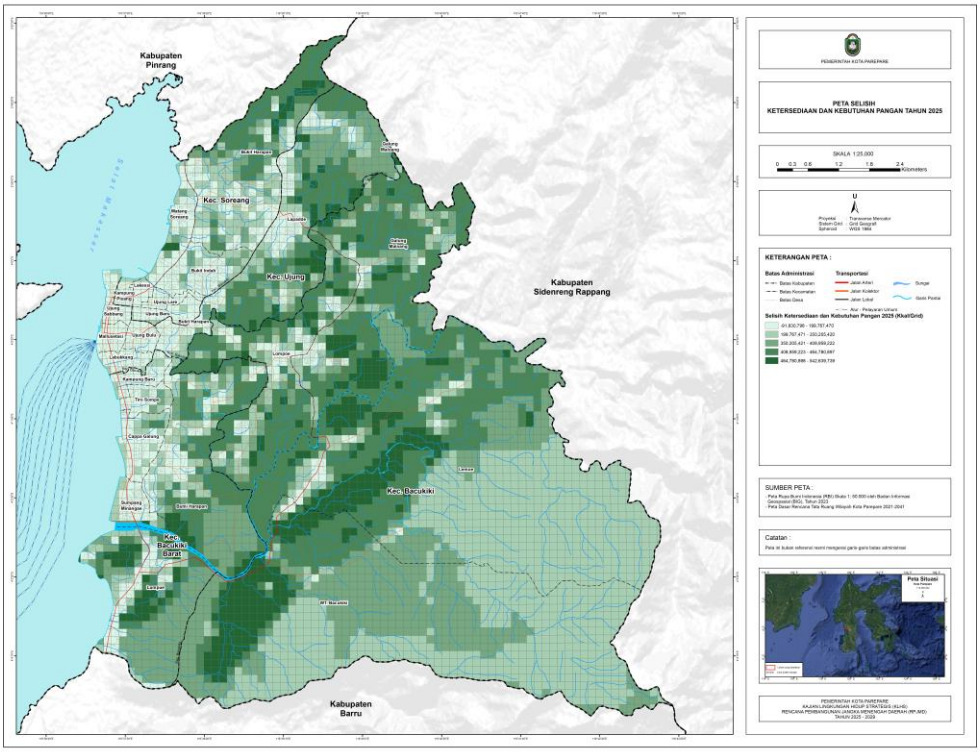

Gambar 4. Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2025
Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

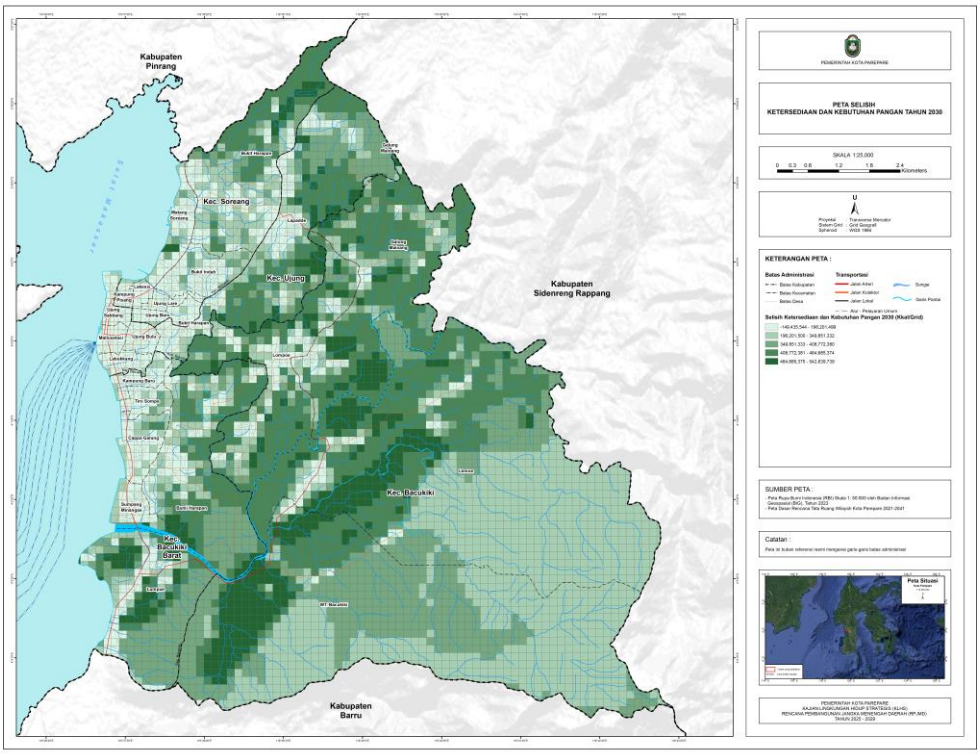

Gambar 5. Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2030
Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Penentuan status daya dukung wilayah sebagai penyedia pangan dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk dengan ambang batas populasi yang dapat didukung oleh wilayah tersebut. Apabila jumlah penduduk melebihi ambang batas, maka wilayah tersebut dianggap telah melampaui daya dukungnya sebagai penyedia pangan, dan sebaliknya. Adapun dalam penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan, dengan jumlah penduduk yang ada di setiap wilayah. Hasil analisis status daya dukung pangan akan menunjukkan jumlah penduduk yang kebutuhan pangannya dapat didukung oleh jumlah ketersediaan pangan di Kota Parepare. Ambang batas populasi tertinggi di Kota Parepare untuk penyediaan pangan terdapat di Kecamatan Bacukiki, yang disebabkan oleh tingginya jumlah ketersediaan pangan, ditambah dengan cakupan wilayahnya yang cukup luas.

Kota Parepare menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyediaan pangan. Kota Parepare pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk sebanyak 162.518 jiwa, memiliki total ketersediaan pangan yang mencapai 1.724.973.048.402 kkal. Adapun untuk kebutuhan pangan domestik hanya sebesar 137.797.940.887 kkal. Hal tersebut menyebabkan terjadinya surplus ketersediaan pangan sebesar 1.587.175.107.515 kkal.

Pada tahun 2030, Kota Parepare diproyeksikan memiliki jumlah penduduk sebanyak 191.466 jiwa. Kebutuhan pangan juga mengalami peningkatan dengan mencapai angka 150.252.786.611 kkal**.** Apabila kita tetap menghitung jumlah ketersediaan pangan yang sama pada tahun 2022, maka Kota Parepare tetap akan mengalami surplus ketersediaan pangan sebesar 1.574.720.261.791 kkal.

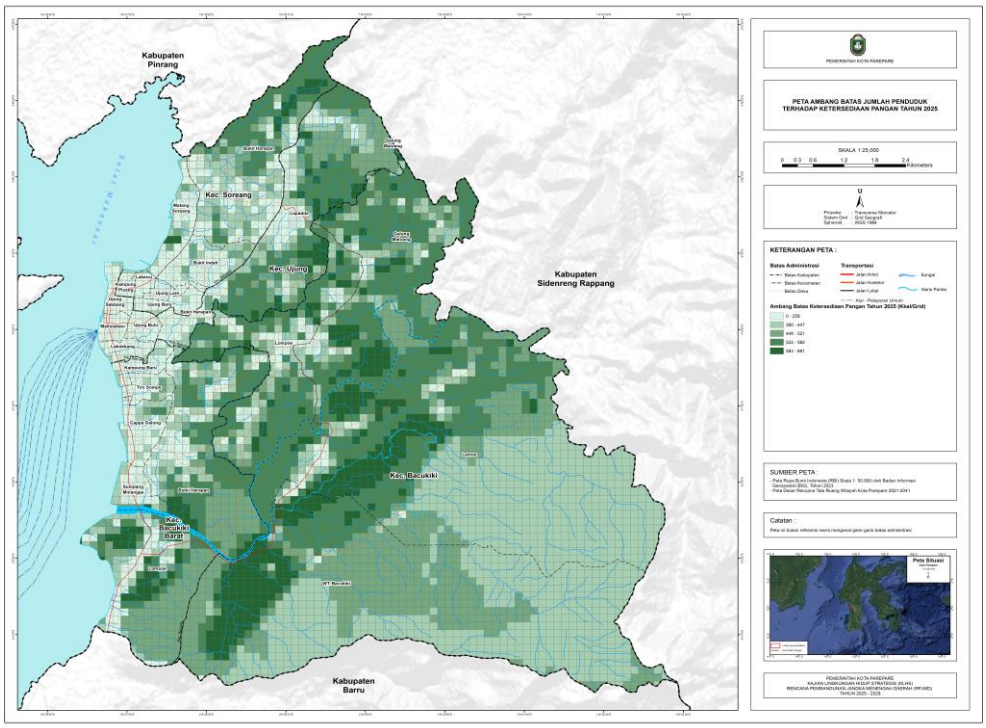

Gambar 6. Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Pangan Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

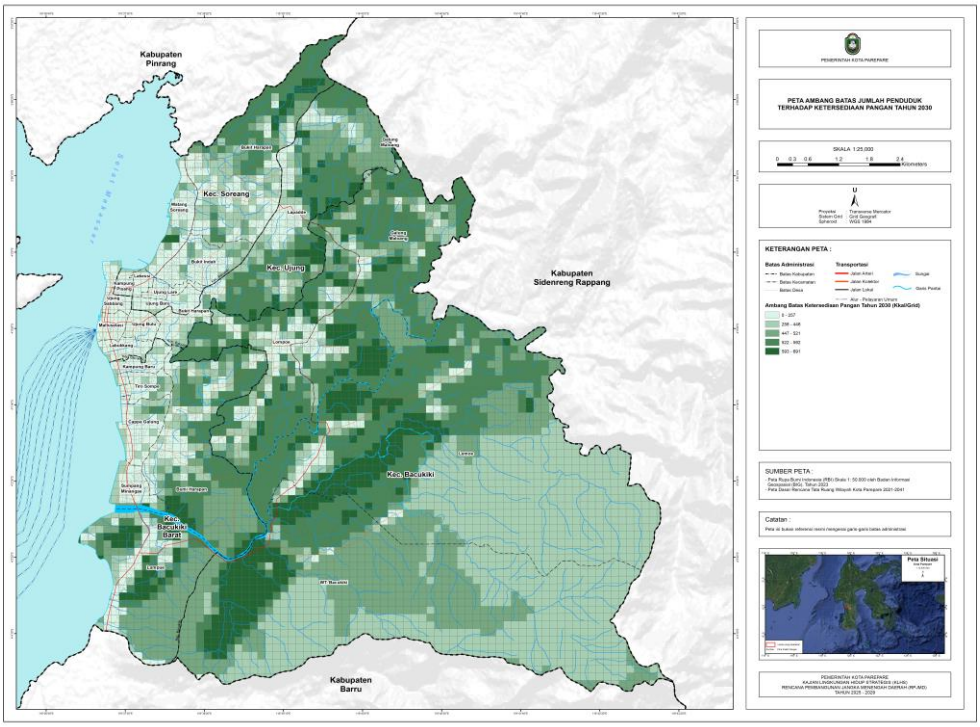

Gambar 7. Peta Ambang Batas Penduduk Terhadap Ketersediaan Pangan Tahun 2030

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.14 **Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2025**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal)	Selisih (Kkal)	Ambang Batas (Jiwa)
Kec. Bacukiki	34.526	1.125.833.022.131	27.094.278.495	1.098.738.743.636	1.400.354
Kec. Bacukiki Barat	46.768	263.846.816.852	36.701.266.486	227.145.550.365	289.453
Kec. Soreang	34.073	155.165.066.444	37.001.197.954	118.163.868.490	150.575
Kec. Ujung	47.150	180.128.142.975	37.001.197.952	143.126.945.024	185.750
Kota Parepare	**162.518**	**1.724.973.048.402**	**137.797.940.887**	**1.587.175.107.515**	**2.026.132**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.15 **Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal)	Selisih (Kkal)	Ambang Batas (Jiwa)
Kec. Bacukiki	48.581	1.125.833.022.131	38.123.939.743	1.087.709.082.388	1.387.849
Kec. Bacukiki Barat	48.192	263.846.816.852	37.818.828.962	226.027.987.890	288.037
Kec. Soreang	34.606	155.165.066.444	37.155.008.954	118.010.057.489	150.380
Kec. Ujung	47.346	180.128.142.975	37.155.008.952	142.973.134.024	185.650
Kota Parepare	**191.466**	**1.724.973.048.402**	**150.252.786.611**	**1.574.720.261.791**	**2.011.915**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Hasil analisis data DDDTLH penyedia pangan tersebut menunjukkan bahwa Kota Parepare secara keseluruhan memiliki daya dukung lingkungan yang sangat baik dalam menyediakan pangan bagi penduduknya. Setiap wilayah kecamatan berada dalam kondisi surplus ketersediaan pangan, sehingga mampu menjamin ketahanan pangan di setiap wilayah tersebut. Kondisi tersebut kemudian akan terus bertahan hingga tahun 2030 atau pada 5 (lima) tahun yang akan datang, berdasarkan hasil proyeksi. Oleh karenanya, dalam hal penyediaan pangan di Kota Parepare masih sangat menjamin untuk setiap penduduknya hingga 5 (lima) tahun kedepan.

Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia Pangan “Belum Melampaui”.

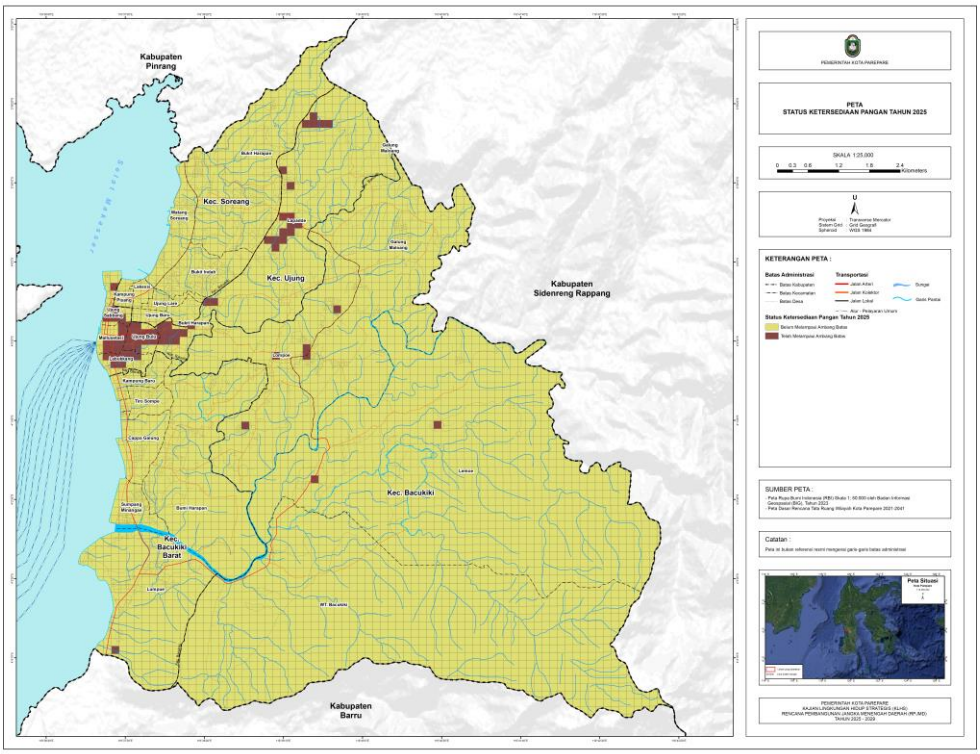

Gambar 8. Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2025
Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

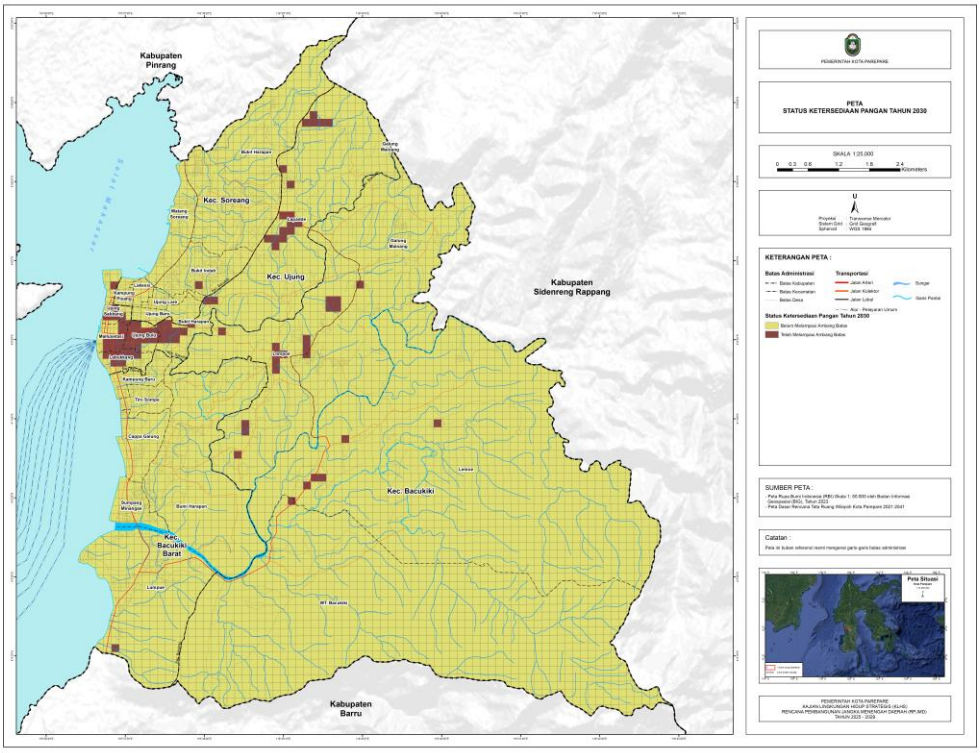

Gambar 9. Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2030
Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.16 **Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2025**

Kecamatan	Status Ketersediaan Pangan (Ha) Tahun 2025		Total (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Kec. Bacukiki	5.918,18	15,75	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	1.358,86	2,25	1.361,11
Kec. Soreang	846,52	0	846,52
Kec. Ujung	756,47	135,48	891,95
Kota Parepare	**8.880,04**	**153,48**	**9.033,52**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.17 **Distribusi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2030**

Kecamatan	Status Ketersediaan Pangan (Ha) Tahun 2030		Total (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Kec. Bacukiki	5.882,18	51,75	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	1.358,86	2,25	1.361,11
Kec. Soreang	844,27	2,25	846,52
Kec. Ujung	756,47	135,48	891,95
Kota Parepare	**8.841,79**	**191,73**	**9.033,52**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kota Parepare masih berada dalam kondisi daya dukung yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi ini juga kemudian diproyeksikan dapat bertahan hingga 5 (lima) tahun yang akan mendatang. Akan tetapi, Kecamatan Soreang diproyeksikan akan mengalami peningkatan luas wilayah yang telah melampaui ambang batas ketersediaan pangan. Pada tahun 2025, seluruh luasan wilayah Kecamatan Soreng masih termasuk belum mencapai ambang batas untuk ketersediaan pangan. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya perhatian yang lebih, terutama pada wilayah kecamatan yang menunjukkan tekanan lebih tinggi terhadap daya dukung lingkungannya, agar keberlanjutan ketersediaan pangan dapat tetap terjaga.

Hasil proyeksi juga menunjukkan bahwa kondisi terkait status daya dukung penyediaan pangan di Kota Parepare mampu bertahan

sepanjang jangka waktu proyeksi, yaitu hingga 5 (lima) tahun mendatang. Indikasi positif dapat ditimbulkan dari kondisi tersebut, dimana menunjukkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari sejumlah wilayah kecamatan tersebut, khususnya dalam hal penyediaan pangan. Sejumlah upaya juga tetap dibutuhkan agar kondisi tersebut tidak mengalami perubahan, sehingga akan menjamin keberlanjutan ketahanan pangan di Kota Parepare secara keseluruhan.

2.1.1.3.2. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersedian air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5”x5” (±150 m x 150 m).

Total ketersediaan air Kota Parepare bersumber dari Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,dengan nomor SK.No. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023. Ketersediaan air di Kota Parepare dihitung berdasarkan volume air dari masing-masing wilayah kecamatan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (IJEPA). Setelah dilakukan perhitungan, kemudian dapat dilakukan distribusi ketersediaan air di setiap wilayah kecamatan, serta ketersediaan air secara keseluruhan di Kota Parepare.

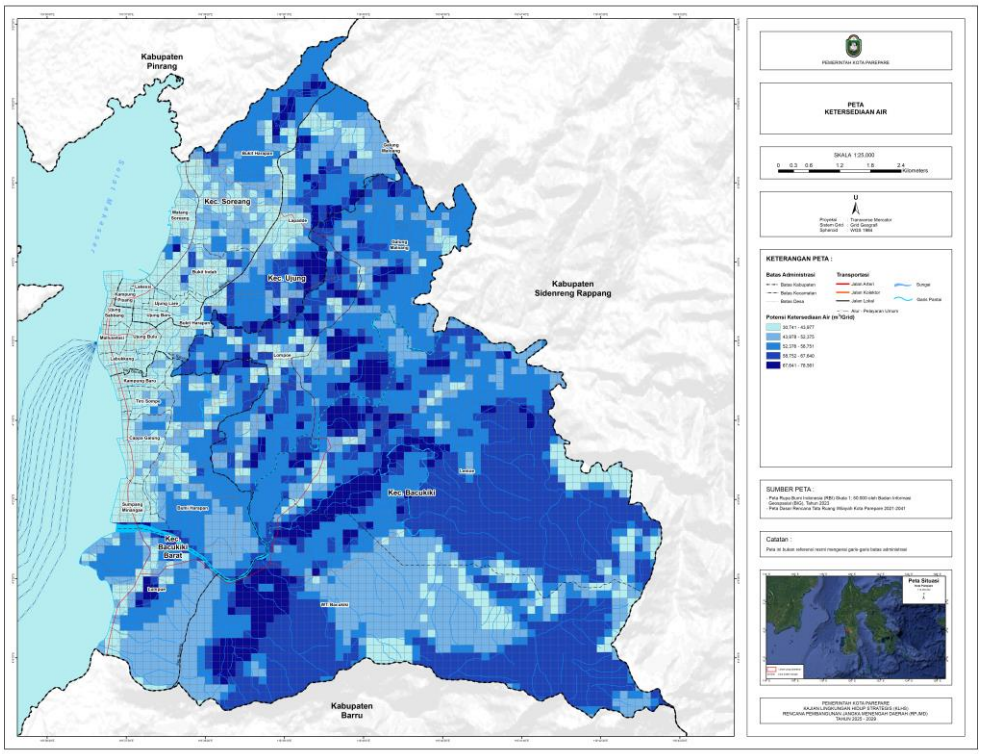

Gambar 10. Peta Ketersediaan Air Tahun 2023

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya yaitu penutupan lahan sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu 43,2 m^3/tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai *safety factor*.

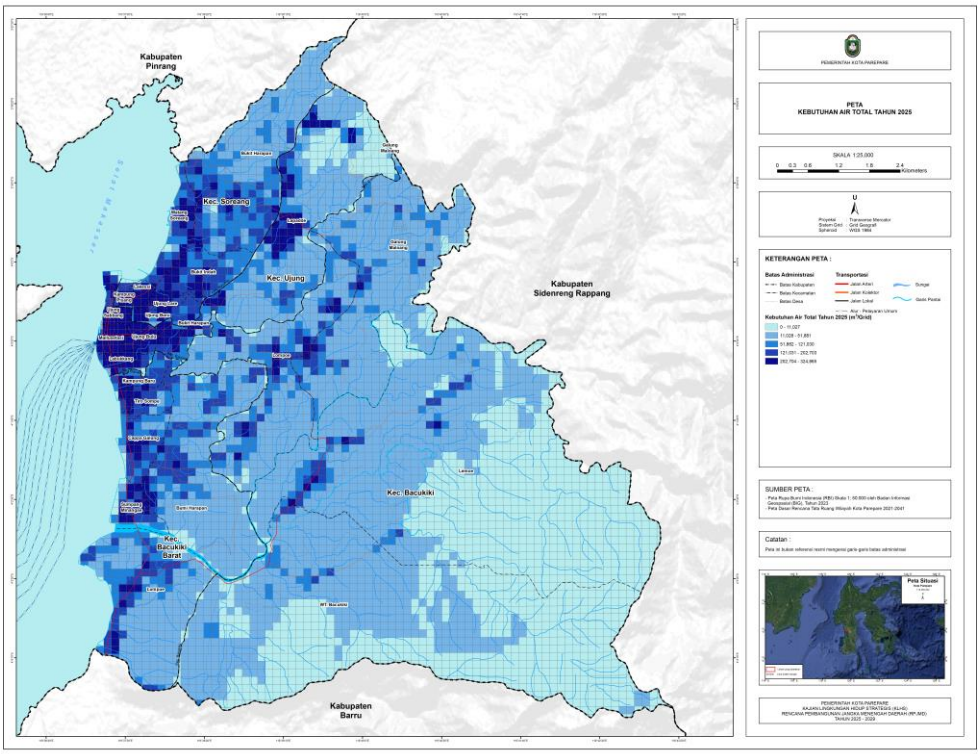

Gambar 11. Peta Kebutuhan Air Total Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

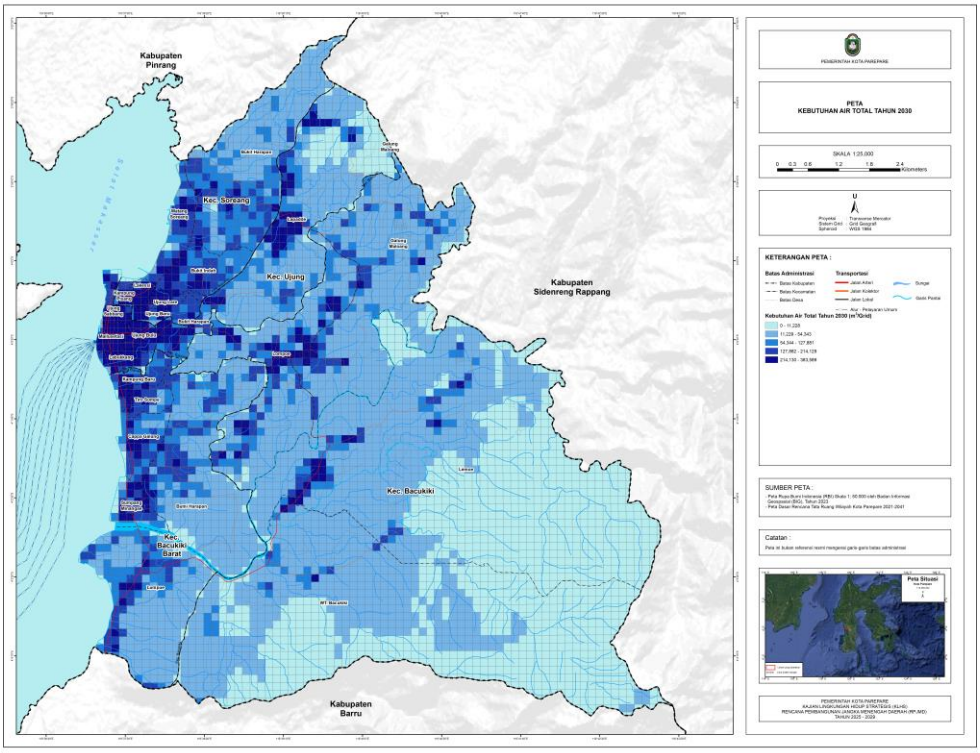

Gambar 12. Peta Kebutuhan Air Total Tahun 2030

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

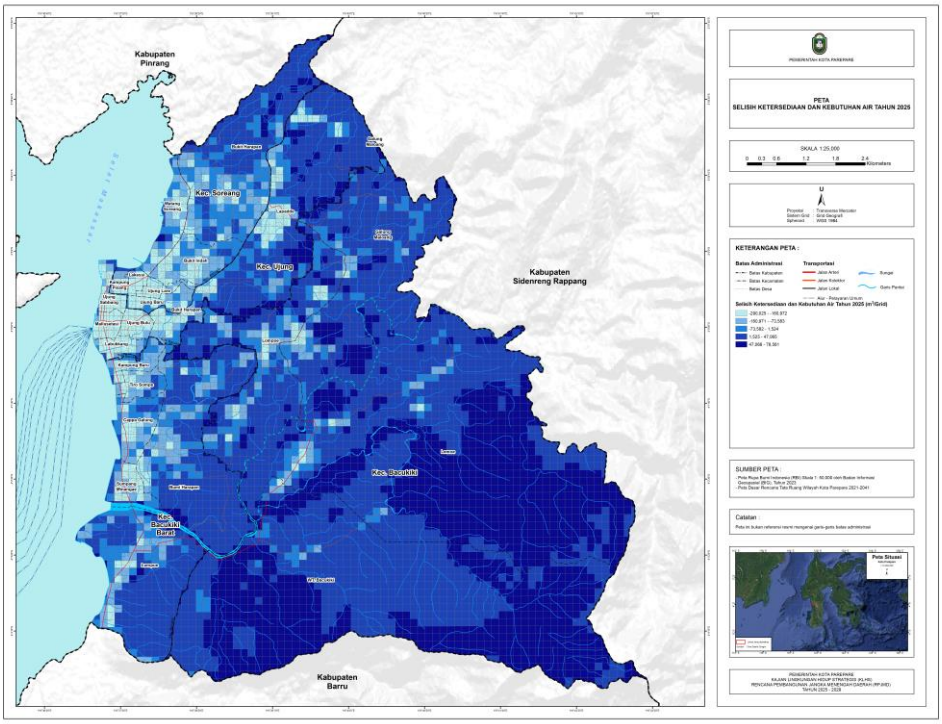

Gambar 13. Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Total Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

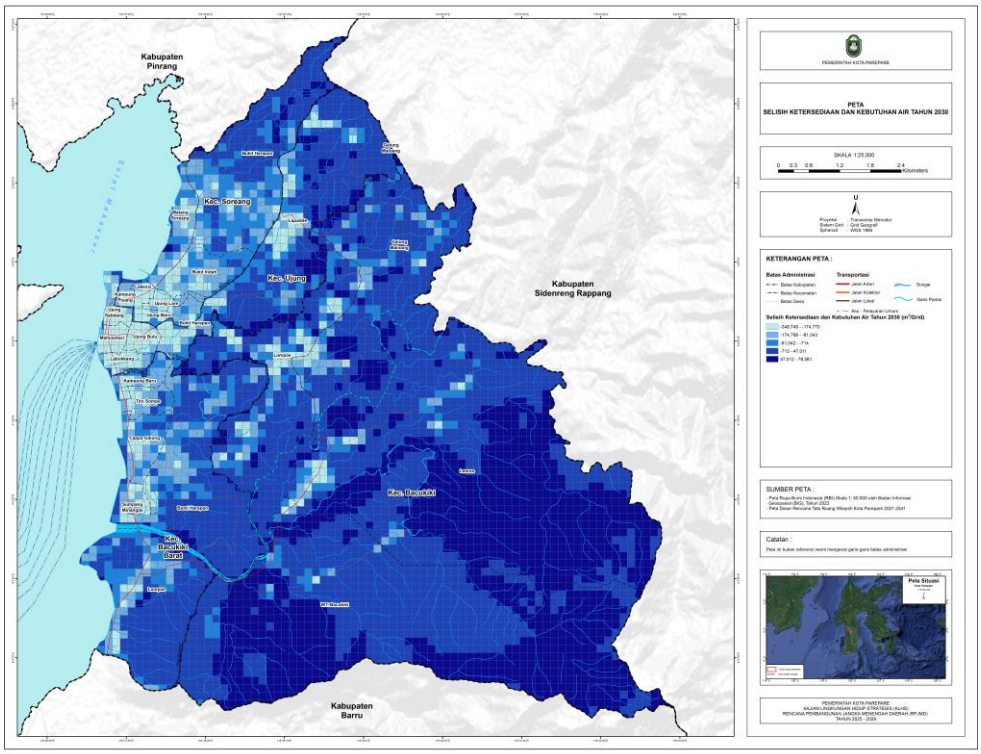

Gambar 14. Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Total Tahun 2030

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

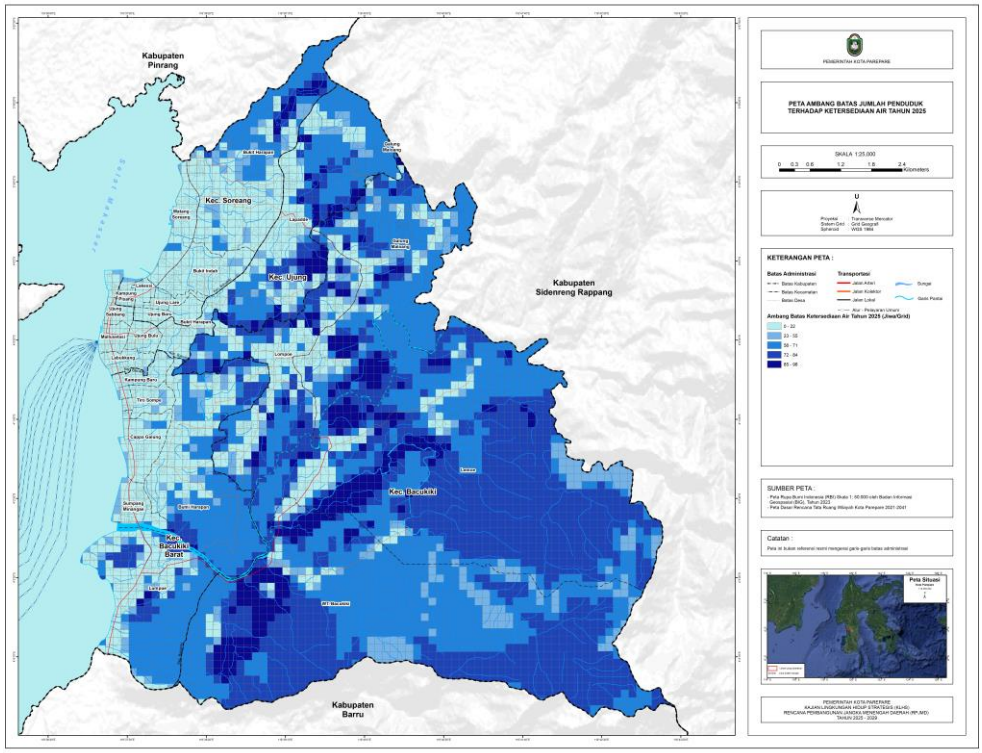

Gambar 15. Peta Ambang Batas Ketersediaan Air Total Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

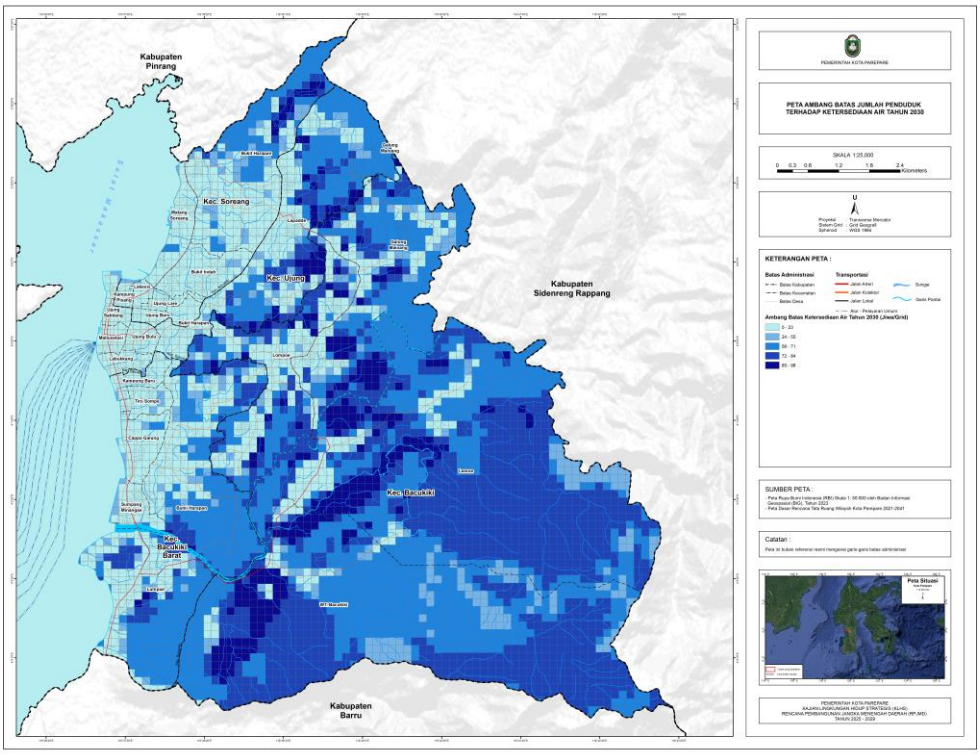

Gambar 16. Peta Ambang Ketersediaan Air Total Tahun 2030

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

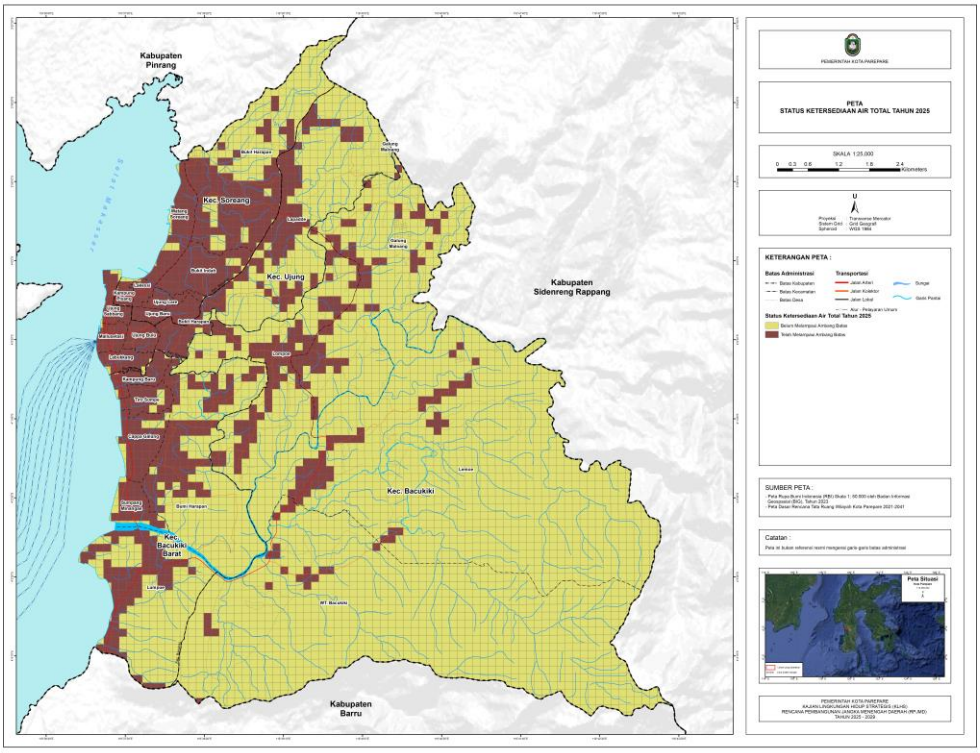

Gambar 17. Peta Status DDDTLH Penyedia Air Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

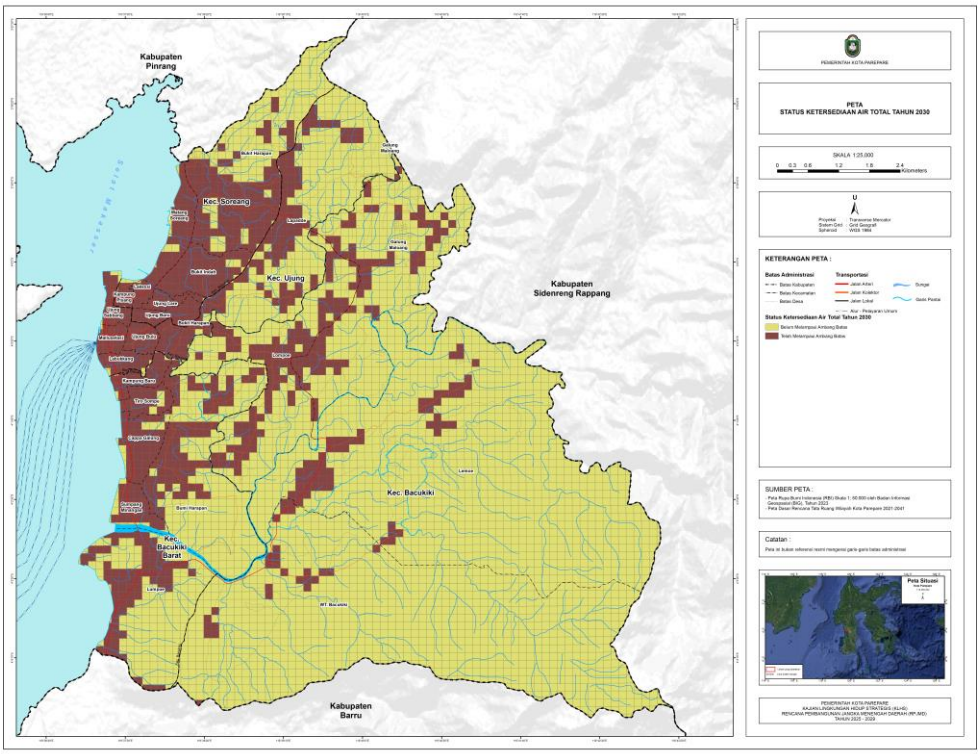

Gambar 18. Peta Status DDDTLH Penyedia Air Tahun 2030

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.18 **Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2025**

Kecamatan	Jumlah enduduk (Jiwa)	ersediaan Air (m^3)	butuhan Air mestik (m^3)	utuhan Air ahan (m^3)	Selisih (m^3)	mbang as (Jiwa)
Bacukiki	34.526	164.996.816	27.620.800	27.149.839	110.226.177	189.159
Bacukiki Barat	46.768	35.230.707	37.414.480	6.876.007	-9.059.780	27.126
Soreang	34.073	21.112.549	37.720.240	3.334.310	-19.942.001	11.299
Ujung	47.150	25.032.765	37.720.240	3.779.803	-16.467.279	20.267
Parepare	**162.518**	**246.372.836**	**140.475.760**	**41.139.959**	**64.757.117**	**247.850**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.19 **Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2030**

Kecamatan	Jumlah enduduk (Jiwa)	ersediaan Air (m^3)	butuhan Air mestik (m^3)	utuhan Air ahan (m^3)	Selisih (m^3)	mbang as (Jiwa)
Bacukiki	48.581	164.996.816	38.864.800	27.149.839	98.982.177	187.162
Bacukiki Barat	48.192	35.230.707	38.553.760	6.876.007	-10.199.060	27.008
Soreang	34.606	21.112.549	37.877.040	3.334.310	-20.098.801	11.290
Ujung	47.346	25.032.765	37.877.040	3.779.803	-16.624.079	20.259
Parepare	**191.466**	**246.372.836**	**153.172.640**	**41.139.959**	**52.060.237**	**245.720**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.20 **Status Ketersediaan Air Tahun 2025**

Kecamatan	Status Ketersediaan Air (Ha) Tahun 2025		Total (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Bacukiki	5.445,47	488,46	5.933,93
Bacukiki Barat	783,94	577,17	1.361,11
Soreang	300,21	546,31	846,52
Ujung	515,56	376,39	891,95
Kota Parepare	**7.045,18**	**1.988,33**	**9.033,52**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Tabel 2.21 **Status Ketersediaan Air Tahun 2030**

Kecamatan	Status Ketersediaan Air (Ha) Tahun 2030		Total (Ha)
	Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
Kec. Bacukiki	5.352,44	581,49	5.933,93
Kec. Bacukiki Barat	779,44	581,67	1.361,11
Kec. Soreang	300,21	546,31	846,52
Kec. Ujung	515,56	376,39	891,95
Kota Parepare	**6.947,65**	**2.085,87**	**9.033,52**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Parepare, 2024

Status DDDTLH penyedia air di Kota Parepare secara keseluruhan didominasi oleh wilayah dengan status belum melampaui ambang batas, dibandingkan dengan wilayah yang telah melampaui batas. Pada tahun 2025, wilayah dengan status belum melampaui ambang batas mencapai luasan 7.045,18 hektar. Adapun wilayah dengan status telah melampaui ambang batas mencapai luasan 1.988,33 hektar. Kondisi tersebut diproyeksikan mampu bertahan hingga 5 (lima) tahun yang akan mendatang. Hasil proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan wilayah dengan status belum melampaui ambang batas mencapai luasan 6.947,65 hektar. Sedangkan wilayah dengan status telah melampaui ambang batas mencapai luasan 2.085,87 hektar.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kota Parepare masih berada dalam kondisi daya dukung yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kondisi

ini juga kemudian diproyeksikan dapat bertahan hingga 5 (lima) tahun yang akan mendatang. Akan tetapi, diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan luas wilayah yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air pada 2 (dua) kecamatan.

Salah satu kecamatan yang mengalami peningkatan luas perubahan status DDDTLH penyedia air secara signifikan yaitu Kecamatan Bacukiki. Kecamatan Bacukiki mengalami peningkatan luas wilayah yang telah melampaui ambang batas untuk daya dukung penyediaan air. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya perhatian yang lebih, terutama pada bagian wilayah yang menunjukkan tekanan lebih tinggi terhadap daya dukung lingkungannya, agar keberlanjutan ketersediaan air dapat terus terjaga.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP diukur berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan negara setiap saat. Ketahanan pangan dicapai melalui empat pilar yaitu: Ketersediaan pangan (produksi dan import), Cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut. Lima variabel yang berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan, yakni: Persentase produksi padi, Rata-rata pengeluaran perkapita, Indeks daya beli, Persentase luas panen, Kepadatan penduduk. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Parepare adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP 2021 tingkat kabupaten/kota dan

provinsi merupakan pemutakhiran IKP 2020 yang telah disusun sebelumnya oleh Badan Ketahanan Pangan.

Grafik. 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kota Parepare

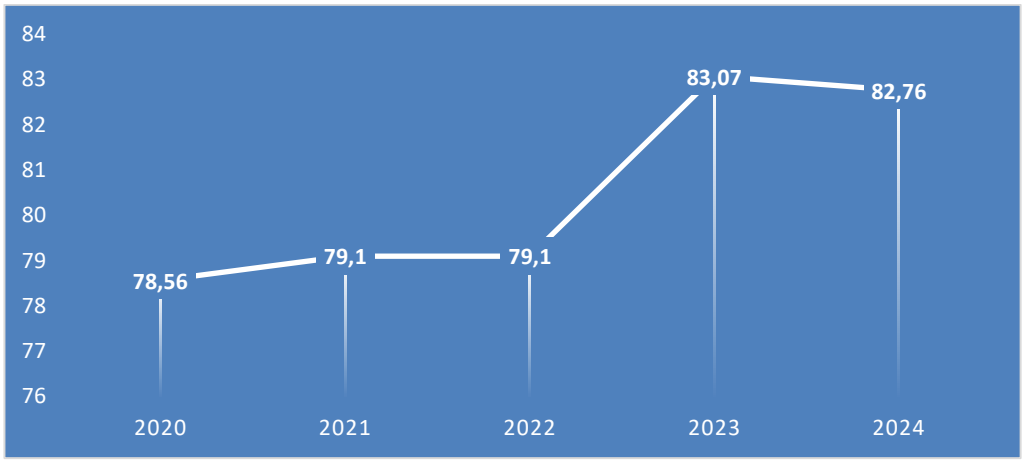

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare

Nilai IKP berkisar antara 0-100, dengan nilai lebih tinggi menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020 dengan nilai 78,56 dan terus meningkat pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 dengan nilai masing-masing 79,10 hingga 83,07. Namun, pada tahun 2024 indeks sedikit menurun menjadi 82,76, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan capaian ini mencerminkan adanya upaya yang cukup baik dari pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya melalui peningkatan ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan masyarakat. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan intervensi program ketahanan pangan, meskipun penurunan kecil pada tahun 2024 menjadi catatan penting agar stabilitas capaian dapat terus dijaga. Secara keseluruhan, tren positif yang ditunjukkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi indikasi bahwa Kota Parepare berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan pangan sebagai salah satu aspek penting pembangunan daerah.

2.1.1.4.2 Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, dan semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur).

Total skor PPH didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan. Pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok pangan yang mengacu pada standar PPH, yaitu sebagai berikut: Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan hewani, Minyak dan lemak, Buah dan biji.

Grafik. 2.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Parepare

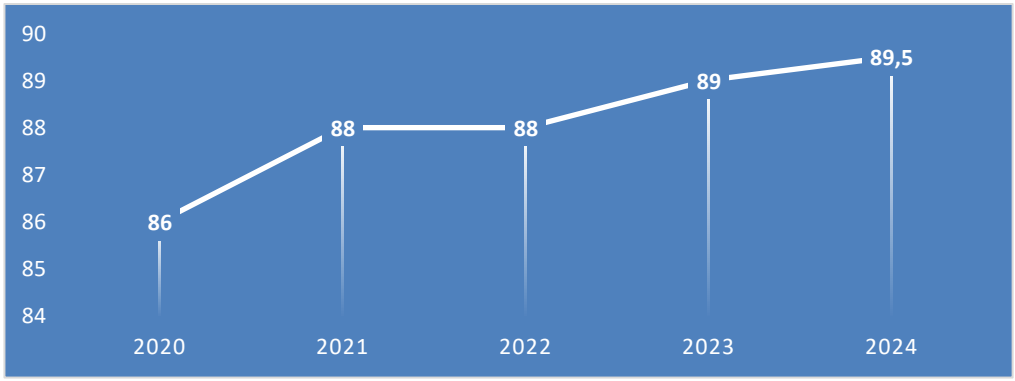

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Parepare terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa harapan konsumsi pangan Kota Parepare semakin membaik. Ditahun 2018 skor PPH Kota Parepare sebesar 85 dan terus meningkat hingga mencapai scor 89,5 pada tahun 2024. Peningkatan skor PPH mengindikasikan semakin tingginya pengeluaran rumah tangga dan semakin

baiknya pemahaman masyarakat Kota Parepare tentang gizi dan pola hidup/makan sehat.

2.1.1.4.3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, juga dikenal sebagai Prevalence of Undernourishment (PoU), adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu yang tidak mengkonsumsi energi yang cukup untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Konsep ini diukur dari asupan energi yang berada di bawah kebutuhan energi minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan diukur sebagai persentase penduduk yang mengkonsumsi kalori per hari di bawah 70% AKG. Semakin banyak persentase masyarakat miskin di kabupaten/kota tersebut, maka kemungkinan besar prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangannya juga tinggi.

Grafik. 2.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Parepare (%)

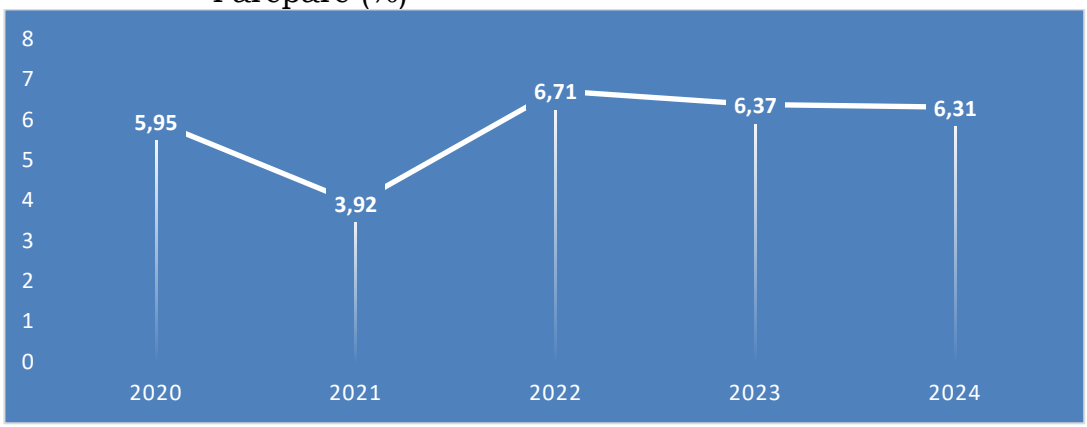

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare

Selama periode tahun, tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Parepare mengalami fluktuasi dan hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Tahun 2023 tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Parepare mengalami penurunan 0,34 dibandingkan tahun 2022. Dan di tahun 2024 dengan 6,31, relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata

Sulawesi Selatan sebesar 7,84% dan rata-rata nasional sebesar 8,53%. Rendahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat Kota Parepare kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan yang berpengaruh pada berkurangnya daya beli masyarakat. Namun Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan kebijakan penguatan ketahanan pangan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui penyediaan bibit tanaman melalui Dinas Ketahanan Pangan. Penyedian bibit tersebut untuk kelompok wanita tani (KWT) maupun secara perorangan seperti komditas sayuran seperti cabe, terong, tomat, kacang panjang dan lainnya.

2.1.1.4.4 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Konsumsi listrik per kapita (kWh per kapita) adalah produksi pembangkit listrik dan gabungan panas dan pembangkit listrik dikurangi kerugian transmisi, distribusi, dan transformasi serta penggunaan sendiri oleh pembangkit listrik dan panas, dibagi dengan populasi pertengahan tahun. Data energi dikumpulkan oleh Badan Energi Internasional (IEA). Konsumsi energi listrik di Indonesia tidak saja hanya dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dalam suatu wilayah tetapi faktor aktifitas ekonomi penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia pada 2023 adalah 1.285 kilowatt-jam per kapita (kWh/kapita), meningkat dari 1.173 kWh/kapita pada 2022. Aktivitas ekonomi merupakan salah satu faktor penentu utama penggunaan energi, sedangkan langkah-langkah efisiensi energi juga dapat membantu mengurangi jejak energi.

Grafik. 2.5 Konsumsi Listrik per Kapita Kota Parepare (kWh)

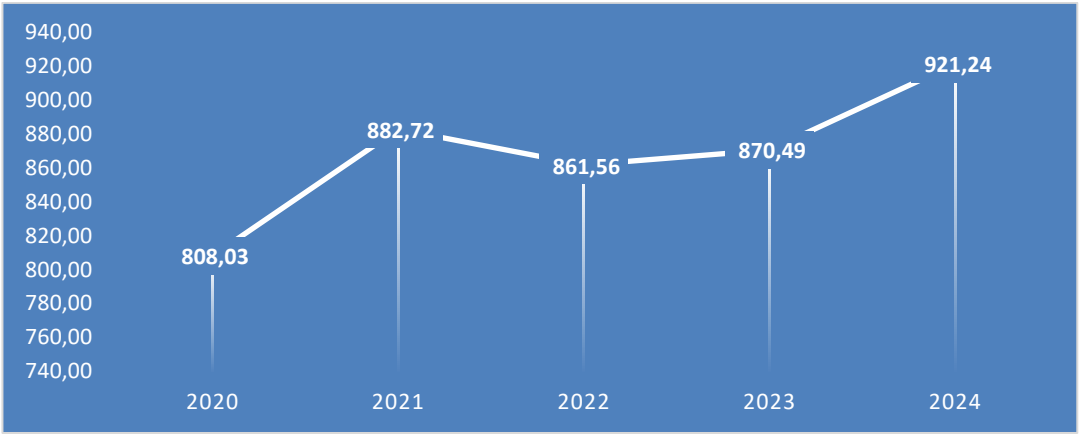

Sumber :

Konsumsi listrik per kapita di Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, konsumsi tercatat sebesar **796,56 kWh per kapita**, kemudian mengalami kenaikan menjadi **800,28 kWh per kapita** pada tahun 2021. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian **807,13 kWh per kapita**, dan mencapai titik tertinggi di tahun 2023 sebesar **832,25 kWh per kapita**.

Kenaikan konsumsi listrik per kapita ini menunjukkan adanya pertumbuhan kebutuhan energi seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat, perkembangan sektor ekonomi, serta bertambahnya jumlah fasilitas sosial dan komersial di Kota Parepare. Hal ini juga dapat mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, di mana listrik semakin menjadi kebutuhan utama baik untuk rumah tangga maupun sektor produktif.

Dengan demikian, meskipun capaian konsumsi listrik per kapita menunjukkan arah positif sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kota Parepare perlu mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik ke depan dengan mendorong investasi energi terbarukan, program hemat energi, serta peningkatan infrastruktur kelistrikan yang andal dan merata.

2.1.1.4.5 Kapasitas Air Baku (ltr/detik)

Ketahanan air adalah konsep yang lebih luas daripada ketersediaan air, yaitu upaya mendapatkan air, keamanan dari daya rusak, dan penyediaan air yang berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan. Ketahanan air mencakup tiga pilar dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Ketahanan air juga dilengkapi dengan dua pilar pendukung yaitu pengembangan sistem informasi SDA dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA. Ketahanan air sangat vital dalam kehidupan manusia, dan terkait erat dengan ketahanan pangan dan energi. Masyarakat dunia telah sependapat bahwa ketahanan air perlu diperhatikan, baik untuk pengelolaan sumber daya air, juga dalam pembangunan berkelanjutan pada umumnya.

Kapasitas air baku adalah konsep yang berkaitan dengan perencanaan penyediaan air bersih, yang harus memenuhi konsep 3K yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air yang perlu atau tidak perlu diolah menjadi air bersih. Air baku meliputi air hujan, air tanah, air sumur resapan, dan air badan seperti danau dan sungai.

Grafik. 2.6 Kapasitas Air Baku Kota Parepare (ltr/detik)

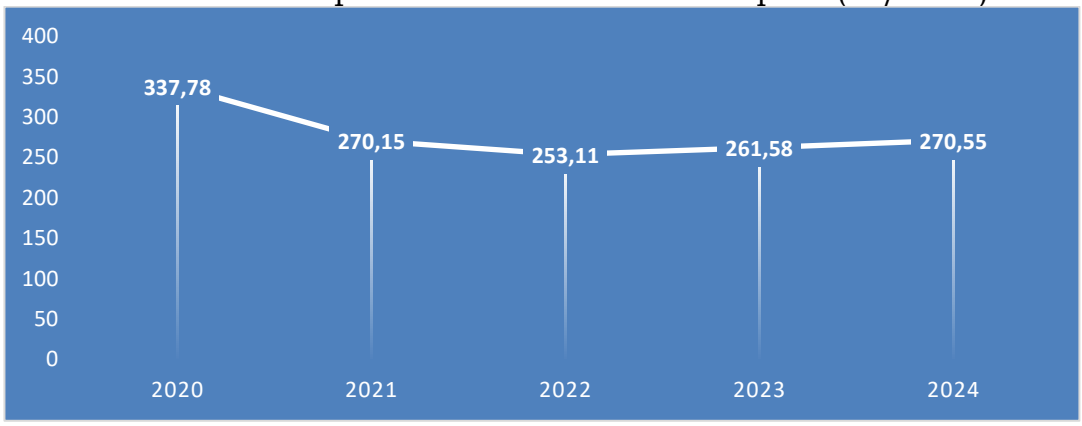

Sumber : Profil PDAM Kota Parepare tahun 2024

Berdasarkan data kapasitas air baku Kota Parepare periode 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi ketersediaan air baku yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, kapasitas air baku tercatat sebesar 337,78 liter per detik, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 270,15 liter per detik dan kembali menurun pada tahun 2022 hingga mencapai titik terendah sebesar 253,11 liter per detik. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari keterbatasan sumber daya maupun keterbatasan prasarana pengelolaan air baku. Mulai tahun 2023 kapasitas air baku kembali meningkat menjadi 261,58 liter per detik dan meningkat menjadi 270,55 liter per detik di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan kapasitas serta efektivitas langkah-langkah optimalisasi prasarana penyediaan air baku di Kota Parepare.

2.1.1.4.6 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah kemampuan keluarga memperoleh air layak, aman, dan terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan akses ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan aktivitas rumah tangga.

Grafik. 2.7 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

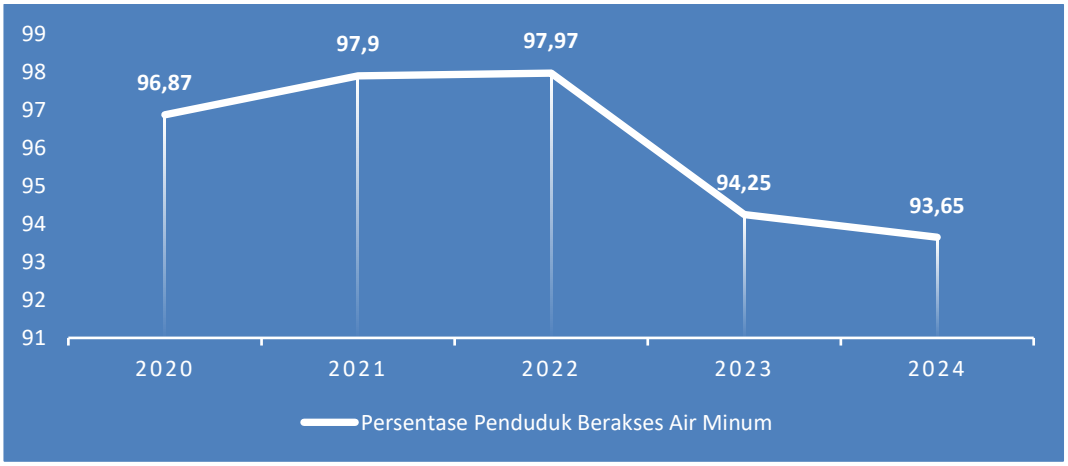

Persentase penduduk berakses air minum pada periode tahun 2018 mencapai 84,29 persen, tahun 2019 mencapai 87,56 persen. Tahun 2020 meningkat menjadi 96,87 persen dan di tahun 2021 mencapai 97,90 persen dikarenakan sumur dalam di kelurahan Bumi Harapan tahun 2021 dan adanya penyambungan rumah. Tahun 2022, meningkat menjadi 97,97 persen. Dan menurun di tahun 2024 menjadi 93,65 persen.

Grafik. 2.8 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan

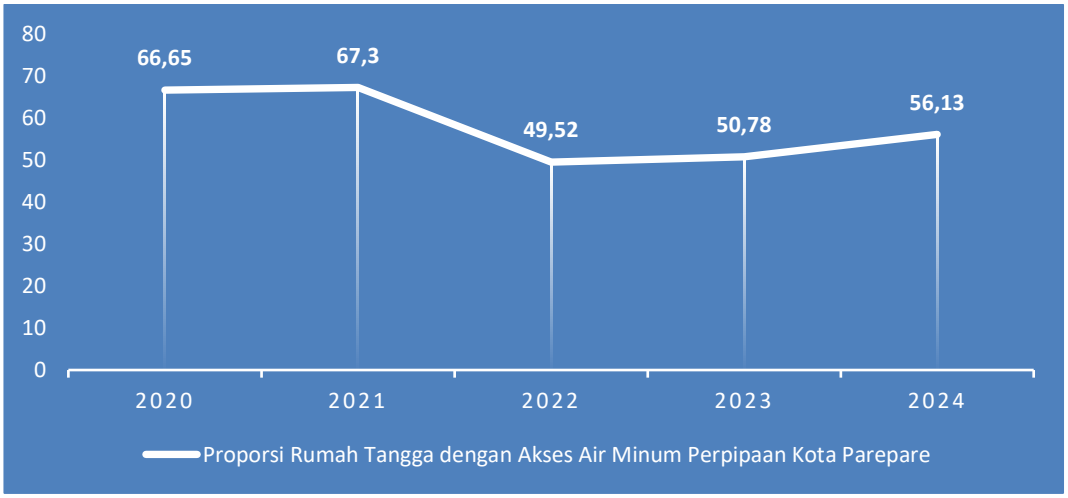

Proporsi rumah tangga dengan akses air minum perpipaan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dengan perhitungan diasumsikan 1 SR sama dengan 4,62 Jiwa. Dan mulai tahun 2022 perubahan perhitungan ril 1 SR sama dengan 3,32 jiwa sehingga persentasenya mengalami penurunan menjadi 49,52 persen dan semakin meningkat menjadi 56,13 persen ditahun 2024 perubahan perhitungan ril 1 SR sama dengan 3,25 jiwa.

Grafik. 2.9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

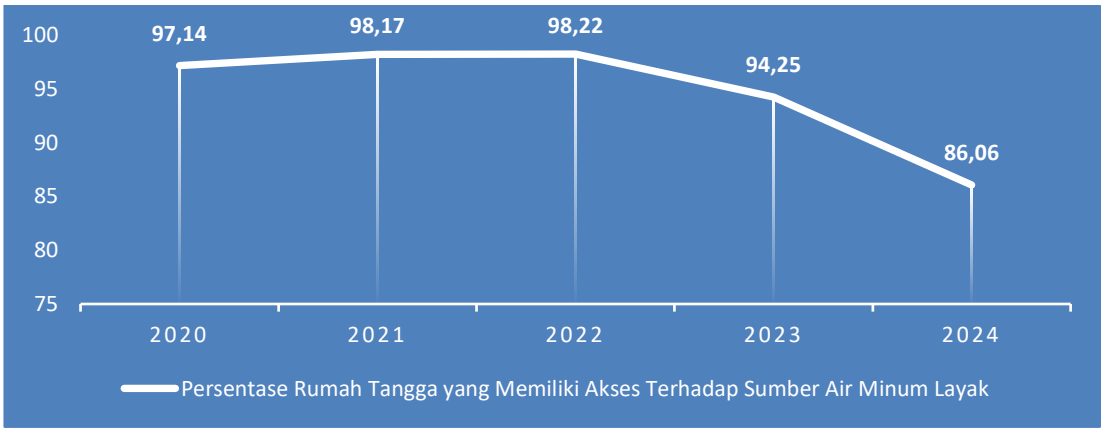

Sumber: Dinas PUPR Kota Parepare

Kota Parepare menunjukkan dalam akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak dalam lima tahun terakhir. Dengan capaian tertinggi 98,22 % di 2022. Dan, capaian terendah 86,06% di tahun 2024.

Grafik menunjukkan perkembangan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kota Parepare dalam periode awal lima tahun terakhir, yang kemudian cenderung mengalami penurunan dalam kinerjanya. Tahun 2020 (97,14 %). Tahun 2021 (98,17 %). Tahun 2022 (98,22 %), terjadi sedikit peningkatan (+0,71 persen). Tahun 2023 (94,25 %) terjadi penurunan yang secara signifikan menurun menjadi 86,06 % di tahun 2024.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, masih belum mencapai target nasional 100%. Pada tahun 2022, capaian indikator ini mencapai 98,22%, namun mengalami fluktuasi dan justru menurun menjadi 86,06% pada tahun 2024. Akses terhadap air minum layak merupakan elemen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya peningkatan dalam distribusi air bersih, pembangunan infrastruktur penyediaan air, serta optimalisasi sistem pengelolaan air.

Grafik. 2.10 Akses Rumah Tanggah terhadap Air Minum Aman menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024

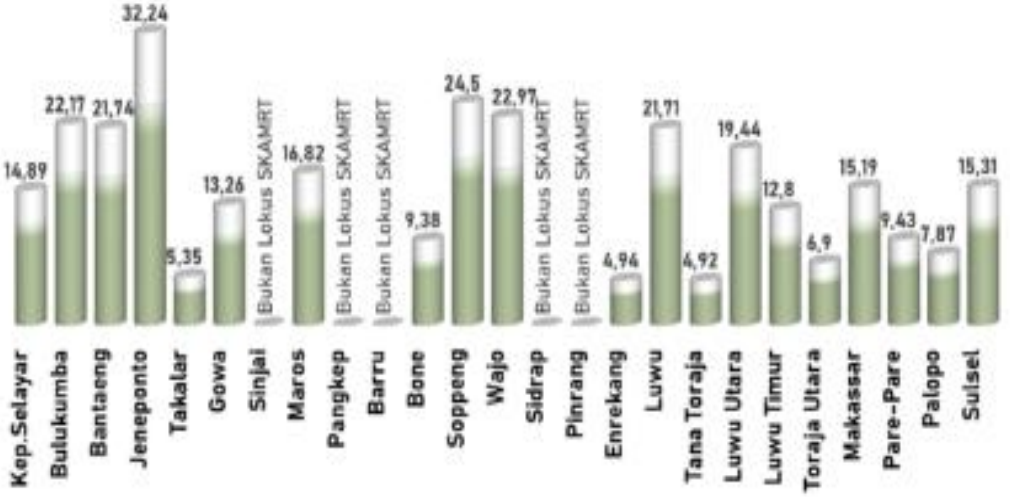

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan data akses rumah tangga terhadap air minum aman di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, **Kota Parepare mencatat angka 9,43 persen**. Capaian ini berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 15,31 persen. Posisi Kota Parepare berada pada kelompok **capaian menengah bawah** Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Parepare merupakan salah satu kota besar di Sulawesi Selatan dengan ketersediaan sumber air baku yang relatif memadai, pemanfaatan dan pengelolaan untuk memastikan air minum yang memenuhi standar aman masih menghadapi berbagai kendala.

Dari sisi kualitas, sumber air baku masih rawan tercemar akibat aktivitas domestik, pertanian, maupun limbah usaha kecil di sekitar daerah aliran sungai, sementara upaya perlindungan kawasan hulu belum optimal. Dari sisi infrastruktur, kapasitas instalasi pengolahan air minum masih terbatas, jaringan perpipaan belum merata menjangkau seluruh wilayah kota, serta banyak pipa distribusi yang sudah tua dan rentan bocor sehingga meningkatkan kehilangan air. Kelembagaan pengelolaan air juga dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan untuk memperbaiki dan memperluas

layanan. Di tingkat masyarakat, belum semua warga memiliki akses langsung ke air perpipaan, sebagian masih bergantung pada sumur atau air isi ulang, sementara kesadaran untuk mengonsumsi air yang benar-benar memenuhi standar aman masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kerentanan lingkungan dan dampak perubahan iklim, seperti musim kemarau panjang maupun alih fungsi lahan di hulu, turut memperburuk kondisi ketersediaan dan kualitas air. Kendala-kendala ini menjadi faktor utama yang membuat capaian Parepare dalam penyediaan air minum masih berada pada kelompok menengah bawah.

2.1.1.4.7 Indeks Pertanaman Padi

Indeks Pertanaman (IP) padi di Kota Parepare menjadi salah satu indikator penting dalam menilai intensitas pemanfaatan lahan sawah dan ketahanan pangan daerah. Secara umum, kondisi IP padi di Parepare masih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air, sistem irigasi, serta pola tanam petani. Berdasarkan kondisi eksisting, lahan sawah di Parepare terbagi menjadi dua kategori utama, yakni sawah beririgasi teknis dan sawah tadah hujan. Wilayah dengan dukungan jaringan irigasi teknis yang memadai cenderung mampu mencapai IP di atas 200, artinya lahan sawah dapat ditanami padi dua kali dalam setahun. Namun demikian, pada kawasan yang mengandalkan sistem tadah hujan, IP masih berada pada kisaran 100 karena hanya memungkinkan satu kali musim tanam dalam setahun. Hal ini menegaskan bahwa faktor pengairan menjadi penentu utama dalam capaian IP padi di Parepare.

Selain faktor air, keberhasilan meningkatkan IP padi juga ditentukan oleh ketersediaan benih unggul, penerapan teknologi pertanian modern, serta kesiapan petani dalam menyesuaikan kalender tanam dengan dinamika iklim. Perubahan pola curah

hujan akibat variabilitas iklim global menjadi tantangan tersendiri, karena dapat memengaruhi siklus tanam dan mengurangi potensi peningkatan IP. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah melalui penyediaan infrastruktur irigasi, rehabilitasi jaringan pengairan, serta pemberdayaan kelompok tani menjadi sangat krusial dalam mendukung stabilitas dan peningkatan IP padi di wilayah ini.

Grafik. 2.11 Indeks Pertanaman Padi (%)

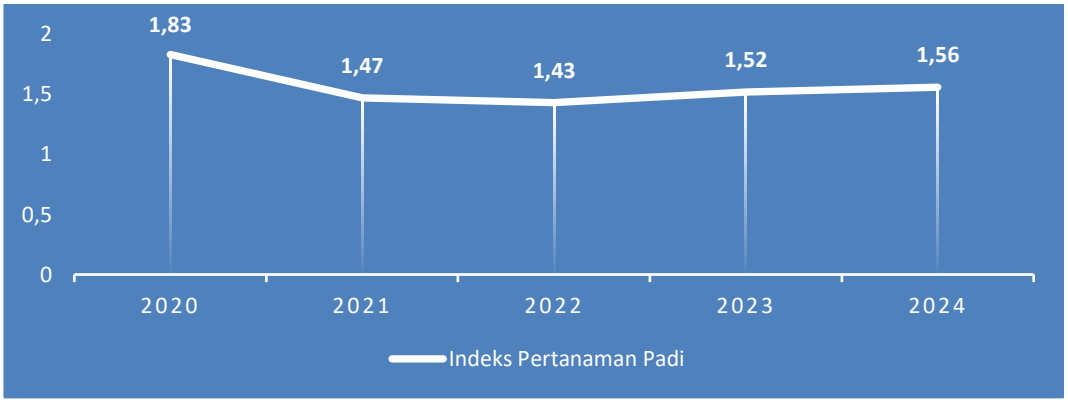

Indeks Pertanaman Padi dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan di awal periode, kemudian berangsur membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, indeks pertanaman padi tercatat sebesar 1,83, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan cukup tajam menjadi 1,47 dan kembali turun tipis pada tahun 2022 menjadi 1,43. Memasuki tahun 2023, indeks mulai mengalami perbaikan dengan capaian 1,52 dan terus meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 1,56, meskipun belum mampu menyamai capaian awal pada tahun 2020.

Perkembangan capaian ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga intensitas dan produktivitas pertanaman padi, terutama pada periode 2021–2022 yang ditandai dengan penurunan indeks. Namun, tren peningkatan pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lahan, ketersediaan sarana

produksi, serta dukungan program pemerintah dalam sektor pertanian. Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan indeks pertanaman padi, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, antara lain penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan akses petani terhadap benih unggul dan teknologi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani. Dengan langkah tersebut, diharapkan indeks pertanaman padi dapat terus meningkat dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.22 Luas Panen dan Produksi Padi di Kota Parepare

Tahun	Padi Sawah	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2020	998	4.343
2021	968	4.226
2022	964	4.650
2023	963	3.857
2024	959	4.983

Sumber : Kota Parepare dalam Angka 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan luas panen dan produksi padi sawah di wilayah yang diamati selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Secara umum, terjadi penurunan luas panen dari 998 hektar pada tahun 2020 menjadi 959 hektar pada tahun 2024. Namun, meskipun luas panen mengalami penurunan, produksi padi justru menunjukkan tren yang fluktuatif dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 4.983 ton, yang merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir.

Peningkatan produksi pada tahun 2024 ini mencerminkan lonjakan produktivitas yang cukup tajam, yakni mencapai 5,20 ton per hektar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam

teknologi pertanian, penggunaan benih unggul, atau efisiensi dalam praktik budidaya padi. Sebaliknya, tahun 2023 menunjukkan kinerja terlemah, baik dari sisi produksi total maupun produktivitas per hektar.

2.1.1.4.8 Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi di Kota Parepare merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas produksi pertanian, khususnya tanaman pangan strategis seperti padi. Proporsi sawah beririgasi teknis relatif lebih kecil dibandingkan luas sawah tadah hujan, sehingga tingkat ketergantungan petani pada curah hujan masih cukup tinggi. Hal ini berdampak pada rendahnya indeks pertanaman serta keterbatasan dalam menjaga kontinuitas produksi sepanjang tahun.

Lokasi sawah irigasi teknis berada di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Wattang Bacukiki yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 306 hektar.

Tabel 2.23 Proporsi Sawah Irigasi

Tahun	Sawah Irigasi (%)
2020	32,62
2021	32,62
2022	32,62
2023	32,62
2024	32,62

Berdasarkan Tabel 2.21 mengenai Proporsi Sawah Irigasi, terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 proporsi sawah irigasi di Kota Parepare berada pada angka yang sama, yaitu sebesar 32,62 persen. Konsistensi capaian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan baik peningkatan maupun penurunan pada luasan sawah irigasi selama lima tahun terakhir.

Stabilnya proporsi sawah irigasi ini dapat mengindikasikan bahwa kapasitas layanan irigasi yang tersedia masih terjaga, meskipun di sisi lain juga mencerminkan belum adanya peningkatan yang berarti dalam perluasan atau optimalisasi jaringan irigasi. Mengingat peran sawah irigasi yang sangat penting dalam mendukung produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi, maka upaya untuk menjaga sekaligus meningkatkan proporsi sawah irigasi tetap menjadi hal yang penting. Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain melalui pemeliharaan jaringan irigasi yang ada, rehabilitasi saluran yang rusak, serta pengembangan infrastruktur irigasi baru agar proporsi sawah irigasi dapat meningkat di masa mendatang dan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah.

2.1.1.4.9 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi perikanan budidaya di Kota Parepare merupakan salah satu indikator utama dalam menilai perkembangan sektor perikanan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Grafik. 2.12 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

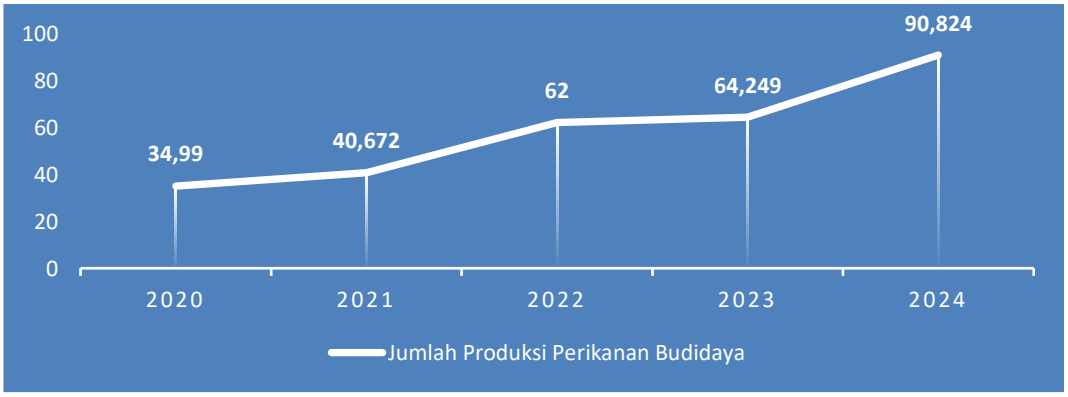

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare

Jumlah produksi perikanan budidaya di Kota Parepare dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 34,99, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 40,672. Peningkatan yang lebih

tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 62, dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 64,249. Selanjutnya, pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya melonjak cukup tajam hingga mencapai 90,824, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Perkembangan ini menggambarkan adanya kemajuan yang cukup pesat dalam sektor perikanan budidaya di Kota Parepare. Peningkatan produksi yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa berbagai program pengembangan, termasuk dukungan teknologi budidaya, penyediaan sarana produksi, serta pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan, telah memberikan hasil yang nyata. Lonjakan signifikan pada tahun 2024 menjadi indikasi adanya keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam budidaya perikanan. Ke depan, upaya penguatan manajemen budidaya, pengendalian kualitas lingkungan perairan, serta perluasan pasar hasil perikanan budidaya perlu terus didorong untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)

Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat konsumsi ikan masyarakat dalam satu tahun yang dinyatakan dalam kilogram per kapita per tahun. Data konsumsi ikan di Kota Parepare periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dengan sedikit fluktuasi.

Grafik. 2.13 Angka Konsumsi Ikan kg/kapita

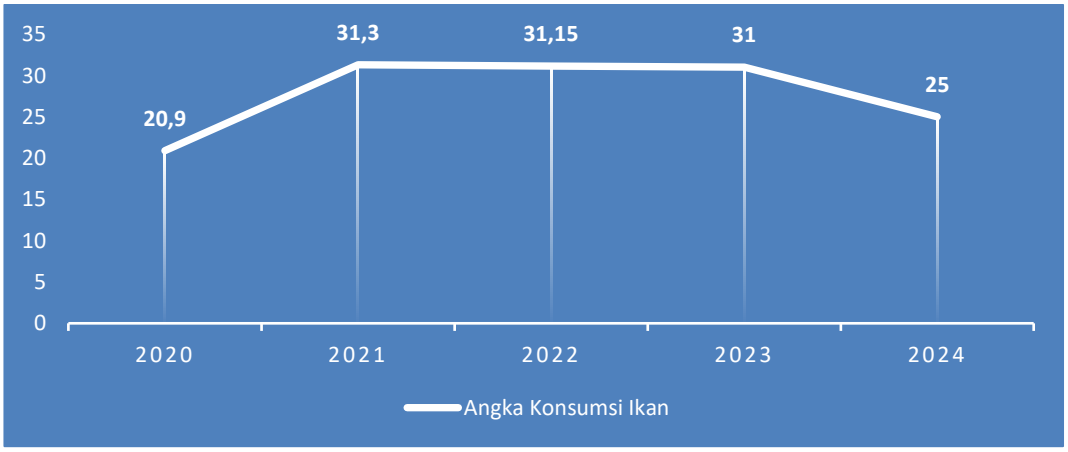

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare

Angka konsumsi ikan di Kota Parepare pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, konsumsi ikan masyarakat tercatat sebesar 20,9, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 31,3. Nilai tersebut relatif stabil pada tahun 2022 dengan capaian 31,15 dan sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 31. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup tajam hingga mencapai 25.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun konsumsi ikan sempat berada pada tingkat yang tinggi dan stabil selama periode 2021–2023, terjadi penurunan pada tahun terakhir yang perlu menjadi perhatian. Tingginya konsumsi ikan pada periode sebelumnya mengindikasikan bahwa ikan masih menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat, sejalan dengan potensi daerah yang memiliki sektor perikanan cukup kuat. Akan tetapi, penurunan pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola konsumsi masyarakat, ketersediaan pasokan, harga ikan, maupun preferensi terhadap sumber pangan lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan program diversifikasi olahan ikan, stabilisasi pasokan dan harga, serta peningkatan kampanye gemar makan ikan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat agar tetap optimal dalam mendukung gizi dan kesehatan masyarakat.

2.1.1.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks tutupan lahan.

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Grafik. 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Parepare

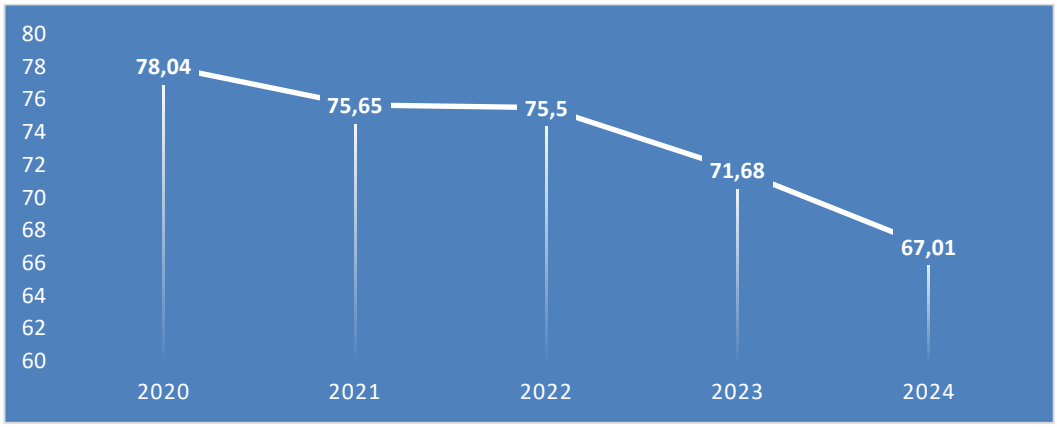

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa IKLH Kota Parepare ditahun 2020 berhasil ditingkatkan menjadi 78,04 dan ini merupakan capaian tertinggi untuk periode 7 tahun terakhir. Namun hingga tahun 2024 IKLH mengalami penurunan menjadi 67,01 dengan kategori SEDANG, yang tentunya hal ini dipengaruhi oleh penurunan kualitas air akibat degradasi pada DAS, penurunan kualitas udara dipengaruhi oleh meningkatnya emisi CO, NO_2, SO_2, dan partikulat (PM_{10}/$PM_{2.5}$) dan penurunan kualitas tutupan lahan diakibatkan oleh alih fungsi lahan dari vegetasi alami atau lahan terbuka menjadi kawasan terbangun (permukiman, perdagangan, infrastruktur).

2.1.1.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri yang terhubung dengan septic tank. Fasilitas sanitasi ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Antara lain:

- Kloset menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah menggunakan tangki septik atau IPALD
- Tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir
- Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat

Akses sanitasi layak bersama adalah apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Keberadaan tangki septik yang memenuhi standar sangat penting untuk mencegah penularan penyakit, pencemaran air dan pencemaran lingkungan. Berikut adalah capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kota Parepare:

Grafik. 2.15 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Parepare

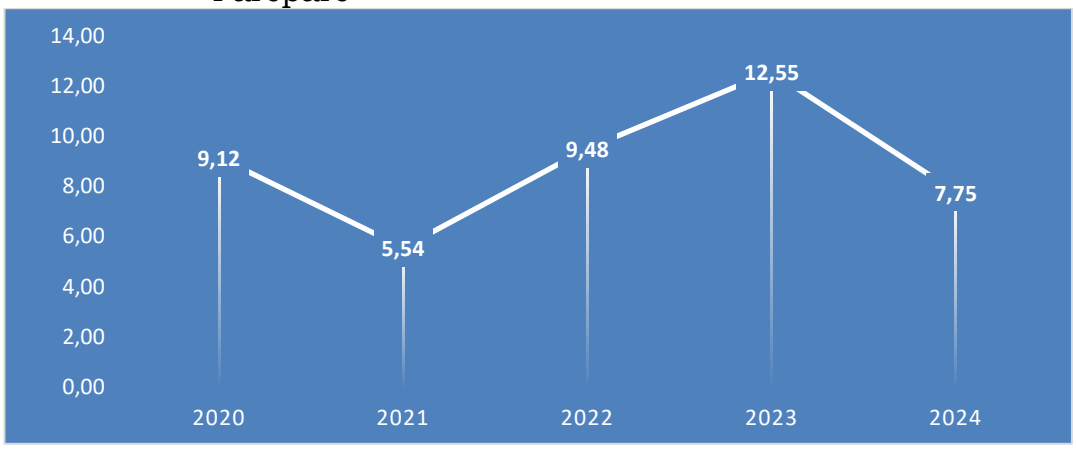

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kota Parepare

Persentase Akses sanitasi aman Kota Parepare tahun 2022 sebesar 14,58 persen atau sebanyak 6.787 rumah tangga dengan sanitasi terakses layak sebesar 94,01 persen dengan jumlah rumah tangga sebanyak 43.764. Pada tahun 2023 persentase akses sanitasi aman meningkat menjadi 14,76% dengan jumlah rumah tangga sebanyak 7.097, dan persentase sanitasi layak ditahun 2023 sebesar 94,07 persen dengan jumlah 45.231 rumah tangga. Peningkatan pelayanan sanitasi aman Kota Parepare terus dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan membangun IPAL komunal dibeberapa titik, pembangunan MCK yang layak untuk warga serta optimalisasi IPLT. Jumlah IPAL komunal saat ini sebanyak 146 titik dengan tangki septik individual yang tersebar sebanyak 1.776.

2.1.1.5.4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah tertentu dalam periode waktu tertentu. Penyelenggaraan pengolahan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan dan/atau penanganan. Pengurangan meliputi (a) pembatasan timbulan sampah spesifik; (b) pendauran ulang sampah spesifik; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah spesifik. Persentase timbulans ampah terolah difasilitas pengolahan Kota Parepare pada tabel berikut:

Grafik. 2.16 Penanganan dan Pengurangan (Terolah) Sampah Kota Parepare (ton/tahun)

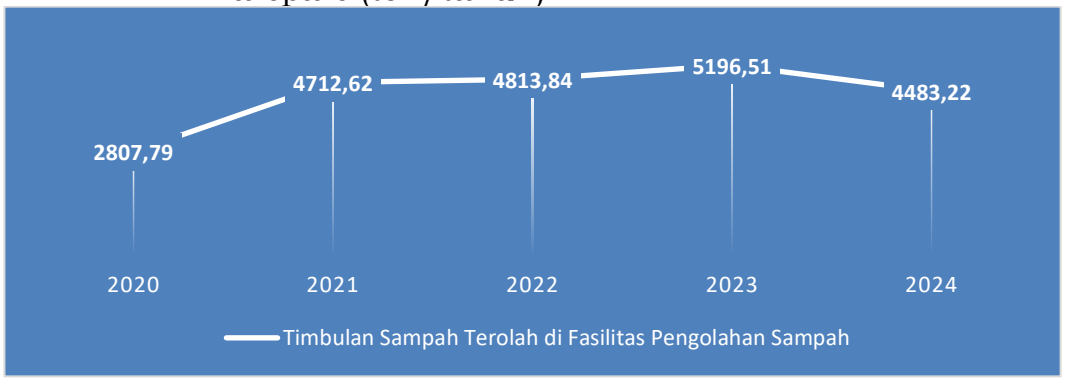

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Berdasarkan data penanganan dan pengurangan sampah terolah di Kota Parepare pada periode 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan pada awal periode, namun mengalami penurunan kembali di tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah sampah yang terolah baru mencapai **2.807,79 ton**, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi **4.712,62 ton**, atau naik lebih dari 68%.

Pada tahun 2022, capaian pengolahan sampah terolah relatif stabil dengan angka **4.813,84 ton**, dan selanjutnya meningkat lagi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar **5.196,51 ton**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan efektivitas fasilitas pengolahan sampah, serta semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengurangan timbulan sampah melalui proses pengolahan.

Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah sampah terolah mengalami penurunan menjadi **4.483,22 ton**. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas operasional fasilitas pengolahan, berkurangnya dukungan sumber daya, maupun masih adanya kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan pengolahan sampah.

Secara umum, kinerja pengolahan sampah di Kota Parepare dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan arah yang positif dengan tren peningkatan signifikan sejak 2020 hingga mencapai puncaknya di 2023. Akan tetapi, fluktuasi di tahun 2024 menjadi perhatian penting agar ke depan pengelolaan sampah dapat lebih stabil, berkesinambungan, dan berbasis pada prinsip ekonomi sirkular. Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu memperkuat strategi inovasi pengolahan, memperluas fasilitas pengelolaan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya.

2.1.1.5.5 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam pengolahan sampah. Ada beberapa sistem pengumpulan sampah rumah tangga yang dilakukan sampai saat ini berdasarkan kondisi dan kultur masyarakat. Pada umumnya sistem pengumpulan sampah dilakukan sebagai berikut:

1. Tiap rumah tangga menyediakan tempat atau wadah sampah tertutup yang dilapisi kantong palstik, yang berisi sampah yang tidak dapat dimanfaatkan
2. Pengumpulan dari pintu ke pintu (*door to door service*) yang dilakukan atas swadaya masyarakat sendiri atau dilakukan oleh petugas dinas kebersihan kota. Pool gerobak sampah dikumpulkan dalam beberapa gerobak yang dikumpulkan dari setiap kepala keluarga ditingkat RT/RW dan diangkat oleh petugas setiap hari dan dikumpulkan di dipo sampah.
3. Dipo adalah tempat penampungan sampah sementara yang meliputi satu kelurahan kurang dari 30.000 warga, dengan daya tampung sampah sekitar 150 M^3
4. *Pool container* biasanya terletak dipinggir jalan di sebuah lokasi permukiman dan memiliki volume kurang dari 6-10 M^3

Tempat sampah ini berbentuk sebuah bak penampungan besi yang langsung diangkat oleh truk kebersihan dengan sistem hidrolik. Sistem truk kompaktor yang berkeliling di sekitar rumah warga dan berfungsi sebagai tempat penampungansampah sementara.

Grafik. 2.17 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)

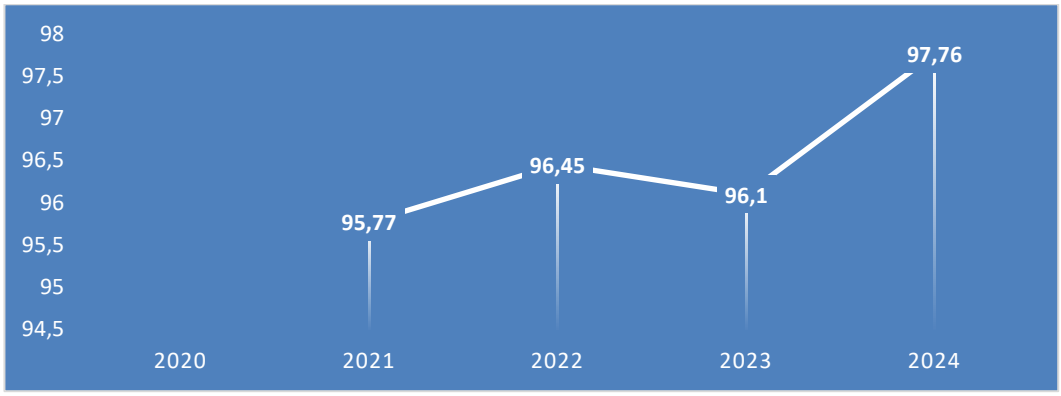

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Berdasarkan data capaian proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kota Parepare, terlihat tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2023. Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga yang terlayani penuh mencapai **95,77%**, kemudian naik pada tahun 2022 menjadi **96,45%**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan sampah yang semakin merata ke berbagai wilayah.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi **96,10%**, yang kemungkinan disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, keterbatasan armada pengangkutan, atau perubahan jumlah rumah tangga yang perlu dilayani. Meski demikian, pada tahun 2024 capaian kembali meningkat signifikan hingga **97,76%**, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi dalam periode pengamatan.

Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Parepare berhasil memperluas dan meningkatkan kualitas layanan persampahan, sehingga hampir seluruh rumah tangga telah mendapatkan akses layanan pengumpulan sampah secara penuh. Peningkatan yang konsisten ini menjadi indikasi keberhasilan

penguatan sistem pengelolaan sampah, baik dari sisi perencanaan, operasional, maupun dukungan masyarakat.

2.1.1.5.6 Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia adalah perbandingan jumlah pupuk organik yang disalurkan kepada petani dengan jumlah pupuk kimia yang disalurkan dalam periode tertentu. Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana kebijakan penggunaan pupuk ramah lingkungan (organik) diimplementasikan dibandingkan dengan ketergantungan pada pupuk kimia. Dengan mengukur proporsi ini, dapat diketahui tren distribusi, efektivitas program pemerintah dalam mendorong pertanian berkelanjutan, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mendukung kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan pembangunan rendah karbon. Walaupun Pemerintah Kota Parepare belum memiliki Rencana Aksi Daerah penuruman emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) namun telah dilakukan kegiatan pembangunan yang mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, diataranya pada sektor energi melalui meterisasi lampu penerangan jalan dan penggunaan lampu LED pada penerangan jalan umum wilayah Kota Parepare. Dan pada sektor pertanian dilakukan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang ramah lingkungan melalui penggunaan pupuk organik dan biogas, pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk dan perbaikan pakan ternak melalui pakan hijau dan konsentrat.

Grafik. 2.18 Persentase Penurunan Emisi GRK Kota Parepare

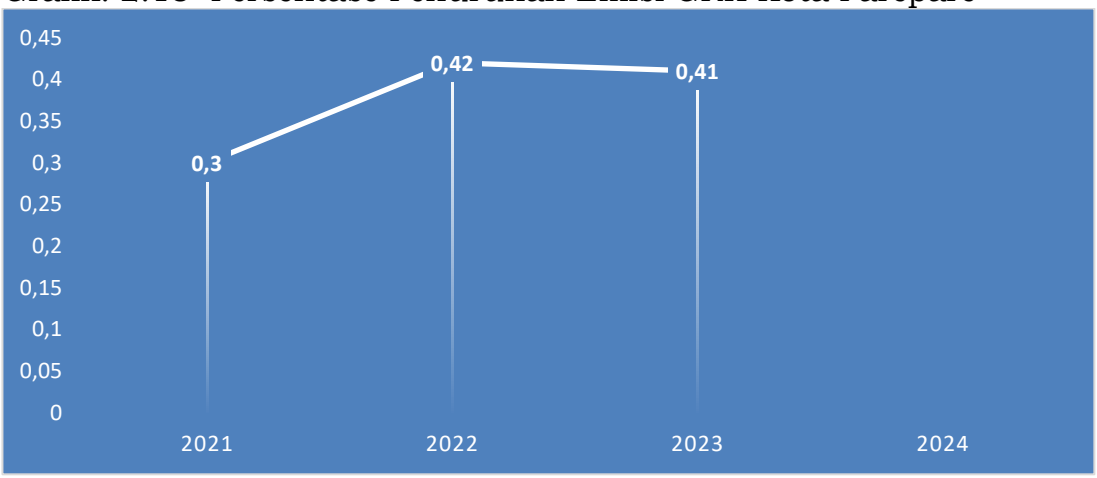

Informasi mengenai persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Parepare tahun 2024 secara spesifik belum tersedia.

2.1.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Wilayah rawan bencana alam diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam.

Potensi rawan bencana Kota Parepare, adalah sebagai berikut:

- Untuk tanah longsor diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budi daya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut.
- Untuk daerah rawan banjir dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya di kawasan yang sering terkena banjir terutama pada pusat kota dan bantaran sungai KarajaE.
- Melaksanakan penanaman atau pengendalian disekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang.

- Menetapkan kawasan rawan bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti membangun hidran-hidran air yang tersebar merata disepanjang jalan primer, kawasan perumahan dan permukiman serta kawasan yang diidentifikasi rawan bencana kebakaran.
- Untuk rawan gempa bumi, gelombang tsunami dan gelombang pasang diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada sepanjang pesisir pantai Kota Parepare.

Titik rawan bencana dan lokasi evakuasi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare

Kecamatan	Rawan Bencana	Lokasi Evakuasi
Ujung	- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Bulu (rawan longsor) - Kawasan BTN Pepabri/BTN Lapadde (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)	- Lapangan/Alun-alun A. Makkasau - SMAN 4 - Polsek Ujung - Lapangan Korem
Bacukiki Barat	- Cappa Galung, (rawan longsor) - Kawasan SPPBE Lumpue (rawan kebakaran/ledakan) - Belakang SMKN 1/SMPN 5, kampung lapangape (rawan longsor) - Kawasan Kampung Baru/Kesuma Timur (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin)	- Lapangan Upacara Kota - Lapangan Sumpang
Bacukiki	- Kawasan Mangimpuru/Lontangnge (rawan banjir dan longsor)	- Lapangan Lemoe - Lapangan Lompoe
Soreang	- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Baru (rawan longsor) - Kawasan Depot Pertamina (rawan kebakaran) - Sekitar Bukit Indah/Ujung Baru (rawan longsor) - Belakang Kantor Kec. Soreang/SMA 3 (rawan longsor)	- Lapangan Sepak Bola Laupe (kampung duri) - Lapangan Lauleng - Lapangan Takkalao - Lapangan Kavelari - Lapangan Umpar

Kecamatan	Rawan Bencana	Lokasi Evakuasi
	- Kawasan Perumahan Sosial (rawan longsor) - Pesisir Pantai.	

Sumber: RTRW Kota Parepare Tahun 2021-2041

Kondisi Wilayah yang beragam merupakan salah satu faktor pemicu kejadian bencana di Kota Parepare. Catatan kejadian bencana Kota Parepare berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tercatat empat jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Parepare, yaitu kekeringan, banjir, tanah longsor dan puting beliung. Dampak kejadian Bencana sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.25 Dampak Kejadian Bencana Kota Parepare

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Terdampak (Kepala Keluarga)
Angin Kencang/ Hujan Deras	37	107
Banjir	2	1.371
Gempa Bumi	1	
Tanah Longsor	12	12
Kebakaran	32	28

Sumber : BPBD Kota Parepare, Tahun 2024

Kejadian bencana yang terjadi di Kota Parepare pada tahun 2023 yakni angin kencang,/hujan deras, banjir, gempa bumi, kebakaran dan tanah longsor. Wilayah Kota Parepare juga dilewati oleh jalur patahan Walanae yang membelah dari arah barat laut ke arah Selatan yang menyebabkan Kota Parepare juga sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi. Tolok ukur tingkat risiko bencana Kota Parepare dapat dilihat pada data d bawah ini.

Grafik. 2.19 Indeks Risiko Bencana Kota Parepare

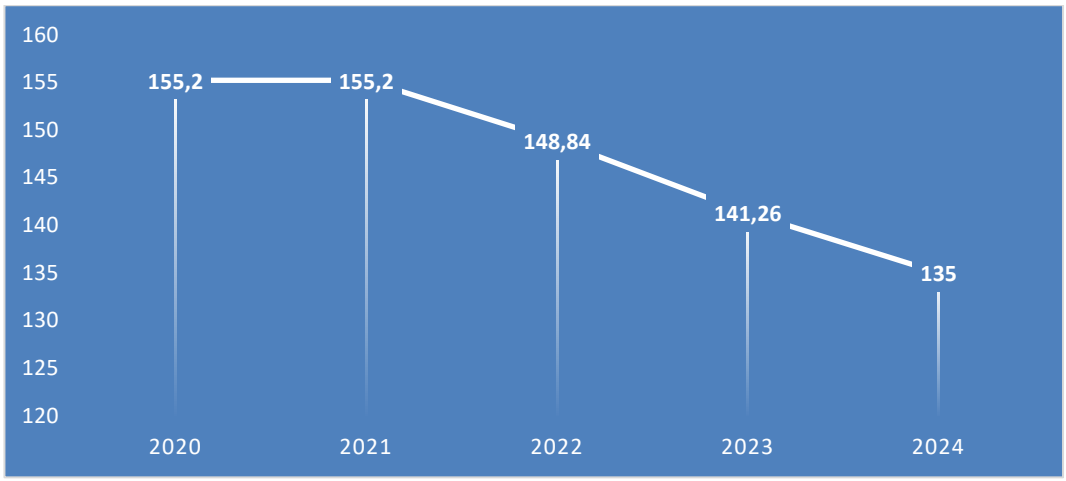

Sumber: BPBD Kota Parepare, Tahun 2024

Sejak tahun 2021 Indeks Risiko Bencana dapat diturunkan ditahun 2022 dengan nilai 148,84 mengalami peningkatan 6,36 poin. Dan pada tahun 2023 indeks risiko bencana Kota Parepare mengalami penurunan 7,58 poin dengan angka indeks 141,26 dan hal ini menjadikan Kota Parepare dengan risiko bencana rendah. Tahun 2024, IRB Kota Parepare menurun menjadi berada pada skor 135,00 dengan kelas risiko SEDANG.

2.1.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kapasitas dan ketangguhan suatu wilayah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, kerentanan, serta risiko pembangunan, baik yang bersumber dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan. Kota Parepare sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan daerah di kawasan pesisir barat Sulawesi. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian IKD Kota Parepare menunjukkan bahwa daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan ruang terbuka hijau, tekanan terhadap kualitas lingkungan akibat urbanisasi, serta

kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Namun demikian, Kota Parepare juga memiliki keunggulan berupa infrastruktur perkotaan yang relatif memadai, potensi ekonomi perdagangan dan jasa, serta dukungan sosial masyarakat yang kuat. Dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan IKD diarahkan pada penguatan ketahanan lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan melalui langkah-langkah strategis tersebut, ketahanan Kota Parepare dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan.

Grafik. 2.20 Indeks Ketahanan Daerah Kota Parepare

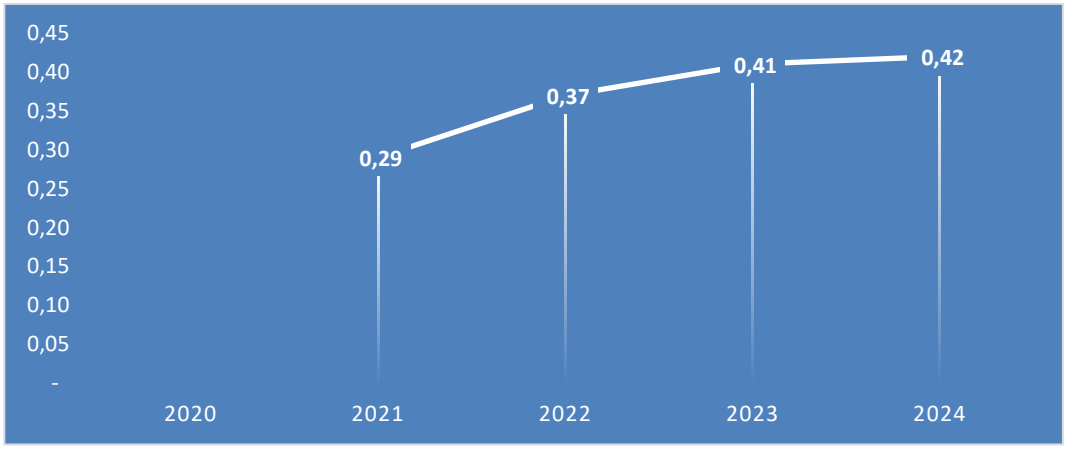

Sumber: BPBD Kota Parepare

Berdasarkan Grafik 2.13, Indeks Ketahanan Daerah Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, data Indeks Ketahanan Daerah Kota Parepare belum tersedia sehingga tidak dapat ditampilkan dalam grafik. Oleh karena itu, analisis tren dimulai sejak tahun 2021, yaitu saat data pertama kali terdokumentasi dengan nilai sebesar 0,29 kemudian meningkat menjadi **0,37** pada tahun 2022, dan terus naik menjadi **0,41**

pada tahun 2023, hingga mencapai **0,42** pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kapasitas Kota Parepare dalam menghadapi potensi risiko dan ancaman, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Peningkatan nilai indeks ketahanan daerah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan yang responsif terhadap risiko; (2) peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas dan pelayanan publik; (3) meningkatnya partisipasi masyarakat serta kolaborasi multipihak dalam upaya penguatan resiliensi; serta (4) implementasi program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengendalian bencana hidrometeorologi dan pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun demikian, nilai indeks yang masih berada pada kisaran **di bawah 0,5** menunjukkan bahwa ketahanan daerah Kota Parepare masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan yang harus segera ditangani, antara lain kerentanan terhadap bencana alam, keterbatasan kapasitas ekonomi sebagian masyarakat, serta permasalahan tata kelola lingkungan. Dengan demikian, diperlukan strategi pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, agar ketahanan daerah Kota Parepare dapat terus ditingkatkan secara optimal di masa mendatang.

2.1.1.7 Kondisi Demografi

Penduduk Kota Parepare tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika adalah sebanyak

163.314 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 81.252 jiwa dan perempuan sebanyak 82.062 jiwa.

Grafik. 2.21 Jumlah Penduduk Kota Parepare

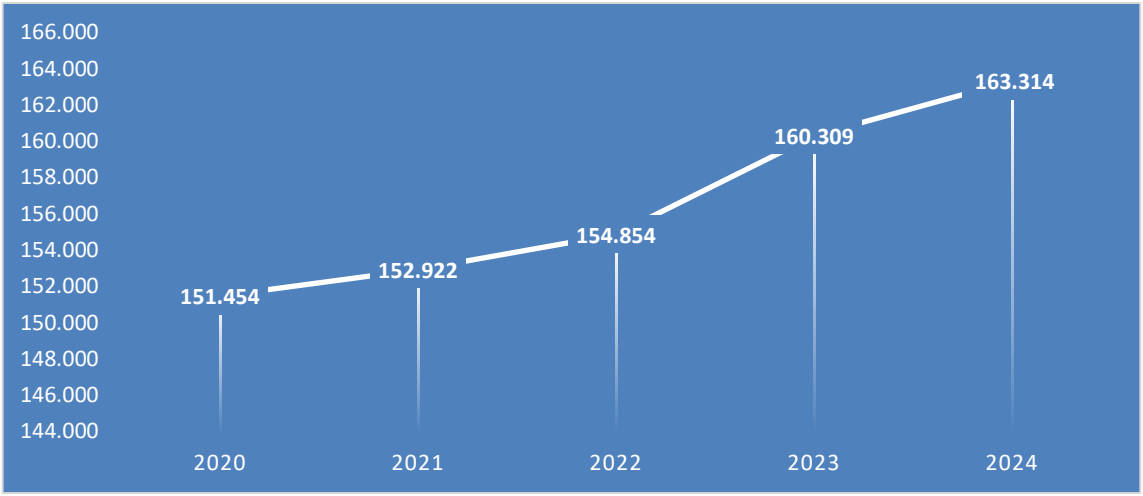

Sumber: Parepare Dalam Angka Tahun 2025

Jika dilihat per kecamatan, jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk sebanyak 49.097 jiwa. Tertinggi kedua adalah Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 48.305 jiwa, kemudian Kecamatan Ujung sebanyak 37.020 jiwa dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 28.892 jiwa. Untuk jumlah penduduk berdasarkan distribusi (menurut kecamatan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Parepare

Tahun	Jumlah Penduduk Berdasarkan Distribusi				
	Bacukiki	Bacukiki Barat	Ujung	Soreang	Parepare
2020	25.511	45.197	33.843	46.903	151.454
2021	26.327	45.660	33.863	47.072	152.922
2022	28.129	45.934	33.758	47.033	154.854
2023	27.424	47.733	36.479	48.673	160.309
2024	**28.892**	**48.305**	**37.020**	**49.097**	**163.314**

Sumber: Parepare Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.28 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk
Bacukiki	17,69	98,50	433	5,67
Bacukiki Barat	29,58	98,40	3.702	1,38
Ujung	22,67	98,90	3.356	1,65
Soreang	30,06	100	5.908	0,88
Parepare	**100**	**99,00**	**1.649**	**1,98**

Sumber: Parepare Dalam Angka Tahun 2025

Untuk dapat melihat kondisi kependudukan suatu daerah tergambarkan pada jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Parepare terkategorikan sebagai tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

Grafik. 2.22 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2024

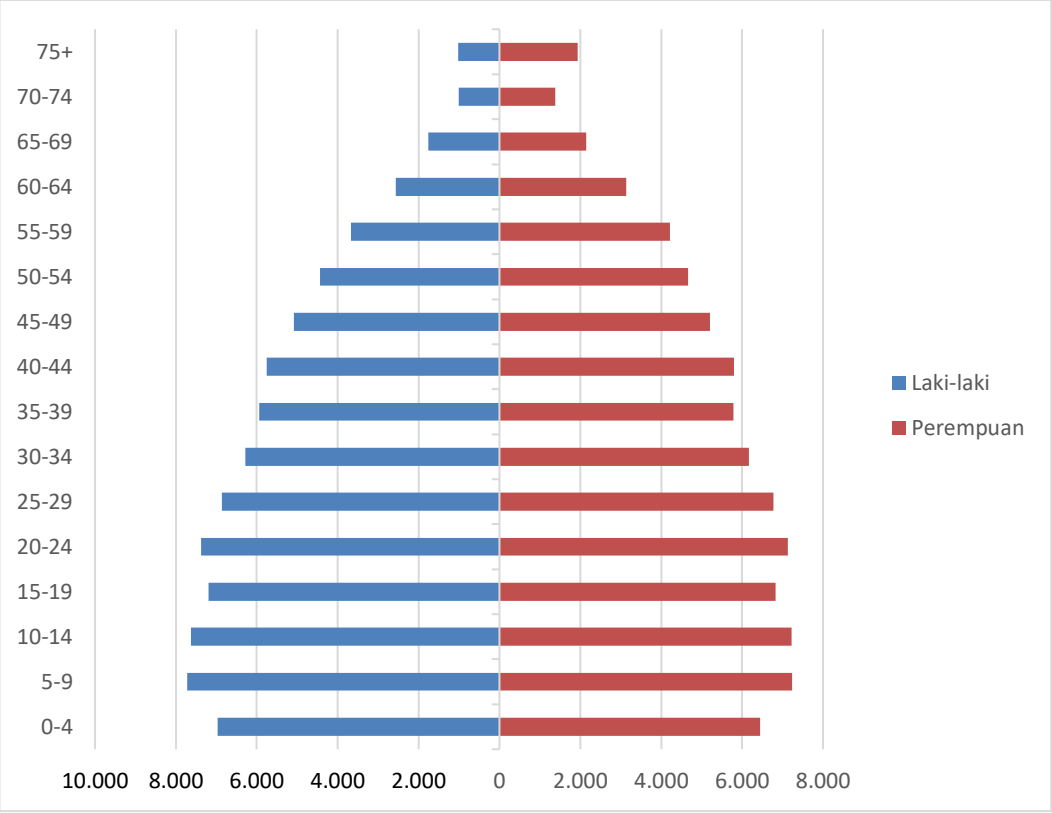

Sumber: Parepare Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.30 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/ *Sex (Jiwa)*		
	Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
0 – 4	6.968	6.440	13.408
5 – 9	7.727	7.241	14.968
10 – 14	7.623	7.219	14.842
15 – 19	7.189	6.827	14.016
20 – 24	7.372	7.131	14.503
25 – 29	6.866	6.771	13.637
30 – 34	6.277	6.169	12.446
35 – 39	5.942	5.782	11.724
40 – 44	5.751	5.799	11.550
45 – 49	5.084	5.203	10.287
50 – 54	4.433	4.663	9.096
55 – 59	3.677	4.221	7.898
60 – 64	2.566	3.135	5.701
65 – 69	1.758	2.146	3.904
70 – 74	1.004	1.386	2.390
75 +	1.015	1.929	2.944
Jumlah	**81.252**	**82.062**	**163.314**

Sumber : Parepare Dalam Angka Tahun 2025

Pada tabel ini terlihat bahwa kelompok umur 5-9 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah tertinggi yaitu sebesar 9,16 persen dari populasi yang jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk Laki-laki. Penduduk perempuan mencapai 50,24 persen dibandingkan penduduk laki-laki dengan selisih 810 jiwa.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1994 hingga tahun 2003, LPE baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan 1993 sebagai tahun dasar dan tahun 2004 sampai dengan 2012 pertumbuhannya dihitung berdasarkan tahun dasar 2000. Namun pada tahun 2013 hingga saat ini, LPE dihitung dengan harga konstan 2010.

Tahun 2020, LPE disemua tingkatan mengalami kontraksi yang cukup dalam sebagai dampak dari pandemi COVID-19, LPE Kota Parepare -0,08 persen, lebih tinggi dibanding dengan Sulawesi Selatan sebesar -0,07 persen dan nasional sebesar -2,07 persen. Sedangkan tahun 2020, LPE Kota Parepare lebih baik dibanding LPE nasioanl dan Sulawesi Selatan. Untuk tahun 2021, LPE Parepare-SulSel-Nasional mengalami peningkatan positif menjadi 4,41-4,65-3,69. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Tahun 2022, LPE Kota Parepare mencapai 5,93 merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 5,09

dan Nasional yaitu 5,31. LPE pada 2022 ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan real estate serta belanja pembangunan pemerintah. Penurunan LPE tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan pada komponen PDRB berdasarkan struktur PDRB lapangan usaha yaitu real estate, administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan serta jasa kesehatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan LPE Kota Parepare tahun 2024 menjadi 5,09 persen di pengaruhi oleh (menurut lapangan usaha) peningkatan pada sektor Jasa Kesehatan, Transportasi dan Pergudangan, dan Informasi dan Komunikasi. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik. 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (persen)

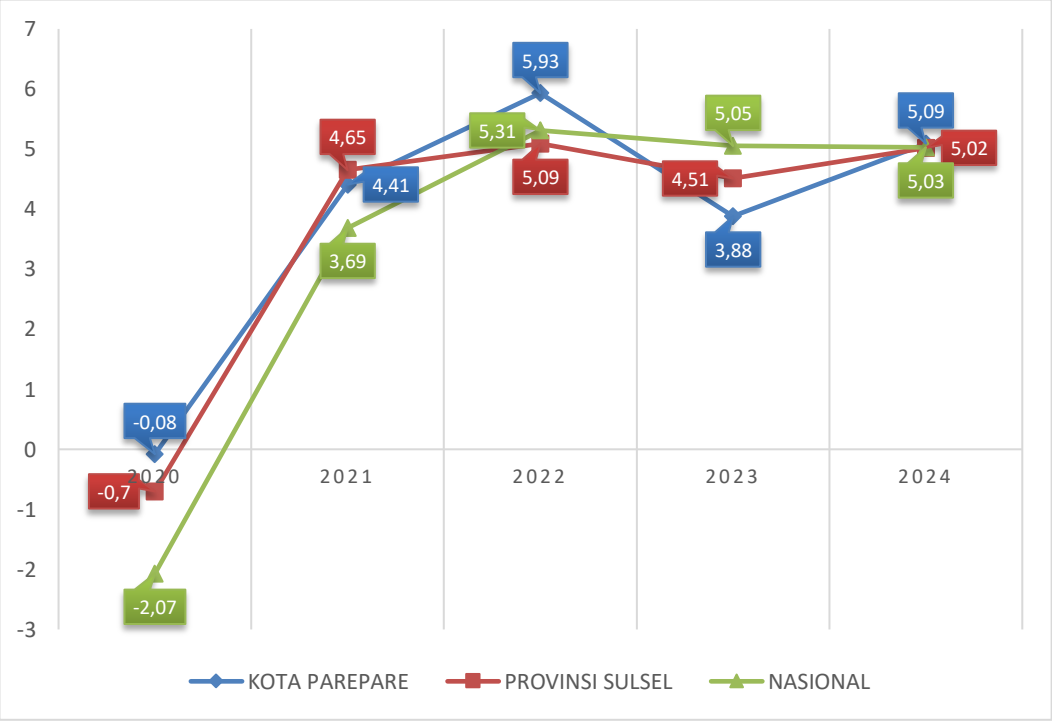

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id

Berikut merupakan data grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah se-Ajatappareng.

Grafik. 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Se-Ajatappareng

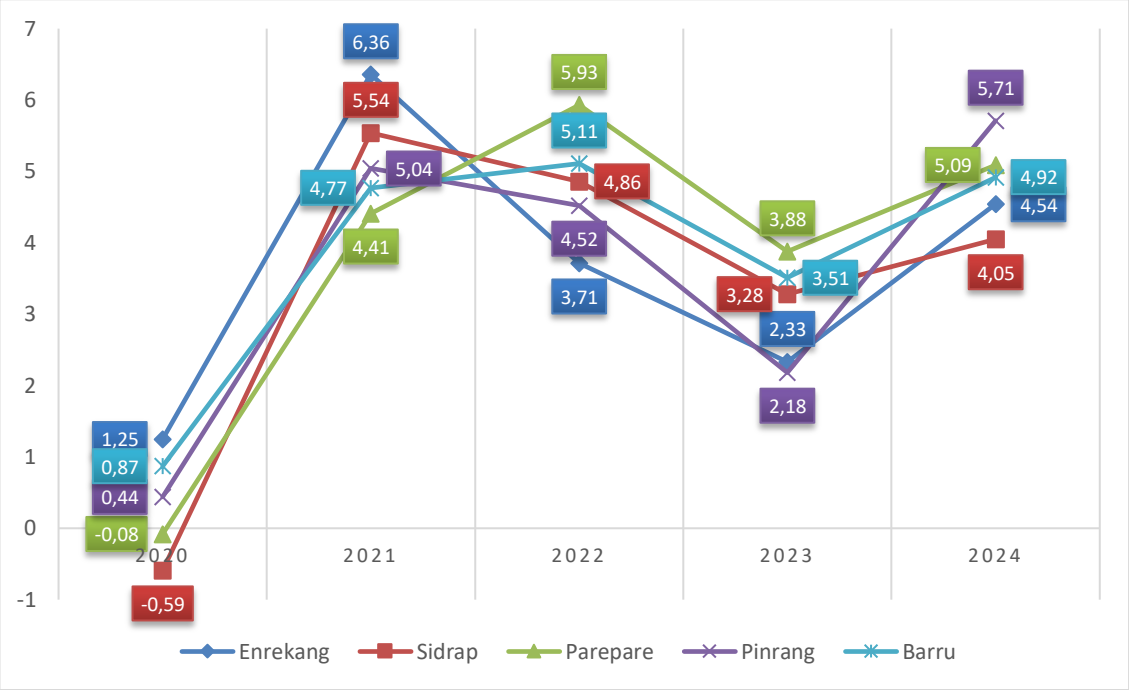

Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Laju Pertumbuhan Ekonomi daerah se-Ajatappareng dalam periode lima tahun terakhir, jika pada tahun 2022 dan 2023 Kota Parepare merupakan Kota dengan LPE tertinggi. Namun di tahun 2024 Kota Parepare berada pada urutan ke-dua sebesar 5,07 persen setelah Pinrang yang capaiannya berada pada angka 5,71 persen. Melihat ke belakang, di tahun 2021, Kota Parepare merupaka Kota yang memiliki capaian terendah di antara daerah wilayah se-ajatappareng yaitu 4,41 persen dibandingkan capaian tertinggi oleh Enrekang sebesar 6,36 persen.

Tabel ..... Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Parepare Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, (persen)

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	-0,52	0,03	3,68	5,20
b	Pertambangan dan	-1,00	0,37	0,03	0,84	-5,20

Sektor Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Penggalian					
c	Industri Pengolahan	-2,01	7,50	8,33	2,36	2,98
d	Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	3,94	4,27	5,46	5,63
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampahm Limbah dan Daur Ulang	3,61	0,78	-0,06	0,29	3,10
f	Konstruksi	-0,54	1,76	4,41	4,22	6,01
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	-4,16	7,52	9,93	5,26	5,52
h	Transportasi dan Pergudangan	-14,79	7,09	16,93	6,63	7,12
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,02	5,42	7,37	7,10	3,84
j	Informasi dan Komunikasi	8,22	5,10	1,23	4,80	6,47
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	5,46	-0,88	-5,16	-0,10
l	Real Estate	3,94	1,69	1,45	4,67	3,61
m,n	Jasa Perusahaan	-8,61	3,63	6,59	5,07	1,38
o	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-0,50	6,41	4,14	-0,84	3,72
p	Jasa Pendidikan	4,82	3,78	8,00	8,26	5,96
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,47	6,21	7,69	4,16	7,94
r,s,t,u	Jasa Lainnya	-15,82	-0,87	26,67	5,27	9,21
Produk Domestik Regional Bruto		**-0,08**	**4,41**	**5,93**	**3,88**	**5,09**

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan sektor lapangan usaha sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 dicapai oleh LU Jasa Lainnya sebesar 9,21 persen, dan pertumbuhan terendah di LU Pertambangan dan Penggalian sebesar -5,20 persen.

Tabel .... Struktur PDRB Kota Parepare Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2020-2024, (persen)

Sektor Lapangan Usaha		Distribusi PDRB				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,45	7,32	7,12	7,17	6,78
b	Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,28	0,26	0,25	0,22
c	Industri Pengolahan	2,03	2,06	2,09	2,04	2,03
d	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampahm Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,26	0,30	0,29	0,28
f	Konstruksi	15,45	15,32	15,28	15,36	15,32
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	15,52	15,97	16,67	16,92	17,04
h	Transportasi dan Pergudangan	4,64	4,78	5,60	5,95	6,24
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,30	6,33	6,45	6,68	6,84
j	Informasi dan Komunikasi	4,71	4,67	4,30	4,23	4,22
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,54	8,82	8,57	7,75	7,33
l	Real Estate	10,40	10,04	9,28	9,23	9,09
m,n	Jasa Perusahaan	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24
o	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	9,14	9,19	8,66	8,12	8,07
p	Jasa Pendidikan	6,86	6,45	6,58	7,22	7,36
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,31	5,58	5,38	5,34	5,65
r,s,t,u	Jasa Lainnya	2,76	2,62	3,13	3,13	3,22
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Parepare didominasi oleh 5 (Lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Real estate dan administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial wajib, dan Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha

terhadap pembentukan PDRB Parepare. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Parepare pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Motor yaitu mencapai 17,04 persen (angka ini naik dari 15,52 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,32 persen (turun dari 15,45 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,09 persen.

2.1.2.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah yaitu PDRB per Kapita, PDRB per Kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan Masyarakat merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan baik yang bersifat mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh Masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan. PDRB per kapita adalah salahsatu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran kependudukan disuatu daerah dalam waktu tertentu.

PDRB per kapita Kota Parepare menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Berdasarkan indikator ini dapat diketahui bahwa secara rata-rata penduduk Parepare di tahun 2023 mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar Rp 58,78 juta.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita Kota Parepare selalu meningkat. Untuk mengetahui PDRB per kapita Kota Parepare sepanjang 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Tahun 2020 menjadi Rp. 49,92 juta. Pada tahun 2021 menjadi Rp. 51,18 juta PDRB per kapita. Tahun 2022 menjadi 56,16 persen. Dan meningkat menjadi Rp. 58,78 juta di tahun 2023.

Grafik. 2.3 PDRB Per Kapita Harga Berlaku Kota Parepare (juta

rupiah)

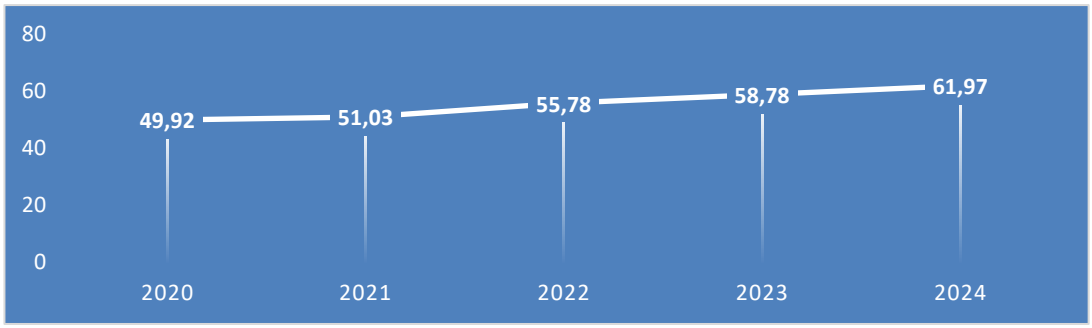

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; BPS.go.id Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita daerah lain se-Ajattappareng maka dapat dilihat pada grafik di bawah:

Grafik. 2.4 Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Berlaku se-Ajatappareng (Juta Rupiah)

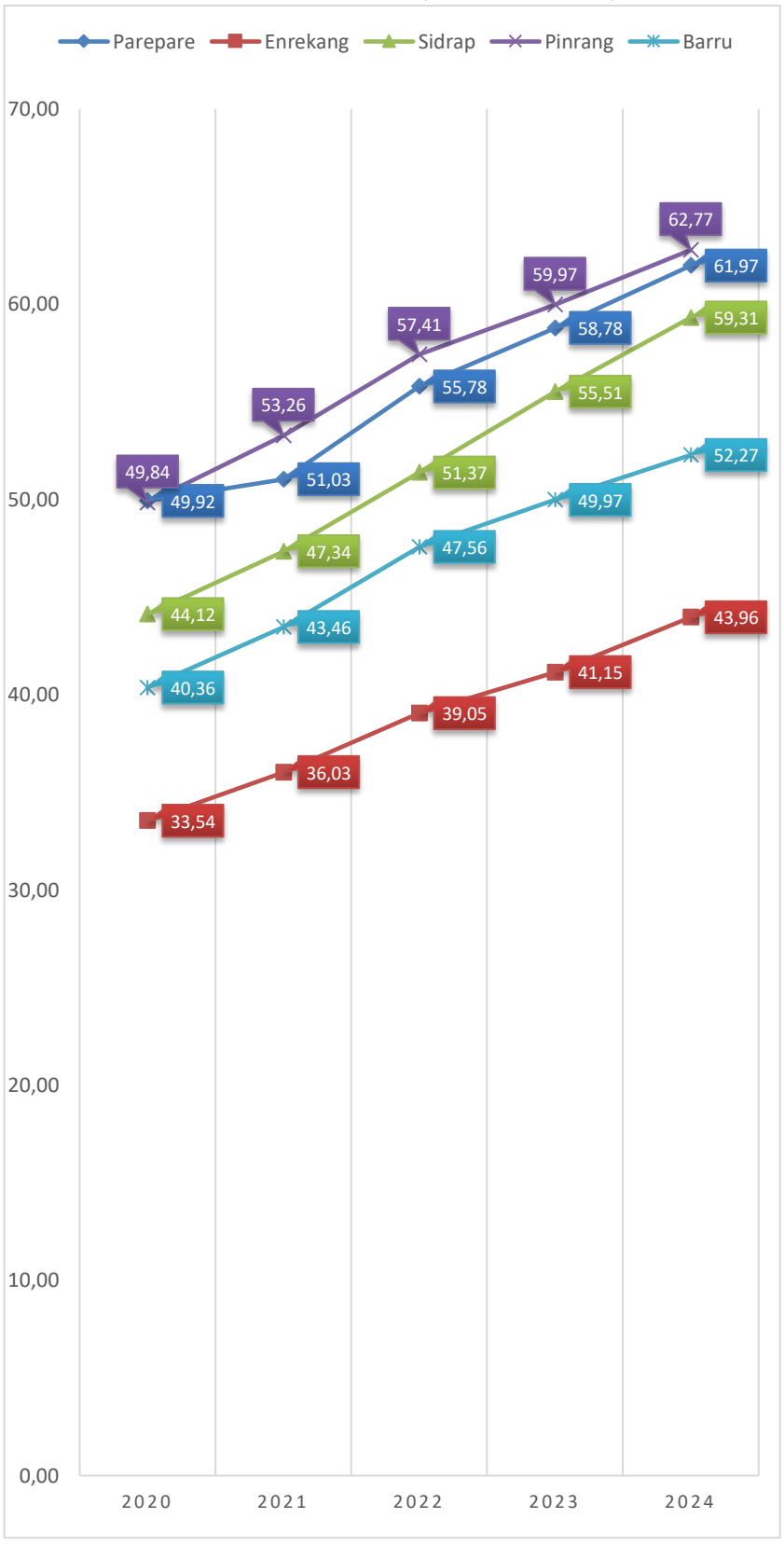

Sumber: BPS, Kota Parepare

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan data grafik yang tersedia, tergambar bahwa secara konsisten daerah-daerah wilayah Ajatappareng mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir.

Grafik. 2.5 Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Berlaku Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

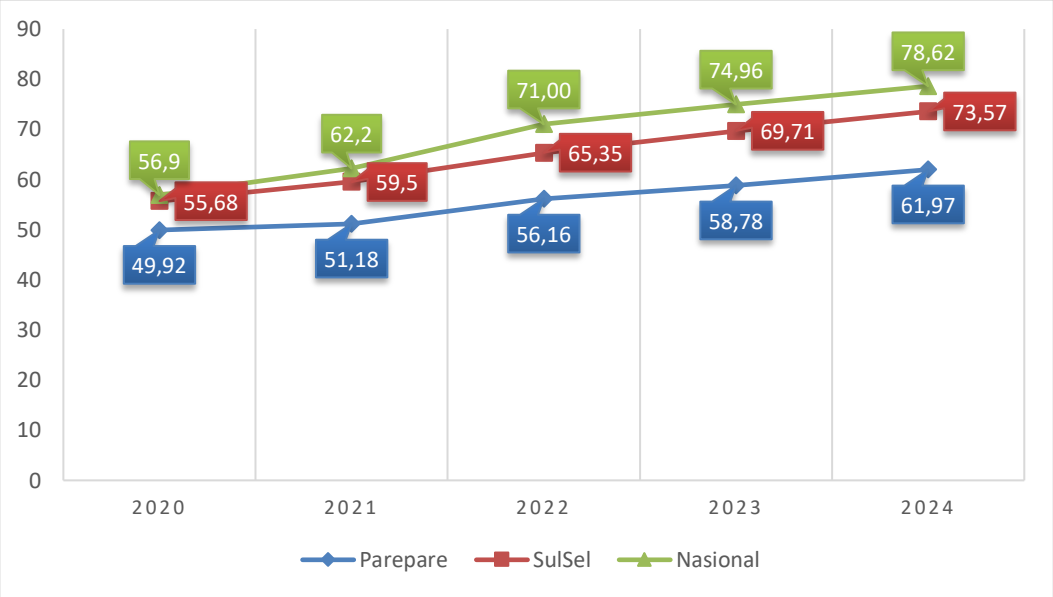

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data grafik di atas, PDRB per Kapita Kota Parepare merupakan capaian terendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional. Setelah yagn tertinggi adalah nasional kemudian Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.2.1.3 Gini Ratio

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisen gini mendekati satu. Indeks Gini Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecendrungan membaik. Indeks gini Kota Parepare dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan indeks gini kembali

meningkat menjadi 0,373 di tahun 2020. Di tahun 2021 indeks gini rasio terlihat pada angkat 0,381. Tahun 2022 hingga 2023 Indeks Gini Kota Parepare berada pada titik 0,379 (2022) – 0,381 (2023), dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.6 Indeks Gini Kota Parepare

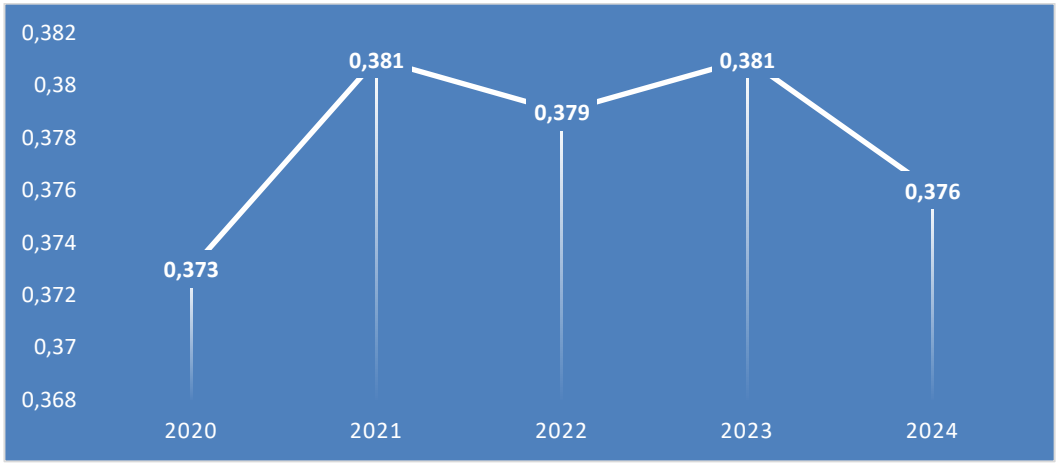

Sumber : BPS, Kota Parepare

Indeks gini di seluruh daerah dalam perbandingan antara daerah se-Ajattappareng secara lengkap dapat dilihat pada tabel grafik berikut:

Grafik. 2.7 Perbandingan Indeks Gini se-Ajatappareng

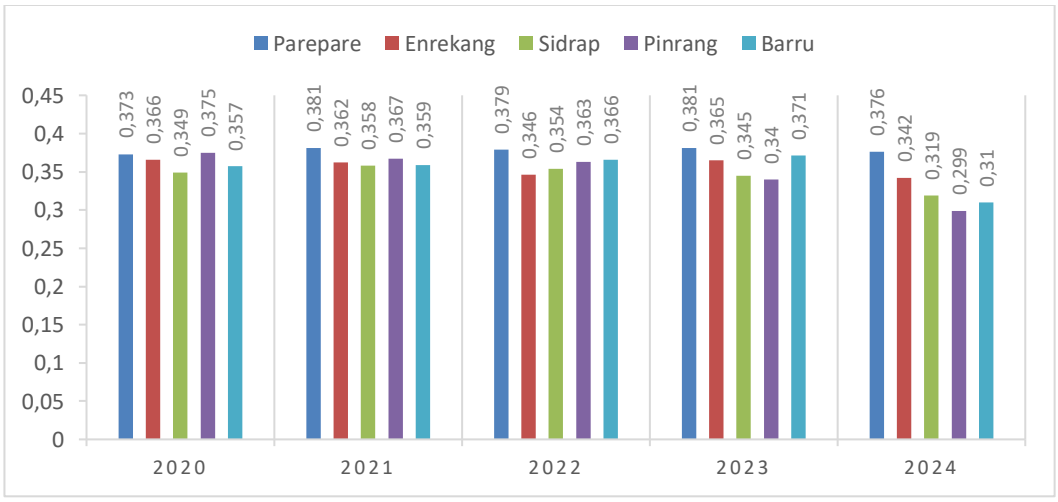

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Indeks Gini Kota Parepare dibanding Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2020, indeks gini Kota Parepare adalah

0,373, sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 0,389 dan Nasional sebesar 0,382 dan 0,381. Tahun 2022, Kota Parepare berada pada titik diantara Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Berdasarkan data yang tertera bahwasanya nilai indeks gini Kota Parepare stagnansi pada angka 0,377. Sedangkan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing berada pada angka 0,388 – 0,381 di tahun 2023. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.8 Perbandingan Indeks Gini Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

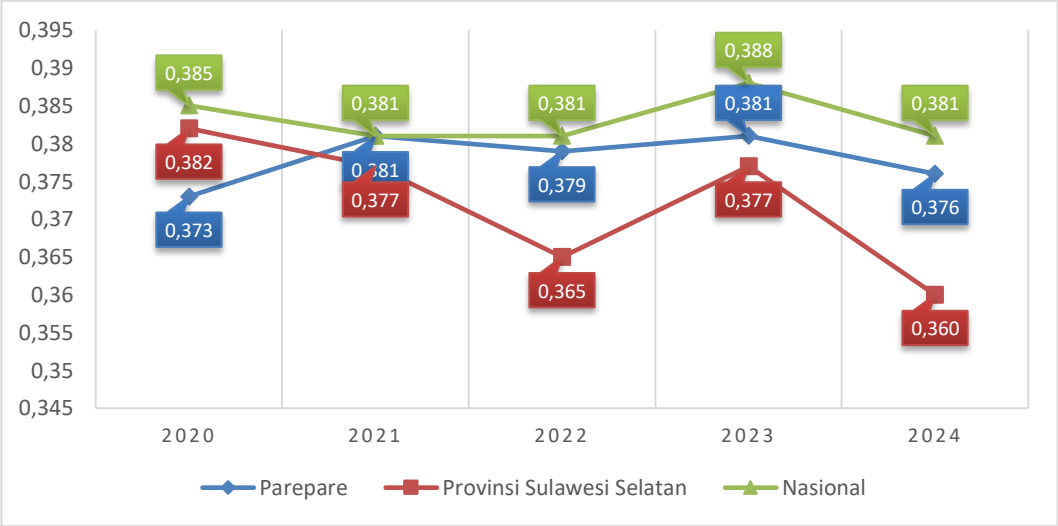

Sumber: BPS Sulawesi Selatan; BPS.go.id

2.1.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Parepare akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan angka kemiskinan di Kota Parepare kembali meningkat menjadi 5,44 persen. Di tahun 2021 angka kemiskinan berapa pada titik 5,40 persen sebagai tahun pemulihan ekonomi. Tahun 2022, angka kemiskinan menjadi 5,41 persen. Tahun 2023, berdasarkan data yang tersedia menunjukkan terjadinya penurunan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya menjadi 5,34 persen. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan penghasilan yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat adalah dengan meningkatkan

keterampilan/keahlian seseorang sehingga semakin meningkat peluang seseorang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan, salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Grafik di bawah ini memperlihatkan tingkat kemiskinan Kota Parepare sebagai berikut:

Grafik. 2.9 Persentase Penduduk Miskinan (P0) Kota Parepare

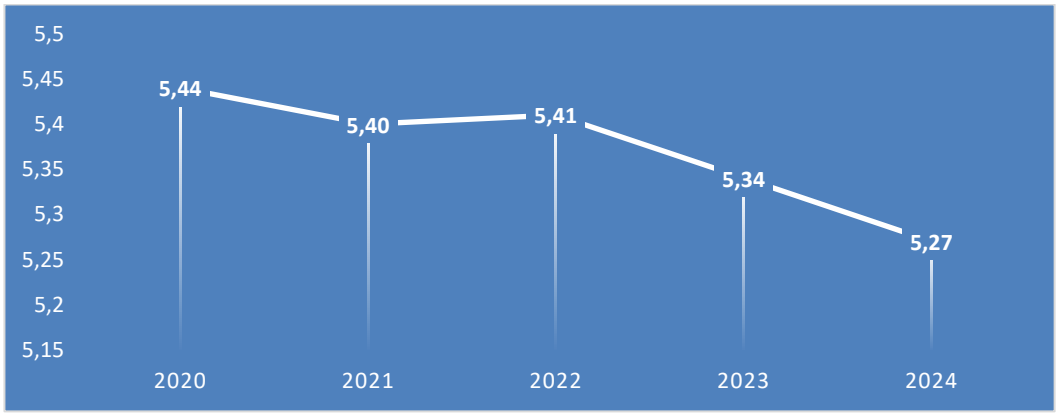

Sumber: BPS, Kota Parepare

Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dalam suatu daerah, maka penting mengetahui indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dalam suatu daerah. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeksnya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalamam Kemiskinan Kota Parepare bertujuan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tahun 2020 indeksnya meningkat menjadi 0,94 akibat adanya pandemi COVID-19. Tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kota Parepare menunjukkan angka 0,72 yang terjadi pengurangan sebesar 0,22. Tahun 2022, angka indeks kedalaman kemiskinan Kota Parepare berada pada angka 0,56 menjadi 0,58 di tahun 2023.

Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Parepare memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Tahun 2020 menjadi 0,24 dan tahun Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare adalah 0,13 yang menunjukkan penurunan angka dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Tahun 2022, nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Parepare adalah 0,09 menjadi 0,12 di tahun 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Parepare

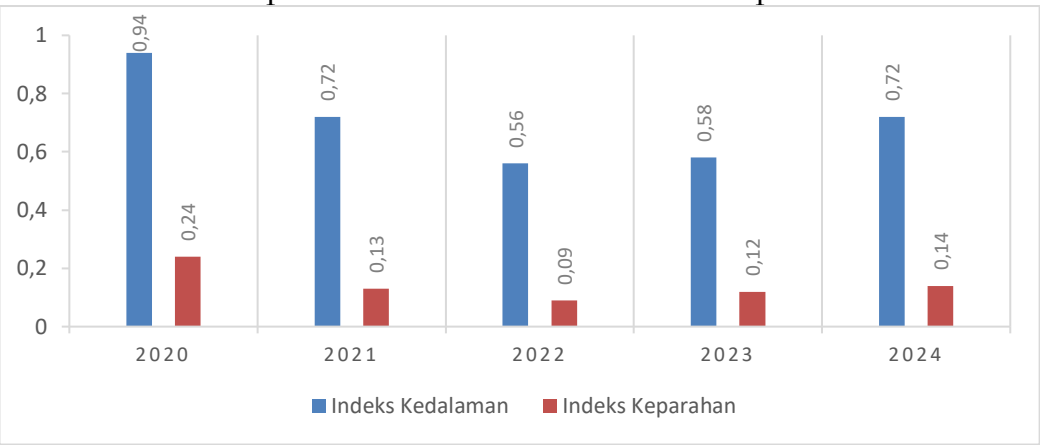

Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2025

Ini mengindikasikan bahwa baik jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) maupun kesenjangan (*gap*) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri (P2), sebelum tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan angka ini menunjukkan terjadinya naiknya taraf hidup penduduk miskin, sekalipun mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, angka P1 maupun P2 kembali mengalami peningkatan di tahun 2020. Yang kemudian di tahun 2021-2022 mengalami penurunan angka. Meningkat tidak signifikan di tahun 2023. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Kemiskinan Kota Parepare

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	363.710	383,471	402.126	445.032	467.151
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	7,96	7,93	8,01	7,98	7,94

Sumber: BPS, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Parepare relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah se-ajattappareng. Maka, Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Kota Parepare sebesar 5,41%, lebih rendah

dibanding Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Barru. Namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten Sidrap. Tahun 2023, Kota Parepare jika dibandingkan dengan Ajatappareng berada pada urutan ke-4 setelah Kabupaten Enrekang sebesar 12,69 – Kabupaten Pinrang (8,90) – Kabupaten Barru (8,46). Setelah Kota Parepare sebesar 5,34, ada Kabupaten Sidrap (5,14). Perbandingan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.11 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Parepare Dengan Daerah Lain se-Ajattappareng

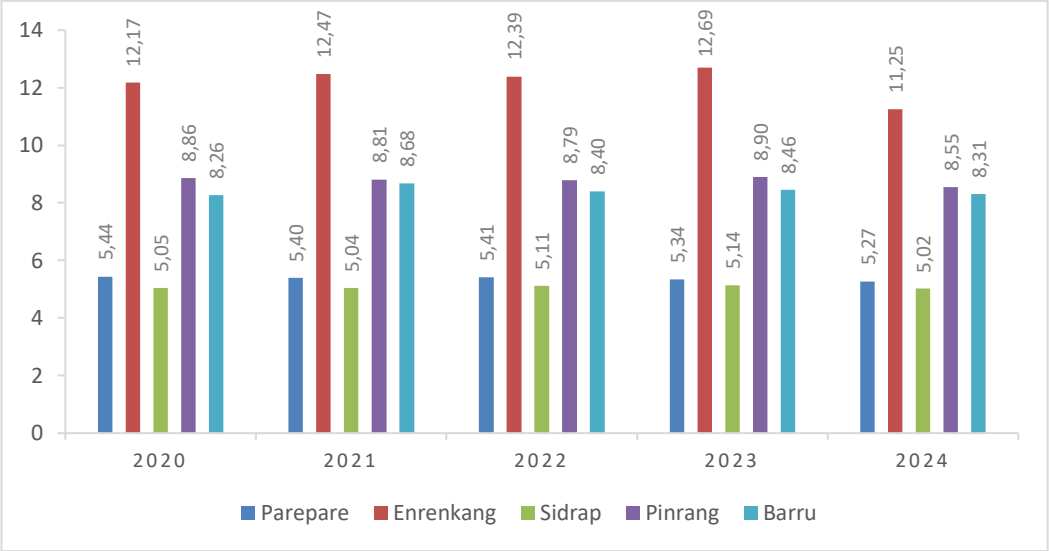

Sumber: Badan Pusat Statistikan Sulawesi Selatan

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka persentase penduduk miskin di Kota Parepare relatif jauh lebih rendah dari keduanya. Dimana pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan meningkat menjadi 8,72% dan nasional meningkat menjadi 9,78%. Untuk tahun 2021 perbandingan kondisi kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara berturut-turut menunjukkan angka 5,4 persen, 8,78 persen, dan 9,71 persen. Tahun 2022 Kota Parepare berdasarkan data perbandingan menunjukkan kondisi kemiskinan Kota Parepare berada pada angka 5,41 menurun menjadi 5,34 di tahun 2023. Sedangkan provinsi yang tahun 2022 adalah 8,63 menjadi 8,7 tahun 2023.

Capaian nasional tahun 2022 adalah 9,57 menjadi 9,36 tahun 2023.

Grafik. 2.12 Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

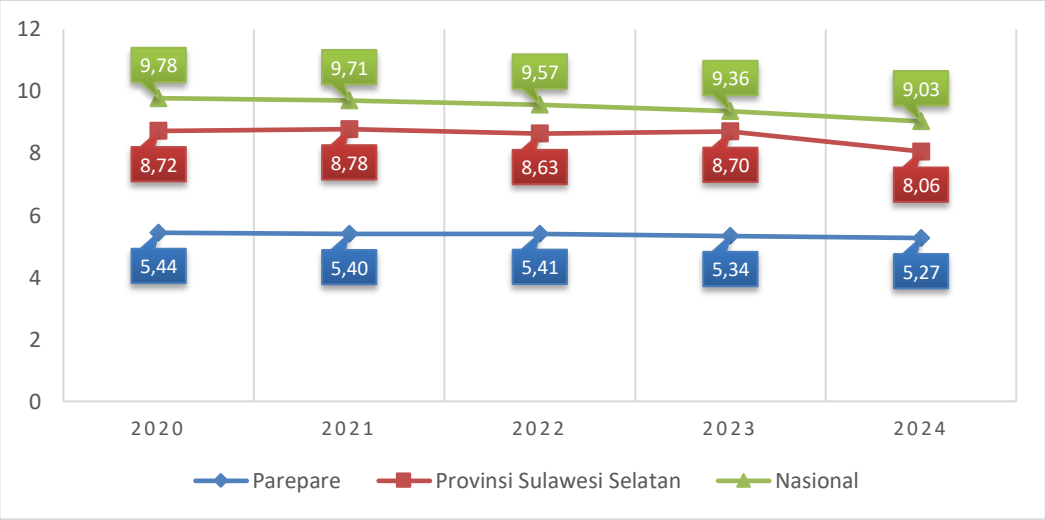

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare jika dibandingkan dengan TPT pada perbandingan dengan wilayah se-Ajattappareng, TPT Kota Parepare tahun 2023 berada pada angka 5,86 dari TPT daerah Kab. Barru (5,89), Kab. Sidrap (3,29), Kab. Pinrang (3,64), dan Kab. Enrekang (1,53). Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare Dengan se-Ajattappareng dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se-Ajatappareng

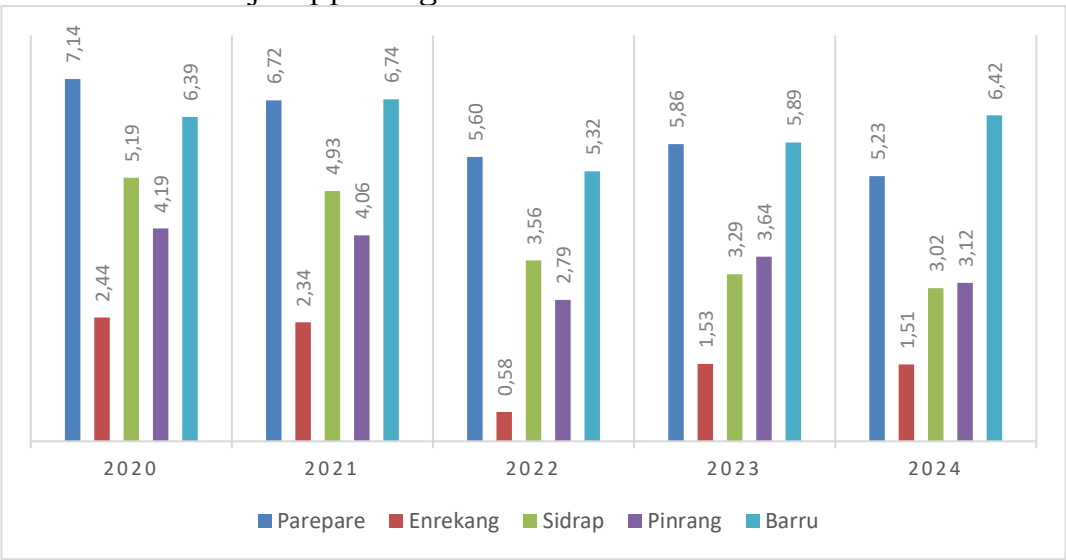

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Parepare maupun Provinsi Sulawesi Selatan serta nasional dengan kecenderungan menurun. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan selalu lebih baik dibanding Kota Parepare. TPT Provinsi Sulsel ditahun 2023 menjadi 4,33 persen dari 6,31 persen di tahun 2020 yang merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Demikian pula jika dibandingkan dengan TPT nasional mengalami cenderung mengalami penurunan secara berkala, yang tahun 2020 capaian tertingginya dalam kurun waktu lima tahun adalah 7,07 persen menjadi 5,32 persen di akhir periode lima tahun yaitu tahun 2023. TPT Parepare yang cenderung menurun dari tahun 2020 yang merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebesar 7,14 persen menurun menjadi 5,6 persen di tahun 2022, namun meningkat di tahun 2023 menjadi 5,86 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.14 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan

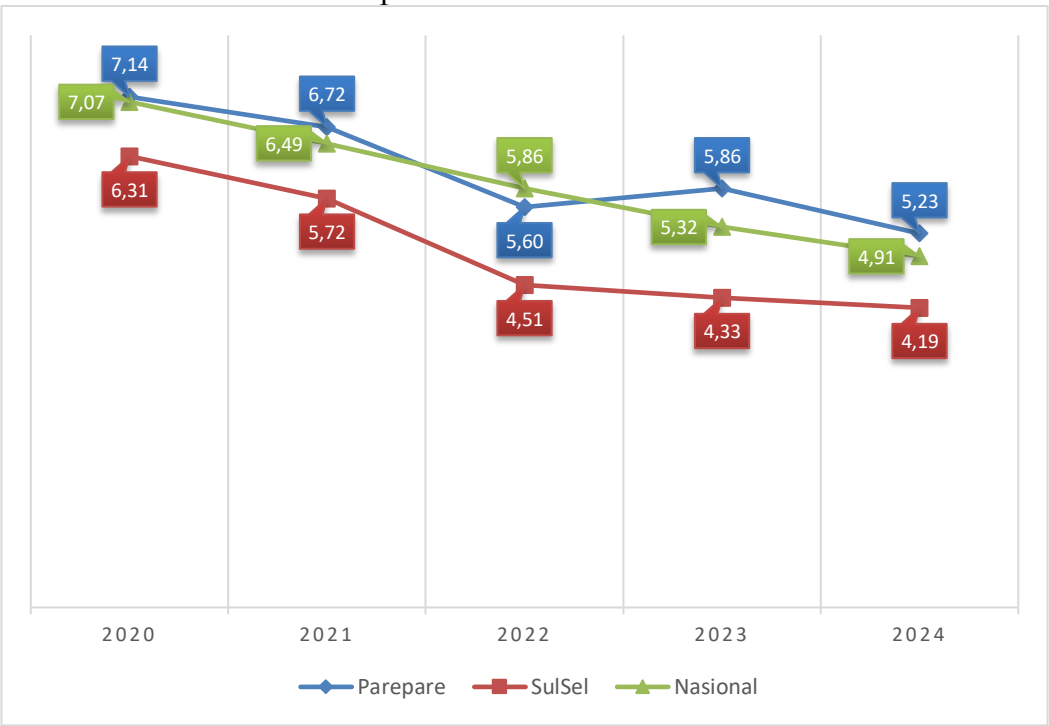

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Parepare yang terus mengalami kemajuan menunjukkan bahwa kualitas hidup di Kota Parepare semakin baik. Komponen pembentuk IPM Kota Parepare yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report*, 1990). Pembangunan manusia lebih difokuskan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kebebasan untuk memilih. Dengan kata lain, pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan alternatif pilihan yang lebih banyak bagi manusia.

Indeks Pembangunan Manusia mengambarkan kondisi pembangunan yang berkualitas, menggambarkan kondisi umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. Pembangunan manusia di Kota Parepare terus mengalami kemajuan. IPM Parepare tahun 2024 sebesar 80,97. Sejak tahun 2023 status IPM Parepare berada pada level "Sangat Tinggi". Selama Tahun 2020-2024 IPM Parepare rata-rata meningkat 0,55 persen per tahun, dari 79,20 pada tahun 2020 menjadi 80,97 pada tahun 2024. Capaian IPM tahun 2024 yang meningkat 0,61 poin didukung oleh peningkatan semua dimensi penyusunnya. Capaian IPM Tahun 2024 lebih cepat dari tahun sebelumnya sebesar 0,49 poin di tahun 2023.

Grafik. 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare

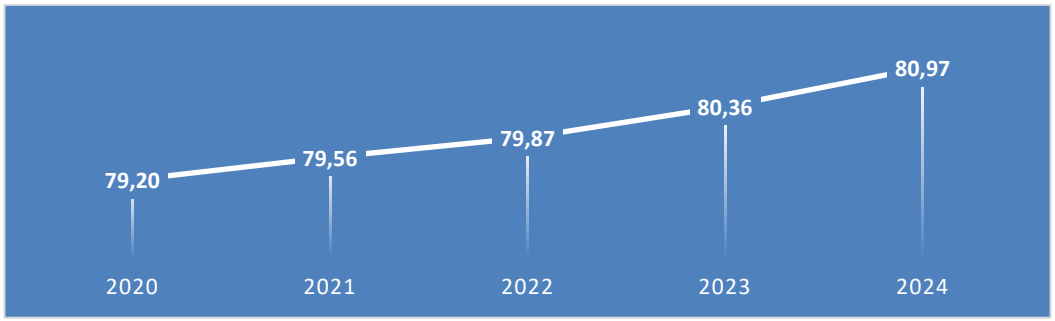

Sumber: IPM BPS; Kota Parepare

Peningkatan terjadi pada semua dimensi, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM 2024 didukung oleh peningkatan di semua dimensi penyusunnya. Pada Tahun 2024, standar hidup layak menjadi lebih baik ditandai dengan percepatan pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Parepare sebesar 2,99 persen dibandingkan tahun 2023 dari 14,50 juta/tahun/kapita menjadi 14,93 juta/tahun/ kapita.

Dari sisi spengetahuan, pada tahun 2024 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,55 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma III. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai

14,54 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,18 tahun, dari 10,70 tahun menjadi 10,88 tahun pada tahun 2024.

Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan yaitu mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP 2020 (SP2020-LF).

Pencapaian IPM Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir juga jauh lebih tinggi dibanding IPM Nasional dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Dan secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.16 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

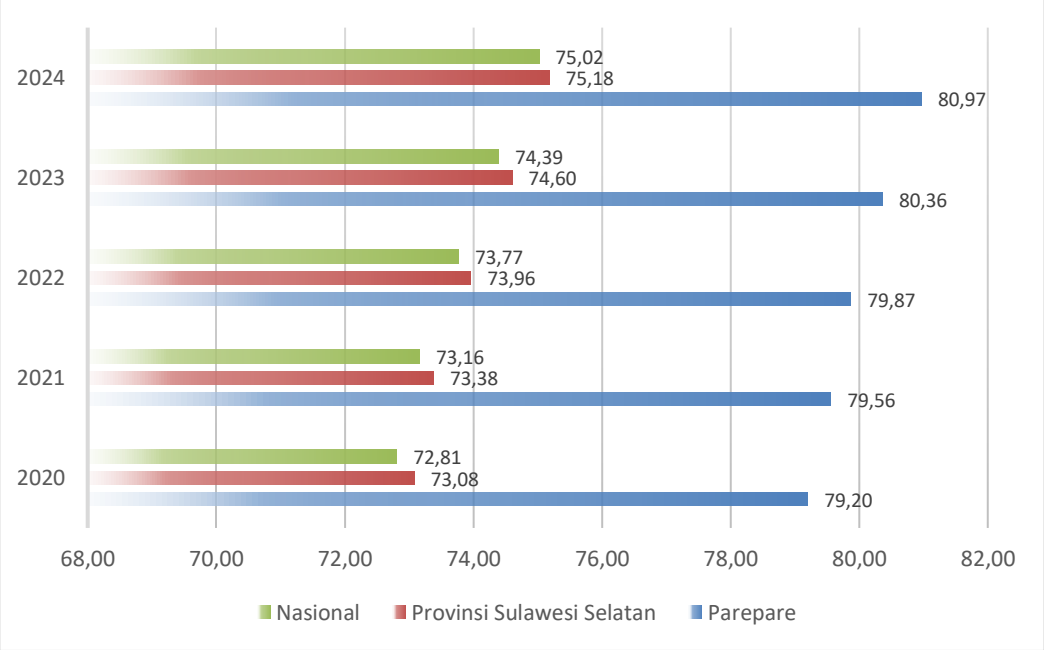

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan

Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Ajatappareng pada tahun 2024 mengalami peningkatan komponen yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan IPM tertinggi adalah Kota Parepare (80,97) dan yang terendah adalah

kabupaten Barru (74,51). Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten se-Ajatappareng. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.17 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia se-Ajatappareng

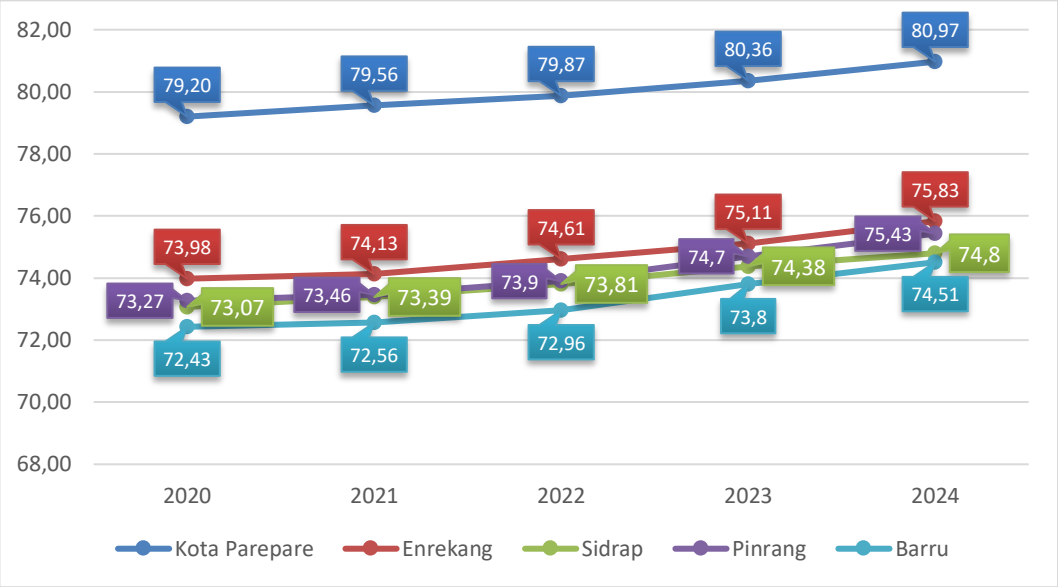

Sumber: BPS; Sulawesi Selatan

IPM didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (PPP). Sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH), sedangkan dimensi pengetahuan yang diwakili dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Pada tahun 2020 Umur Harapan Hidup saat lahir di

Parepare adalah 73,97 tahun, dan pada tahun 2024 mencapai 74,63 tahun. UHH 2024 meningkat 0,19 tahun (0,26 persen) dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,44 tahun pada tahun 2023.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Parepare telah meningkat 0,01 tahun, sementara RLS meningkat 0,18 tahun. HLS Parepare tahun 2024 sebesar 14,55 tahun dan RLS Parepare 2024 sebesar 10,88 tahun.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Parepare mencapai Rp14,92 juta per tahun, naik sebesar 2,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp14,49 juta per tahun.

Rata-rata pengeluaran per kapita menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Rata-rata pengeluaran per kapita Parepare selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 sebesar Rp 1.535.884 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 1.555.706. Jika dilihat per kelompok komoditas, rata-rata pengeluaran per kapita terbesar ada pada kelompok bukan makanan uaitu sebesar Rp 914.601 (59,55%),

sedangkan pada kelompok makanan hanya sebesar Rp 621.283 (40,45%).

Tabel ..... Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Parepare Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2020-2024 (Rp)

Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas				
	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	**599.134**	**679.974**	**590.451**	**654.777**	**621.283**
Padi-padian	61.643	63.296	64.041	72.037	82.288
Umbi-umbian	2.723	3.435	3.009	2.317	2.403
Ikan/udang/cumi/kerang	63.237	77.236	68.248	67.162	69.984
Daging	11.918	16.515	13.524	16.907	14.283
Telur dan susu	33.202	45.083	34.392	36.177	34.126
Sayur-sayuran	29.390	35.393	32.882	34.299	35.594
Kacang-kacangan	6.961	9.726	7.300	7.603	8.187
Buah-buahan	36.298	26.478	20.895	29.185	37.423
Minyak dan kelapa	12.759	15.178	14.813	15.745	15.543
Bahan Minuman	14.129	16.144	14.180	15.084	12.601
Bumbu-bumbuan	11.502	15.471	14.227	14.543	12.512
Konsumsi lainnya	12.657	13.499	11.261	13.123	9.802
Makanan dan minuman jadi	239.912	273.339	222.912	263.250	218.393
Rokok	62.812	69.182	68.768	67.346	68.144
Bukan Makanan	**761.902**	**942.161**	**712.218**	**900.929**	**914.601**
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	351.256	451.885	381.737	432.334	432.832
Aneka barang dan jasa	163.269	257.757	137.562	187.918	217.651
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	46.047	44.902	38.986	46.018	45.949
Barang tahan lama	112.313	92.683	63.619	98.955	96.919
Pajak, pungutan dan asuransi	51.693	69.697	72.395	81.951	74.672
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	37.325	24.967	17.919	53.753	46.577
Jumlah	**1.361.036**	**1.622.137**	**1.302.669**	**1.555.706**	**1.535.884**

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Tabel ..... Distribusi Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Parepare Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2020-2024 (persen)

Kelompok Komoditas	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas				
	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	**44,02**	**41,92**	**45,33**	**42,09**	**40,46**
Padi-padian	4,53	3,90	4,92	4,63	5,36
Umbi-umbian	0,20	0,21	0,23	0,15	0,16
Ikan/udang/cumi/kerang	4,65	4,76	5,24	4,32	4,56
Daging	0,88	1,02	1,04	1,09	0,93
Telur dan susu	2,44	2,78	2,64	2,33	2,22
Sayur-sayuran	2,16	2,18	2,52	2,20	2,32
Kacang-kacangan	0,51	0,60	0,56	0,49	0,53
Buah-buahan	2,67	1,63	1,60	1,88	2,44
Minyak dan kelapa	0,94	0,94	1,14	1,01	1,01
Bahan Minuman	1,04	1,00	1,09	0,97	0,82
Bumbu-bumbuan	0,85	0,95	1,09	0,93	0,81
Konsumsi lainnya	0,93	0,83	0,86	0,84	0,64
Makanan dan minuman jadi	17,63	16,85	17,11	16,92	14,22
Rokok	4,62	4,26	5,28	4,33	4,44
Bukan Makanan	**55,98**	**58,08**	**54,67**	**57,91**	**59,54**
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	25,81	27,86	29,30	27,79	28,18
Aneka barang dan jasa	12,00	15,89	10,56	12,08	14,17
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	3,38	2,77	2,99	2,96	2,99
Barang tahan lama	8,25	5,71	4,88	6,36	6,31
Pajak, pungutan dan asuransi	3,80	4,31	5,56	5,27	4,86
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	2,74	1,54	1,38	3,46	3,03
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Tabel. ... Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Menurut Dimensi Penyusunnya, Tahun 2020-2024

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,97	74,01	74,25	74,44	74,63
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,50	14,51	14,52	14,54	14,55

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,45	10,65	10,66	10,70	10,88
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP	Rp 000	13.663	13.786	14.027	14.495	14.928
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		79,20	79,56	79,87	80,36	80,97

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024, Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Selain itu, IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan.

2.1.2.1.7 Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi

Dari grafik dapat digambarkan secara umum jika tren yang ditunjukkan cenderung relatif stabil yang mengindikasikan bahwa skala ekonomi kota Parepare berperan tetap namun tidak mengalami peningkatan signifikan terhadap total PDRB provinsi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi Kota Parepare tercatat sebesar 1,45%, yang menjadi nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan. Tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi penurunan proporsi kontribusi menjadi 1,43%, dan angka ini bertahan pada level yang sama pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya perlambatan relatif pertumbuhan ekonomi Parepare dibandingkan dengan provinsi secara keseluruhan. Selanjutnya, pada tahun 2023, proporsi kontribusi Kota Parepare kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 1,42%, yang menjadi titik terendah dalam rentang lima tahun tersebut. Penurunan ini menunjukkan semakin kecilnya peranan ekonomi Parepare terhadap pembentukan total PDRB provinsi. Namun

demikian, pada tahun 2024 kontribusi tersebut kembali meningkat ke angka 1,43%, meskipun belum mampu menyamai capaian pada tahun 2020.

Grafik. 2.18 Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi, 2020-2025

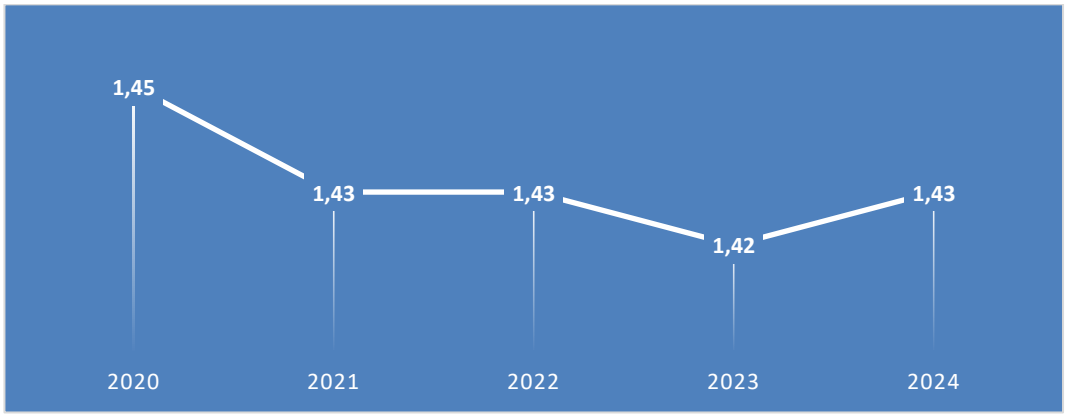

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara umum, kualitas kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin meningkat berdasarkan rata-rata angka harapan hidup yang semakin panjang. Selanjutnya, AHH Kota Parepare sepanjang periode lima tahun terakhir juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional.

Grafik. 2.19 Angka Harapan Hidup Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

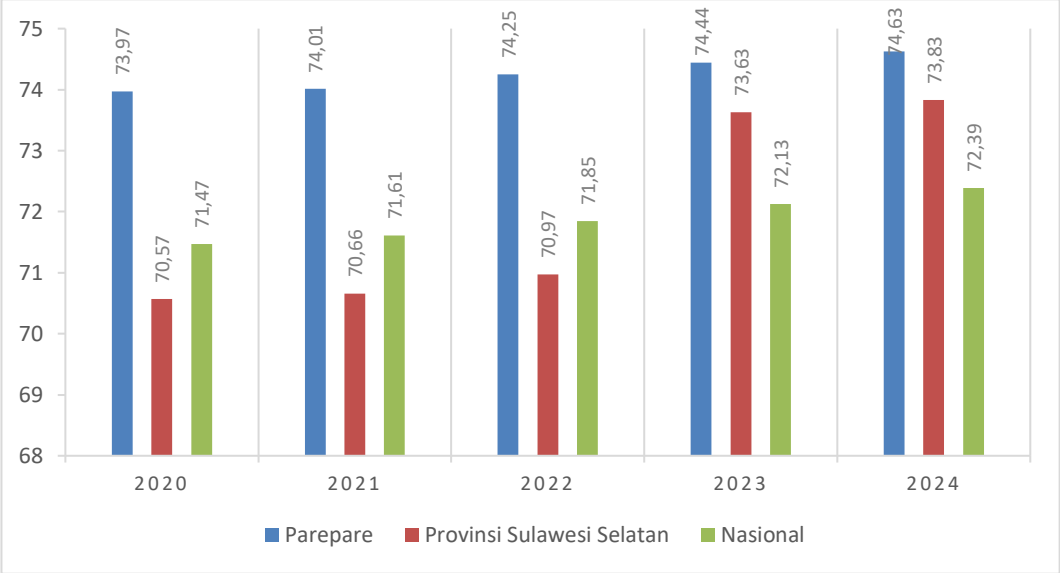

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan

Berdasarkan data grafik di atas menunjukkan bahwa capaian UHH Kota Parepare yang berada pada angka 71,78, sedangkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional adalah 71,22 dan 72,13 yang merupakan angka rata-rata tambahan umur yang diharapkan dapat terus dialami seseorang, yang juga dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah mencapai ulang tahun tertentu.

2.1.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 Kelahiran Hidup)

Berdasarkan data kesehatan Kota Parepare, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan fluktuasi pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 84,42 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 2 kasus dari 2.369 kelahiran hidup. Pada tahun 2021, AKI meningkat tajam menjadi 228,48 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian ibu mencapai 6 kasus dari 2.626 kelahiran hidup.

Selanjutnya pada tahun 2022, AKI turun signifikan menjadi 50,91 per 100.000 kelahiran hidup, meskipun terdapat 5 kasus kematian ibu dari 2.357 kelahiran hidup. Fluktuasi kembali terjadi pada tahun 2023 dengan AKI sebesar 165,90 per 100.000 kelahiran hidup (4 kasus dari 2.411 kelahiran hidup), dan pada tahun 2024 mencapai 183,06 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus kematian ibu tetap sebanyak 4 dari 2.185 kelahiran hidup. Perubahan yang cukup dinamis ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah kasus kematian ibu relatif kecil secara absolut, nilai AKI dapat berubah signifikan karena dipengaruhi oleh jumlah kelahiran hidup yang juga fluktuatif. Maka, diperlukan upaya penguatan layanan kesehatan ibu, peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) untuk memastikan penurunan angka kematian ibu dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tabel 2.2 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 Kelahiran Hidup) Kota Parepare, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	84,42	228,48	50,91	165,90	183,06
Jumlah Kematian Ibu	Angka	2	6	5	4	4
Jumlah Kelahiran Hidup	Angka	2.369	2.626	2.357	2.411	2.185

2.1.2.2.4. Prevalensi Stunting pada Balita

Prevalensi stunting pada balita di Kota Parepare menunjukkan fluktuasi pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pengukuran prevalensi tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19, sehingga data tidak tersedia. Tahun 2021 tercatat prevalensi stunting sebesar 24,28 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 27,1 persen. Pada tahun 2023, prevalensi stunting menurun sedikit menjadi 26,7 persen, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 25,24 persen.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022, prevalensi stunting secara umum cenderung menurun dalam dua tahun terakhir. Namun tetap diperlukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan stunting, khususnya melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta perbaikan sanitasi dan pola asuh. Dengan pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Parepare perlu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pangan, hingga sanitasi, agar percepatan penurunan prevalensi stunting dapat tercapai sesuai target pembangunan daerah.

Tabel. ... Prevalensi Stunting pada Balita di Kota Parepare, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	Tidak dilakukan pengukuran karena covid	24,28	27,1	26,7	25,24

2.1.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis

Berdasarkan data capaian cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (TB) pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, cakupan penemuan dan pe

ngobatan kasus TB tercatat sangat tinggi yakni sebesar 98,47 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 62,55 persen, dan kembali menurun pada tahun 2022 hingga mencapai titik terendah sebesar 57,74 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya deteksi dan penanganan kasus TB pada periode tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 85,99 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penemuan dan pengobatan kasus. Peningkatan ini berhasil dipertahankan pada tahun 2024 dengan capaian 88,32 persen, meskipun belum kembali menyamai capaian optimal pada tahun 2020. Secara umum, data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat dinamika capaian dari tahun ke tahun, upaya pengendalian Tuberkulosis di Kota Parepare menunjukkan tren pemulihan yang positif dalam dua tahun terakhir.

Tabel. ... Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB di Kota Parepare, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB	Persen	98,47	62,55	57,74	85,99	88,32

2.1.2.2.6. Angka keberhasilan pengobatan TB (*treatment success rate*)

Berdasarkan data angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) periode 2020–2024, terlihat adanya tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, angka keberhasilan pengobatan TB tercatat sangat tinggi yakni sebesar 145,80 persen, yang kemungkinan disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan atau pelaporan kasus sehingga hasilnya melebihi 100 persen. Memasuki tahun 2021, capaian tersebut menurun menjadi 90,48 persen, kemudian

kembali turun pada tahun 2022 sebesar 87,32 persen. Penurunan berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian 69,07 persen, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit perbaikan dengan meningkatnya angka keberhasilan pengobatan TB menjadi 71,89 persen, meskipun belum kembali mencapai level optimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian dan pengobatan TB masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menjaga konsistensi keberhasilan pengobatan, sehingga diperlukan strategi lebih intensif dalam pemantauan, pendampingan pasien, serta kepatuhan terhadap pengobatan.

Tabel. ... Angka keberhasilah pengobatan TB (*treatment success rate*)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka keberhasilah pengobatan TB (*treatment success rate*)	Persen	145,80	90,48	87,32	69,07	71,89

2.1.2.2.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Berdasarkan data capaian kinerja indikator cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) periode 2020–2024, terlihat bahwa terjadi tren penurunan kepesertaan dari tahun ke tahun meskipun pada 2024 mulai menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2020, cakupan JKN mencapai 88,33 persen, kemudian menurun menjadi 84,47 persen pada 2021 dan kembali turun menjadi 82,51 persen pada 2022. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, yakni sebesar 77,57 persen, sebelum akhirnya meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 81,31 persen. Pola fluktuatif yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, namun masih terdapat tantangan

baik dari aspek pendaftaran, kepatuhan pembayaran iuran, maupun validasi data peserta. Oleh karenanya, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pendataan, serta peningkatan sosialisasi dan kemudahan akses layanan agar cakupan JKN dapat meningkat secara berkelanjutan.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	88,33	84,47	82,51	77,57	81,31

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1. Kemampuan Literasi/numerasi pada Assesment Tingkat Nasional

Berdasarkan hasil Asesmen Tingkat Nasional, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kota Parepare menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Pada jenjang SD, literasi membaca meningkat dari 48,5 persen pada tahun 2021 menjadi 59,09 persen pada tahun 2024. Tren yang sama juga terlihat pada jenjang SMP, yakni dari 58,63 persen pada tahun 2021 menjadi 65,79 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca peserta didik SMP konsisten lebih tinggi dibandingkan SD, dengan selisih rata-rata sekitar 7–10 persen setiap tahunnya.

Untuk numerasi, capaian SD meningkat secara bertahap dari 34,51 persen pada tahun 2021 menjadi 46,22 persen pada tahun 2024. Sementara itu, capaian numerasi SMP cenderung fluktuatif, dari 58,63 persen pada tahun 2021 naik ke 61,06 persen pada 2022, namun sempat menurun ke 58,4 persen pada 2023 sebelum kembali meningkat menjadi 60,29 persen pada 2024. Meskipun

capaian numerasi SMP lebih tinggi dibanding SD, tren peningkatan di jenjang SD terlihat lebih konsisten dan signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik SMP telah memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik dibandingkan SD, namun stabilitas capaian masih belum maksimal. Sebaliknya, pada jenjang SD meskipun capaian masih lebih rendah, peningkatannya relatif lebih pesat. Oleh karena itu, strategi peningkatan mutu pembelajaran perlu difokuskan pada penguatan dasar-dasar literasi dan numerasi di SD, sekaligus menjaga konsistensi capaian pada tingkat SMP agar target mutu pendidikan di Kota Parepare dapat tercapai secara berkelanjutan.

Tabel. ... Kemampuan Literasi/numerasi pada Assesment Tingkat Nasional, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi Membaca						
SD	Persen	N/A	48,5	53,29	57,14	59,09
SMP	Persen	N/A	58,63	61,06	64,16	65,79
Numerasi						
SD	Persen	N/A	34,51	39,93	43,66	46,22
SMP	Persen	N/A	58,63	61,06	58,4	60,29

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

2.1.2.3.2. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

Berdasarkan data persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional tahun 2020–2024, capaian literasi membaca dan numerasi di Kota Parepare menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada tahun terakhir. Pada literasi membaca, capaian satuan pendidikan tercatat sebesar 84,21 persen pada tahun 2021, menurun menjadi 72,22 persen pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 85,52 persen pada tahun 2023 dan

mencapai 86,18 persen pada tahun 2024. Sementara itu, capaian numerasi menunjukkan tren yang lebih tidak stabil. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 79,70 persen, turun drastis menjadi 52,08 persen pada tahun 2022, namun kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 75,86 persen dan sedikit naik pada tahun 2024 menjadi 76,96 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa capaian literasi membaca di satuan pendidikan Kota Parepare relatif lebih stabil dan konsisten berada pada kisaran di atas 80 persen, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Sedangkan, capaian numerasi masih membutuhkan upaya yang cukup besar, ditandai dengan fluktuasi yang signifikan terutama pada tahun 2022. Namun, adanya tren peningkatan kembali di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran numerasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Parepare perlu difokuskan pada penguatan numerasi, sekaligus mempertahankan capaian literasi membaca agar tetap berada pada level yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel. ... Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi Membaca	Persen	N/A	84,21	72,22	85,52	86,18
Numerasi	Persen	N/A	79,70	52,08	75,86	76,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

2.1.2.3.3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung pada penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah di Kota Parepare juga mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan

Nasional, angka RLS Kota Parepare jauh lebih tinggi. Perbandingan RLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.20 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

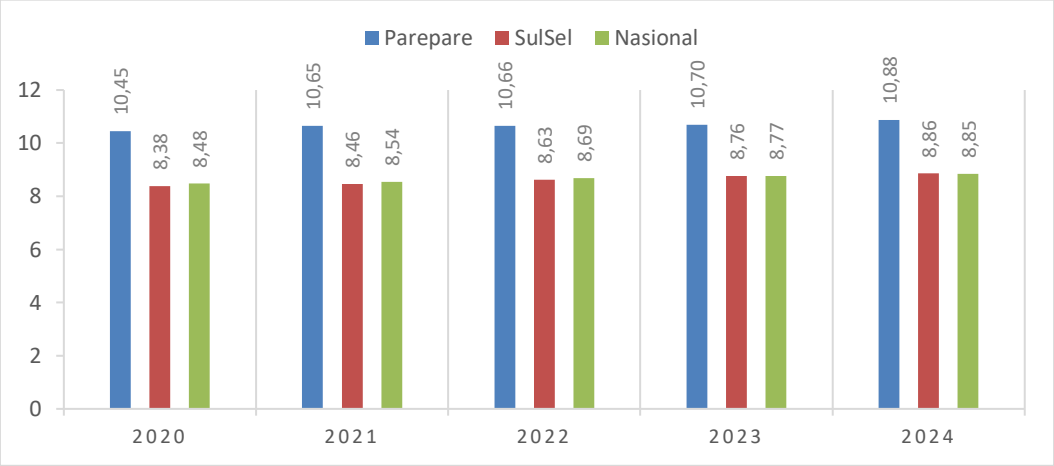

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa capaian Kota Parepare terkait Rata-rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional adalah Kota Parepare mencapai 10,70 di tahun 2023 lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian 8,76 dan Nasional yang capaiannya adalah 8,77.

2.1.2.3.4. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti program wajib belajar. Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan,

namun peningkatannya sangatlah kecil sehingga dapat dikatakan terjadi perlambatan pertumbuhan angka harapan sekolah. Perbandingan HLS antara Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 2.21 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

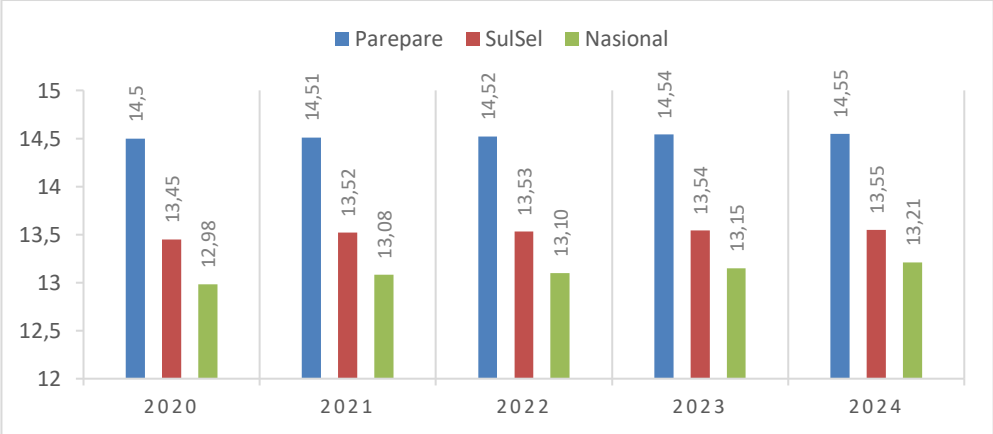

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan

Jika dilihat, angka HLS Kota Parepare lebih tinggi dibanding Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, angka HLS Kota Parepare 14,54 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Parepare yang berumur 7 tahun ke atas dapat menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA bahkan sampai semester 4–5 perguruan tinggi atau setara dengan diploma II. Sedangkan angka harapan lama sekolah Propinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023 sebesar 13,54 tahun sehingga bisa diartikan bahwa rata-rata penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang berumur 7 tahun ke atas diperkirakan dapat menyelesaikan pendidikannya sampai semester 2 perguruan tinggi atau setara dengan diploma I. Angka HLS nasional adalah 13,15 tahun atau setara dengan semester 2 perguruan tinggi atau diploma I.

2.1.2.3.5. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Berdasarkan data proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkulifikasi pendidikan tinggi di Kota Parepare pada periode 2020–2024, terlihat adanya perkembangan yang berfluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi tercatat sebesar 51,4 persen, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 60,82 persen. Namun demikian, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 53,93 persen, lalu berangsur naik pada tahun 2023 sebesar 56,13 persen, hingga akhirnya mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar 63,85 persen.

Secara umum, data ini mencerminkan adanya kemajuan positif dalam peningkatan jumlah penduduk berpendidikan tinggi di Kota Parepare, meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2022. Kenaikan yang konsisten sejak tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa potensi sumber daya manusia di Kota Parepare semakin membaik, sehingga diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas tenaga kerja yang lebih terdidik dan berdaya saing.

Tabel. ... Proporsi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	51,4	60,82	53,93	56,13	63,85

2.1.2.3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Berdasarkan data persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota Parepare periode 2020–2024, terlihat adanya perkembangan yang cenderung meningkat meskipun masih berfluktuasi. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan tinggi tercatat sebesar 21,26 persen, relatif stabil pada tahun 2021 dengan capaian 21,20 persen. Selanjutnya, capaian ini mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 26,65 persen, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 25,61 persen. Namun demikian, tren positif kembali terlihat pada tahun 2024 dengan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 30,84 persen.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk berpendidikan tinggi di Kota Parepare yang terserap ke dunia kerja, terutama dengan peningkatan tajam pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas dan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia daerah. Meskipun demikian, fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan sesuai dengan kompetensi lulusan pendidikan tinggi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel. ... Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang	Persen	21,26	21,2	26,65	25,61	30,84

bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan						

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

Berdasarkan data capaian kinerja indikator persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal pada periode 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal tercatat sebesar 1,45 persen, kemudian meningkat menjadi 2,04 persen pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 2,59 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 2,88 persen, hingga mencapai lonjakan cukup besar pada tahun 2024 sebesar 5,62 persen. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan aksesibilitas, penerimaan, serta inklusi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam pasar kerja formal. Hal ini dapat terjadi dengan efektivitas kebijakan pemerintah dan dukungan berbagai pihak dalam mendorong kesempatan kerja yang lebih setara bagi kelompok disabilitas. Dengan upaya peningkatan keterampilan, pelatihan kerja, serta perluasan jaringan kerja sama dengan sektor swasta yang terus diperkuat sehingga tren positif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Tabel. ... Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kota Parepare, 2020-2025

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyandang disabilitas bekerja di	%	1,45	2,04	2,59	2,88	5,62

sektor formal						

2.1.2.4.2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tabel. ... Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	17,24	18,64	19,23		24,73

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1. Persentase benda, bangunanm struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Berdasarkan data persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kota Parepare selama periode 2020–2024, terlihat capaian yang konsisten sebesar 100 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh objek cagar budaya yang telah terdaftar secara resmi juga telah melalui proses penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Konsistensi capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, serta melestarikan warisan budaya sebagai bagian penting dari identitas dan sejarah daerah.

Capaian 100 persen ini juga menjadi indikasi bahwa sistem registrasi dan penetapan cagar budaya di Kota Parepare berjalan efektif tanpa adanya keterlambatan atau objek terdaftar yang belum ditindaklanjuti. Dengan demikian, pengelolaan cagar budaya di daerah ini dapat dikatakan sudah sangat baik, meskipun tetap diperlukan upaya lanjutan berupa pengawasan, perawatan, serta pemanfaatan yang berkelanjutan agar keberadaan cagar budaya

tersebut dapat terus memberi manfaat, baik dari aspek pendidikan, sosial, maupun ekonomi, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata daerah.

Tabel. ... Persentase benda, bangunanm struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase benda, bangunanm struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	100	100	100	100	100

2.1.2.5.2. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Parepare periode 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 indeks tercatat sebesar 73,92, kemudian naik menjadi 75,44 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 76,39, hingga akhirnya mencapai angka tertinggi sebesar 79,04 pada tahun 2024.

Kenaikan indeks ini mencerminkan semakin kuatnya toleransi, kerjasama, dan keharmonisan antarumat beragama di Kota Parepare. Hal ini sekaligus menunjukkan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun iklim sosial yang inklusif, harmonis, dan kondusif. Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa Kota Parepare berada pada kategori kerukunan yang baik dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Meski demikian, upaya penguatan dialog lintas agama, pengembangan pendidikan multikultural, serta pemberdayaan forum-forum kerukunan perlu terus dilanjutkan agar capaian positif ini dapat terjaga secara berkelanjutan.

Tabel. ... Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka		73.92	75.44	76.39	79.04

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1. Indeks Pembangunan Keluarga

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Parepare, perkembangan capaian dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat. Pada tahun 2020, penghitungan indeks belum dilakukan, namun mulai tahun 2021 tercatat nilai sebesar 54,35 dengan kategori "Cukup Baik/Berkembang". Selanjutnya, pada tahun 2022 indeks meningkat menjadi 58,26, kemudian naik signifikan pada tahun 2023 dengan capaian 64,02, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 64,32. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pembangunan keluarga, baik dari aspek ketahanan, kesejahteraan, maupun kualitas hidup keluarga. Peningkatan nilai iBangga ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 64,32, maka dapat dikatakan bahwa kondisi pembangunan keluarga di Kota Parepare semakin menunjukkan arah yang positif dan berkesinambungan.

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	belum dilakukan perhitungan	54,35 (Cukup baik/ Berkembang)	58,26 (Cukup baik/ Berkembang)	64,02 (Cukup baik/ Berkembang)	64,32

2.1.2.6.2. Indeks Perlindungan Anak

Berdasarkan data Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kota Parepare, terlihat adanya perkembangan capaian dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2020, data indeks tidak tersedia karena belum ada rilis resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenP3A). Namun, mulai tahun 2021 tercatat nilai indeks sebesar 61,62, kemudian meningkat menjadi 62,84 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 66,67 pada tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemenuhan hak anak, peningkatan perlindungan, serta penguatan lingkungan yang ramah anak di Kota Parepare. Adapun untuk tahun 2024, data indeks belum tersedia karena sesuai informasi akan dirilis secara resmi oleh KemenP3A pada bulan November 2025. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan dan program perlindungan anak, sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	Angka	tidak ada data dari KemenP3A	61.62	62.84	66.67	rilis bulan November 2025 dari KemenP3A

2.1.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Pembangunan manusia akan optimal apabila ketimpangan pencapaian antar individu rendah, terutama antargender. Untuk mengetahui ketimpangan gender diperlukan kurang yang representative dan dapat menunjukkan karakteristik ketimpangan, sekaligus memberikan petunjuk untuk solusi penyelesaian. Indeks ketimpangan gender adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal

karena ketimpangan antara laki-laki dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Menggunakan metode yang lebih baik dibandingkan indikator terkait gender sebelumnya serta dapat diaplikasikan setiap tahun di tingkat nasional dan daerah. Semakin kecil nilai Indeks Ketimpangan Gender, semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah data Kota Parepare untuk capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Grafik. 2.22 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Parepare

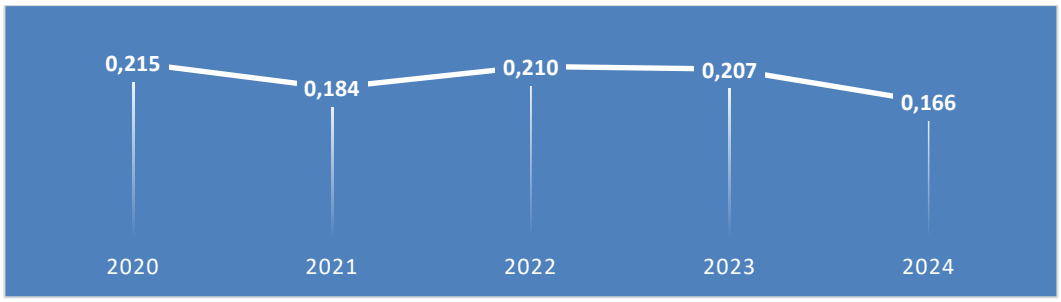

Sumber: sulsel.bps.go.id

Berdasarkan data grafik di atas, dapat diketahui bahwa indeks ketimpangan gender (IKG) di Kota Parepare untuk lima tahun terakhir cednerung mengalami penurunan. Tahun 2010 IKG berada pada angka 0,215 menurun ke 2,10 (2022) – 0,207 (2023) – 0,166 (2024).

2.1.3 ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi dalam suatu daerah. Aspek daya saing ini terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, atau infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia. Kemampuan ekonomi daerah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah itu sendiri untuk mempertahankan dan menarik pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Indikator variabel daerah terdiri dari:

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menggambarkan rasio jumlah penduduk pada penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 dan diatas 64 tahun) seperti anak-anak dan lansia, dengan penduduk usia produktif itu sendiri (15-64 tahun). Angka ketergantungan menggambarkan apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah.

Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Grafik
Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024 (%)

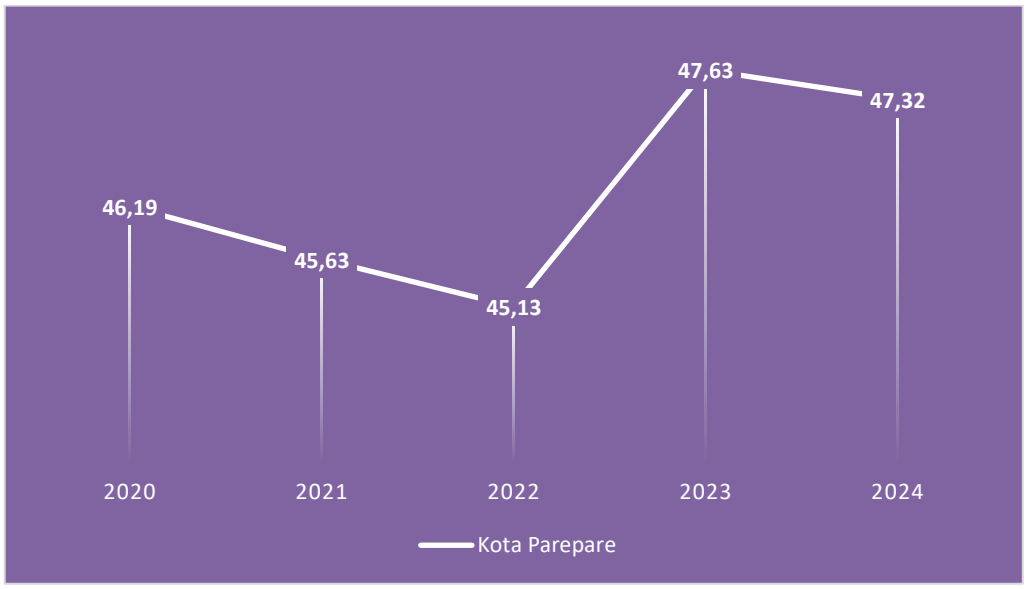

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Angka ketergantungan Kota Parepare menunjukkan peningkatan dari 46,19 pada tahun 2020 menjadi 47,32 pada tahun 2024. Kenaikan angka ketergantungan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia non produktif, dan hal ini dapat menambah tekanan pada ekonomi keluarga karena usia produktif harus mencukupi kebutuhan yang semakin besar dari kelompok non produktif. Peningkatan angka ketergantungan ini mempertegas perlunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan social dan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi peningkatan ketergantungan.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi

b. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB dalam suatu wilayah, dengan menggunakan data dalam harga dasar berlaku (ADHB). Angka ini memberikan gambaran penting mengenai peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, yang mencakup berbagai sub kategori seperti industri makanan dan minuman.

Grafik
Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024 (%)

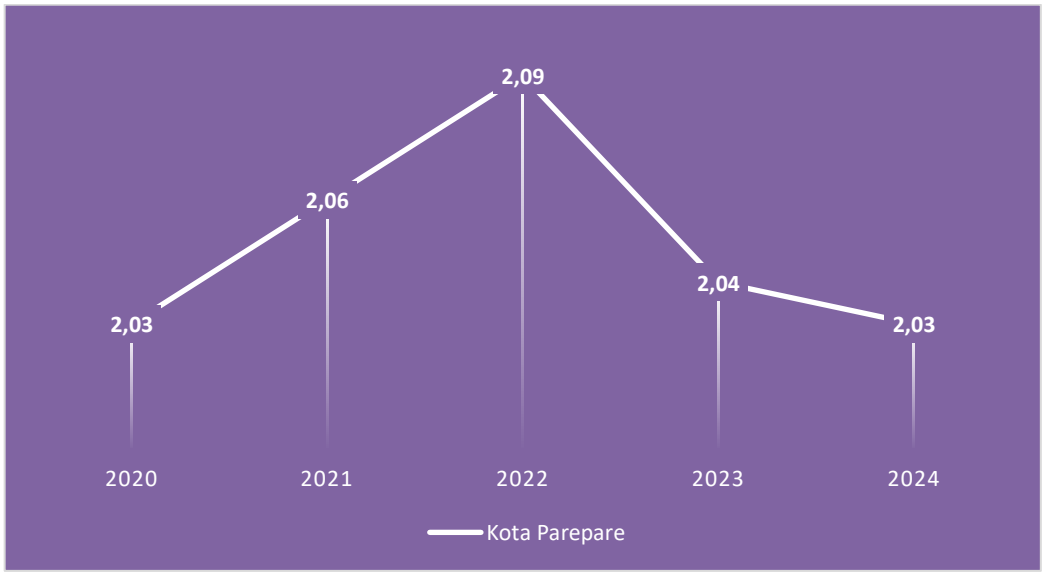

Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap total PDRB, yang meningkat dari 2,03% pada 2020 menjadi 2,09% pada 2022. Peningkatan ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan semakin berperan penting dalam perekonomian daerah, walaupun kontribusinya masih sangat rendah. Namun ditahun 2023 dan 2024 Rasio PDRB Industri Pengolahan turun menjadi 2,03% hal ini menandakan nilai tambah dari produksi barang

semakin menurun dan belum berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

c. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (ADHB) mengukur kontribusi sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total PDRB dengan menggunakan harga dasar berlaku (ADHB). Indikator ini penting untuk menilai peran sektor pariwisata dan layanan makan-minum dalam perekonomian suatu daerah.

Grafik
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Tahun 2020-2024 (%)

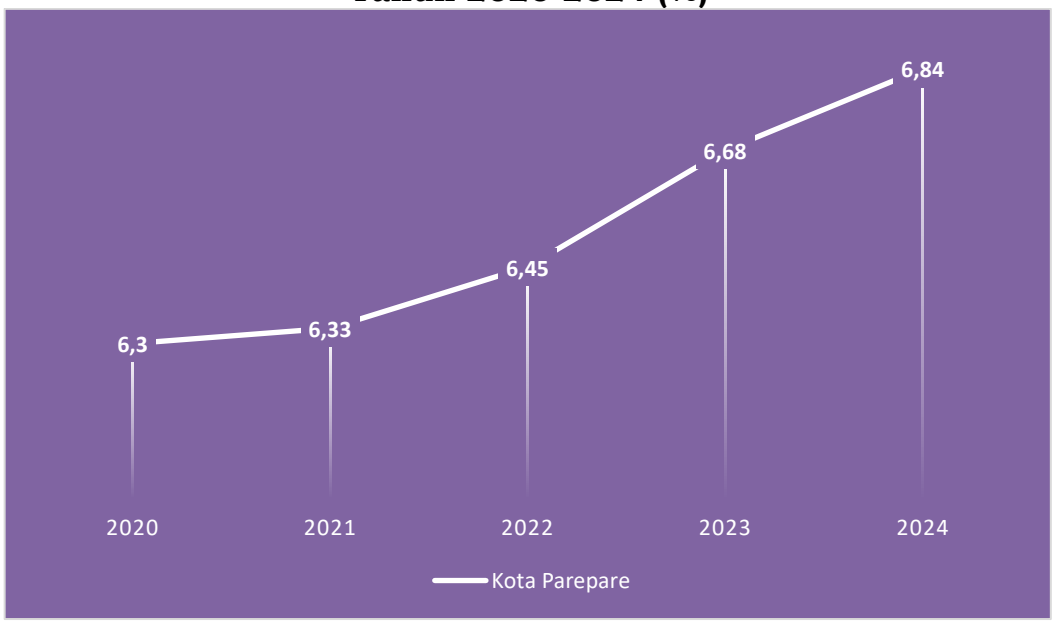

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap total PDRB yang terus meningkat, dari 6,3 pada tahun 2020 hingga mencapai 6,84 pada tahun 2024. PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum di Kota Parepare menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang positif dari 2020 hingga 2024 dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Parepare. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan fasilitas akomodasi. Kontribusi sektor penyedia akomodasi makan dan minum yang terus meningkat menandakan

potensi untuk memperkuat dan mengembangkan kepariwisataan dan pengembangan inovasi pada layanan dan diversifikasi produk pada sektor makan minum.

d. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)

Kota Parepare memiliki potensi pariwisata yang terus berkembang, terutama didukung oleh posisinya sebagai kota pelabuhan strategis dan warisan budaya yang kaya. Sektor pariwisata di kota ini berfokus pada kombinasi antara wisata alam, wisata sejarah, dan atraksi budaya serta berbagai acara dan festival untuk menarik kunjungan ke Kota Parepare.

Grafik
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)
Tahun 2020-2024 (Orang)

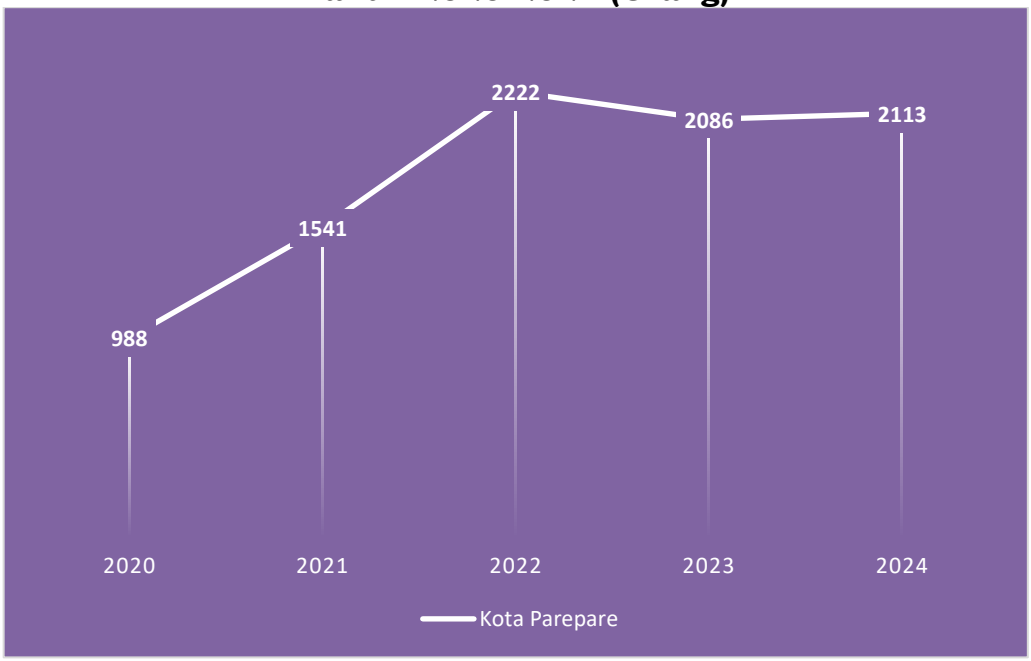

Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Parepare dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan, dan puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 2.222 orang. Peningkatan signifikan ditahun 2022 akibat dibukanya kembali pembatasan sektor pariwisata secara luas dari masa pandemi ke era “normal baru”. Walaupun sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan didorong melalui peningkatan sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kota Parepare memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dengan melakukan pengembangan destinasi wisata fokus pada pengembangan objek wisata alam maupun buatan dan berupaya mengembangkan pariwisata berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh budaya masyarakat Kota Parepare. Pengembangan kepariwisataan juga dilakukan dengan kerjasama dengan Kemenparekraf untuk menginisiasi berbagai event-event kebudayaan maupun event-event modern lainnya.

e. **Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang memanfaatkan ide-ide kreatif, pengetahuan, dan keahlian individu untuk menciptakan nilai tambah melalui produksi dan distribusi barang serta jasa yang unik dan inovatif. Pengembangan ekonomi kreatif menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Parepare aktif mendorong pelaku UMKM kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta membangkitkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan teknologi dan ide kreatif. Pertumbuhan ekonomi kreatif Kota Parepare melibatkan berbagai sektor ekonomi seperti kerajinan tangan/souvenir, kuliner dan fashion dan setian tahunnnya semakin banyak bertumbuh pelaku-pelaku ekonomi kreatif Kota Parepare.

Grafik
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Parepare
Tahun 2021-2024 (unit)

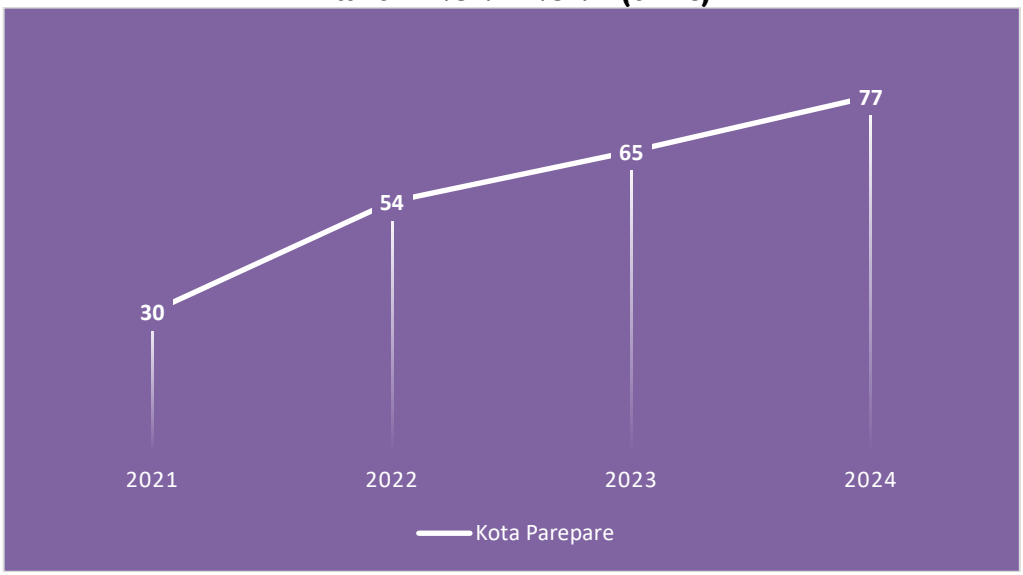

Jumlah pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Parepare. Peningkatan yang stabil dari 30 orang menjadi 77 orang dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif di kota ini terus berkembang pesat. Melalui perangkat daerah terkait berbagai kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif seperti pemanfaatan kawasan-kawasan seperti PareBeach dan Pantai Senggol sebagai pusat kuliner dan tempat eaktivitas ekonomi masyarakat, pelatihan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM, pengembangan sector pariwisata yang secara langsung dapat mendukung ekonomi kreatif terutama terkait produk souvenir/kerajinan, kuliner serta festival dan event yang menjadi tempat promosi bagi produk-produk kreatif.

e. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Jumlah industri kecil dan menengah yang ada di Kota Parepare berada pada proporsi 100 % jika dilihat dari tabel mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa proporsi industri kecil dan menengah di Kota Parepare ini konsisten selama lima tahun terakhir didominasi atau sepenuhnya terdiri dari kategori industri kecil dan menengah. Kestabilan angka pada level 100% menandakan bahwa tidak terjadi perubahan struktur proporsi industri dalam kurun waktu tersebut. Dengan kata lain, tidak terdapat kontribusi dari industri besar dalam komposisi total industri di Parepare, sehingga industri kecil dan menengah tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Tabel. … Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah, 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	100	100	100	100	100

f. *Return on Assets* (ROA) BUMD

Return of Assets (RoA) merupakan indikator kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa efisien asset yang dikelola digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Perkembangan nilai RoA pada menunjukkan fluktuasi yang naik turun. Untuk tahun 2020 RoA berada pada nilai yang negatif yakni -4,25 yang menandakan kondisi di tahun ini cukup rendah. Begitupula di tahun 2021 nilai RoA semakin menurun mencapai -5,16 yang menunjukkan adanya penurunan yang lebih lanjut dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pada dua tahun ini Parepare mengalami tekanan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi, di tahun 2022 terjadi perubahan signifikan dimana Gambar melonjak ke arah positif dan mencapai 2,19 hal ini terjadi karena Parepare berada dalam pemulihan ekonomi akibat kondisi pandemi Covid-19

yang sudah terkendali. Sehingga bisa dilihat tahun ini menjadi titik balik karena berhasil keluar dari zona negatif menjadi positif. Sementara untuk tahun 2023 Gambar berada pada nilai 0,7 yang mana hal ini mengindikasikan masih adanya pertumbuhan tetapi lebih kecil. Namun, pada tahun 2024 Gambar kembali berada di nilai negatif yang cukup ekstrim yaitu -7,09 yang menjadikan tahun 2024 sebagai nilai RoA terendah sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Tabel. … Return on Assets (PAM Tirta Karajae), 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Return on Assets (PAM Tirta Karajae)	Persen	-4,25	-5,16	2,19	0,70	-7,09

Grafik
***Return on Assets* (ROA) BUMD**

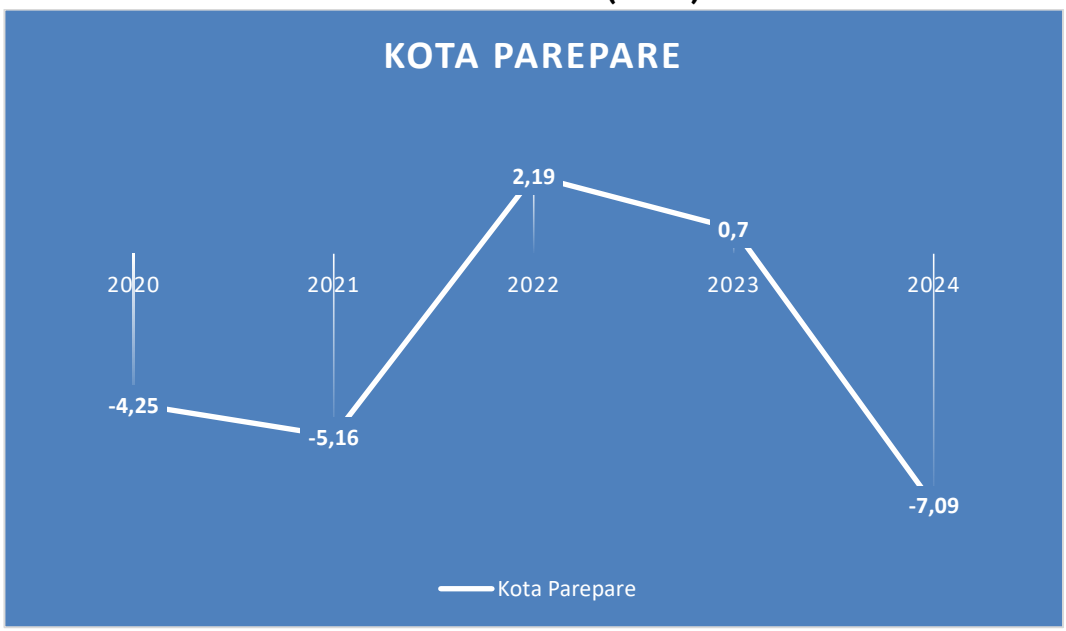

g. Nilai Tukar Petani Pangan

Nilai Tukar Petani Pangan

(NTPP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai Tukar Petani Pangan ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima

petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Nilai tukar juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Melalui Nilai Tukar Petani diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya.

Dengan kata lain, NTPP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi. NTPP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. NTPP > 100, berarti indeks harga yang diterima lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani.

Grafik. 2.1 Nilai Tukar Petani Pangan Kota Parepare

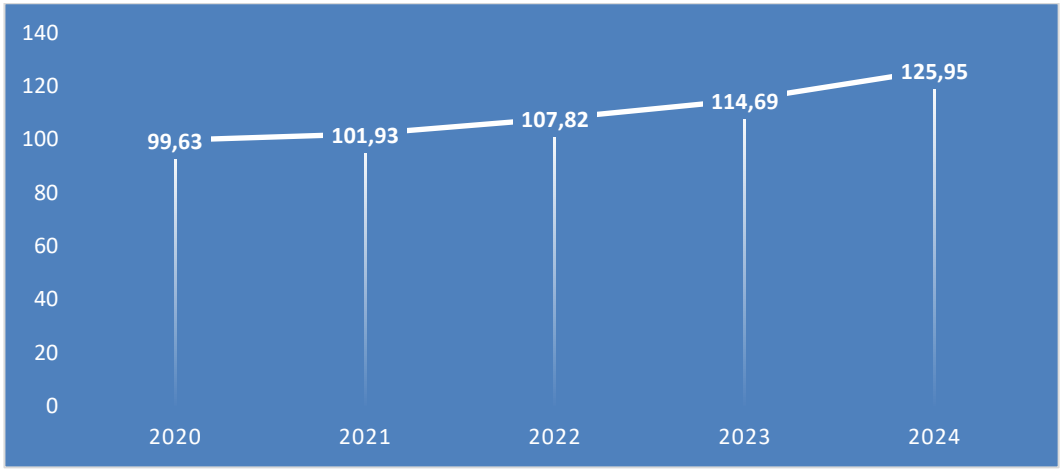

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Nilai tukar petani pangan Kota Parepare di tahun 2020 megalami penurunan dan dibawah 100, yang menggambarkan bahwa pendapatan petani lebih kecil dari pengeluaran mereka, penurunan ini akibat dampak pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021, 2022 dan 2023 nilai NTN Kota Parepare lebih dari 100, hal menunjukkan bahwa petani mengalami surplus, dimana harga produksi yang diterima petani naik lebih besar dibandingkan

dengan kenaikan harga barang konsumsi yang mereka bayar. Ini berarti pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran mereka.

h. NIlai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator ekonomi yang penting untuk menilai kesejahteraan nelayan di suatu daerah, termasuk di Kota Parepare. NTN mencerminkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dari hasil tangkapan mereka dengan indeks harga yang dibayar oleh mereka untuk barang dan jasa yang dibutuhkan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir, NTN Kota Parepare mengalami peningkatan walaupun peningkatannya melambat. Ditahun 2020 NTN Kota Parepare mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid-19 dengan nilai dibawah 100, yang berarti pendapatan nelayan lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran mereka, namun pada tahun 2021 hingga 2024 nilai NTP Kota Parepare lebih dari 100 hal mengindikasikan bahwa pendapatan nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran mereka, yang menunjukkan kondisi ekonomi yang baik. Dan Pemerintah Kota Parepare terus melakukan pendampingan kepada para nelayan melalu peningkatan usaha hasil perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan.

Grafik. 2.2 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kota Parepare

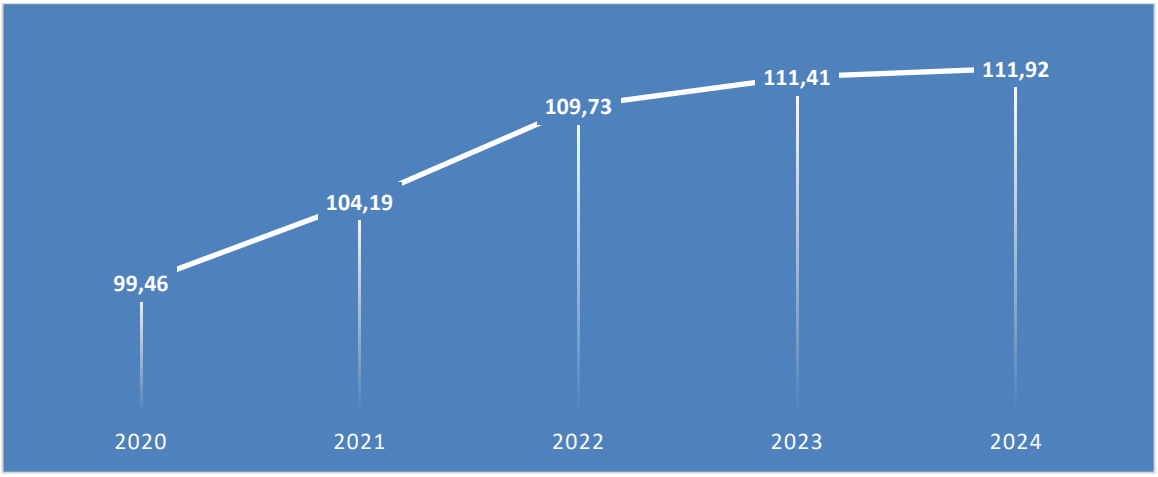

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik. 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

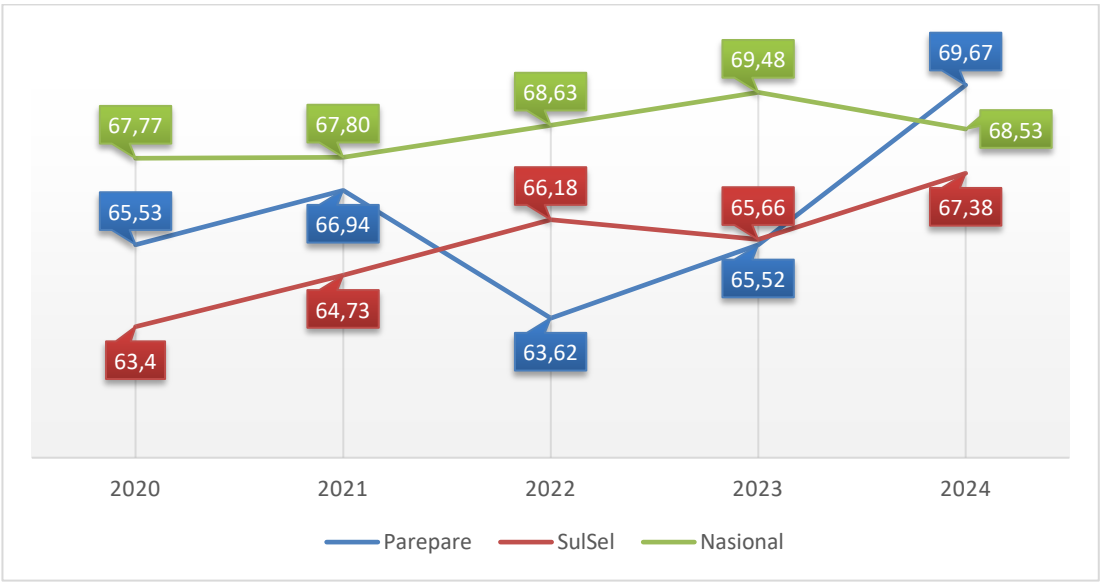

Sumber : BPS Kota Parepare, BPS Sulawesi Selatan

TPAK Kota Parepare jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sul-sel dan Nasional dalam akhir periode lima tahun terakhir menunjukkan bahwa angka TPAK Kota Parepare berada di atas angka TPAK Provinsi Sul-sel dan TPAK Nasional.

j. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK meunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja, baik yang mendapatkan pekerjaan maupun yang belum bekerja. Hingga tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berfluktuatif dan bila dilihat dari angka presentasi maka menggambarkan bahwa dari 100 penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 50 orang yang termasuk angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Parepare masih jauh lebih rendah bila dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 80 persen. Melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, selama lima tahun terakhir, angka TPAK perempuan di Kota Parepare masih terus berada di bawah TPAK laki-laki. Tahun 2020 TPAK laki-laki sebesar 79,99 dan TPAK perempuan 51,79. Selanjutnya pada tahun 2021 TPAK laki-laki sebesar 80,16 dan TPAK perempuan 54,37. Selanjutnya pada tahun 2022 TPAK laki-laki sebesar 77,80 dan TPAK perempuan 50,12. Hasil tahun 2023 menunjukkan TPAK lakilaki sebesar 80,09 dan TPAK perempuan 51,44. Perkembangan TPAK perempuan disajikan pada gambar berikut:

Grafik. 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

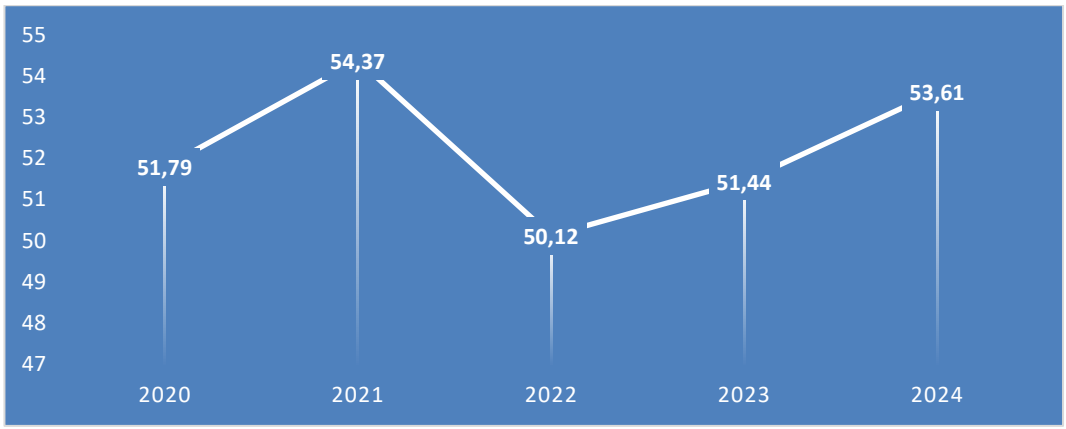

Sumber : BPS Kota Parepare, Tahun 2024

k. Indeks Kapabilitas Inovasi

Berdasarkan grafik, *Indeks Kapabilitas Inovasi* di Kota Parepare menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Di tahun 2022 nilai indeks kapabilitas inovasi sebesar 2,20. Angka ini mencerminkan bahwa kapasitas inovasi di Parepare masih berada pada tahap awal penguatan. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup berarti, di mana nilai indeks naik menjadi 2,89**.** Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam kemampuan daerah untuk menciptakan, mengadopsi, serta mengembangkan inovasi, baik pada sektor pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 2,88. Meskipun penurunan ini relatif kecil dan tidak terlalu signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa laju peningkatan kapabilitas inovasi mulai mengalami perlambatan.

Grafik
Indeks Kapabilitas Inovasi

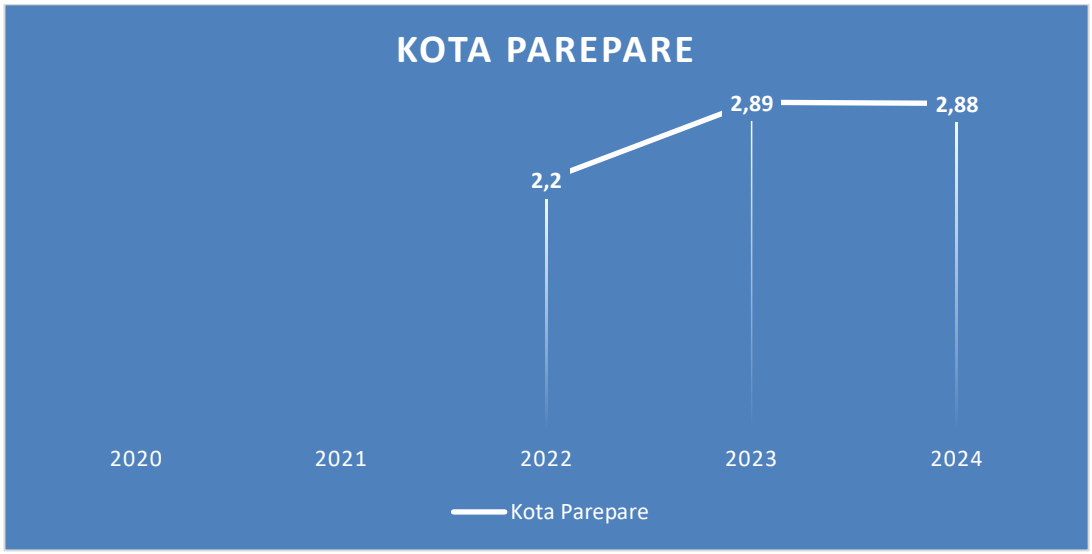

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Dilihat dari grafik, perkembangan Indeks Ekonomi Hijau di Kota Parepare selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020**,** nilai indeks tercatat sebesar 21,78, yang merupakan capaian awal dengan kategori masih rendah. Angka ini menggambarkan bahwa pada periode tersebut, penerapan prinsip ekonomi hijau di Parepare masih berada pada tahap awal.

Di tahun 2021, nilai indeks mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 44,39**.** Lonjakan ini hampir dua kali lipat dari capaian tahun sebelumnya, menandakan adanya kemajuan dalam penerapan praktik ramah lingkungan. Untuk tahun 2022, capaian indeks relatif stabil dengan sedikit penurunan, yakni menjadi 44,76**.** Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun tren positif tetap terjaga, peningkatannya tidak terlalu besar. Tahun 2023 menunjukkan pencapaian tertinggi sepanjang periode pengamatan, dengan nilai indeks mencapai 67,21**.**

Lonjakan ini mengindikasikan adanya penguatan nyata dalam implementasi kebijakan hijau. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai indeks menurun menjadi 50,1**.** Penurunan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021–2022, tren ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip ekonomi hijau.

Grafik
Indeks Ekonomi Hijau

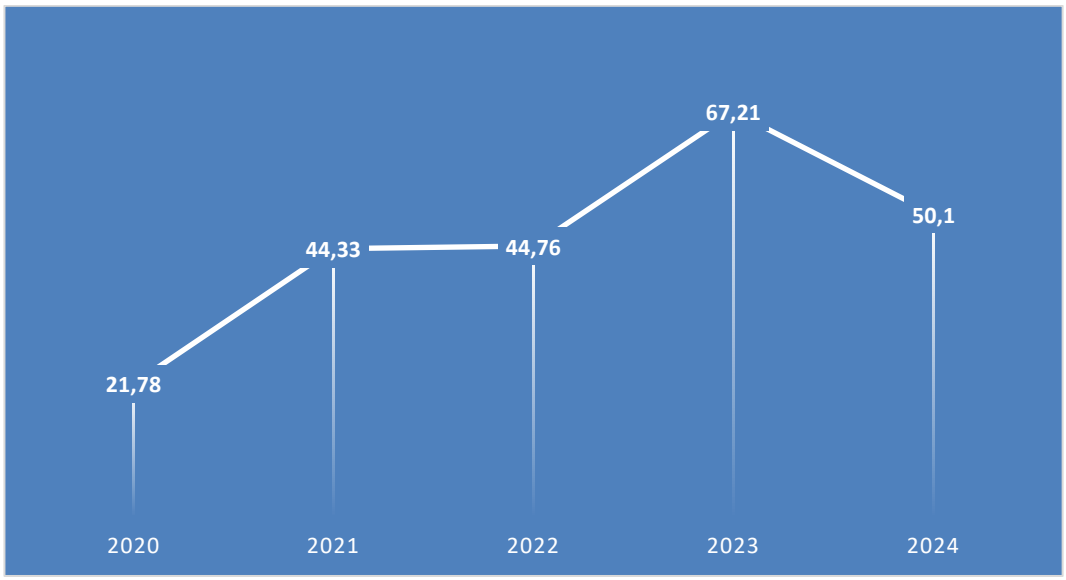

2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Kota Parepare dua tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023**,** nilai indeks tercatat sebesar 62,75**.** Angka ini menunjukkan capaian awal yang cukup baik, menandakan bahwa Parepare telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi biru ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Sementara tahun 2024 nilai indeks meningkat tajam menjadi 71,30**.**

Kenaikan ini menggambarkan adanya perbaikan yang nyata dalam penerapan konsep ekonomi biru, baik melalui peningkatan tata kelola sumber daya laut, penguatan industri perikanan yang ramah lingkungan, maupun pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pesisir dan kelautan secara berkelanjutan.

Grafik
Indeks Ekonomi Biru

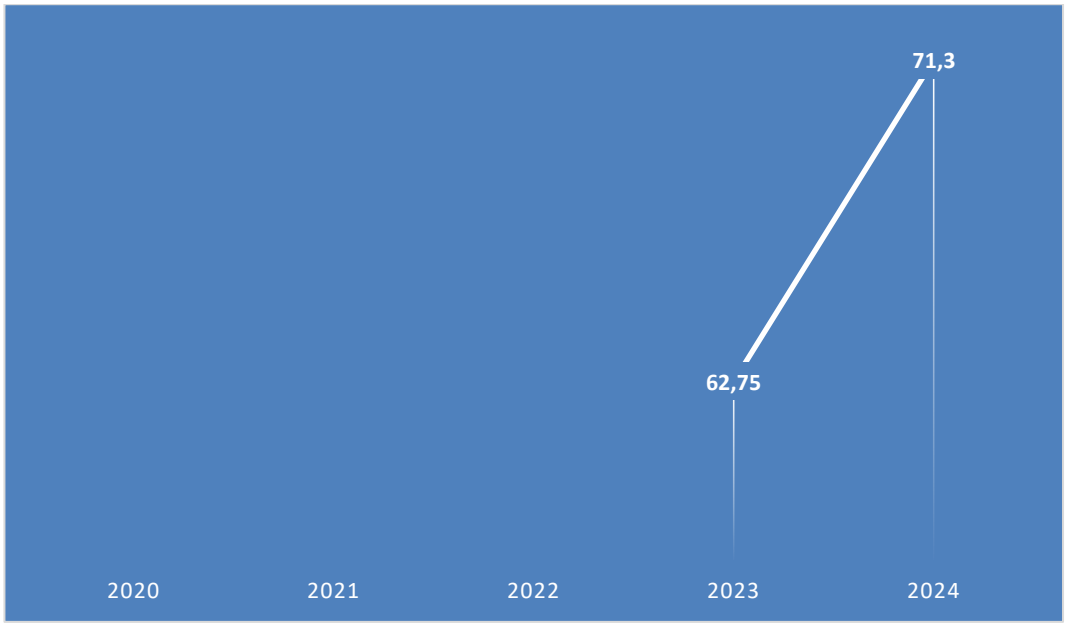

2.1.3.4 Transformasi Digital

2.1.3.4.1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Secara keseluruhan, perkembangan persentase layanan publik online dan terintegrasi di Parepare memperlihatkan arah positif, meskipun sempat mengalami stagnasi pada tahun 2022–2023 yakni 17,65. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2024 yang mana berada di angka 20,49 merupakan indikasi bahwa pemerintah daerah mulai berhasil mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik.

Grafik Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

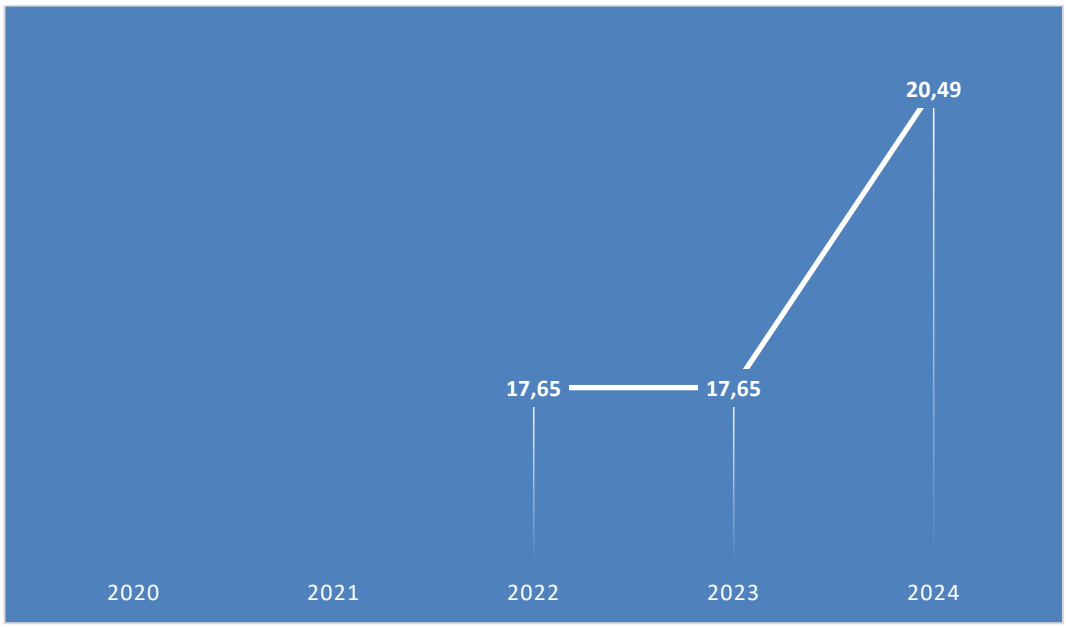

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Berdasarkan grafik perkembangan persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kota Parepare menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentase koefisien variasi harga tercatat sebesar 0,24**.** Angka ini relatif tinggi yang menandakan bahwa pada periode tersebut fluktuasi harga barang kebutuhan pokok cukup besar di Kota Parepare. Sementara pada tahun 2023 dan tahun 2024, nilai koefisien variasi turun signifikan menjadi 0,11**.** Penurunan hampir setengah dari nilai sebelumnya ini menunjukkan adanya perbaikan dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

Grafik Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

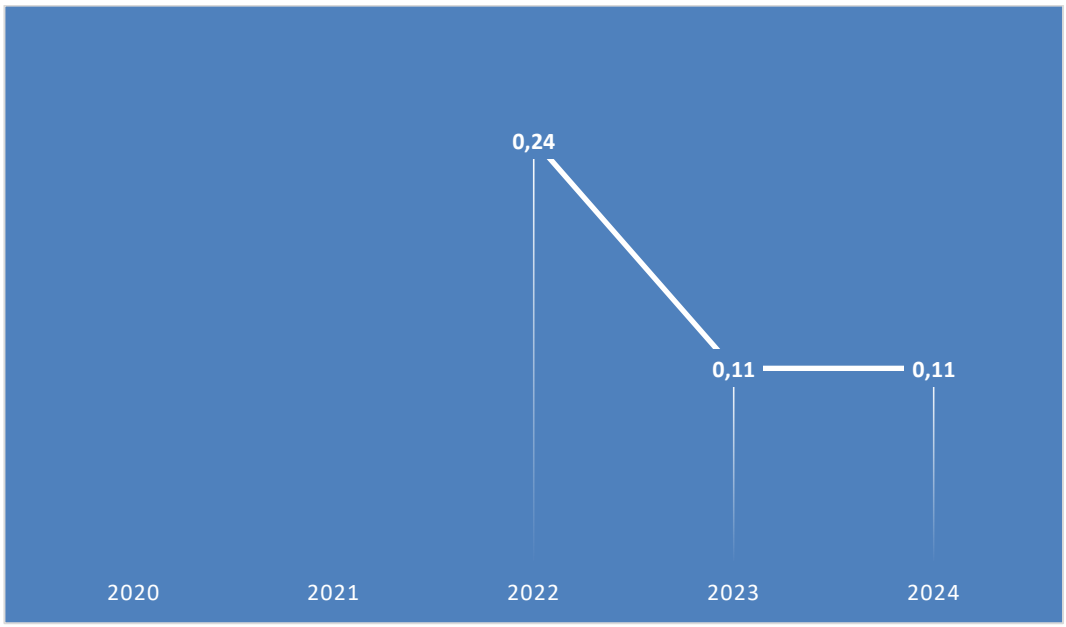

2.1.3.5.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar 41,92. Angka ini kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 41,63, yang menunjukkan adanya pelemahan kecil dalam investasi pada aset tetap. Kondisi penurunan semakin signifikan terjadi pada tahun 2022**,** di mana nilai PMTB turun hingga mencapai 39,66. Hal ini dapat diartikan bahwa pada periode tersebut, aktivitas investasi di Kota Parepare menghadapi tantangan besar. Namun, pada tahun 2023 nilai PMTB kembali menunjukkan peningkatan menjadi 40,05**.** Pemulihan ini menandakan adanya upaya pemerintah Kota Parepare dalam mendorong kembali aktivitas investasi, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun penguatan sektor-sektor produktif. Tren positif berlanjut pada tahun 2024, dengan nilai PMTB meningkat menjadi 40,78. Peningkatan ini sekaligus mengindikasikan adanya pertumbuhan investasi dari Kota Parepare

Grafik Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

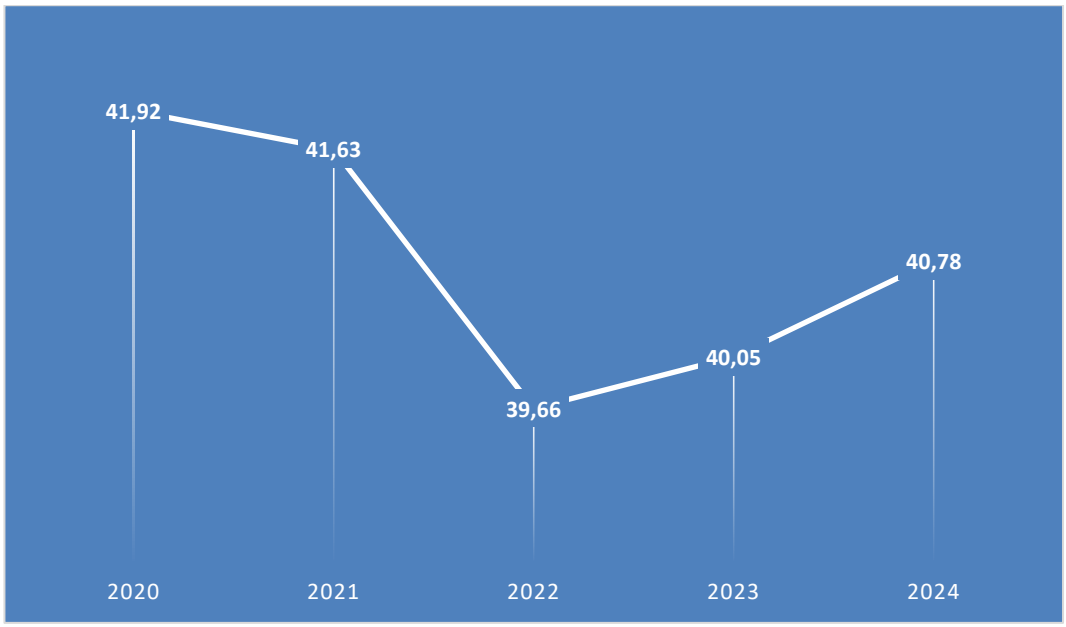

2.1.3.5.3 Net Ekspor Barang dan Jasa

Pada tahun 2020, nilai net ekspor Kota Parepare tercatat sebesar 759,98, yang menunjukkan kondisi surplus cukup besar. Angka ini menandakan bahwa ekspor barang dan jasa Kota Parepare jauh lebih tinggi dibandingkan dengan impor pada tahun tersebut. Namun, memasuki tahun 2021 terjadi perubahan drastis dengan nilai net ekspor turun tajam menjadi -750,7, yang berarti Kota Parepare mengalami defisit perdagangan yang cukup signifikan. Sementara pada tahun 2022, nilai net ekspor sedikit membaik dengan defisit yang berkurang menjadi -609.

Meskipun masih dalam kondisi negatif, perbaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekspor atau penurunan impor dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2023, Kota Parepare kembali mengalami kondisi defisit yang lebih dalam, mencapai -795,46**,** menjadikannya defisit tertinggi selama periode pengamatan. Selanjutnya, pada tahun 2024, meskipun kondisi masih dalam posisi defisit, nilainya sedikit membaik menjadi -754,76, yang menunjukkan adanya sedikit pemulihan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Grafik Net Ekspor Barang dan Jasa

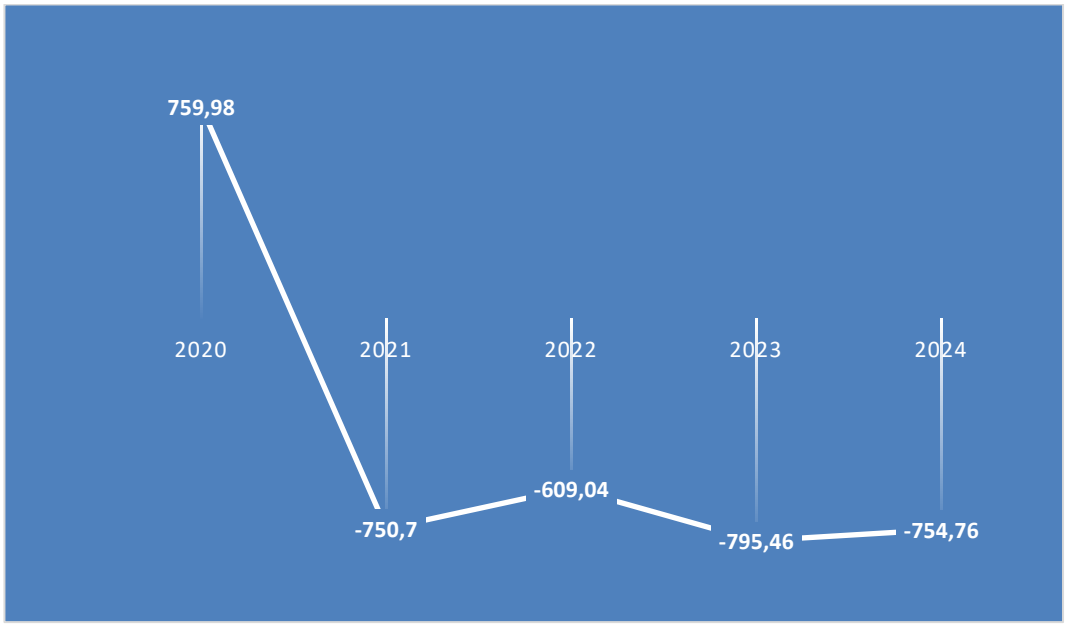

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1. Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi

Dari grafik dapat digambarkan secara umum jika tren yang ditunjukkan cenderung relatif stabil yang mengindikasikan bahwa skala ekonomi kota Parepare berperan tetap namun tidak mengalami peningkatan signifikan terhadap total PDRB provinsi dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, kontribusi Kota Parepare tercatat sebesar 1,45%, yang menjadi nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan. Tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi penurunan proporsi kontribusi menjadi 1,43%, dan angka ini bertahan pada level yang sama pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya perlambatan relatif pertumbuhan ekonomi Parepare dibandingkan dengan provinsi secara keseluruhan. Selanjutnya, pada tahun 2023, proporsi kontribusi Kota Parepare kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 1,42%, yang menjadi titik terendah dalam rentang lima tahun tersebut. Penurunan ini menunjukkan semakin kecilnya peranan ekonomi Parepare terhadap pembentukan total PDRB provinsi. Namun demikian, pada tahun 2024 kontribusi tersebut kembali meningkat ke angka 1,43%, meskipun belum mampu menyamai capaian pada tahun 2020.

Grafik Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi

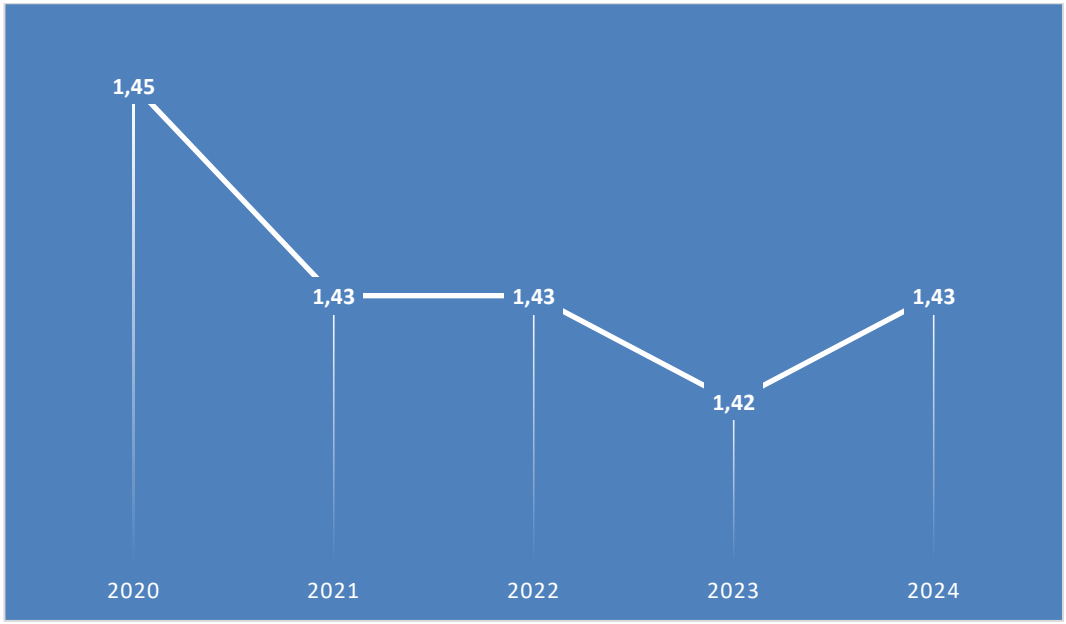

2.1.3.6.2. Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Pada tahun 2024, data yang tercatat menunjukkan bahwa 82,49 persen rumah tangga di Kota Parepare telah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan**.** Angka ini menggambarkan capaian yang cukup baik, karena mayoritas rumah tangga sudah mampu menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi fisik bangunan, keterjangkauan biaya, maupun keberlanjutan lingkungan.

2.1.3.6.3. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur merupakan indeks menjadi indikator yang mencerminkan seberapa baik layanan infrastruktur dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pada tahun 2022, nilai indeks Kota Parepare sebesar 1,93. Angka ini menjadi awal yang relatif rendah, yang menunjukkan masih terbatasnya kualitas maupun cakupan layanan infrastruktur pada tahun ini. Selanjutnya, di tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan di mana nilai indeks Kota Parepare naik menjadi 2,49. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup pesat, baik dari segi pembangunan fisik maupun peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang tersedia bagi masyarakat khususnya di Kota Parepare. Pada tahun 2024, tren peningkatan kembali berlanjut dengan indeks mencapai 2,85**.** Nilai ini menunjukkan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, yang menandakan bahwa layanan infrastruktur di Kota Parepare semakin baik, lebih merata, dan mampu mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat dengan lebih optimal.

Grafik Indeks Layanan Infrastruktur

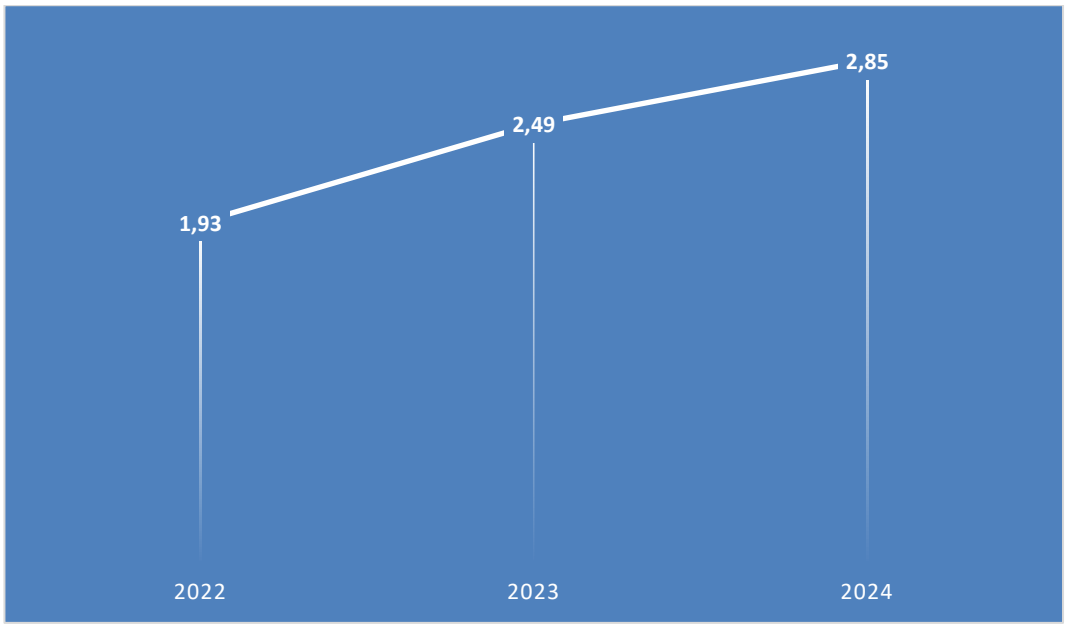

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

2.1.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB ini merupakan gambaran besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan total PDRB suatu wilayah khususnya di kota Parepare. Sehingga jika dilihat melalui grafik, secara umum menunjukkan adanya tren Kota Parepare berhasil meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB tercatat sebesar 0,66.

Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,70**,** yang menunjukkan adanya penguatan kontribusi pajak daerah di kota Parepare meskipun masih dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio kembali naik sedikit menjadi 0,71**,** menandakan stabilitas pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang relatif konsisten dengan perkembangan PDRB. Pada tahun 2023, rasio mengalami peningkatan lebih signifikan mencapai 0,75**.** Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak semakin baik, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan, yaitu 0,85.

Grafik Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

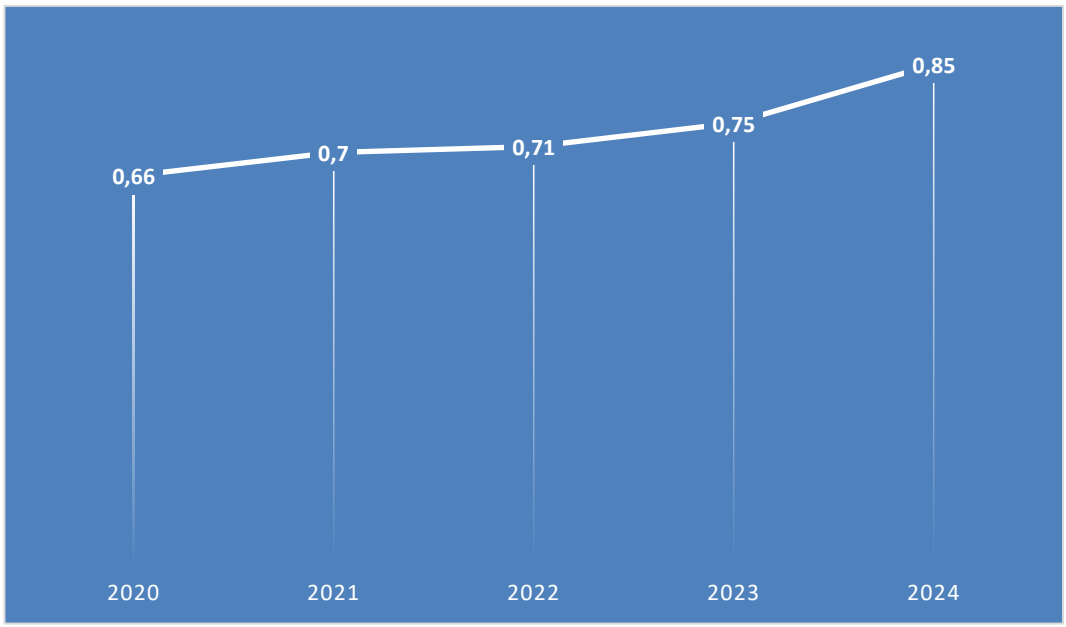

2.1.3.7.3. Tingkat Inflasi

Secara umum grafik menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam, dengan kecenderungan meningkat pesat pada awal periode kemudian menurun drastis di tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat pada tahun 2020, tingkat inflasi di Kota Parepare tercatat sebesar 1,61%**,** yang menandakan kondisi inflasi relatif terkendali. Memasuki tahun 2021, inflasi mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 4,09%**,** yang menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup kuat. Hal ini dipicu oleh pemulihan permintaan pasca pandemi Covid-19 yang tidak diimbangi pasokan. Kenaikan inflasi berlanjut dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan angka 6,66%**.** Angka ini merupakan titik tertinggi dalam periode lima tahun, menandakan terjadinya tekanan harga yang kuat dan diperkuat oleh gangguan distribusi serta tingginya permintaan masyarakat**.** Namun pada tahun 2023, inflasi turun secara drastis menjadi 2,22%**,** dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan nilai 2,21%**.** Penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam pengendalian inflasi telah berjalan efektif sehingga inflasi kembali terkendali pada level yang lebih baik.

Grafik
Tingkat Inflasi

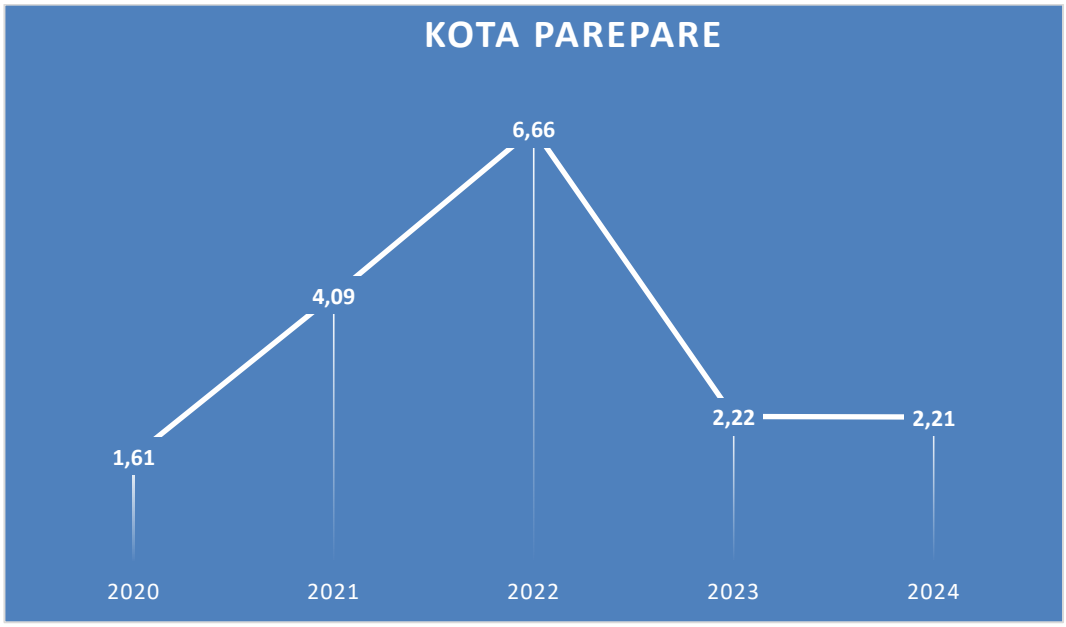

2.1.3.7.4. Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Persentase peningkatan investasi daerah merupakan tingkat pertumbuhan investasi yang masuk dan direalisasikan di Kota Parepare, sehingga bisa dilihat dalam grafik pada tahun 2021, persentase peningkatan investasi daerah tercatat sebesar 0,89%**.** Angka ini relatif rendah, menandakan bahwa realisasi investasi masih terbatas yang mana hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelaku usaha menahan ekspansi. Pada tahun 2022, angka ini bahkan sedikit menurun menjadi 0,74%**,** yang mengindikasikan masih adanya kehati-hatian investor dalam menanamkan modalnya, baik karena faktor ketidakpastian global maupun kondisi perekonomian domestik yang belum sepenuhnya pulih.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2023, di mana persentase peningkatan investasi melonjak drastis hingga mencapai 11,92%**.** Lonjakan signifikan ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Parepare mulai membaik. Pada tahun 2024, tren positif tersebut berlanjut dengan peningkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 15,08%**.** Angka ini merupakan pencapaian tertinggi dalam periode pengamatan, yang memperlihatkan bahwa Kota Parepare berhasil menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kota Parepare.

Grafik Persentase Peningkatan Investasi Daerah

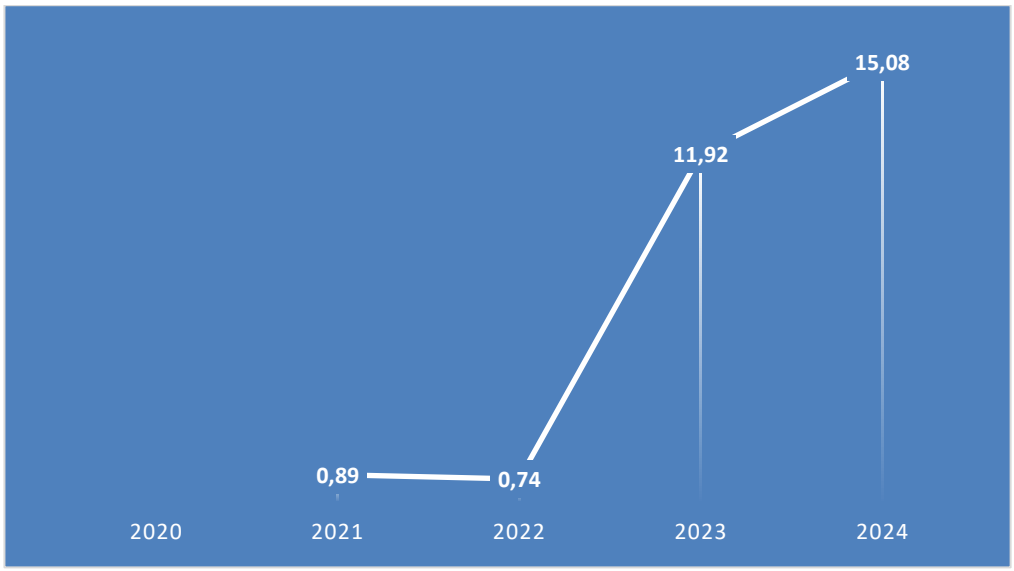

2.1.3.7.5. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Parepare ini menggambarkan sejauh mana efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pada tahun 2021, nilai IPKD Kota Parepare berada pada angka 65,04 yang menunjukkan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang relatif baik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana indeks turun menjadi 57,93**.** Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan daerah pada tahun tersebut. Sementara di tahun 2023, nilai IPKD menunjukkan perbaikan dengan meningkat menjadi 59,76. Kenaikan ini menandakan adanya upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, baik melalui peningkatan pengendalian internal, pemantapan mekanisme pelaporan, maupun optimalisasi belanja daerah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana nilai IPKD kembali naik menjadi 61,59**.** Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Parepare semakin mampu memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya.

Grafik Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

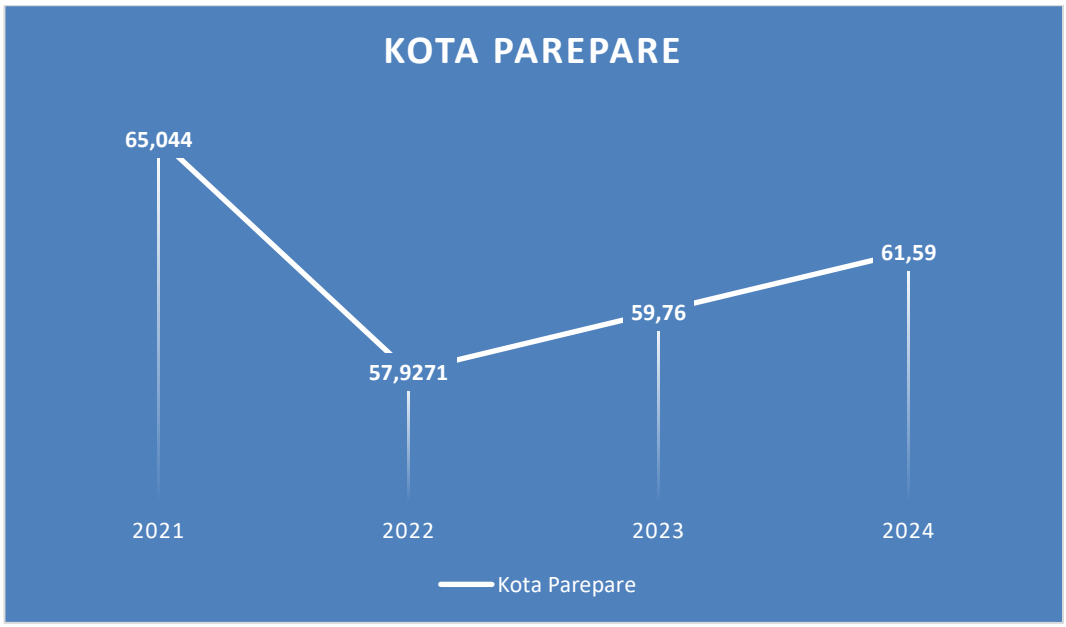

2.1.3.8 Ketanggungan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti

Jika dilihat dari grafik, tidak adanya penurunan maupun lonjakan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem diplomasi dan pertahanan kawasan telah memiliki fondasi yang kuat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Kota Parepare memiliki ketahanan yang stabil terhadap potensi ancaman eksternal maupun internal**,** serta mampu menjaga keberlanjutan stabilitas wilayah. Kestabilan nilai indeks ini menandakan bahwa kemampuan Kota Parepare dalam menjaga ketangguhan diplomasi dan pertahanan kawasan berada dalam kondisi yang sangat baik dan berdaya gentar optimal**.**

Grafik Ketanggungan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

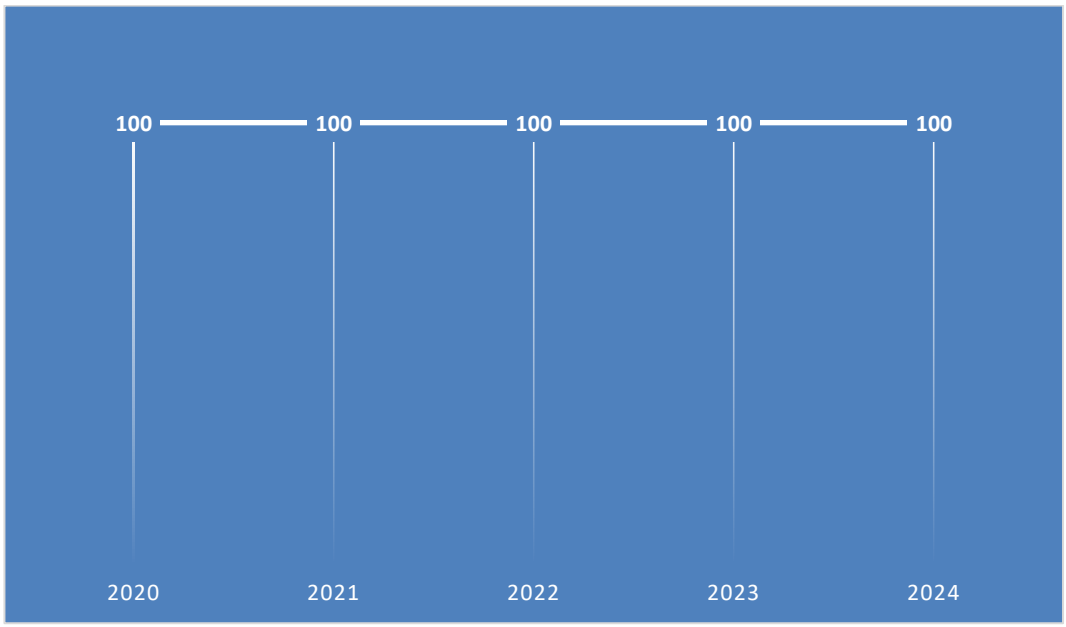

b. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah di Kota Parepare dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif dan progresif**,** yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi, sosial, dan pembangunan. Dakam grafik dapat dilihat bahwa tren peningkatan yang konsisten dan berkesinambungan, mencerminkan adanya perbaikan dalam kapasitas pembangunan daerah, daya tarik investasi, serta kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Parepare. Untuk tahun 2022 nilai indeks tercatat sebesar 3,54**.**

Angka ini menjadi dasar awal pengukuran daya saing daerah. Nilai tersebut menggambarkan bahwa Kota Parepare memiliki daya saing yang cukup baik. Di tahun 2023 indeks mengalami peningkatan menjadi 3,71, menandakan adanya kemajuan pada berbagai indikator penyusun daya saing. Dan di tahun 2023 Indeks Daya Saing Daerah kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 4,09. Pergerakan grafik yang terus naik mengindikasikan adanya konsistensi dalam upaya pembangunan berkelanjutan

Grafik Indeks Daya Saing Daerah

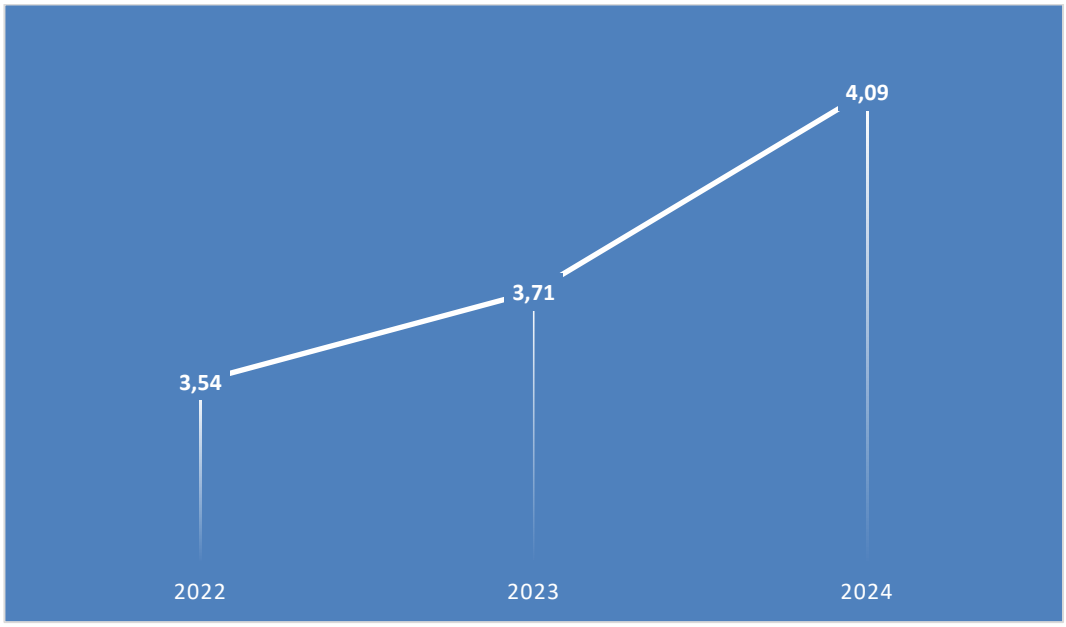

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan terkait dengan pencapaian indikator tata kelola pemerintah dan layanan urusan pemerintah wajib, baik dasar maupun non dasar, serta layanan urusan pilihan dan layanan urusan penunjang, meliputi:

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yanag Berintegrasi dan Adaptif

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastic untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yagn berkulitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022. Indeks Reformasi Hukum (IKH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional. Tujuan penilaian IKH untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel dan meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah.

Grafik. 2.1 Indeks Reformasi Hukum Kota Parepare

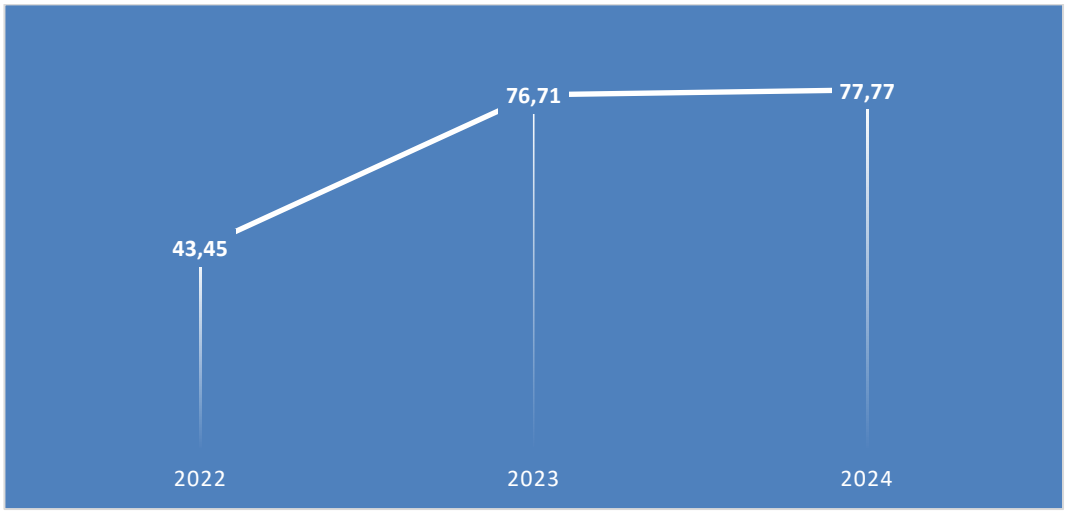

Pada Tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan perhitungan. Tahun 2022 Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mulai melakukan penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Parepare. IRH Kota Parepare Tahun 2022 adalah 43,45 dengan kategori C (Buruk), dari 4 variabel yang diukur yaitu Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan nilai 3,5 dengan bobot max 25, Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dengan nilai 7,9 dengan bobot max 25, Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dengan nilai 20,8 dengan bobot max 35, dan Penataan Database Peraturan Perundangundangan dengan nilai 11,25 dengan bobot max 15.

Ditahun 2023 nilai IKH Kota Parepare semakin membaik 76,71 dengan kategori BB (Baik) dan 77,77 dengan kategori BB (Baik) di tahun 2024, hal ini dipengaruhi oleh pencapaian variabel maksimal pada Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas namun masih rendah pada Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Capaian Indikator SPBE Kota Parepare di.

Grafik. 2.2 Indeks SPBE Kota Parepare

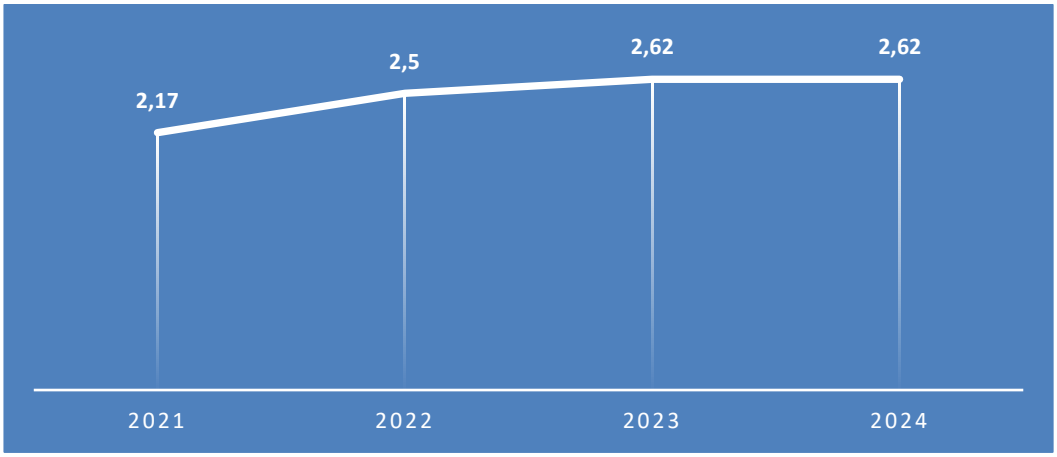

Sumber : Dinas Kominfo Kota Parepare

Pada tahun 2020, penilaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya situasi pandemi COVID-19 yang terjadi pada periode tersebut. Capaian Indikator SPBE Kota Parepare di Tahun 2021 menjadi 2,17. Tahun 2022 adalah 2,50. Tahun 2023 adalah 2,62 dan menjadi 2,73 di tahun 2024.

2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. IPP mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, pelaksanaan inovasi pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, dan konsultasi dan pengaduan. Indeks pelayanan publik Kota Parepare hingga tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai 3,11 dengan kategori (B-).

Tabel. 2.1 Indeks Pelayanan Publik Kota Parepare

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	%	(A-) 4,25	(A-) 4,50	(A-) 4,46	(B-) 3,02	(B-) 3,11

2.1.4.1.4. Indeks Survey Penilaian Integritas

Indeks Survei Penilaian Integritas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat penerapan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan birokrasi. Berdasarkan data capaian tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, indeks integritas tercatat sebesar 75,52 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 73,53 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 indeks kembali mengalami perbaikan dengan capaian 74,90 persen, namun pada tahun 2024 justru menurun signifikan menjadi 72,44 persen yang masuk ke dalam kategori Zona Merah/Rentan.

Tabel. 2.2 Indeks Survey Penilaian Integritas

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Survey Penilaian Integritas	%		75,52	73,53	74,90	72,44

Perkembangan capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan integritas birokrasi, hasilnya belum konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan yang terjadi terutama pada tahun 2024 menjadi catatan penting bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan penerapan nilai integritas di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan pengawasan, serta penanaman budaya integritas di seluruh lini aparatur. Dengan demikian, diharapkan capaian Indeks Survei Penilaian Integritas dapat meningkat secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya dan mampu memperkuat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.1.4.1.5. Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK

Center for Prevention (MCP) merupakan indikator penilaian sebagi upaya mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah. Penilaian MCP bertujuan untuk memetakan titik rawan korupsi disetiap daerah dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan pengawasannya agar korupsi dapat terhindarkan.

Nilai MCP Kota Parepare hingga Tahun 2022 terus mengalami peningkatan, dimana hasil MCP menunjukkan nilai 23,29 point ditahun 2022 dengan nilai 87,35 namun ditahun 2023 nilai menurun 15,86 point menjadi 71,49 yang menjadi capaian terendah selama lima tahun terakhir. Meski demikian, pada tahun 2024 nilai MCP kembali mengalami peningkatan cukup signifikan dengan capaian 87,18 yang masuk ke dalam Zona hijau/Terjaga, mendekati angka tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2022.

Grafik. 2.3 Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK

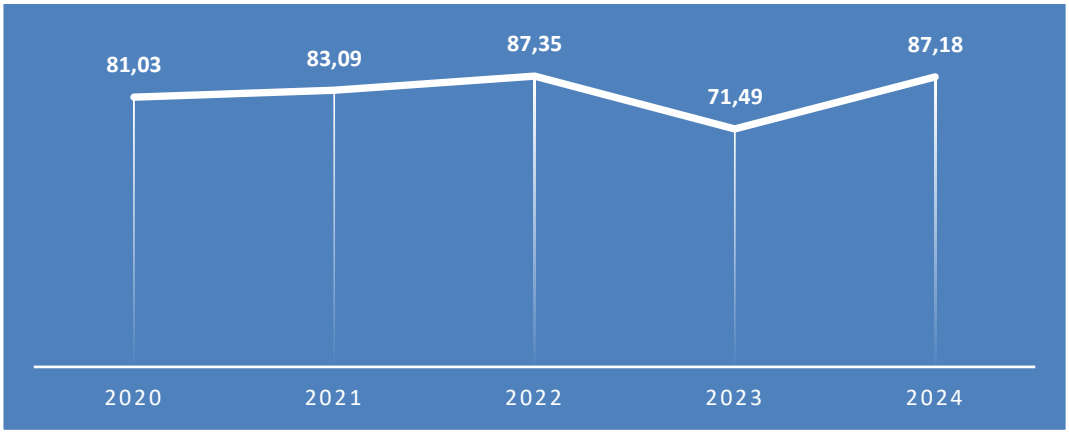

Sumber : Inspektorat Kota Parepare

Perkembangan ini mencerminkan bahwa implementasi program pencegahan korupsi melalui MCP telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan pada tahun 2023 yang menyebabkan penurunan capaian. Kenaikan kembali pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan, evaluasi, dan penguatan komitmen dalam pelaksanaan langkah-langkah pencegahan

korupsi di daerah. Secara keseluruhan, tren capaian nilai MCP mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung upaya KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

2.1.4.1.6. Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan SPIP, digunakan pengukuran menggunakan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP yang diukur dengan nilai indeks. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Grafik. 2.4 Indeks Maturitas SPIP Kota Parepare

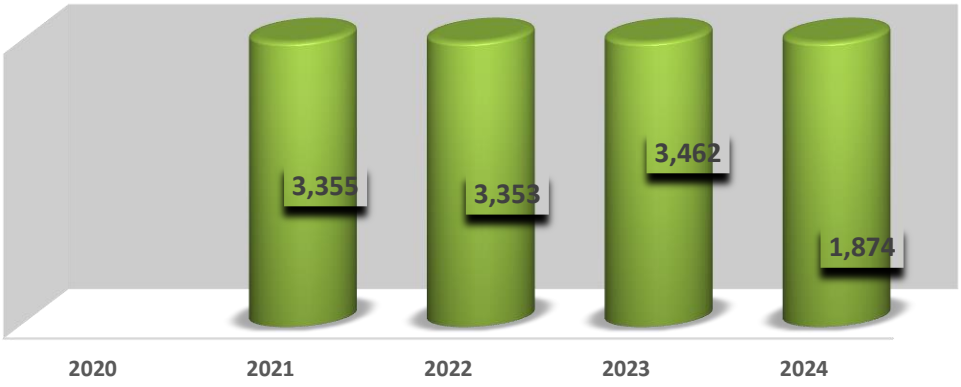

Sumber : Inspektorat Kota Parepare

Tingkat maturnitas SPIP Kota Parepare pada tahun 2020 tidak lakukan penilaian karena adanya covid, dan mulai tahun 2021 indeks maturitas SPIP Kota Parepare mencapai Level 3 dengan nilai 3,355, begitu pun ditahun 2022 dan 2023 telah mencapai Level 3 dengan nilai masing-masing 3,353 dan 3,463. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat meningkatkan nilai SPIP 0,108 poin. Namun, pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan cukup signifikan hingga berada pada angka 1,874 yang masuk dalam kategori Level 1.

Fluktuasi capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Kota Parepare masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan penerapan sistem pengendalian internal. Peningkatan pada tahun 2023 mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan penguatan tata kelola, namun penurunan tajam pada tahun 2024 menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Diperlukan langkah strategis dalam memperkuat komitmen, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperbaiki mekanisme pengawasan dan pengendalian agar maturitas SPIP dapat kembali meningkat dan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.1.4.1.7. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Indeks ini mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi, sekaligus menggambarkan keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian indeks reformasi birokrasi penting sebagai indikator kualitas pelayanan

publik, peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara, serta perbaikan sistem manajemen pemerintahan.

Tabel. 2.3 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Tahun	60,00	63,50	63,01	61,12	65,67

Sumber : Inspektorat Kota Parepare

Berdasarkan tabel capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024, terlihat adanya dinamika perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian Indeks Reformasi Birokrasi berada pada angka 60,00, kemudian mengalami peningkatan menjadi 63,50 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 indeks tersebut sedikit menurun menjadi 63,01 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan capaian 61,12. Meskipun demikian, pada tahun 2024 capaian Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dengan angka 65,67. Hal ini menggambarkan bahwa upaya perbaikan birokrasi terus dilakukan secara berkesinambungan, meskipun masih terdapat tantangan yang menyebabkan fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, capaian tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan capaian awal tahun 2020.

2.1.4.2 Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dna berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Persentase penegakan PERDA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penegakan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar target penegakan PERDA yang telah direalisasikan dalam kurun waktu tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Semakin tinggi persentasenya, maka semakin efektif pula pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh aparatur pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Di Kota Parepare, penegakan PERDA menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang tertib hukum. Melalui pengukuran persentase penegakan PERDA, Pemerintah Kota Parepare dapat memantau sejauh mana pelaksanaan regulasi daerah dijalankan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini juga mencerminkan tingkat keseriusan dan konsistensi aparat dalam menegakkan aturan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera.

Tabel 2.10. Persentase Penegakan PERDA Kota Parepare

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

Berdasarkan Tabel 2.10 yang berjudul *Persentase Penegakan PERDA Kota Parepare*, dapat disimpulkan bahwa tingkat penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kota Parepare menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian kinerja yang dicatat dalam tabel menunjukkan angka 100% secara berturut-turut setiap

tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh target penegakan PERDA yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Parepare melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil direalisasikan secara maksimal setiap tahun.

Konsistensi capaian 100% selama lima tahun mencerminkan adanya komitmen yang kuat serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di tingkat daerah. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi indikator positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi daerah. Namun demikian, penting untuk tetap dilakukan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa keberhasilan capaian ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.1.4.2.2. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat Penyelesaian K3 merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan aspek **Ketertiban**, **Ketentraman**, dan **Keindahan** (K3) di wilayahnya. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan mencerminkan proporsi kasus atau aduan terkait K3 yang berhasil diselesaikan oleh perangkat daerah, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis. K3 sendiri merupakan unsur penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, tertib, nyaman, dan estetis bagi masyarakat.

Tabel 2.11. Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	98,02	100	100	100	100

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel diatas tentang *Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)* di Kota Parepare, terlihat bahwa kinerja dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan aspek K3 mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian tingkat penyelesaian berada pada angka 98,02%, menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan telah ditangani, meskipun belum sepenuhnya optimal. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2024, capaian kinerja menunjukkan angka maksimal yaitu 100% setiap tahunnya.

Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam penanganan isu-isu yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan. Konsistensi capaian 100% selama empat tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare, melalui perangkat daerah terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, berhasil membangun sistem penanganan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat berjalan dengan baik.

Peningkatan ini patut diapresiasi, namun tetap diperlukan upaya evaluasi dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut. Dengan demikian, Kota Parepare dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas

pelayanan publik dalam bidang K3 demi mendukung terciptanya tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkualitas.

2.1.4.2.3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai **tingkat rasa aman masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya**, terutama dalam konteks keamanan publik dan ketentraman sosial.

Tabel 2.12. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	96	99,47	99,57	99,63	100

Berdasarkan data pada tabel mengenai *Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya* di Kota Parepare, terlihat tren positif yang menunjukkan peningkatan rasa aman masyarakat dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang merasa aman tercatat sebesar 96%, dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 99,47%. Kenaikan ini berlanjut secara konsisten dengan capaian sebesar 99,57% pada tahun 2022 dan 99,63% pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan capaian maksimal sebesar 100%.

Peningkatan yang stabil ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Parepare dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran strategis aparat penegak ketertiban, peningkatan patroli wilayah, pemantauan lingkungan berbasis masyarakat, serta

program-program pemberdayaan dan penyuluhan keamanan yang berjalan secara berkelanjutan.

Capaian 100% pada tahun 2024 menjadi indikator bahwa seluruh responden atau sebagian besar penduduk merasa aman berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya, baik pada siang maupun malam hari. Hal ini juga menjadi refleksi keberhasilan kebijakan keamanan berbasis komunitas serta upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

2.1.4.2.4. Persentase tindak kriminal yang ditangani

Persentase tindak kriminal yang ditangani merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aparat penegak hukum, khususnya di tingkat daerah, berhasil menyelesaikan atau menindaklanjuti kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dari jumlah total tindak kriminal yang dilaporkan atau tercatat dibandingkan dengan jumlah kasus yang berhasil ditangani atau diselesaikan.

Indikator ini menjadi sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk di Kota Parepare, karena mencerminkan efektivitas respons aparat keamanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tingginya persentase penanganan menunjukkan kapasitas yang baik dari sisi penegakan hukum, investigasi, dan penyelesaian kasus, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap lembaga keamanan. Sebaliknya, rendahnya persentase dapat mengindikasikan berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan dalam proses hukum, atau kurangnya pelaporan dari masyarakat.

Tabel 2.13. Peresentase tindak kriminal yang ditangani

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	32,35	34,2	34,17	38,61	33,06

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel mengenai *Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani* di Kota Parepare selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam penanganan kasus kriminal oleh aparat yang berwenang. Pada tahun 2020, persentase tindak kriminal yang berhasil ditangani tercatat sebesar 32,35%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 34,20%, dan kembali meningkat sedikit pada tahun 2022 menjadi 34,17%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar 38,61%. Namun, pada tahun 2024, persentasenya kembali menurun menjadi 33,06%.

Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas penanganan kasus kriminal belum menunjukkan pola yang stabil dari tahun ke tahun. Kenaikan pada tahun 2023 patut diapresiasi sebagai hasil dari kemungkinan penguatan kapasitas aparat keamanan, peningkatan laporan masyarakat, atau efektivitas koordinasi antarinstansi. Namun, penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap strategi penanganan tindak kriminal, terutama dalam hal peningkatan respons aparat, percepatan proses hukum, dan upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas.

2.1.4.2.5. Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di tingkat daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anggota DPRD

perempuan yang berhasil terpilih melalui proses pemilihan umum dengan total keseluruhan anggota DPRD dalam satu periode tertentu, dan dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

Indikator ini memiliki makna strategis dalam mengukur sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diterapkan dalam sistem demokrasi dan politik lokal. Keterwakilan perempuan di DPRD tidak hanya mencerminkan partisipasi politik yang inklusif, tetapi juga menunjukkan adanya akses yang lebih adil bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui berbagai regulasi nasional dan kebijakan afirmatif, telah mendorong terpenuhinya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam lembaga legislatif, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip demokrasi yang setara.

Tabel 2.14. Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	%	24	24	20	20	26,43

Berdasarkan data pada tabel mengenai *Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD* Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), terlihat adanya fluktuasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase perempuan terpilih tercatat sebesar 24%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 20%. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 26,43%, yang sekaligus merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD belum sepenuhnya stabil dan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi partisipasi politik, dukungan partai politik,

maupun preferensi pemilih. Namun, peningkatan pada tahun 2024 dapat dimaknai sebagai hasil dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik, serta efektivitas kebijakan afirmasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif.

Capaian 26,43% pada tahun 2024 mendekati target ideal keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi dan komitmen nasional maupun internasional. Hal ini menjadi indikator positif bagi kemajuan kesetaraan gender dalam politik lokal di Kota Parepare, serta menjadi momentum untuk terus mendorong pencapaian representasi yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan gender dalam lembaga legislatif.

2.1.4.2.6. Persentase Perempuan pengurus Partai Politik

Persentase perempuan pengurus partai politik Kota Parepare mengacu pada prosentase atau perbandingan jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai pengurus inti atau struktural dalam sebuah partai politik di tingkat daerah.

Tabel 2.15. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perempuan pengurus Partai Politik	%				29,17	30,00

2.1.4.2.7. Perda yang merupakan Inisiatif DPRD

Perda yang merupakan inisiatif DPRD adalah Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan dan disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Perda inisiatif DPRD ini mencerminkan fungsi legislasi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam rangka

membentuk peraturan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

Tabel 2.16. Perda yang merupakan Inisiatif DPRD

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perda yang merupakan Inisiatif DPRD	%			10	12	14

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidanag, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang kontruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

2.1.4.3.1. Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti

Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar proporsi perjanjian atau nota kesepahaman (MoU/MoA) kerja sama antar daerah atau antara daerah dengan pihak lain (seperti instansi pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, atau luar negeri) yang telah dilanjutkan ke tahap implementasi nyata.

Pemerintah Kota Parepare, memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Kerja sama ini dapat dilakukan antar daerah, dengan pihak ketiga, atau bahkan dengan institusi luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, penting untuk memastikan bahwa kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada dokumen atau seremoni penandatanganan semata. Oleh karena itu, indikator persentase

kerja sama yang ditindaklanjuti menjadi alat evaluasi yang penting untuk mengetahui tingkat keseriusan dan kemampuan Pemerintah Kota Parepare dalam mengimplementasikan isi perjanjian kerja sama tersebut.

Tabel 2.17. Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan data pada Tabel 2.17, capaian indikator Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti di Kota Parepare menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2024. Ini berarti bahwa seluruh kerja sama daerah yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Parepare berhasil ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam bentuk implementasi nyata.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut adalah kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Indikator Kinerja Kunci Kota Parepare
Kota Parepare Tahun 2020 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				BASELINE
			2020	2021	2022	2023	TAHUN 2024
1	2	3					4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
I	PENDIDIKAN						
1,1	Tingkat Partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpastisipasi dalam PAUD	Persen	0,00	89,08	72,59	79,49	83,81
1,2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	0,00	97,98	92,64	95,90	82,40
1,3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	0,00	97,30	97,30	90,66	65,60
1,4	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	Persen	0,00	99,60	99,60	28,16	23,15

	pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
II	**KESEHATAN**						
2,1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Orang	3,80	4,06	5,11	5,04	4,46
2,2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	Orang	20,00	25,00	60,00	100,00	100,00
2,3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	68,16	87,62	97,07	100,00	80,63
2,4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	76,60	86,50	87,35	94,88	91,07
2,5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	81,28	90,66	91,53	99,75	87,56
2,6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	59,64	79,58	100,00	93,86	71,04
2,7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	0,00	15,92	98,38	99,74	96,34
2,8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	4,13	9,34	27,53	62,51	89,46
2,9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	98,29	100,00	100,00	100,00	93,57
2,1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	17,42	86,00	100,00	30,41	69,65
2,11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	113,40	81,75	100,00	108,93	113,49
2,12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	98,53	98,52	100,00	87,04	92,41
2,13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	99,93	100,00	100,00	100,00
2,14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	85,55	64,65	100,00	94,59	113,99
III	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3,1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota	Persen	0,00	0,00	100,00	0,68	Indikator tersebut tidak dapat ditentukan targetnya karena tidak ada wilayah

							sungai yang menjadi kewenangan Kota Parepare
3,2	Rasio panjang jalan dengan jumlah pendudu Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kota	Persen	92,00	90,84	90,84	76,97	76,97
3,3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	82,24	94,74	95,07	57,24	59,21
3,4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Persen	97,14	97,22	95,04	94,25	93,65
3,5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	93,35	93,79	88,81	87,87	86,06
3,6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	99,98	99,88	59,66	100,00	100
3,7	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	98,08	98,21	83,17	88,68	58,81
3,8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	62,86	86,96	23,00	45,30	0,00
3,9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
4,1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang ditangani	Persen	0,00	0,00	0,00	5,65	44,63
4,4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,65	4,19	3,47	5,87	6,03
4,5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	11,87	49,92	49,36	47,84	29,23

V	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5,1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,3	Jumlah warga Negara yang memperolah layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	418,33
5,4	Jumlah warga Negara yang memperolah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	78,43
5,5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15 menit	8,52 menit	8,78 menit	5,69 menit	9,81
VI	**SOSIAL**						
6,1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	43,11
6,2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
I	**TENAGA KERJA**						
1,1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	31,25	100,00	100,00	100,00	57,14
1,2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	2,04	18,69	18,43	18,74	19,07
1,3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Persen	42116, 27	0,00	41,05	42,49	44,53
1,4	Persentase perusahaan yang merapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Persen	76,09	77,16	85,74	85,78	73,53
1,5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	Persen	73,81	83,17	83,32	84,06	84,26

	mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota						
II	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2,1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	4,15	3,28	3,19	8,27	5,87
2,2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait instansi kabupaten	Persen	0,09	0,04	0,07	100,00	100,00
2,3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,04	7,71	11,37	12,41	54,41
III	**PANGAN**						
3,1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras /jagung sesuai kebutuhan)	Persen	141,77	299,48	224,51	295,00	231,69
IV	**PERTANAHAN**						
4,1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Angka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	4,67	97,71	0,42	5,43	0,00
4,3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	Tersediannya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang bersal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
V	**LINGKUNGAN HIDUP**						
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Persen	78,04	75,65	75,50	71,68	67,01
5,2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	Persen	74,11	73,20	74,40	73,45	73,9
5,3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						

6,1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	100,00	100,00	100,00	97,67	99,86
6,2	Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	63,80	77,44	96,34	91,75	92,03
6,3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	99,97	100,00	99,95	99,90
6,4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	21,88	3,13	25,00	25,00	45,45
VII	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
7,1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7,2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
VIII	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
8,1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,19	2,19	2,35	2,35	2,34
8,2	Persentase pemakaian Kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76,18	67,01	62,97	66,36	66,71
8,3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	14,36	11,81	15,41	9,77	11,9
IX	**PERHUBUNGAN**						
9,1	Rasio konektifitas kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9,2	V/C Rasio di Jalan Kota	Persen	0,38	0,74	0,74	0,51	0,39
X	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
10,1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	97,06
10,2	Persentase Layananan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	17,22	100,00	100,00	100,00	46,67
10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
XI	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						
11,1	Meningkat koperasi yang berkualitas	Persen	24,20	41,46	32,80	43,20	33,61
11,2	Meningkatnya Usaha Mikron yang menjadi wirausaha	Persen	17,25	44,23	20,00	45,16	44,24
XII	**PENANAMAN MODAL**						
12,1	Persentase peningkatan investasi di kota	Persen	-47,14	100,89	243,77	11,92	0,98

XIII	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**						
13,1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,39	2,47	34,23	3,23	0,61
13,2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasrakatan	Persen	12,95	12,51	124,89	12,07	11,98
13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	26	52	76	40	82
XIV	**STATISTIK**						
14,1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14,2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
XV	**PERSANDIAN**						
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	87,88	33,40	60,60	60,60	90,70
XVI	**KEBUDAYAAN**						
16,1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
XVII	**PERPUSTAKAAN**						
17,1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	57,83	60,50	66,08	61,27	76,87
17,2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Persen		27,48	42,93	92,46	94,68
XVIII	**KEARSIPAN**						
18,1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
18,2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggunjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	92,86	83,33	66,67	76,19	50,00
LAYANAN URUSAN PILIHAN							
I	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						

1,1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Persen	100,00	100,00	99,18	132,80	95,59
II	**PARIWISATA**						
2,1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-52,34	154,41	144,19	26,28	-24,70
2,2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	Persen	-94,78	2092,10	110,67	0,19	4,19
2,3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	2864,67	7580,79	13060,05	851,54	822,79
2,4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	6,30	0,00	6,45	6,68	6,84
2,5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4,22	0,00	5,11	4,76	0,73
III	**PERTANIAN**						
3,1	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	Persen	4,70	6,54	6,53	6,79	5,70
3,2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-5,31	102,59	110,79	-7,95	-16,63
IV	**PERDAGANGAN**						
4,1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	67,93	1702,12	41,99	92,64	46,08
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100,00	79,90	93,65	92,23	95,50
V	**PERINDUSTRIAN**						
5,1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	Persen	1,41	89,80	92,81	6,61	16,28
5,2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen			30,00	30,00	30,00
5,3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Induusri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5,4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasaan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
5,5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pemgawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5,6	Tersediaanya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	0,00	62,50	62,50	62,50	65,00
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
I	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**						
1,1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	24,51	23,36	24,25	8,99	14,67
1,2	Rasio PAD	Persen	-97,77	0,00	18,93	21,67	21,61
1,3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Tidak ada Penilaian	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,355)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,353)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,462)	Rintisan (Level 1 Skor 1,874)
1,4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Tidak ada Penilaian	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3)	Terintegrasi (Level 3 Skor 3,00)	Terintegrasi (Level 3 Skor 3,00-3,99)
1,5	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transper expenditures)	Persen	76,94	77,07	76,17	79,26	2,71
1,6	Opini Laporan Keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
II	**PENGADAAN**						
2,1	Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ketahun berikutnya. yang ditanda tangani pada kuartal pertama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode komperatif	Persen	15,48	16,69	16,23	34,08	63,14
2,3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	20,85	0,00	0,00	13,20	15,30
2.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan				192,93	17,96	-22,95
III	**KEPEGAWAIAN**						
3,1	Rasio Pegawai pendidikan Tinggi dan menengah /dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jp/Tahun	3,65	0,80	0,29	0,82	0,83
3,2	Rasio Pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persen	0,05	0,15	0,19	0,17	0,18

3,3	Rasio jabatan funsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenga kesehatan	Persen	100,00	100,00	45,28	7,92	11,02
IV	**MANAJEMEN KEUANGAN**						
4,1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-7,76	-7,60	-2,19	-2,92	-5,58
4,2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	12,80	3,68	5,45	9,78	21,61
4,3	Manajemen Aset		YA	YA	YA	YA	YA
4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		4,46	4,95	2,32	1,42	2,84
V	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**						
5,1	Informasi tentang sumber daya yang tersdia untuk pelayanan	Persen	98,33	99,37	91,36	99,56	99,69
5,2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.1.5.1 Bidang Urusan Pendidikan

2.1.5.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pencapaian SPM pada indikator Persentase warga negara usia 5-6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini di Kota Parepare mencapai 79,69% tahun 2022. Dan tahun 2023 menurun menjadi 56,13%.

Tabel 2.18. Pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini	100%	98,45%	98,70%	79,69%	56,13%	49,78%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

2.5.1.2 Pendidikan Dasar

Persentase warga negara usia 7-15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar di Kota Parepare cenderung mengalami

penurunan. Pada tahun 2020 persentasenya kembali turun menjadi 85,94%. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 92,64 persen. Data rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional merupakan pengganti ujian nasional yang penilaiannya dimulai pada tahun 2020 sehingga untuk data tahun sebelumnya belum terdapat data capaian. Di tahun 2021 capaian rata-rata hasil assesmen nasional adalah 1,61. Persentase warga negara usia 7 -15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar tahun 2022 telah mencapai 99,12 persen. Dan data tahun 2023 capaiannya hanya mencapai 97,19%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.254 Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara usia 7 -15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar	100%	85,94	92,64	99,12	97,19	87,86
Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	N/A	N/A	53,565	57,175	
Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	N/A	N/A	46,57	50,495	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2024

2.5.1.3 Pendidikan Kesetaraan

Persentase warga negara usia 7-18 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan di Kota Parepare belum mencapai target nasional. Pada tahun 2020 persentase kembali turun menjadi 61,21%. Tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 81,71 persen. Data Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen nasional merupakan pengganti ujian

nasional yang penilaiannya dimulai pada tahun 2020 sehingga untuk data tahun sebelumnya belum terdapat data capaian. Hingga tahun 2021 belum dilakukan assesmen. Tahun 2022 mencapai 96,56 persen dari target nasional yaitu 100 persen. Tahun 2023, Persentase warga negara usia 7-18 tahun untuk menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam, Pendidikan kesetaraan mencapai 116,96 persen dari target nasional yaitu 100 persen, meningkat dibandingkan data tahun 2022.

Tabel 2.255 Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara usia 7-18 tahun untuk menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam, Pendidikan kesetaraan	100%	61,21	81,71	96,56	116,96	98,23
Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	N/A	N/A			

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

2.1.5.2 Bidang Urusan Kesehatan

2.5.2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, hal ini terlihat dari presentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 turun menjadi 68,16%, persentase yang jauh dari target nasional yaitu 100%. Tahun 2021 persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan meningkat hingga angka 87,62 persen dari capaian tahun sebelumnya yang hanya 68,16 persen. Tahun 2022 meningkat lagi

menjadi 97,07 persen, dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 97,46 mendekati target nasional yaitu 100 persen.

Tabel 2.256 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	68,16%	87,62%	97,07%	79,46%	88,16%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Untuk Pelayanan kesehatan Ibu bersalin, tahun 2020 kembali turun menjadi 76,60%, angka yang cukup tinggi ini masih dibawah standar nasional yang menargetkan 100%. Tahun 2021, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 86,50 persen untuk pelayanan ibu bersalin. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 87,35 persen untuk Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 99,75%, hampir mencapai target nasional 100%.

Tabel 2.257 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	76,60%	86,50%	87,35%	99,75%	89,91%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi, namun masih di bawah target nasional yaitu 100%. Pada tahun 2020 persentasenya kembali turun menjadi 81,28%. Tahun 2021 untuk persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 90,66 dan meningkat

Kembali pada tahun 2022 menjadi 91,53 persen. Tahun 2023 pelayanan Kesehatan bayi baru lahir telah mencapai target nasional 100%.

Tabel 2.258 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	81,28%	90,66%	91,53%	100%	87,52%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.4. Pelayanan Kesehatan Balita

Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah tahun 2020 capaian SPM meningkat menjadi 59,64%. Angka ini masih jauh dari target nasional yang mengharapkan capaian 100%. Yang kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 79,58 persen. Persentase Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan untuk tahun 2022 adalah 100 persen, tahun 2023 menurun 73,56 persen, beberapa layanan yang dilakukan belum dapat meningkatkan pelayanan terhadap bayi.

Tabel 2.259 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	59,64%	79,58%	100%	73,56%	129,83%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan telah mencapai target nasional pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebanyak 100%, dimana semua anak usia

pendidikan dasar telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada.

Tabel 2.260 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	178,13%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan pada tahun 2020 tertinggal dari target yang ditetapkan dalam SPM. Yang terjadi di tahun 2021, capaian Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan menunjukkan stagnansi pada angka 4,13%. Capaian Tahun 2022 adalah 27,53 persen yang terbilang masih jauh dari capaian target nasional yaitu 100 persen. Dan pada tahun 2023 realisasi persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan mencapai 100 persen dan ini telah mencapai target nasional. Pencapaian disebabkan oleh semakin sehatnya warga usia produktif baik jasmani maupun Rohani.

Tabel 2.261 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	4,13%	4,13%	27,53%	100%	145,61%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, meskipun masih di bawah target nasional yaitu 100%. Capaian tahun 2020 persentase kembali meningkat menjadi 98,29%, persentase yang hampir mencapai target nasional. Tahun 2021 terjadi penurunan pada angka 82,28 persen. Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan tahun 2022 capaiannya menjadi 100 persen telah memenuhi target nasional dan tahun 2023 capaiannya 55,35 persen, sehingga pencapaian indikator ini turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.262 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,29%	82,28%	100%	55,35%	132,51%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024

2.5.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan di Kota Parepare masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional, yaitu 100%. Pada tahun 2020 persentase meningkat menjadi 17,42%, persentase yang masih sangat jauh dari target nasional. Tahun 2021 adalah tahun dengan awal pencapaian 100 persen untuk pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Kota Parepare. Peningkatan yang sangat drastis dan signifikan. Tahun 2022, Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan menjadi 100 persen dan tahun 2023 capaian dapat dipertahankan 100 persen, dan capaian ini telah memenui target nasional.

Tabel 2.263 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	17,42%	100%	100%	100%	229,79%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2020 persentase capaian meningkat signifikan menjadi 113,40% dan melampaui target nasional. Tahun 2021, terjadi menurunan namun berada pada angka yang baik yaitu 100 persen untuk capaian Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan. Hingga tahun 2022, capaian Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan adalah 100 persen. Dan tahun 2023 melebihi target nasional sebesar 109,30%.

Tabel 2.264 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	113,40%	100%	100%	109,30%	105,14%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan pada tahun 2020 persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani

kesehatannya turun menjadi 98,53%. Dan tahun 2021 menjadi 100 persen. Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan tahun 2022 menjadi 67,23 persen, dan tahun 2023 layanan Kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai 89,83 persen, belum memenuhi target nasional 100 persen.

Tabel 2.265 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	98,53%	100%	67,23%	89,83%	107,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2020 persentase Capaian telah mencapai target nasional yaitu 100%. Di tahun 2021 menjadi 99,93 persen untuk capaian pelayanan kesehatan pada orang yang terduga tuberkulosis di Parepare. Tahun 2022 Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 100 persen. Tahun 2023, Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan menurun menjadi 79,74 persen.

Tabel 2.266 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	103,20%	100%	100%	97,74%	106,61%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.5.2.12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodefici EncyVirus)

Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sangat rendah. Tahun 2020 persentase capaian meningkat secara signifikan menjadi 85,55%. Tahun 2021, meningkat ke angka 100 persen dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodefici EncyVirus). Hingga tahun 2022, persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan mencapai 100 persen, namun mengalami penurunan ditahun 2023 dengan capaian layanan 94,59 persen.

Tabel 2.267 Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodefici Ency Virus) Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	85,55%	100%	100%	94,59%	114,03%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Parepare

2.1.5.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

2.5.3.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum untuk itu Pemerintah Kota Parepare menempatkan pemenuhan air bersih bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas

pembangunan. Jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2020 persentase capaian meningkat menjadi 97,17%. Di Tahun 2021 menjadi 96,79 persen. Tahun 2022, persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari mencapai 100 persen, namun ditahun 2023 mengalami penurunan menjadi 92,91 persen.

Tabel 2.268 Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	97,17	96,79	100	92,91	92,34%

Sumber : Dinas PUPR Kota Parepare

2.5.3.2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pada tahun 2020 persentase capaian meningkat menjadi 90,68%. Untuk tahun 2021, menurun menjadi 84,75 persen. Di tahun 2022, indikator Penyediaan pelayanan pengelolahan air limbah domestik mencapai 94,01 persen dan pencapaian pelayanan meningkat menjadi 94,92 persen di tahun 2023, namun belum mencapai target nasional 100 persen.

Tabel 2.269 Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	90,68%	84,75%	94,01%	94,92%	93,24%

Sumber : Dinas PUPR Kota Parepare

2.1.5.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

2.5.4.1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota

Pemerintah Kota Parepare telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi ketersediaan rumah layak huni bagi seluruh warga masyarakat yang menjadi korban bencana. Sepanjang Tahun Pemerintah Kota Parepare telah menyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat korban bencana sehingga capaiannya 100%. Namun, tahun 2021, capaian kinerja Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana menurun ke 95,28 persen. Tahun 2022, cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana menurun menjadi 94,62 persen. Dan untuk tahun 2023 tidak ada kebutuhan untuk penyediaan ataupun rehabilitasi rumah korban bencana.

Tabel 2.270 Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	95,28%	94,62%	0	100

Sumber : Dinas Perkimtan Kota Parepare

2.5.4.2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam kurun waktu 5 tahun, tidak ada program pemerintah daerah yang menyebabkan warga masyarakat harus direlokasi.

Tabel 2.271 Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	-	-	0	0	100

Sumber : Dinas Perkimtan Kota Parepare

2.1.5.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

2.5.5.1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seluruh warga wajib memperoleh layanan dari pemerintah daerah akibat penegakan hukum perda dan perkada, sehingga capaian 5 tahun adalah 100 persen.

Tabel 2.272 Pelayanan Dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Satpol PP Kota Parepare

2.5.5.2 Pelayanan informasi rawan bencana

Pemerintah Kota Parepare telah memberikan layanan informasi rawan bencana bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana, sehingga capaiannya 100%. Pemberian layanan informasi rawan bencana dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media serta informasi langsung kepada masyarakat.

Tabel 2.273 Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	124,98%

Sumber : BPBD Kota Parepare

2.5.5.3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dengan masifnya pelaksanaan sosialisasi dan pemberian informasi yang dilakukan dalam mitigasi bencana kepa masyarakat dalam kurun waktu 5 Tahun, maka Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100%.

Tabel 2.274 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	137,50%

Sumber : BPBD Kota Parepare

2.5.5.4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Bencana sepanjang tahun 2020, pemerintah daerah telah melakukan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kepada semua kejadian bencana, sehingga capaiannya adalah 100% sebagaimana target nasional. Namun ditahun berikutnya pada periode tahun 2021 capaian persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana menurun menjadi 95,83 persen. Di tahun 2022, warga negara yang memperoleh

layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menjadi 100 persen, dan tahun 2023 juga mencapai 100 persen.

Tabel 2.275 Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	95,83%	100%	100%	100%

Sumber : BPBD Kota Parepare

2.5.5.5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pada tahun 2023 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran mencapai 100 persen.

Tabel 2.276 Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.1.5.6 Bidang Urusan Sosial

2.5.6.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sepanjang 5 tahun telah mencapai target nasional yaitu 100%.

Tabel 2.277 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare

2.5.6.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti

Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti pada 5 tahun mencapai 100 persen, dan hal ini telah memenuhi target nasional.

Tabel 2.278 Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare

2.5.6.3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti

Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti juga mengalami peningkatan dari 5 Tahun capaian sudah mecapai target nasional yaitu mencapai 100%.

Tabel 2.279 Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare

2.5.6.4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada 5 tahun persentasi telah berada pada capaian target nasional yaitu 100%.

Tabel 2.280 Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare

2.5.6.5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota

Pemerintah Kota Parepare telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat yang mengalami korban bencana alam. Sepanjang 5 Tahun, Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial mencapai 100% setiap tahunnya, yang berarti semua wagra masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dari Pemerintah Kota Parepare.

Tabel 2.281 Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Parepare

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	408%

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare

2.1.6 KERJASAMA DAERAH

Untuk gambaran pelaksanaan kerja sama antar daerah maupun kerja sama daerah dengan swasta. Berikut adalah daftar kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dengan beberapa baik daerah lain maupun swasta.

Tabel 2.282 Kerjasama Daerah Tahun 2024
DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2024

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Kota Parepare dan BPJS Kesehatan Cabang Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
2	PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Parepare	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Parepare tentang Pelayanan Kelistrikan	5 Tahun	Peningkatan PAD	Masa Berlaku
3	PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Parepare tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik	5 Tahun	Peningkatan PAD	Masih Berlaku
4	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Labukkang tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Lompoe tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
		Program Jaminan Kesehatan			
6	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Lumpue tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
7	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Laapadde tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
8	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Lakessi tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
9	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Cempae tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
10	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Lauleng Bukit Harapan tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
11	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Puskesmas Lemoe tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
12	PT. Kawasan Industri Makassar	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan PT. Kawasan Industri Makassar tentang Kerja Sama dalam persiapan, Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Industri dan	5 Tahun	Peningkatan PAD	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
		Pengudangan Parepare dan			
13	Universitas Pelita Harapan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Universitas Pelita Harapan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
14	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan BPJS Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Makassar tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Miskin	8 Bulan	Kesehatan	Masih Berlaku
15	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabanag Parepare dan Pemerintah Kelurahan Lapadde Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota	9 Bulan	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
16	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabanag Parepare dan Pemerintah Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Parepare	9 Bulan	Kesehatan	Masih Berlaku
17	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabanag Parepare dan PemerintahKelurahan Bukit Indah Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Parepare	9 Bulan	Kesehatan	Masih Berlaku
18	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabanag Parepare dan Pemerintah Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Parepare	9 Bulan	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
19	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabanag Parepare dan Pemerintah Kelurahan Lompoe Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Parepare	9 Bulan	Kesehatan	Masih Berlaku
20	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabanag Parepare dan Pemerintah Kelurahan Watang Bacukiki Kota Parepare tentang Pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Online di Kota Parepare	2 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
21	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabanag Parepare dan Pemerintah Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare tentang Pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Online di Kota Parepare	2 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
22	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
23	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie tentang Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inspektorat	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
24	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie tentang Penelitian, Penerapan dan Pengembangan Sistem Satu Data Parepare	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
25	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie tentang Sinergitas Peningkatan dan Layanan kesehatan Bagi Civitas Akademika Institut Teknologi Akademika Institut	5 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
		Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie			
26	Institut Agama Islam Negeri Parepare	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Institut Agama Islam Negeri Parepare tentang Sinergitas Peningkatan dan Layanan kesehatan Bagi Civitas Akademika Institut Teknologi Akademika Institut Agama Islam Negeri Parepare	5 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
27	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare dan Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
28	Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Rumah Sakit	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan Makassar dan Rumah Sakit Ibnu Sinayw -UMI Makassardan Pemerintah Daerah Kota	3 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
	Ibnu Sinayw - UMI Makassar	Parepare dan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Klinik			
29	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Makassar	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Makassar tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Muballigh / Muballighah dan Guru Sekolah minggu	5 Bulan	Tenaga Kerja	Masih Berlaku
30	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare tentang Pelaksanaan Pemberian Informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Parepare	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
31	Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia tentang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia tentang	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
		Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi			
32	Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia tentang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kota Parepare	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
33	Yayasan Syarikat Islam	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Yayasan Syarikat Islam tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
34	Sekolah Menengah Kejurusan Farmasi Yasari Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Sekolah Menengah Kejurusan Farmasi Yasari Parepare tentang Peraktek Kerja Lapangan	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
35	Yayasan Nurtfainna Makjab Abadi Kota Parepare	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Yayasan Nurtfainna Makjab Abadi Kota Parepare tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
36	Sekolah Menengah Kejurusan Bahari Kota Parepare	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Sekolah Menengah Kejurusan Bahari Kota Parepare tentang Peraktek Kerja Lapangan	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
37	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Makassar	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan BPJS Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Makassar tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Parepare	3 Bulan	Tenaga Kerja	Masih Berlaku
38	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
39	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare tentang Pencegahan dan Penangganan Stunting	5 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
40	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare tentang Pendidikan Penelitiaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	3 Tahun	Pendidikan	Masih Berlaku
41	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Pemerintah Kelurahan Lapadde Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Parepare	3 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
42	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Pemerintah Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Parepare	3 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
43	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Pemerintah Kelurahan Bukit Indah Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan	3 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
		Kesehatan Nasional Di Kota Parepare			
44	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Pemerintah Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Parepare	3 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
45	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Pemerintah Kelurahan Lompoe Kota Parepare tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi dan Registrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota	3 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
46	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Parepare	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Parepare tentang Pengelolaan Uang	3 Tahun	Keuangan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
		Daerah dan Penempatan Dana			
47	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Cempae Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
48	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Lakessi Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
49	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Lapadde Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
50	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Lauleng Bukit Harapan Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
51	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Lemoe Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
52	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Lompoe Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi PesertaProgram Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
53	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Lumpue Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi PesertaProgram Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/ STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
54	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara BPJS Kesehatan Cabang Parepare dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi PesertaProgram Jaminan Kesehatan	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku
55	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Parepare	Rencana Kerja Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan BPJS Kesehatan Cabang Parepare tentang Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi peserta Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kota Parepare dalam rangka universal health coverag	1 Tahun	Kesehatan	Masih Berlaku

DATA KERJA SAMA DAERAH LAIN TAHUN 2024

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan danPemerintah Daerah Kota Parepare tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah di Kota Parepare	5 (lima) tahun	Pajak Daerah	Masih Berlaku
2	Pemerintah Kota Samarinda	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kota Samarinda tentang Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Daerah	5 (lima) tahun	Ekonomi	Masih Berlaku
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar Daerah	3 (tiga) tahun	Perdagangan	Masih Berlaku
4	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare tentang Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Mal Pelayanan Publik Kota Parepare	3 (tiga) tahun	Pajak Daerah	Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar Daerah	3 (tiga) tahun	Perdagangan	Masih Berlaku
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar Daerah	3 (tiga) tahun	Perdagangan	Masih Berlaku
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar Daerah	3 (tiga) tahun	Perdagangan	Masih Berlaku
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Unggulan Antar Daerah	3 (tiga) tahun	Perdagangan	Masih Berlaku
9	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengembangan	5 (Lima) tahun		Masih Berlaku

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
		Pembangunan Daerah			
10	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kota Parepare	3 (tiga) tahun		Masih Berlaku
11	Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap	Perjanjian Kerja Sama Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap tentang Kerja Sama Perdagangan Komoditas Beras dan Telur	3 (tiga) tahun	Perdagangan	Masih Berlaku

DATA DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (SINERGI) TAHUN 2024

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KERJA SAMA	JANGKA WAKTU	URUSAN YANG DI KERJA SAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)
1	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Parepare tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Kota Parepare Tahun 2024	3 (tiga) tahun	Komunikasi dan Informatika	Masih Berlaku
2	Kejaksaan Negeri Parepare	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare tentang Kerja Sama Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara	1 Tahun	Hukum	Masih Berlaku

Sumber: Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Parepare

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kota Parepare

Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota untuk menggambarkan rencana pembangunan infrastruktur di daerah bersangkutan yang merupakan bagian dari PSN, Perpres percepatan pembangunan, dan/atau merupakan bagian rencana kebijakan provinsi di kabupaten/kota yang harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 2.283 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota Parepare

Sumber Anggaran	Jenis Infrastruktur			Tahun	Keterangan
APBN	Jalan	Penanganan Jalan Kota	Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ rekonstruksi)	2025	Dana Alokasi Khusus Fisik
	Kesehatan	Penguatan Puskesmas	Renovasi/ Penambahan Ruang	2025	Dana Alokasi Khusus Fisik
	Olahraga	Pengembangan Sarana Olahraga	Pengembangan Sport Center		
APBD PROVINSI	Jalan	Pemeliharaan/ Pembangunan Jalan			Bantuan Keuangan Provinsi

2.1.8 BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah

Untuk gambaran BUMD yang berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, berikut adalah tabel yang memperlihatkan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan publik Kota Parepare Tahun 2024.

Tabel 2.284 BUMN yang Mendukung Kinerja Pelayanan Publik Daerah Tahun 2024

BUMD	Jenis dan Bentuk Dukungan	Keterangan dengan Prioritas Daerah
PDAM	Layanan Pengelolah Air Bersih; dan Penyedia Air Minum di Kota Parepare	Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Dasar dan Peningkatan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Menuju Pelayanan Prima dan profesional serta Berkeadilan
		- Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengotimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat

2.1.9 Inovasi Daerah Kota Parepare 2025

Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, peningkatan daya saing akan semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada beragam dimensi dan berbagai tataran. Merespon tuntutan perubahan dan dinamika yang terus berjalan cepat Aparat Pemerintah Kota Parepare dituntut untuk lebih berpikir kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam melayani dan mengayomi masyarakat Kota Parepare. Dalam pengembangan inovasi daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sejak tahun 2017. Perangkat daerah terus didorong dan dimotivasi untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan birokrasi pemerintah. dan inovasi telah menjadi gerakan bersama Perangkat Daerah Kota Parepare dan harus terus berkelanjutan. Mulai Tahun 2018 melalui kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan Laboratorium Inovasi/Workshop Champion Innovation, yang bertujuan untuk terus membangkitkan semangat inovasi aparat lingkup Pemerintah Kota Parepare dan melahirkan champion/fasilitator inovasi di perangkat daerah. Dan untuk mengapresiasi perangkat daerah dalam pelaksanaan inovasi maka dilakukan Lomba Inovasi yang telah berjalan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Tiap tahunnya

pengembangan inovasi Kota Parepare dilaksanaakan melalui kegiatan pendampingan ke perangkat daerah dalam menyusun proposal inovasi dan melalui Bappeda Kota Parepare disiapkan Kotak Inovasi untuk menginventarisir inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tiap tahunnya. Berikut beberapa inovasi Pemerintah Kota Parepare yang telah terimplementasi pada perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Kota Parepare:

Tabel ... Daftar Inovasi Kota Parepare, 2025

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
1	Gerakan Masyarakat Pemustaka Berkarya (GEMPAR)	Inovasi ini lahir dari kebutuhan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya tempat simpan-pinjam buku. GEMPAR dirancang untuk mengatasi lemahnya pelibatan masyarakat dan minimnya kegiatan kolaboratif di Dinas Perpustakaan. Melalui program ini, perpustakaan bertransformasi menjadi ruang inklusif yang mengakomodir kegiatan literasi, kepenulisan, kajian, hingga kesenian. GEMPAR juga mendukung program nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial serta prioritas pembangunan SDM di tingkat daerah. Hasil pelaksanaan GEMPAR menunjukkan dampak positif. Dalam dua tahun berjalan, program ini berhasil menghasilkan ratusan karya berupa tulisan, seni rupa, musik, hingga video, yang dipublikasikan melalui berbagai platform resmi. Selain itu, jumlah kunjungan perpustakaan meningkat signifikan dari 19 ribu pada 2021 menjadi lebih dari 46 ribu pada 2024, sekaligus menaikkan skor Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kota Parepare ke kategori tinggi. Inovasi ini juga tercatat memiliki regulasi pendukung, jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, replikasi di daerah lain, serta indikator keberhasilan yang terukur, sehingga layak disebut sebagai model penguatan literasi berbasis kolaborasi di tingkat daerah.	Dinas Perpustakaan

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
2	PANDU GENRE (Pelayanan Terpadu Generasi Berencana)	Inovasi ini lahir dari tantangan masih tingginya prevalensi stunting yang menghambat pembangunan sumber daya manusia. Permasalahan tersebut diperparah dengan perbedaan signifikan antara data lokal (E-PPGBM) dan data nasional (SSGI), rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. PANDU GENRE hadir sebagai strategi komprehensif dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan layanan edukasi gizi bagi ibu hamil, terapi pijat bayi dan hidroterapi, pengasuhan terpadu melalui taman asuh anak, serta pemanfaatan aplikasi pencatatan stunting berbasis digital untuk pemantauan real-time. Pelaksanaan PANDU GENRE memberikan hasil nyata berupa peningkatan pengetahuan ibu hamil, optimalisasi tumbuh kembang anak, dan pola pengasuhan yang lebih berkualitas di tingkat keluarga. Program ini berhasil menyelenggarakan kelas edukasi rutin, layanan stimulasi bayi, serta operasional taman asuh anak yang mendukung pengasuhan sehat dan edukatif. Selain itu, data kesehatan yang lebih akurat dan real-time memudahkan intervensi dini dan perumusan kebijakan berbasis bukti. Dengan dukungan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan inovatif, PANDU GENRE mampu menurunkan angka stunting di Parepare sekaligus menjadi model terobosan untuk peningkatan kualitas generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
3	Si Kumbang (Si Kurir Timbangan)	Si Kumbang (Si Kurir Timbangan), sebuah layanan publik yang digagas Dinas Perdagangan untuk meningkatkan efektivitas tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Latar belakang inovasi ini adalah rendahnya capaian layanan tera ulang karena sistem sebelumnya mengharuskan pedagang datang langsung ke kantor layanan, yang sulit dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, serta kendala teknis. Si Kumbang hadir sebagai solusi dengan menghadirkan layanan kurir yang menjemput dan mengembalikan alat timbangan pedagang, sehingga layanan menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan mampu memperluas cakupan pengawasan metrologi legal. Hasil inovasi menunjukkan peningkatan signifikan, di antaranya jumlah legalisasi alat UTTP naik dari 1.164 menjadi 1.612 unit. Pedagang tetap bisa berjualan tanpa terganggu, sementara perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap keakuratan timbangan semakin terjamin. Inovasi ini juga mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), menyediakan peluang tambahan jasa kurir, serta memperkuat jejaring kerja sama lintas perangkat daerah. Dengan integrasi dalam sistem layanan Dinas Perdagangan, dukungan regulasi, hingga sosialisasi luas, Si Kumbang menjadi model inovasi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat	Dinas Perdagangan
4	INSTAL SAPA (Informasi Digital Sahabat Perempuan dan Anak)	INSTAL SAPA (Informasi Digital Sahabat Perempuan dan Anak) yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Inovasi ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tingginya akses masyarakat terhadap internet. INSTAL SAPA memanfaatkan media digital berupa website, media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp), dan QR Code yang dipasang di fasilitas publik, sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dan ruang terbuka. Tujuannya untuk memudahkan akses informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Hasil pelaksanaan INSTAL SAPA meliputi tersedianya sarana informasi terpadu yang cepat, mudah, dan menjaga privasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		pengguna. Inovasi ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan literasi publik terkait isu kesetaraan gender, serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan. Dengan dukungan regulasi, integrasi program dalam RKPD, jejaring lintas sektor, serta replikasi di beberapa daerah lain, INSTAL SAPA menjadi model inovasi pelayanan publik berbasis digital yang mampu menjawab tantangan sosial di era digitalisasi	
5	Basement APIP	Basement APIP (Database Management System APIP) yang dikembangkan oleh Inspektorat. Latar belakang inovasi ini adalah rendahnya kualitas pengelolaan arsip hasil pengawasan yang selama ini masih berbasis hardcopy, sehingga menyulitkan pencarian, rawan hilang, dan membutuhkan ruang besar untuk penyimpanan. Basement APIP hadir sebagai solusi digitalisasi arsip, khususnya Surat Tugas, Laporan Hasil Pengawasan (LHP), dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), agar lebih aman, mudah diakses, dan efisien. Aplikasi ini berbasis website dan menyediakan menu khusus yang dapat diakses oleh Inspektur maupun pejabat berwenang sesuai tingkat kerahasiaan dokumen. Penerapan Basement APIP membawa sejumlah manfaat, antara lain mempercepat akses data, mengurangi risiko kehilangan arsip, serta meningkatkan efektivitas kinerja Inspektorat dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hingga pertengahan 2024, sistem ini telah mengarsipkan ratusan dokumen penting, sekaligus memperpanjang umur arsip dinamis agar tetap mudah diakses meski sudah lama. Inovasi ini juga bersifat mudah, murah, dan sederhana, sehingga berpotensi untuk direplikasi di daerah lain. Dengan dukungan regulasi, jejaring lintas perangkat daerah, serta integrasi dengan sistem informasi pemerintah, Basement APIP menjadi model tata kelola pengawasan modern yang mendukung transparansi dan reformasi birokrasi	Inspektorat

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
6	PERIKSA WAJAH (Penerbitan Dokumen Adminduk Berbasis Penerbitan Wajah)	PERIKSA WAJAH (Penerbitan Dokumen Adminduk Berbasis Pengenalan Wajah) yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi ini lahir dari permasalahan penduduk rentan administrasi kependudukan, seperti lansia, penyandang disabilitas, pasien gawat darurat, warga binaan, dan komunitas terpencil, yang sulit mengakses layanan dokumen kependudukan. Sebelumnya, proses identifikasi dan penerbitan dokumen membutuhkan mobilisasi petugas atau warga ke kantor Dukcapil, yang seringkali tidak efektif dan menimbulkan risiko seperti keterlambatan layanan maupun duplikasi data. PERIKSA WAJAH hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan teknologi face recognition untuk mempercepat dan mempermudah identifikasi biometrik tanpa perlu tatap muka langsung. Implementasi inovasi ini menghasilkan dampak nyata berupa pelayanan yang lebih cepat, efisiensi biaya operasional, serta kemudahan bagi penduduk rentan untuk mendapatkan dokumen kependudukan sebagai dasar layanan publik lain. Dengan metode ini, identitas warga dapat dipastikan hanya melalui foto wajah yang dikirim lewat perangkat mobile, sehingga dokumen bisa diterbitkan dalam waktu sekitar 45 menit. Inovasi ini telah membantu pasien gawat darurat, warga panti jompo, ODGJ, hingga narapidana untuk tetap memiliki dokumen kependudukan yang sah. Selain meningkatkan efektivitas layanan dan mendukung hak-hak sipil masyarakat, PERIKSA WAJAH juga memperkuat integritas administrasi kependudukan, mendukung demokrasi, serta berpotensi direplikasi di daerah lain sebagai model pelayanan publik berbasis teknologi	Dinas Kenpendudukan dan Pencatatan Sipil
7	Lapor Pak Satpol (Lahan Penataan Relokasi Pedagang Kaki Lima Satpol PP)	Lapor Pak Satpol (Lahan Penataan Relokasi Pedagang Kaki Lima Satpol PP) yang digagas oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Inovasi ini muncul karena permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan dan trotoar di sepanjang Jalan Mattirotasi, sehingga menimbulkan kemacetan, mengganggu ketertiban umum, serta melanggar Peraturan Daerah. Program ini menawarkan solusi dengan merelokasi PKL ke lahan aset milik pemerintah yang telah disiapkan, disertai penataan sarana prasarana, pembinaan usaha, serta pendampingan agar mereka tetap bisa beroperasi	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		tanpa melanggar aturan dan tetap memiliki penghasilan. Pelaksanaan Lapor Pak Satpol memberikan manfaat nyata berupa terciptanya ketertiban umum, berkurangnya kemacetan, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta tumbuhnya iklim usaha yang lebih tertata. Para PKL yang direlokasi dapat meningkatkan pendapatan, sementara pemerintah memperoleh tambahan PAD dari retribusi kebersihan, lahan, dan parkir. Dengan dukungan regulasi, keterlibatan banyak stakeholder, integrasi dalam RKPD, serta potensi replikasi di daerah lain, inovasi ini menjadi model penegakan perda yang solutif, mengedepankan pendekatan humanis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi	
8	SIPAKAINGA ADA (Sistem Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah)	SIPAKAINGA ADA (Sistem Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah) yang digagas oleh Satpol PP. Inovasi ini lahir dari persoalan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih tingginya pelanggaran perda maupun perkada. Untuk menjawab tantangan tersebut, Satpol PP menghadirkan dua program utama, yaitu Green Light Patrol yang memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat di titik-titik rawan pelanggaran, serta Satpol PP Go To School yang menyasar generasi muda melalui sosialisasi di sekolah. Kedua program ini bertujuan memperluas jangkauan edukasi hukum secara langsung, kontekstual, dan interaktif agar lebih mudah dipahami masyarakat. Pelaksanaan SIPAKAINGA ADA membawa manfaat berupa meningkatnya pemahaman hukum, tumbuhnya budaya tertib hukum di masyarakat dan pelajar, serta berkurangnya potensi pelanggaran berulang di lokasi rawan. Program ini juga mendorong partisipasi aktif sekolah dan masyarakat sebagai mitra strategis penegakan hukum, sekaligus mendukung pencapaian target SDGs dalam menciptakan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi, jejaring lintas sektor, integrasi dalam RKPD, serta potensi replikasi, inovasi ini menjadi model penegakan hukum daerah yang lebih preventif, edukatif, dan partisipatif	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
9	PANRITA - PelaporAN elektRonIk moniToring dan evaluAsi (Pelaksanaan Pembangunan)	PANRITA (PelaporAN elektRonIk moniToring dan evaluAsi Pelaksanaan Pembangunan) yang digagas oleh Bappeda. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas permasalahan monitoring dan evaluasi pembangunan yang selama ini dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan kendala seperti keterlambatan pelaporan, inkonsistensi data, hingga lemahnya akuntabilitas. PANRITA menggunakan sistem digital berbasis Google Spreadsheet yang memungkinkan perangkat daerah melaporkan kinerjanya secara daring, real-time, efisien, dan transparan. Inovasi ini mempercepat proses kompilasi data, memudahkan asistensi oleh Bappeda, serta mendukung kebijakan berbasis bukti melalui data yang lebih akurat dan terintegrasi. Penerapan PANRITA menghasilkan sistem pelaporan pembangunan yang terdigitalisasi, seragam, dan mudah diakses oleh seluruh OPD. Hasilnya terlihat dari peningkatan ketepatan waktu dan akurasi laporan, efisiensi kerja, serta terbentuknya dokumentasi yang sistematis untuk penyusunan RPJMD, RKPD, dan laporan evaluasi lainnya. Selain mengurangi praktik pelaporan fiktif, PANRITA juga memperkuat koordinasi lintas OPD dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Dengan dukungan regulasi, jejaring lintas sektor, serta potensi pengembangan ke aplikasi khusus bersama perguruan tinggi, PANRITA menjadi model tata kelola pembangunan digital yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan	BAPPEDA
10	SMART PEDULI (Sharing Mentoring Seputar Pegawai Negeri dan Lintas Instansi)	SMART PEDULI (Sharing Mentoring Seputar Pegawai Negeri dan Lintas Instansi) yang digagas oleh BKPSDMD. Inovasi ini lahir dari tantangan rendahnya pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi ASN minimal 20 jam per tahun, keterbatasan anggaran, serta masih adanya kesenjangan kompetensi dengan standar jabatan. SMART PEDULI menghadirkan model pengembangan kompetensi yang lebih murah dan efektif melalui mentoring, coaching, pertukaran pengetahuan antar-ASN lintas instansi, serta pembelajaran berbasis teknologi. Dengan konsep kolaboratif, ASN yang sudah memiliki keahlian difasilitasi untuk berbagi ilmu kepada rekan lainnya, sekaligus mendapat penilaian angka kredit dalam pengisian SKP fungsional.	BKPSDMD

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		Hasil implementasi SMART PEDULI sangat signifikan, di antaranya penyelenggaraan 28 kegiatan pengembangan kompetensi tanpa anggaran khusus, peningkatan keterlibatan 2.672 ASN selama dua tahun, penghematan biaya pelatihan, serta naiknya indeks profesionalisme ASN dan nilai merit system hingga 11,5% per tahun. Inovasi ini juga menciptakan ruang kolaborasi lintas instansi, UMKM, dan masyarakat, yang memperkuat sinergi pembangunan daerah. Dengan dukungan regulasi, integrasi dalam RKPD, replikasi di daerah lain, serta kemudahan akses melalui platform daring maupun tatap muka, SMART PEDULI terbukti sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kualitas SDM ASN secara berkelanjutan	
11	PEDULI ASN	"Peduli ASN" yang digagas oleh BKPSDMD. Inovasi ini muncul sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi pegawai negeri sipil (PNS) menjelang pensiun, seperti proses pengurusan berkas yang rumit, memakan waktu, biaya, serta kurangnya pendampingan bagi keluarga PNS yang pensiun atau meninggal. Melalui pendekatan satu pintu di BKPSDMD, pengurusan pensiun menjadi lebih cepat, hemat biaya, serta terbebas dari peran calo. Selain itu, inovasi ini juga mengedepankan pendampingan emosional dan edukasi bagi ASN serta keluarganya agar lebih siap menghadapi masa purna tugas. Keunggulan inovasi ini terletak pada keterlibatan multipihak, seperti PT Taspen, perbankan, Badan Keuangan Daerah, Dukcapil, hingga rumah sakit, yang bersama-sama memastikan layanan kepegawaian lebih efisien, inklusif, dan ramah. Dibentuk pula Satgas Peduli PNS untuk memantau serta membantu proses pengurusan dokumen pensiun. Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya kepercayaan publik, efisiensi waktu dan biaya pengurusan, serta terciptanya ASN yang lebih siap secara mental dan ekonomi di masa pensiun. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan aparatur sipil negara.	
12	Melodi STBM (Sanitasi Total	"Melodi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)" yang digagas oleh Dinas Kesehatan. Inovasi ini hadir untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lima	Dinas Kesehatan

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
	Berbasis Masyarakat)	pilar STBM, kurangnya sosialisasi, serta minimnya kemitraan dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan memanfaatkan digitalisasi melalui lagu edukatif yang disebarkan lewat media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram, inovasi ini memungkinkan sosialisasi dilakukan secara menarik, hemat biaya, tanpa batas ruang dan waktu, serta tetap efektif meski ada keterbatasan aktivitas saat pandemi. Keunggulan inovasi ini terletak pada cara penyampaian pesan kesehatan yang kreatif dan menghibur, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan mengingat pentingnya sanitasi. Hasil yang dicapai antara lain meningkatnya pengetahuan dan perilaku hidup bersih, bertambahnya kelurahan yang telah diverifikasi sebagai Kelurahan STBM, serta terbentuknya kemitraan lintas sektor termasuk pekerja seni. Inovasi ini terbukti mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menurunkan risiko penyakit akibat sanitasi buruk, sekaligus memperkuat kualitas layanan publik melalui pendekatan kolaboratif dan digital.	
13	Sekolah SB3 (Sehat, Beriman, Berilmu dan Bersanitasi)	“Sekolah SB3 (Sehat, Beriman, Berilmu, dan Bersanitasi)”. Program ini digagas oleh Dinas Kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas sekolah agar memenuhi standar kesehatan sekaligus menanamkan nilai spiritual dan ilmu pengetahuan. Latar belakang inovasi ini adalah masih adanya sekolah yang belum sehat, kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya peran masyarakat sekolah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang bersih dan sehat. Melalui program ini, sekolah-sekolah dipandu untuk mengintegrasikan tiga pilar pembangunan: kesehatan, pendidikan, dan spiritual, dengan melibatkan sosialisasi, pendampingan, advokasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Keunggulan inovasi ini terlihat dari terbentuknya sekolah peduli lingkungan, meningkatnya kolaborasi lintas sektor, serta lahirnya agen perubahan sejak dini berupa sanitarian cilik. Program ini berhasil menurunkan angka kesakitan siswa, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, serta memperluas penerapan STBM hingga beberapa	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		kelurahan. Hasil nyata yang dicapai adalah adanya satuan pendidikan yang lebih sehat, kemitraan sekolah dengan pihak lain, serta peningkatan pengetahuan masyarakat sekolah. Dengan demikian, Sekolah SB3 tidak hanya meningkatkan kesehatan lingkungan sekolah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan.	
14	TEMAN OBAT TA' (SISTEM LAYANAN APOTEKR BERBASIS ANDOID TA')	"TEMAN OBAT TA' (Sistem Layanan Apoteker Berbasis Android)". Inovasi ini dikembangkan RSUD Andi Makkasau untuk menjawab keterbatasan interaksi pasien dengan apoteker, terutama terkait penggunaan obat di rumah yang berisiko menimbulkan kesalahan penggunaan dan efek samping. Aplikasi ini menyediakan layanan informasi obat, konseling, edukasi interaksi obat dengan makanan, serta pelaporan efek samping secara digital. Dengan begitu, pasien dapat mengakses informasi obat kapan saja dan di mana saja, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam menjalani terapi. Keunggulan inovasi ini terletak pada digitalisasi layanan kefarmasian yang lebih luas dan fleksibel dibanding cara konvensional. Melalui aplikasi, pasien tidak hanya memperoleh edukasi langsung dari apoteker via video call, tetapi juga dapat menikmati layanan pengantaran obat ke rumah untuk mengurangi antrian. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kepatuhan terapi, menurunnya risiko efek samping maupun kesalahan penggunaan obat, serta meningkatnya kenyamanan pasien. Inovasi ini memberi manfaat nyata berupa akses informasi yang lebih cepat, efisiensi waktu dan biaya, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian rumah sakit berbasis teknologi digital.	RSUD Andi Makkasau
15	KONEKTINK (Konseling Elektronik Tinggal Klik)	"KONEKTINK (Konseling Elektronik Tinggal Klik)" yang dikembangkan oleh RSUD Andi Makkasau. Inovasi ini hadir untuk mengatasi rendahnya capaian Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) yang masih jauh dari target nasional. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya edukasi, tidak adanya sistem tindak lanjut, keterbatasan konselor, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Melalui platform digital berbasis web, KONEKTINK memungkinkan ibu pasca persalinan mengakses informasi	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		kontrasepsi, melakukan konseling mandiri, serta mendapatkan pengingat jadwal pemasangan KB secara fleksibel, privat, dan berkelanjutan. Keunggulan inovasi ini antara lain kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, konseling yang lebih personal, integrasi dengan sistem informasi rumah sakit, serta dukungan terhadap pencapaian SDGs melalui pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan penurunan risiko stunting. KONEKTINK juga mengubah layanan KBPP dari pendekatan konvensional yang pasif menjadi aktif, interaktif, dan ramah pengguna. Hasilnya adalah meningkatnya partisipasi ibu dalam program KBPP, meningkatnya kepuasan pasien, serta efisiensi layanan kesehatan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi model pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.	
16	Alarm Berencana	"Alarm Berencana" yang dikembangkan RSUD Andi Makkasau. Inovasi ini lahir karena rendahnya cakupan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) yang masih jauh dari target nasional. Permasalahan utamanya meliputi kurangnya edukasi kepada ibu pasca melahirkan, tidak adanya sistem pengingat atau tindak lanjut, serta minimnya pemanfaatan teknologi. Alarm Berencana hadir dengan konsep sistem pengingat berbasis pesan digital (WhatsApp) dan penjemputan pasien, sehingga ibu lebih terinformasi dan termotivasi untuk menggunakan kontrasepsi tepat waktu. Keunggulan inovasi ini adalah menciptakan layanan yang lebih interaktif, berkelanjutan, dan ramah pengguna dibanding metode konvensional. Pasien mendapat pengingat terjadwal, penyuluhan, hingga pendampingan konseling personal dari tenaga kesehatan. Hasilnya terlihat dari peningkatan cakupan KBPP tiap tahun, terutama pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti implant dan MOW. Alarm Berencana bukan hanya membantu mengendalikan angka kelahiran dan mendukung kesehatan ibu-anak, tetapi juga berkontribusi pada percepatan penurunan stunting serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.	
17	SI IMUT (SISTEM INFORMASI	"SI IMUT (Sistem Informasi Indikator Mutu Unit Terintegrasi)" yang dikembangkan oleh RSUD Andi Makkasau Kota	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
	INDIKATOR MUTU UNIT TERINTEGRASI)	Parepare. Inovasi ini lahir untuk mengatasi permasalahan pelaporan mutu pelayanan kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan kertas, sehingga rentan tercecer, hilang, dan tidak efisien. SI IMUT memanfaatkan sistem digital terintegrasi dalam SIM-RS untuk mempermudah pencatatan, pemantauan, dan pelaporan data indikator mutu secara real-time. Dengan sistem ini, komite mutu dapat langsung memantau hasil capaian unit, memberi umpan balik cepat, serta melakukan tindak lanjut bila ada data yang tidak sesuai standar. Keunggulan SI IMUT terletak pada efisiensi, transparansi, dan akurasi data mutu pelayanan rumah sakit. Data dari berbagai unit dapat diintegrasikan secara langsung, kemudian dilaporkan secara berkala ke Kementerian Kesehatan dan direksi rumah sakit. Hasil penerapan inovasi ini menunjukkan peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu dari 54% di tahun 2022 menjadi 76,92% di tahun 2023, berkurangnya insiden keselamatan pasien, serta meningkatnya kepuasan pasien. Dengan demikian, SI IMUT mendukung terwujudnya mutu layanan kesehatan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan sejalan dengan target SDGs dan kebijakan nasional di bidang kesehatan.	
18	LAFIS INDIA (LATIHAN FISIK INTRA DIALISIS)	inovasi “LAFIS INDIA (Latihan Fisik Intra Dialisis)” yang dikembangkan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Inovasi ini hadir untuk menjawab masalah kelemahan otot yang sering dialami pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis. Kondisi ini biasanya diperburuk oleh keterbatasan aktivitas fisik, atrofi otot, hingga gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. LAFIS INDIA menawarkan solusi berupa latihan fisik sederhana yang dilakukan langsung saat pasien menjalani dialisis, melalui tahapan pemeriksaan, evaluasi, hingga pelaksanaan latihan peregangan dan senam dengan theraband. Program ini dirancang agar aman, terukur, dan mampu meningkatkan kekuatan otot serta kualitas hidup pasien. Keunggulan LAFIS INDIA terletak pada manfaat fisik dan psikologisnya, antara lain meningkatkan aliran darah otot, memperbesar kapiler untuk mempercepat pembuangan	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		toksin, menjaga stabilitas tekanan darah, hingga mengurangi tingkat kecemasan pasien. Dampak yang dihasilkan tidak hanya berupa berkurangnya kelemahan otot dan meningkatnya kemampuan fungsional pasien, tetapi juga peningkatan efisiensi pelayanan, stabilitas hemodinamik, serta kepuasan pasien. Inovasi ini mendukung pencapaian SDGs dalam bidang kesehatan, memperkuat pengembangan sumber daya manusia, serta selaras dengan regulasi nasional tentang pelayanan kesehatan.	
19	PEER SUPPORT SYSTEM MANAJEMEN DIRI PASIEN HEMODIALISIS (PERSSYT MANDIRI PASHD)	PERSSYT MANDIRI PASHD (Peer Support System Manajemen Diri Pasien Hemodialisis)" yang dikembangkan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Inovasi ini hadir karena pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis sering mengalami penurunan kualitas hidup akibat masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Sebelum inovasi ini, pasien hanya menerima perawatan teknis tanpa dukungan psikososial, sehingga banyak yang merasa terisolasi dan kurang termotivasi untuk mengelola diri. PERSSYT MANDIRI PASHD dirancang untuk memberikan pendampingan berbasis kelompok diskusi tatap muka dan grup daring (WhatsApp), dengan melibatkan perawat, ahli gizi, farmasi, psikolog, serta keluarga pasien. Keunggulan inovasi ini adalah menciptakan ekosistem dukungan sosial yang terstruktur, murah, berkelanjutan, dan mudah direplikasi. Pasien memperoleh ruang untuk berbagi pengalaman, edukasi kesehatan, hingga konsultasi harian terkait diet, obat, dan efek samping hemodialisis. Dampak positif yang dihasilkan antara lain meningkatnya kepatuhan terhadap jadwal terapi, bertambahnya motivasi dan rasa percaya diri pasien, berkurangnya keluhan fisik maupun psikis, serta meningkatnya kepuasan layanan. Program ini tidak hanya memberdayakan pasien agar lebih mandiri, tetapi juga memperkuat model pelayanan HD yang lebih holistik dan manusiawi.	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
20	Pandu Bumil	inovasi “Pandu Bumil” yang dilaksanakan di RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Inovasi ini lahir untuk menekan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi baru lahir (AKB), serta mencegah stunting yang masih tinggi di Indonesia dan Sulawesi Selatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, kurangnya tenaga spesialis, serta minimnya informasi tentang layanan antenatal berkualitas. Pandu Bumil memberikan pelayanan antenatal terpadu (10 T) yang dilengkapi dengan USG gratis, senam hamil, pemberian makanan tambahan, konseling gizi dan KB, edukasi pencegahan stunting, serta deteksi dini komplikasi kehamilan. Keunggulan inovasi ini adalah pendekatan komprehensif dengan melibatkan keluarga, bidan, kader, hingga kerjasama lintas sektor seperti BKKBN dan media. Layanan tidak hanya diberikan di rumah sakit, tetapi juga melalui kunjungan rumah dan grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi serta edukasi ibu hamil. Dampak yang dicapai adalah meningkatnya jumlah kunjungan ibu hamil ke rumah sakit, meningkatnya kesadaran akan pentingnya ANC, serta bertambahnya pengetahuan terkait persiapan persalinan, kontrasepsi, dan pencegahan stunting. Inovasi ini berkontribusi pada tercapainya kehamilan sehat, persalinan aman, bayi lahir sehat, sekaligus mendukung program nasional penurunan AKI, AKB, dan stunting.	RS Hasrie Ainun Habibie

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
21	PASTA (Pelayanan Asuhan Persalinan Dengan Aroma Terapi)	inovasi “PASTA (Pelayanan Asuhan Persalinan dengan Aroma Terapi)” yang dikembangkan di RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Inovasi ini muncul untuk menjawab tingginya angka kematian ibu dan bayi, yang salah satunya dipicu oleh kecemasan, stres, serta nyeri berlebih saat persalinan. Kondisi psikologis tersebut sering menghambat proses fisiologis kelahiran dan dapat menyebabkan komplikasi serius. PASTA menggunakan pendekatan aroma terapi untuk membantu ibu merasa lebih rileks, mengurangi rasa takut, serta meringankan nyeri selama dan setelah persalinan. Program ini diharapkan memperlancar proses kelahiran, mengurangi kasus gawat janin, serta menekan angka kesakitan ibu dan bayi. Manfaat utama dari inovasi ini adalah memberikan suasana nyaman bagi ibu dan tenaga kesehatan selama proses persalinan, meningkatkan efisiensi kerja uterus, mencegah keletihan, serta membantu relaksasi pasca salin. Dampak yang dicapai berupa penurunan tingkat kecemasan, pengendalian angka persalinan macet, berkurangnya kasus bayi lahir tidak sehat, serta terkendalinya angka kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Dengan pendekatan sederhana, non-digital, dan berbiaya rendah, PASTA mampu menghadirkan pelayanan persalinan yang lebih humanis dan holistik, sekaligus mendukung pencapaian target penurunan AKI dan AKB secara nasional maupun daerah.	
22	KO'RAWAN	inovasi KO’RAWAN (Kamar Operasi Ramah Wanita) yang dikembangkan RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Latar belakang inovasi ini adalah perlunya menjaga privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien serta petugas wanita di kamar operasi, mengingat pakaian operasi standar sering kali minim penutup dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan maupun pelanggaran privasi. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual di fasilitas kesehatan memperkuat urgensi perlindungan khusus berbasis gender. KO’RAWAN menghadirkan solusi berupa desain pakaian operasi pasien wanita yang menutup aurat sesuai standar sterilitas, pakaian syar’i bagi petugas wanita, pengaturan shift berbasis gender, serta zonasi ruang operasi yang lebih aman dengan tirai privasi.	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		Keunggulan inovasi ini adalah penerapan prinsip gender-sensitive care di rumah sakit pemerintah, yang jarang ditemukan sebelumnya. Implementasi KO'RAWAN memberikan manfaat berupa peningkatan rasa aman, nyaman, dan bermartabat bagi pasien wanita, menurunkan kecemasan pra-operasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif bagi petugas wanita. Hasilnya berupa tersusunnya SOP layanan berbasis gender, modifikasi ruang operasi, pelatihan SDM, dan peningkatan kepuasan pasien maupun kepatuhan petugas terhadap prosedur. Inovasi ini tidak hanya memperbaiki kualitas layanan kesehatan, tetapi juga mendukung pencapaian SDGs terkait kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender di fasilitas kesehatan.	
23	LAHIR MEDICALL (LAYANAN APOTEKER HINGGA RUMAH BY CALL)	"LAHIR MEDICALL (Layanan Apoteker Hingga Rumah by Call)" yang dikembangkan RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Inovasi ini lahir dari permasalahan seringnya pasien salah menggunakan obat setelah pulang dari rumah sakit akibat minimnya interaksi dengan apoteker. Hal ini berpotensi menimbulkan efek samping serius, resistensi antibiotik, hingga peningkatan biaya kesehatan. Melalui layanan ini, pasien tetap dapat berkomunikasi langsung dengan apoteker setelah pulang, menerima pesan otomatis berisi informasi obat melalui Android, serta berkonsultasi secara privat tanpa harus kembal ke rumah sakit. Keunggulan LAHIR MEDICALL terletak pada kemudahan akses informasi obat, pencegahan medication error, dan dukungan layanan pasca-rawat inap yang berkelanjutan. Pasien usia lanjut atau dengan kebutuhan khusus bahkan bisa mendapat layanan pengantaran obat ke rumah. Dampak yang dihasilkan antara lain meningkatnya kepatuhan penggunaan obat, menurunnya angka kesalahan terapi, berkurangnya resistensi obat, serta penghematan biaya kesehatan. Inovasi ini juga memperkuat hubungan komunikasi antara pasien dan apoteker, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang lebih peduli dan modern berbasis digital.	

24	MLM S HIV	inovasi “MLM S HIV (Multi Level Marketing Suluh HIV)” yang dikembangkan RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Inovasi ini lahir karena tingginya angka penularan HIV/AIDS di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z, akibat kurangnya pendidikan seks yang komprehensif, stigma sosial, serta rendahnya akses layanan kesehatan ramah remaja. MLM S HIV mengadopsi konsep penyebaran informasi berjenjang, di mana setiap individu yang telah mendapat edukasi tentang HIV/AIDS diharapkan menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan ke orang lain. Pendekatan ini memanfaatkan media sosial, konten digital, serta pelibatan aktif remaja sebagai konselor sebaya untuk menciptakan edukasi yang lebih interaktif, masif, dan relevan dengan gaya komunikasi generasi digital. Keunggulan inovasi ini adalah mengubah peran generasi muda dari sekadar penerima informasi menjadi penyuluh aktif yang mampu mengedukasi lingkungannya. Program ini menghasilkan jaringan konselor remaja HIV, konten digital edukatif, pelatihan tenaga pendamping, serta sistem monitoring berbasis digital untuk memantau sebaran informasi. Dampaknya, pengetahuan remaja tentang HIV meningkat signifikan, stigma terhadap ODHA berkurang, partisipasi komunitas bertambah, dan penyebaran informasi berlangsung lebih cepat melalui media digital. MLM S HIV tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan, tetapi juga membangun gerakan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan mudah direplikasi dalam upaya menekan angka infeksi HIV di kalangan generasi muda	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
25	HALO BIDAN CARE	"HALO BIDAN CARE" yang dikembangkan RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Inovasi ini lahir dari tingginya angka kematian ibu (AKI) yang dipengaruhi kurangnya pengetahuan tentang komplikasi kehamilan, terbatasnya akses ke layanan kesehatan, serta sulitnya koordinasi dengan tenaga medis di luar jam kerja. Dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp, HALO BIDAN CARE menghadirkan layanan kebidanan digital yang dapat diakses 24 jam. Pasien bisa berkonsultasi langsung dengan bidan melalui chat, panggilan telepon, atau video call, bahkan mendapat panduan visual berupa foto dan video terkait perawatan bayi, pemulihan pasca operasi, hingga jadwal imunisasi. Keunggulan inovasi ini terletak pada fleksibilitas layanan tanpa batas waktu, penggunaan media visual untuk meningkatkan pemahaman pasien, serta penerapan pendekatan interprofesional dalam asuhan kebidanan. Program ini terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil maupun nifas, mempercepat pengambilan keputusan, serta mencegah komplikasi yang berisiko meningkatkan AKI. Dampak yang dirasakan antara lain meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit, efisiensi anggaran kesehatan, peningkatan citra profesi bidan, serta kepuasan pasien yang mendapat pelayanan cepat, murah, dan responsif. HALO BIDAN CARE mendukung pencapaian target SDGs 2030 dalam menurunkan AKI, sekaligus menjadi model pelayanan kebidanan digital yang mudah direplikasi di daerah lain	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
26	HATI HOSPITAL	"HATI HOSPITAL (Halal Medical Tourism Hospital)" yang dikembangkan RS dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare. Inovasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan berbasis halal yang terintegrasi dengan konsep wisata medis, mengingat potensi besar Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Permasalahan yang diangkat adalah belum optimalnya pelayanan rumah sakit dengan standar halal, mulai dari metode pengobatan hingga makanan pasien, serta minimnya regulasi spesifik terkait wisata medis halal di Indonesia. Dengan letak strategis rumah sakit yang berdekatan dengan destinasi wisata, HATI HOSPITAL memadukan pelayanan kesehatan berkualitas, jaminan produk halal, dan daya tarik wisata sebagai pembeda di industri pariwisata medis. Tujuan utama inovasi ini adalah memperkuat branding rumah sakit dengan konsep halal, meningkatkan daya saing, serta memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan pasien. Manfaat yang diperoleh mencakup meningkatnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, hadirnya rumah sakit halal pertama di Sulawesi Selatan, serta bertambahnya pendapatan daerah melalui wisata medis. Hasil yang dicapai adalah peningkatan signifikan pendapatan rumah sakit, peningkatan citra sebagai pelopor rumah sakit halal pemerintah, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang aman, sehat, dan sesuai syariat. HATI HOSPITAL tidak hanya berperan sebagai fasilitas kesehatan, tetapi juga sebagai motor penggerak pariwisata halal yang mendukung SDGs dan program prioritas nasional	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
27	SIGAP LIHAT DBD (Aksi Keluarga Peduli Lingkungan Sehat Berantas DBD)	inovasi “SIGAP LIHAT DBD (Aksi Keluarga Peduli Lingkungan Sehat Berantas DBD)” yang digagas oleh Puskesmas Cempae Kota Parepare. Inovasi ini lahir dari meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah tersebut, sementara kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) masih rendah. Program ini menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam melakukan PSN, pemantauan jentik, dan pelaporan mandiri, dengan dukungan lintas sektor mulai dari pemerintah kelurahan, sekolah, hingga organisasi masyarakat. Melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, kunjungan rumah, serta pembentukan kader jumantik, inovasi ini mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli pada kebersihan lingkungan. Keunggulan inovasi ini terletak pada model pemberdayaan keluarga secara langsung, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya mengandalkan petugas kesehatan. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya angka bebas jentik dari 80% di tahun 2023 menjadi 91% pada awal 2025, serta penurunan kasus DBD di Kelurahan Bukit Indah. Program ini juga menciptakan kolaborasi lintas sektor yang kuat, meningkatkan kesadaran kolektif, memperbaiki lingkungan hidup, sekaligus menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat DBD. Dengan biaya terjangkau dan mudah direplikasi, SIGAP LIHAT DBD menjadi model inovasi lokal yang mendukung pencapaian SDGs dan prioritas nasional di bidang kesehatan	UPTD Puskesmas Cempae

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
28	KURMA PEDIS (Kunjungan Rawat Mandiri Penderita Penyakit Kronis)	inovasi “KURMA PEDIS (Kunjungan Rawat Mandiri Penderita Penyakit Kronis)” yang dikembangkan oleh Puskesmas Cempae Kota Parepare. Inovasi ini hadir untuk menjawab rendahnya cakupan layanan kesehatan bagi penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, gagal ginjal, kanker, dan penyakit jantung, yang sering mengalami keterbatasan akses, biaya, serta putus obat. KURMA PEDIS mengintegrasikan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan dengan pemantauan digital, sehingga pasien mendapatkan pemeriksaan, asesmen, edukasi personal, hingga rujukan bila diperlukan. Program ini menekankan peran aktif pasien dan keluarga dalam pengelolaan penyakit kronis secara berkelanjutan. Keunggulan KURMA PEDIS terletak pada pendekatan holistik, kemudahan akses, serta pencatatan digital yang memperkuat evaluasi. Hasilnya adalah meningkatnya cakupan pelayanan penyakit tidak menular, deteksi dini komplikasi, peningkatan kepatuhan pasien terhadap terapi, serta penguatan kolaborasi antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Inovasi ini bukan hanya memperluas jangkauan layanan kesehatan, tetapi juga menurunkan risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan kemudahan replikasi dan dukungan lintas sektor, KURMA PEDIS berkontribusi pada pemerataan layanan kesehatan dan pencapaian SDGs di bidang kesehatan	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
29	Makkita' (PeMAntauan JentiK nyamuK berbasIs digiTAl)	inovasi "Makkita' (PeMAntauan JentiK nyamuK berbasIs digiTAl)" yang dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Latar belakang inovasi ini adalah masih manualnya sistem pemantauan jentik nyamuk yang lambat, rawan kesalahan, boros biaya, serta sulit diakses secara real-time. Makkita' menghadirkan solusi digital berupa aplikasi mobile dan Google Form/Sheet yang memungkinkan kader jumantik maupun masyarakat langsung melaporkan hasil pemantauan. Data yang masuk otomatis tersimpan, dapat dianalisis secara cepat, serta digunakan untuk memetakan wilayah rawan DBD. Inovasi ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan, mempercepat deteksi dini, dan mendukung program Smart City serta digitalisasi layanan kesehatan. Keunggulan inovasi ini ada pada efisiensi, akurasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif dibanding metode manual. Hasil yang dicapai adalah tersedianya sistem digital yang terintegrasi, meningkatnya kecepatan intervensi pada wilayah rawan, partisipasi warga yang lebih luas, serta data historis yang dapat dijadikan dasar kebijakan berbasis bukti. Dampaknya terlihat pada meningkatnya efektivitas pencegahan DBD, efisiensi anggaran, serta kualitas kesehatan lingkungan. Dengan model yang hemat biaya, real-time, dan mudah direplikasi, Makkita' berkontribusi langsung pada penurunan kasus DBD dan mendukung pencapaian SDGs di bidang kesehatan	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
30	KONTER CATIN (KONSELING TERPADU CALON PENGANTIN)	inovasi “KONTER CATIN (Konseling Terpadu Calon Pengantin)” yang dikembangkan Puskesmas Cempae Kota Parepare. Inovasi ini lahir untuk menekan angka stunting yang masih tinggi di Parepare, dengan menyasar calon pengantin sebagai sasaran utama pencegahan sejak dini. Program ini tidak hanya memberikan edukasi pra-nikah, tetapi juga mengintegrasikan skrining kesehatan, tes laboratorium, konseling gizi, imunisasi TT, hingga pemantauan berkelanjutan oleh tenaga kesehatan dan kader setelah menikah dan hamil. Dengan melibatkan lintas sektor seperti KUA, pemerintah desa, PKK, serta tenaga kesehatan, inovasi ini memastikan kesiapan fisik, mental, gizi, dan reproduksi calon pengantin. Keunggulan KONTER CATIN adalah pendekatan menyeluruh yang berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada masa pra-nikah tetapi berlanjut hingga kehamilan. Dampak yang dicapai antara lain meningkatnya pengetahuan dan perilaku sehat calon pengantin, terdeteksinya risiko kesehatan sejak dini, menurunnya risiko komplikasi kehamilan, BBLR, dan stunting, serta terbentuknya keluarga yang lebih sehat dan produktif. Program ini juga memperkuat peran Puskesmas dalam layanan promotif dan preventif, sekaligus mendukung target nasional dan SDGs dalam penurunan angka stunting	
31	PIOMER (Pelayanan Informasi Obat Melalui Messenger)	inovasi “PIOMER (Pelayanan Informasi Obat Melalui Messenger)” yang dikembangkan UPTD Puskesmas Cempae Kota Parepare. Inovasi ini muncul karena masih sering terjadi kesalahan penggunaan obat akibat kurangnya edukasi dari tenaga farmasi yang terbatas waktu dan sumber daya. PIOMER memanfaatkan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi antara pasien dengan apoteker, sehingga pasien dapat menanyakan aturan pakai, efek samping, interaksi, hingga cara penyimpanan obat tanpa harus kembali ke puskesmas. Layanan ini dilengkapi dengan auto-reply untuk pertanyaan umum, jam konsultasi khusus, SOP digital, serta dokumentasi percakapan yang dapat diintegrasikan dengan sistem rekam medis. Keunggulan PIOMER adalah kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta edukasi obat yang lebih cepat dan terstruktur.	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		Program ini juga memungkinkan apoteker mengirimkan pesan edukatif berkala kepada pasien, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap terapi obat. Dampak inovasi ini terlihat pada menurunnya risiko efek samping dan kesalahan penggunaan obat, meningkatnya penggunaan obat secara rasional, serta bertambahnya kepuasan pasien terhadap layanan kefarmasian. Dengan biaya rendah, pemanfaatan teknologi sederhana, dan cakupan yang luas, PIOMER menjadi model inovasi yang efektif, mudah direplikasi, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional	
32	SiMVasTaTIn (sistem manajemen inventaris digital obat rutin)	inovasi “SiMVasTaTIn (Sistem Manajemen Inventaris Digital Obat Rutin)” yang dikembangkan UPTD Puskesmas Cempae Kota Parepare. Inovasi ini hadir untuk menjawab kelemahan sistem pencatatan manual dalam pengelolaan obat, seperti risiko human error, keterlambatan informasi, sulitnya audit, hingga tingginya biaya administrasi. Dengan memanfaatkan platform AppSheet, SiMVasTaTIn memungkinkan pencatatan stok obat secara digital, real-time, serta mudah diakses melalui smartphone. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur input stok masuk/keluar, kartu stok, pengeluaran resep, hingga barcode scanning untuk meningkatkan akurasi data. Manfaat utama dari inovasi ini adalah memudahkan petugas dalam menghitung mutasi obat harian, menurunkan biaya kertas, mempercepat pembuatan laporan, serta menyediakan data yang lebih akurat untuk perencanaan kebutuhan obat. Hasil implementasi menunjukkan berkurangnya kasus penumpukan atau kekosongan obat, menurunnya obat kadaluarsa, serta meningkatnya efisiensi layanan farmasi di Puskesmas. Selain itu, aplikasi ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan dengan sistem kesehatan digital, sehingga mudah direplikasi di daerah lain dan menjadi model transformasi digital pelayanan kesehatan	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
33	PDKT ODHIV (Pendekatan Keluarga Tanpa Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS)	Inovasi PDKT ODHIV adalah sebuah program untuk mengatasi permasalahan ketidakpatuhan pasien HIV (ODHIV) dalam mengonsumsi obat antiretroviral (ARV). Masalah utama yang dihadapi adalah banyak ODHIV yang tidak terbuka mengenai status kesehatannya kepada keluarga, sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan yang optimal dalam menjalani pengobatan. Kondisi ini meningkatkan risiko angka "Lost to Follow-Up" (LFU) atau pasien yang berhenti pengobatan. Inovasi ini berfokus pada pendekatan keluarga untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan dukungan emosional dan praktis bagi ODHIV. Program ini merupakan inovasi non-digital di bidang pelayanan publik dan kesehatan. Melalui inovasi ini, petugas kesehatan memberikan edukasi dan konseling kepada anggota keluarga yang disetujui oleh ODHIV. Tujuannya adalah agar keluarga memahami kondisi ODHIV dan dapat memberikan dukungan, baik dalam bentuk perawatan, pendampingan, maupun pengingat untuk minum obat ARV secara rutin. Program ini juga mengembangkan media edukasi berbasis web untuk mempermudah akses informasi bagi keluarga. Manfaat yang diharapkan dari inovasi ini meliputi peningkatan kepatuhan minum obat ARV, penurunan angka LFU, dan yang paling penting, penghilangan diskriminasi serta peningkatan dukungan keluarga terhadap ODHIV. Inovasi ini telah diimplementasikan sejak 2 Juni 2023.	
34	SARANG SEMUT MERAH (Sehat Bersama Dengan terampil Meramu Rempah)	inovasi "SARANG SEMUT MERAH (Sehat Bersama Dengan Terampil Meramu Rempah)" adalah sebuah program pelayanan publik non-digital dari Puskesmas Lapadde, Kota Pare-Pare, Inovasi ini bertujuan untuk mengatasi pergeseran gaya hidup modern yang menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada obat kimia, sehingga mengabaikan potensi pengobatan tradisional. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menjaga kesehatan secara mandiri melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA). Taman Obat Keluarga (TOGA) sebagai percontohan dan Pojok Herbal yang menyediakan ramuan siap minum bagi pengunjung. Sementara di luar gedung, dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai meramu rempah di berbagai kelompok	UPTD Puskesmas Lapadde

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		masyarakat. Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam meramu herbal, terciptanya budaya "Back To Nature," dan pertumbuhan ekonomi lokal dari produk herbal. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada obat kimia, terutama bagi lansia dan kelompok rentan, serta mendorong partisipasi lintas sektor	
35	MASIDDI GAU' (Masyarakat Sehat Mandiri Dengan Gerakan Akupresur)	Inovasi MASIDDI GAU' (Masyarakat Sehat Mandiri dengan Gerakan Akupresur) yang digagas Puskesmas Lapadde Kota Parepare merupakan upaya menghadirkan layanan kesehatan tradisional berbasis akupresur untuk mengatasi keluhan ringan secara mandiri, alami, dan minim efek samping. Lahir dari minimnya pemahaman masyarakat serta belum optimalnya integrasi layanan akupresur di layanan primer, program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengurangi ketergantungan obat kimia, memperkuat kapasitas puskesmas, serta melibatkan komunitas dalam penyebarluasan edukasi. Dukungan regulasi, SDM, jejaring lintas sektor, serta pelaksanaan sosialisasi di berbagai komunitas menjadi landasan penguatan inovasi ini. Pelaksanaan inovasi mencakup pembentukan poli akupresur di puskesmas, sosialisasi langsung ke masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pelatihan dan MoU. Dampak yang diperoleh antara lain meningkatnya kunjungan layanan akupresur, menurunnya penggunaan obat berlebihan, terbentuknya kelompok masyarakat sadar akupresur di kelurahan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan terapi tradisional. Program ini juga telah direplikasi di daerah lain, mendukung visi Kota Parepare sebagai daerah Terbaik, Sejahtera, dan Maju (TSM), sekaligus menjadi model inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
36	MASIDDI GAU' (Masyarakat Sehat Mandiri Dengan Gerakan Akupresur)	Inovasi MASIDDI GAU' (Masyarakat Sehat Mandiri dengan Gerakan Akupresur) yang digagas Puskesmas Lapadde Kota Parepare merupakan upaya menghadirkan layanan kesehatan tradisional berbasis akupresur untuk mengatasi keluhan ringan secara mandiri, alami, dan minim efek samping. Lahir dari minimnya pemahaman masyarakat serta belum optimalnya integrasi layanan akupresur di layanan primer, program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengurangi ketergantungan obat kimia, memperkuat kapasitas puskesmas, serta melibatkan komunitas dalam penyebarluasan edukasi. Dukungan regulasi, SDM, jejaring lintas sektor, serta pelaksanaan sosialisasi di berbagai komunitas menjadi landasan penguatan inovasi ini. Pelaksanaan inovasi mencakup pembentukan poli akupresur di puskesmas, sosialisasi langsung ke masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pelatihan dan MoU. Dampak yang diperoleh antara lain meningkatnya kunjungan layanan akupresur, menurunnya penggunaan obat berlebihan, terbentuknya kelompok masyarakat sadar akupresur di kelurahan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan terapi tradisional. Program ini juga telah direplikasi di daerah lain, mendukung visi Kota Parepare sebagai daerah Terbaik, Sejahtera, dan Maju (TSM), sekaligus menjadi model inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan	UPTD SMP Negeri 1
37	CARI KUTU (Baca Ringkasan Kumpulkan Tulisan)	Inovasi CARI KUTU (Baca Ringkasan, Kumpulkan Tulisan) yang digagas di UPTD SMP Negeri 13 Parepare hadir sebagai solusi untuk meningkatkan literasi generasi Alpha yang sangat akrab dengan teknologi digital namun mengalami penurunan capaian literasi dari tahun ke tahun. Melalui aplikasi berbasis Android, program ini memberikan akses mudah, metode pembelajaran kreatif, interaktif, dan fleksibel bagi peserta didik, sehingga mereka dapat meningkatkan minat baca sekaligus keterampilan literasi digital. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan siswa dalam belajar secara mandiri, tetapi juga terbukti meningkatkan capaian literasi di sekolah secara signifikan. Dengan fitur bacaan fiksi, nonfiksi, koleksi buku, hingga wadah untuk menulis, inovasi ini	UPTD SMP Negeri 13

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		mendorong partisipasi aktif siswa dan mendukung program literasi nasional. Hasilnya, tercatat peningkatan skor literasi dalam Rapor Pendidikan, serta aplikasi ini berpotensi direplikasi di daerah lain sebagai model pembelajaran digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan	
38	SABU SAMI (Satu Buku Satu Minggu)	Inovasi SABU SAMI (Satu Buku Satu Minggu) yang digagas UPTD SD Negeri 37 Parepare merupakan strategi literasi terstruktur untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan memahami bacaan siswa. Program ini mewajibkan setiap siswa membaca satu buku per minggu, baik di sekolah maupun di rumah, kemudian membuat ringkasan, ulasan, atau presentasi. Dengan melibatkan guru dan orang tua, inovasi ini menciptakan ekosistem literasi berkelanjutan yang tidak hanya membiasakan membaca, tetapi juga melatih berpikir kritis, menambah kosakata, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara maupun menulis. Hasil dari inovasi ini terlihat pada meningkatnya kebiasaan membaca yang lebih teratur, kualitas pemahaman bacaan, serta kesiapan siswa menghadapi asesmen literasi nasional. Program ini juga memperkuat peran keluarga sebagai pendukung utama literasi melalui jurnal baca mingguan, serta menjaga motivasi siswa dengan sistem penghargaan seperti “Bintang Literasi.” Dengan pendekatan sederhana namun konsisten, SABU SAMI menjadi gerakan literasi yang efektif, aplikatif, dan berdampak nyata pada peningkatan hasil belajar sekaligus pembentukan karakter siswa	UPTD SD Negeri 37
39	TBM MASAGENAE	Inovasi TBM Masagenae dikembangkan untuk meningkatkan minat baca siswa dengan menghadirkan layanan perpustakaan berbasis digital dan barcode di UPTD SD Negeri 30 Parepare. Program ini memadukan koleksi buku cetak dan digital yang terintegrasi melalui QR Code serta sistem peminjaman daring, sehingga siswa, guru, dan orang tua dapat mengakses bahan bacaan dengan lebih mudah, kapan saja, dan di mana saja. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan budaya literasi yang berkelanjutan sekaligus memodernisasi layanan perpustakaan sekolah agar relevan dengan perkembangan teknologi. Hasil dari inovasi ini antara lain meningkatnya minat baca	UPTD SD Negeri 30

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		siswa, bertambahnya jumlah kunjungan dan peminjaman buku, serta terbangunnya sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung literasi anak. Selain mempermudah pengelolaan perpustakaan, TBM Masagenae juga menumbuhkan literasi digital, menjadikan perpustakaan sekolah lebih fungsional, dan bahkan menjadi inspirasi untuk direplikasi di sekolah lain. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya memperkuat budaya membaca, tetapi juga mendukung transformasi pendidikan menuju era digital	
40	MANTRA BUGIS PAKATAJANG (MelestarikAN sasTRA BUGIS melalui aPlikasi AKsarA lonTAra sesuai tuntunan JAman sekaraNG)	Inovasi MANTRA BUGIS PAKATAJANG merupakan aplikasi digital interaktif yang dikembangkan untuk melestarikan aksara Lontara Bugis sekaligus menjawab tantangan rendahnya minat belajar bahasa daerah di sekolah. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi dengan menghadirkan menu pengenalan huruf, latihan soal, hingga game edukatif agar pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses oleh siswa maupun masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembelajaran yang sebelumnya monoton menjadi interaktif, aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil penerapan inovasi menunjukkan peningkatan signifikan pada kemampuan siswa dalam memahami aksara Lontara, dari kategori rendah menjadi tinggi. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah guru dalam mengajar, tetapi juga memberi kesempatan belajar mandiri bagi masyarakat luas. Selain berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal, inovasi ini menjadi model pembelajaran berbasis teknologi yang dapat direplikasi di daerah lain, sehingga berkontribusi pada upaya revitalisasi bahasa daerah secara berkelanjutan	UPTD SD Negeri 71
41	KAWAN AMAN (KAWal laporkAN AMankan damaikAN)	Inovasi KAWAN AMAN (KAWal laporkAN AMankan damaikAN) dikembangkan sebagai solusi untuk menekan kasus perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah. Melalui aplikasi digital berbasis Android, siswa dapat melaporkan kejadian secara pribadi, aman, dan cepat menggunakan login NISN, sementara laporan langsung diteruskan ke guru melalui email untuk ditindaklanjuti. Inovasi ini lahir dari kondisi banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan karena rasa takut atau malu, serta minimnya saluran pelaporan yang efektif di sekolah.	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		Manfaat yang dihasilkan antara lain meningkatnya keberanian siswa untuk melapor, terbentuknya sistem deteksi dini kasus kekerasan, serta meningkatnya kesadaran warga sekolah terhadap budaya aman dan saling menghargai. Selain sebagai kanal aduan, aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai bahaya perundungan dan intoleransi. Dengan demikian, KAWAN AMAN menjadi model inovasi perlindungan anak yang responsif, mudah diakses, dan berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak	
42	DOMIKASI (DOMINO EDUKASI)	Inovasi DOMIKASI (Domino Edukasi) dikembangkan di UPTD SD Negeri 32 Parepare sebagai media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Terinspirasi dari permainan domino klasik, media ini dirancang dengan konsep mencocokkan gambar, kata, angka, atau konsep pelajaran sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. DOMIKASI hadir sebagai solusi atas rendahnya minat belajar, metode pembelajaran yang monoton, serta keterbatasan media ajar yang menarik di sekolah dasar. Manfaat inovasi ini terlihat dari meningkatnya motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, serta kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan daya ingat mereka. Guru juga terdorong untuk lebih kreatif dalam mengajar, sementara orang tua dapat ikut mendukung pembelajaran anak melalui media ini. Dengan penerapan DOMIKASI, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, hasil belajar siswa meningkat, dan budaya belajar interaktif semakin berkembang. Inovasi ini juga berpotensi direplikasi di sekolah lain sebagai praktik baik dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan bermakna	UPTD SD Negeri 32
43	GALAKSI EDUKASI (Galakkan Literasi melalui Dunia Kamus Siswa)	Inovasi GALAKSI EDUKASI (Galakkan Literasi melalui Dunia Kamus Siswa) dikembangkan di UPTD SD Negeri 32 Parepare untuk menjawab rendahnya kemampuan literasi siswa, terutama dalam membaca dan memahami teks. Program ini mendorong siswa membuat kamus pribadi berisi kosakata baru yang ditemukan dari berbagai bacaan atau pengalaman belajar. Melalui tahapan kreatif seperti mencatat, menulis definisi, membuat kalimat, hingga menghias kamus, siswa terlibat aktif dalam proses literasi yang menyenangkan	

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		sekaligus memperkuat pemahaman bahasa Indonesia maupun bahasa daerah Bugis. Hasil implementasi menunjukkan adanya peningkatan penguasaan kosakata, minat baca, serta keterampilan menulis dan berbicara siswa. Kamus pribadi juga berfungsi sebagai portofolio literasi sehingga guru dapat menilai perkembangan kemampuan siswa secara lebih terukur. Inovasi ini tidak hanya membangun kemandirian belajar dan kreativitas siswa, tetapi juga mendukung budaya literasi sekolah, memperkuat pendidikan dasar, dan berpotensi direplikasi di sekolah lain sebagai model pembelajaran literasi yang kontekstual dan berkelanjutan	
44	MABARAKKA (Membaca dan Merangkum dengan Menyenangkan)	Inovasi MABARAKKA (Membaca dan Merangkum dengan Menyenangkan) dikembangkan di SD Negeri 11 Parepare sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yang masih rendah. Melalui metode membaca, merangkum, dan visualisasi dengan platform digital seperti Canva, siswa diajak membuat rangkuman menarik dalam bentuk peta konsep, infografis, atau desain kreatif. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi rendahnya minat baca, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, menulis, dan menyampaikan ide secara sistematis dengan cara yang lebih menyenangkan. Hasil penerapan menunjukkan adanya peningkatan nilai literasi, keterampilan merangkum, minat membaca, serta kreativitas visual siswa. Program ini juga membentuk komunitas belajar yang mendorong kolaborasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan mengintegrasikan teknologi, kreativitas, dan pembelajaran berdiferensiasi, MABARAKKA menjadi inovasi literasi digital yang efektif, aplikatif, serta berpotensi direplikasi di berbagai sekolah sebagai model pembelajaran interaktif di era modern	UPTD SD Negeri 11
45	ASE MATASE'NA 77 (Aplikasi Sederhana Manajemen Tata Laksana Nilai Akhir Sekolah_ dari Handphone)	Inovasi ASE MATASE'NA 77 (Aplikasi Sederhana Manajemen Tata Laksana Nilai Akhir Sekolah dari Handphone) dikembangkan oleh UPTD SD Negeri 77 Parepare sebagai solusi untuk mempermudah guru dalam mengelola penilaian hasil belajar siswa. Aplikasi berbasis Google Sheet ini memungkinkan guru menginput nilai secara real-time langsung dari ponsel, yang otomatis tersimpan dan dapat	UPTD SD Negeri 77

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD
		diakses oleh wali kelas. Dengan sistem ini, penilaian menjadi lebih transparan, akurat, efisien, serta mengurangi beban administratif guru di akhir semester. Hasil penerapan menunjukkan peningkatan akurasi penilaian, kemudahan pemantauan pembelajaran secara real-time, serta meningkatnya kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan. Selain itu, aplikasi ini memperkuat kualitas pembelajaran dengan data penilaian yang lebih otentik dan dapat menjadi model praktik baik bagi sekolah lain. Inovasi ini juga mendukung visi Kota Parepare dalam mewujudkan layanan pendidikan dasar yang bermutu serta transformasi digital dalam tata kelola pendidikan	

2.2. Gambaran Umum Keuangan Daerah

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan Pasal 1, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa yang lalu, yang meliputi analisis tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selain itu, juga dianalisis neraca daerah yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya pada periode sebelumnya. Dari analisis kinerja beberapa tahun kebelakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan serta dengan memperhatikan data ekonomi makro seperti laju petumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan faktor yang penting dalam mengukur kemampuan keuangan daerah melaksanakan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pendapatan merupakan proses yang penting dalam penentuan alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai belanja program/kegiatan Pemerintah Kota Parepare.

Kinerja APBD Kota Parepare Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuatif, realisasi pendapatan tahun 2020 mencapai 834,23 milyar rupiah lebih, tahun 2021 naik menjadi 860,68 milyar rupiah lebih, kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 906,54 milyar rupiah lebih, akan tetapi pada tahun 2023 realisasi realisasi pendapatan mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 896,12 miyar rupiah lebih dan tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai 910,68 milyar rupiah lebih.

Realisasi komponen belanja tahun 2020 sampai tahun 2024 berfluktuatif. Tahun 2020 realisasi belanja daerah sebesar 842,98 milyar rupiah lebih dan megalami kenaikan selama dua tahun

berturut-turut yaitu pada tahun tahun 2021 sebesar Rp881,42 milyar rupiah lebih dan tahun 2022 sebesar Rp904,43 milyar rupiah lebih. Penyerapan anggaran belanja tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami tren penurunan dengan masing-masing realisasi sebesar Rp897,59 milyar rupiah lebih pada tahun 2023 dan Rp894,84 milyar rupiah lebih pada tahun 2024.

Realisasi Pembiayaan Daerah selama Tahun 2020-2024 nilainya selalu positif, yang berarti pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, pada tahun 2020 realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp49,94 Milyar, pada tahun 2021 sebesar Rp38,42 Milyar, pada tahun 2022 sebesar Rp15,02 milayar, tahun 2023 sebesar Rp14,37 milyar dan pada tahun 2024 sebesar Rp9,63 milyar. Perkembangan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi. Gambaran realisasi APBD Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel ... Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024
(Rp.Milyar)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	**PENDAPATAN DAERAH**						
	A. Pendapatan Asli Daerah	161,23	162,94	173.76	196.74	248,07	11.75
	B. Pendapatan Transfer	609,59	678,94	720,19	699,38	662,61	2,33
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	63,41	18,92	12.59	-	-	-75,9
	JUMLAH PENDAPATAN	**834,23**	**860,8**	**906.54**	**896.12**	**910,68**	**2.24**
2.	**BELANJA DAERAH**						
	A. Belanja Operasi	673,49	686,08	701,03	747,49	802,41	4.51
	B. Belanja Modal	165,58	190,35	199,08	145,49	92,37	-10.97
	C. Belanja Tak Terduga	3,06	4,99	4,31	4,6	0,05	-10,56
	D. Belanja Transfer	0,86	0	0	0	0	-100
	JUMLAH BELANJA	**842,98**	**881,42**	**904,43**	**897,59**	**894,84**	**1.53**
	SURPLUS/DEFISIT	**-8,75**	**-20,62**	**-2,11**	**-1,48**	**15,83**	
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
	A. Penerimaan Pembiayaan	57,96	41,19	17,8	17,14	12,89	-28,55
	B. Pengeluaran Pembiayaan	8,02	2,77	2,77	2,77	3,27	-11,85
	PEMBIAYAAN NETTO	**49,94**	**38,42**	**15,03**	**14,4**	**9,63**	**-30,33**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**41,19**	**17,8**	**17,14**	**12,89**	**25,47**	3,06

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2025 (data diolah

2.2.1.1.1. Analisis Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang inovatif.

Analisis pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah kedepannya.

Kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Parepare dari Tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp834,23 milyar rupiah lebih menjadi Rp910,68 milyar rupiah lebih pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,24 persen.

Komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki kinerja cukup baik yang ditandai dengan peningkatan realisasi setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 11,75 persen. Komponen dari Pendapatan Asli Daerah

terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan darah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi tertinggi terhadap rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 14,40 persen kemudian retribusi daerah dengan kontribusi sebesar 7,77 persen. Sedangkan pajak daerah nilai kontribusi sebesar 6,65 persen. Hasil Pengelolalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan kontribusi sebesar 0,77 persen dan merupakan komponen terendah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Sedangkan pada komponen pendapatan transfer mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 2,33 persen pada periode tahun 2020-2024. Komponen ini terdiri atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Kontribusi tertinggi terhadap rata-rata pertumbuhan pada komponen ini berasal dari Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,54 persen yang disumbang oleh dua jenis pendapatan yaitu dana perimbangan dan dana insentif daerah. Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah pertumbuhannya berfluktuatif dan mengalami trend penurunan dengan rata-rata pertumbuhan 6,1 persen selama periode tahun 2020-2024. Pendapatan transfer antar daerah ini disumbang oleh dua jenis pendapatan yaitu pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Kedua jenis pendapatan ini dari tahun ke tahun tumbuh berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan masing-masin sebesar 4,91 persen dan 38,45 persen.

Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah, kontribusinya terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp63,41 milyar rupiah lebih, tahun 2021 kontribusinya sebesar Rp18,92 milyar rupiah lebih dan pada tahun 2022 sebesar Rp12,59 milyar rupiah lebih. Dan sejak tahun 2023 dan 2024 kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah tidak ada terealisasi. Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah ini

terdiri atas Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak adanya realisasi pada tahun 2023 dan 2024 dari dua jenis pendapatan tersebut karena Pemerintah Kota Parepare sudah tidak mendapatkan dana hibah dan pendapatan lainnya. Disamping itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumya masuk dalam komponen belanja ini dialihkan ke komponen belanja pendapatan transfer DAK Non Fisik.

Secara keseluruhan, dengan mengamati ketiga jenis sumber pendapatan daerah Kota Parepare di periode 5 tahun terakhir masih digerakkan oleh pendanaan dari pemerintah pusat melalui pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,63 persen pertahun, PAD dengan kontribusi masih 18,73 persen dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,64 persen.

2.2.1.1.2. Analisis Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja daerah Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 berfluktuasi seiring dengan kondisi penerimaan pendapatan daerah dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 2,91 persen. Realisasi belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp842,98 milyar lebih, dan pada tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan menjadi Rp881,42 Milyar lebih dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp904,43 Milyar. Pada tahun 2023 realisasi belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp897,59 milyar lebih, dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 894,84 Milyar lebih.

Dengan mengamati besaran belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dapat disimpulkan bahwa

selama periode tahun 2020-2024 proporsi jenis belanja terbesar dari total belanja daerah yaitu pada belanja operasi dan yang terendah adalah belanja transfer. Proporsi belanja daerah berdasarkan jenisnya selama periode tahun 2020-2024 yaitu belanja operasi sebesar 81,64 persen, belanja modal 17,96 persen, 0,38 persen untuk belanja tidak terduga dan belanja transfer sebesar 0,02 persen. Dilihat dari rata-rata realisasi belanja, realisasi jenis belanja operasi selama lima tahun terakhir sebesar 2,55 persen, belanja modal 9,82 persen, belanja tak terduga sebesar 743,85 persen dan belanja transfer 0 persen. Namun pada tahun 2021 hingga 2024 belanja transfer yang berupa belanja bantuan keuangan tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2.2.1.1.3. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis Pembiayaan Daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan daerah didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Realisasi Pembiayaan Daerah selama Tahun 2020-2024 nilainya selalu positif, yang berarti pembiayaan dapat digunakan

untuk menutup defisit anggaran, pada tahun 2020 realisasi pembiayaan daerah sebesar Rp49,94 Milyar, pada tahun 2021 sebesar Rp38,42 Milyar, pada tahun 2022 sebesar Rp15,02 milayar, tahun 2023 sebesar Rp14,37 milyar dan pada tahun 2024 sebesar Rp9,63 milyar. Perkembangan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi. Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Parepare hanya bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, sedangkan dari sisi pengeluaran kebijakan yang dilakukan hanya ada pada penyertaan modal daerah pada BUMD dan pembayaran bunga pinjaman sebagau konsekuensi dari pinjaman daerah.

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5 Neraca Daerah Kota Parepare Tahun 2020-2024 (Rp Milyar)

NO.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
1.1.	ASET LANCAR	79,50	89,77	67,12	67,37	726,29	241,53
1.2.	ASET TETAP	1.935,71	2.008,32	2.089,31	3.654,52	1.887,00	8,58
1.3.	ASET LAINNYA	67,17	59,67	50,75	57,79	58,27	-2,85
1.4.	INVESTASI JANGKA PANJANG	89,75	91,56	93,07	103,47	104,75	4,02
	JUMLAH ASET DAERAH	**2.172,13**	**2.249,32**	**2.300,26**	**3.883,17**	**2.980,28**	**12,85**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.50	50.97	37,85	41.14	39,36	14,37
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	11.06	8.30	5,53	2,76	7,33	14,29
	JUMLAH KEWAJIBAN	**39.57**	**59.26**	**43.38**	**43.91**	**46,69**	**7,63**
3	**EKUITAS DANA**	**2.132,56**	**2.190,06**	**2.257,00**	**2.278,31**	**2.933,58**	**8,86**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**2.132,56**	**2.190,06**	**2.257,00**	**2.278,31**	**2.933,58**	**8,86**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.172,13**	**2.249,32**	**2.300,38**	**2.322,22**	**2.980,28**	**8,78**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2025 (diolah)

2.2.1.3. Aset Daerah

Pada tahun 2020 total aset Rp 2.172,13 trilyun dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp3.779,69 trilyun, hal ini disebabkan karena adanya penambahan Belanja Modal di SKPD. Tahun 2024 total nilai aset sebesar Rp2,980.29 trilyun. Penyebab penurunan nilai total asset disebabkan beberapa asset telah dijual melalui proses pelelangan sehingga menambah pendapatan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

Peningkatan aset dari penambahan belanja modal setiap tahun baik pengadaan tanah, gedung, jaringan, dan irigasi dari tahun ketahun mengalami penambahan walaupun di dalam neraca tersebut tetap terjadi pengurangan atau penyusutan setiap tahun namun tidak berpengaruh signifikan. Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2020-2024, Kota Parepare mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,85 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset lancar dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 241,53 persen dan aset tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,58 persen, sementara aset lainnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,85 persen.

2.2.1.4. Kewajiban

Kewajiban yang disajikan di Neraca pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami pencatatan secara fluktuatif, utang jangka panjang selalu mengalami penurunan karena tetap dibayar setiap tahun, utang tersebut adalah pasar lakessi.

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah

menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kota Parepare selama periode 2020-2024 mengalami rata-rata pertumbuhan 7,63 persen setiap tahunnya. Kewajiban jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,37 persen pertahun. Kewajiban jangka panjang mengalami pertumbuhan negative dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -14,29 persen pertahun yang hanya didapatkan dari komponen utang jangka panjang lainnya.

2.2.1.5. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan Bersih pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah. Ekuitas dana terus mengalami peningkatan pada periode tahun 2020-2024. Tahun 2020 ekuitas dana sebesar Rp2.132,56 triliun, pada tahun 2021 menjadi Rp2.190,06 Triliun, tahun 2022 meningkat menjadi Rp2.257 Triliun. Pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi Rp2.278,42 Trilliun dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.933,58 trilyun.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Didalam Komponen Rasio Likuiditas ini ada 2 (dua) komponen rasio yang dihitung yaitu Rasio Lancar dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dan Rasio Quick dengan formula adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya Dari tabel 3.6 di bawah dapat diketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Kota

Parepare berada rata-rata diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.

Tabel 2...
Rasio Lancar Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Lancar
2020	79,497,290,446.29	28,503,772,463.43	2,79
2021	89,769,663,153.33	50,965,473,010.09	1,76
2022	67,121,827,552.05	37,857,312,401.71	1,77
2023	67,368,427,160.24	41,144,152,562.50	1.64
2024	726,296,770,080.30	39,369,153,890.93	18,44

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2025 (Data diolah)

Rasio cair yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid,

dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.7, rasio cair Pemerintah Kota Parepare capaiannya lebih, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 2....
Rasio Quick Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Quick
2020	79,497,290,446.29	15.594.744.951,54	28.503.772.463,43	2.24
2021	89,769,663,153.33	19,666,913,667.86	50,965,473,010.09	1.38
2022	67,121,827,552.05	21,542,375,060.46	37,857,312,401.71	1.20
2023	67,368,427,160.24	17,070,290,623.36	41,144,152,562.50	1.22
2024	726,296,770,080.30	18,074,168,001.03	39,369,153,890.93	17.99

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2025 (Data diolah)

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung Rasio Solvabilitas ini adalah Rasio Total Hutang terhadap total Aset yang secara langsung membandingkan Total Kewajiban (Kewajiban Jangka Pendak dan Kewajiban Jangka Panjang) dibagi dengan Total Asset dan Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas dengan membandingkan Total kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Rasio total kewajiban terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh kewajiban/utang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh utang terhadap aktivitas Pemerintah Kota Parepare yang paling besar yaitu 0,03 persen pada tahun 2021, paling rendah sebesar 0,02 persen pada tahun 2020, 2022, dan 2023. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang

Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

Tabel 2....
Rasio Total kewajiban dengan Aset, 2020-2024

Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio
2020	39.567.200.587,15	2.172.128.990.606,18	0,02
2021	59,263,044,103.07	2,249,324,696,756.63	0,03
2022	43,389,026,464.39	2,300,259,690,600.04	0,02
2023	43,910,009,595.18	2,322,229,730,008.18	0,02
2024	46,699,202,307.93	2,980,288,738,029.18	0,02

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2024 (Data diolah)

Rasio Utang terhadap asset 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2020 sebesar 0,02 dan pada Tahun 2023 naik menjadi 0,03, kemudian dua tahun berikutnya turun menjadi 0,02. Ini menandakan total asset masih lebih banyak dari kewajiban Pemerintah Kota Parepare.

Tabel 2....
Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas, 2020-2024

Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
2020	39.567.200.587,15	2,132,561,790,019.03	0,02
2021	59,263,044,103.07	2,190,061,652,653.56	0,03
2022	43,389,026,464.39	2,256,870,664,135.65	0,02
2023	43,910,009,595.18	2,278,319,720,413.00	0,02
2024	46,699,202,307.93	2,933,589,535,721.25	0,02

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2024 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, menunjukkan rasio total utang terhadap ekuitas dari 0,02 tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 0,02 dan pada range waktu itu tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan, yang berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. Peningkatan rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Parepare untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya masih terkategori sangat baik, karena pendanaan utang untuk membiayai aktivitas pemerintah masih sangat kecil.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa lama tingkat perputaran piutang dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Kota Parepare untuk terkonversi menjadi kas untuk mendukung pelayanan publik. Rasio Aktivitas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.... berikut:

Tabel 2.... Rasio Aktivitas Kota Parepare Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rata-rata Umur Piutang	1-5 Tahun	1-5 Tahun	1-5 Tahun	1-5 Tahun	1-5 Tahun
Rata-rata Umur Persediaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.... di atas, menunjukkan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 1-5 tahun. Rata-rata umur persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup popular untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya instansi mengontrol modal yang

ada pada persediaan. Rata-rata umur persediaan menunjukan kecenderungan yang semakin membaik.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan belanja aparatur Pemerintah Kota Parepare tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung berfluktuasi. Tahun 2020 proporsi belanja aparatur sebesar 37,04 persen turun di tahun 2021 menjadi sebesar 35,36 persen, namun meningkat menjadi 37,17 pada tahun 2022, tahun 2023 belanja aparatur pemerintah meningkat menjadi 37,52 persen dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 39,38 persen. Namun proporsi belanja aparatur rata-rata dibawah 40 persen, ini menandakan bahwa 60 persen anggaran digunakan dengan mengutamakan pembangunan untuk kebutuhan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik serta keadilan ekonomi masyarakat.

Tabel 2... Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, 2020-2024

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp Milyar)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) /(Rp Milyar)	Prosentase (%)
2020	315,19	850,99	37,04
2021	312,63	884,19	35,36
2022	337,16	907,19	37,17
2023	337,77	900,36	37,52
2024	365,25	927,53	39,38

Sumber : BKD Kota Parepare Tahun 2025 (Data diolah)

2.2.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang.

Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk memanfaatkan surplus tersebut dalam aktivitas pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan aktivitas penerimaan pembiayaan daerah.

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran. Surplus/defisit riil anggaran Pemerintah Kota Parepare yang disajikan pada Tabel 2.... menunjukkan bahwa Kota Parepare mengalami defisit anggaran pada tahun 2020-2024. Kemampuan Pemerintah Kota Parepare untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada Tabel 2....

Tabel 2.... Defisit Riil Anggaran Kota Parepare Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Rp)	834.23	860.80	905.70	896.12	910.68
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah (Juta Rp)	842.98	881.42	903.74	897.59	894.83
3	Pengeluaran Pembiayaan (Juta Rp)	8.02	2.77	2.77	2.77	3.27
A	Defisit Riil	(16.8)	(23.4)	(0.8)	(4.246.96)	(19.12)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	57.96	41.19	17.80	17.14	12.89

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	57.96	41.19	17.80	17.14	12.89
A+B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan**	**41.19**	**17.80**	**17.14**	**12.89**	**25.47**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Tahun 2025

Dari Tabel 3.12 terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Kota Parepare mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. SILPA tersebut berasal dari sisa penghematan dalam melakukan belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Kondisi ini menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare masih cukup kuat membiayai belanja operasi dan belanja modal.

2.2.2.3. Analisis Fiskal Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Rasio ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan yang diterima, termasuk dana transfer dan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Secara teknis, rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan total dana transfer dan dana perimbangan yang diterima terhadap total pendapatan daerah, yang kemudian

dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin rendah persentase rasio ini, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut, karena menunjukkan bahwa daerah lebih mengandalkan sumber pendapatan sendiri daripada bantuan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin tinggi persentase rasio ini menunjukkan semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel .....
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Total Pendapatan Transfer/Perimbangan (Rp)	Rasio Transfer terhadap Pendapatan Daerah
2020	703.451.489.603,00	560.512.161.000,00	79,68
2021	976.034.142.622,00	566.925.461.000,00	58,08
2022	1.000.567.429.546,24	622.684.084.000,00	62,23
2023	982.802.420.504,00	608.628.439.000,00	61,93
2024	940.518.864.333,00	616.341.311.000,00	65,53

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Data di olah (2025)

Berdasarkan tabel rasio kemandirian keuangan Kota Parepare periode tahun 2020-2024, kondisi kemandirian keuangan daerah menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Total pendapatan daerah mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan nilai sebesar Rp 703,45 miliar pada tahun 2020, kemudian meningkat drastis menjadi Rp 976,03 miliar pada tahun 2021 atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,7%. Pendapatan daerah mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai Rp 1.000,57 miliar, namun kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai Rp 940,52 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, total pendapatan transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat menunjukkan pola yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Nilai transfer berkisar antara Rp 560,51 miliar hingga Rp 622,68 miliar selama periode tahun 2022-2024. Transfer tertinggi terjadi pada

tahun 2022 sebesar Rp 622,68 miliar, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai Rp 616,34 miliar pada tahun 2024. Stabilitas dana transfer ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung operasional pemerintah daerah, meskipun besarannya tidak mengalami peningkatan signifikan.

Rasio transfer terhadap pendapatan daerah merupakan indikator kunci yang menggambarkan tingkat kemandirian keuangan Kota Parepare. Data menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi sepanjang periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio mencapai 79,68%, menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer. Meskipun mengalami perbaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi 58,08%, rasio ini kembali meningkat dengan capaian 62,23% pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 61,93% pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan sebesar 65,53% pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare masih belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tingginya ketergantungan ini menunjukkan perlunya upaya secara sistematis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Rasio Fiskal Daerah

Rasio fiskal daerah merupakan indikator keuangan yang mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Rasio fiskal daerah menggambarkan proporsi antara total pendapatan daerah dengan berbagai komponen pembiayaannya, termasuk pendapatan hibah, dana alokasi khusus, belanja pegawai, dan belanja bunga. Indikator ini menjadi parameter penting untuk

menilai tingkat kemandirian fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pelayanan publik. Sementara itu, ruang fiskal daerah merupakan kapasitas atau fleksibilitas keuangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja atau mengurangi beban pajak tanpa mengorbankan stabilitas fiskal dan kemampuan membayar kewajiban. Ruang fiskal menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang karena menunjukkan seberapa besar kapasitas daerah untuk melaksanakan program-program pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tanpa mengganggu keseimbangan anggaran dan keberlanjutan fiskal.

Tabel .....
Rasio Fiskal Daerah Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Selisih	Ruang Fiskal
2020	703.451.489.603,00	0	103.355.786.000,00	329.713.259.177,00	2.500.000.000.00	270.382.444.426,00	38,44
2021	976.034.142.622,00	17.235.144.245,00	184.488.407.000,00	333.183.417.898,00	1.020.000.000,00	440.107.173.479,00	45,09
2022	1.000.567.429.546,24	17.521.074.000,00	250.818.165.000,00	363.590.392.212,00	1.100.000.000,00	367.537.798.334,24	36,73
2023	982.802.420.504,00	0	151.395.939.000,00	366.998.035.648,00	1.000.000.000,00	463.608.115.856,00	47,17
2024	940.518.864.333,00	0	124.992.779.000,00	411.096.448.617,00	1.000.000.000,00	403.429.636.716,00	42,89

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Data di olah (2025)

Ruang fiskal Kota Parepare menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dan menggembirakan selama periode 2020-2024, meskipun dengan beberapa fluktuasi yang mencerminkan dinamika kondisi ekonomi dan fiskal daerah. Dimulai dari titik terendah 38,44% pada tahun 2020, ruang fiskal mengalami peningkatan substansial menjadi 45,09% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan sementara menjadi 36,73% pada tahun 2022 sebelum mencapai puncak tertinggi 47,17% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 42,89% pada tahun 2024. Rata-rata ruang fiskal selama periode lima tahun adalah 42,06%, yang menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat dan memberikan fleksibilitas yang memadai bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai prioritas pembangunan.

3. Rasio Pajak Daerah

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator untuk mengukur perbandingan antara total penerimaan pajak daerah dengan nilai PDRB suatu daerah dalam periode tertentu. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, rasio ini memiliki signifikansi yang mendalam karena menghubungkan dua aspek, yaitu kinerja ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB dan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya melalui pajak daerah. Keterkaitan antara Pajak Daerah dan PDRB merepresentasikan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu daerah, sementara pajak daerah merupakan instrumen bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan nilai tambah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tax ratio Kota Parepare menunjukkan tren yang relatif stabil dengan berada pada rentang 0,42 hingga 0,46. Pada tahun 2020, di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, tax ratio tercatat sebesar 0,45 dengan pajak daerah mencapai Rp 32,60 triliun dari total PDRB sebesar Rp 7,32 triliun. di tahun 2021, tax ratio mengalami peningkatan menjadi 0,46, sejalan dengan peningkatan pajak daerah menjadi Rp 36,28 triliun dan PDRB yang mencapai Rp 7,82 triliun. Namun, pada tahun 2022, tax ratio kembali turun ke level 0,45 meskipun secara absolut baik pajak daerah maupun PDRB terus mengalami pertumbuhan menjadi Rp 38,81 triliun dan Rp 8,69 triliun. Tahun 2023, tax ratio kembali menguat ke posisi 0,46, didukung oleh pajak daerah sebesar Rp 42,38 triliun dan PDRB mencapai Rp 9,31 triliun. Namun, perkembangan yang perlu mendapat perhatian terjadi pada tahun 2024, dimana tax ratio turun secara signifikan menjadi 0,42, meskipun pajak daerah masih tumbuh menjadi Rp 42,02 triliun dan PDRB mencapai Rp 9,97 triliun. Penurunan tax ratio pada tahun 2024 disebabkan

beberapa hal diantaranya kepatuhan wajib pajak dan efektivitas mekanisme pengumpulan pajak daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Parepare digambarkan pada tabel berikut :

Tabel .....
Rasio Pajak Daerah Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	Nilai PDRB (Milyar Rupiah)	Tax Ratio
2020	32.601.904.835,70	7.323,65	0,45
2021	36.288.891.979,65	7.826,24	0,46
2022	38.817.569.022,58	8.697,27	0,45
2023	42.384.557.470,55	9.311,61	0,46
2024	42.021.021.539,11	9.972,18	0,42

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan BPS, Data di olah (2025)

Penurunan di tahun 2024 mengisyaratkan perlunya evaluasi terhadap strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Implementasi digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan program edukasi dan penegakan hukum menjadi agenda prioritas untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah 5 tahun kedepan.

4. Rasio Belanja Pegawai

Berdasarkan data belanja pegawai selama periode 2020-2024, terlihat adanya tren pertumbuhan dalam alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Belanja pegawai mengalami peningkatan dari Rp329.713.259.177 pada tahun 2020 menjadi Rp411.096.448.617 pada tahun 2024, yang menunjukkan kenaikan sebesar 24,7% atau rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 5,7%.

Pola pertumbuhan belanja pegawai menunjukkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar Rp 3.470.158.721 atau 1,05% dari tahun sebelumnya. Momentum pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan

peningkatan mencapai Rp30.406.974.314 atau 9,13%, yang disebabkan adanya penerimaan pegawai pada tahun 2021 dan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang baru diberlakukan pada tahun 2022. Tahun 2023 dengan kenaikan Rp3.407.643.436, dengan persentase pertumbuhannya 0,94%. Pada tahun 2024, belanja pegawai kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 44.098.413.069 atau 12,03% hal ini disebabkan adanya penyesuain tunjangan jabatan pejabat fungsional. Rasio belanja pegawai terhadap total pendapatan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel .....
Rasio Belanja Pegawai Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
2020	329.713.259.177,00	858.221.750.107,00	38,42
2021	333.183.417.898,00	1.009.205.271.281,00	33,01
2022	363.590.392.212,00	1.010.347.092.139,00	35,99
2023	366.998.035.648,00	991.927.398.552,00	37,00
2024	411.096.448.617,00	957.502.864.333,00	42,93

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Data di olah (2025)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 146 ayat 1, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belum dipenuhinya ketentuan batas maksimal 30% sepanjang periode 2020-2024 menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, tren penurunan rasio dari 38,42% menjadi 37,00% (dengan pengecualian pada tahun 2024) sebagai upaya untuk mencapai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut melalui alokasi anggaran belanja modal, belanja barang

dan jasa, serta program-program peningkatan kualitas layanan publik.

5. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan indikator dalam menilai kinerja fiskal pemerintah, yang menggambarkan proporsi belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap terhadap total pengeluaran daerah. Rasio ini menjadi parameter untuk mengukur komitmen pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dasar dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu tahun anggaran. Capaian rasio belanja modal digambarkan pada tabel berikut :

Tabel .....
Rasio Belanja Modal Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
2020	142.706.494.342,00	858.221.750.107,00	16,63
2021	248.300.885.875,00	1.009.205.271.281,00	24,60
2022	250.031.117.444,00	1.010.347.092.139,00	24,75
2023	145.499.419.851,00	991.927.398.552.00	14,67
2024	91.724.376.039,00	957.502.864.333,00	9,58

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Data di olah (2025)

Capaian rasio belanja modal Pemerintah Kota Parepare periode tahun 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio belanja modal tercatat sebesar 16,63%, yang mengindikasikan alokasi yang cukup proporsional untuk belanja modal. Kondisi ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021, dimana rasio belanja modal naik menjadi 24,60% dan berlanjut pada tahun 2022, dimana rasio belanja modal sedikit

meningkat menjadi 24,75%. Peningkatan belanja modal pada periode tersebut diprioritaskan pada pembangunan Mesjid Terapung dan perbaikan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya.

Namun demikian, pada tahun 2023-2024, rasio belanja modal mengalami penurunan secara signifikan menjadi 14,67% pada tahun 2023 dan 9,58% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat terutama Dana Alokasi Khusus (DAK FISIK).

6. Rasio Belanja Per Kapita Penduduk

Rasio belanja daerah per kapita penduduk adalah indikator keuangan daerah yang mengukur besarnya belanja daerah yang dialokasikan untuk setiap penduduk dalam suatu wilayah selama satu tahun. Semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk maka semakin besar kemungkinan tercapainya kesejahteraan. Sementara semakin kecil rasio belanja daerah untuk satu orang penduduk maka kemungkinan akan tercapainya kesejahteraan semakin kecil. Rasio belanja per kapita penduduk Kota Parepare digambarkan pada tabel berikut :

Tabel .....
Rasio Belanja Daerah per Kapita Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Total Belanja	Jumlah Penduduk	Belanja Daerah per Kapita
2020	858.221.750.107,00	151.454	5.666.551
2021	1.009.205.271.281,00	152.922	6.599.477
2022	1.010.347.092.139,00	154.854	6.524.514
2023	991.927.398.552.00	160.309	6.187.596
2024	957.502.864.333,00	163.300	5.863.459

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan BPS, Data di olah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, belanja daerah per kapita penduduk menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024.

Pada tahun 2020, belanja per kapita tercatat sebesar Rp 5.666.551 dengan total belanja daerah Rp858.221.750.107.000 dan jumlah penduduk 151.454 jiwa. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan menjadi Rp6.599.477 per kapita, dengan kenaikan sebesar 16,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan total belanja daerah menjadi Rp1.009.205.271.281.000 meskipun terjadi pertambahan penduduk menjadi 152.922 jiwa.

Pada tahun 2022-2024 , belanja per kapita mengalami tren penurunan. Tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 1,14% menjadi Rp 6.524.514 per kapita, diikuti penurunan lebih signifikan pada 2023 sebesar 5,16% menjadi Rp 6.187.596. Tahun 2024 dengan penurunan 5,24% menjadi Rp 5.863.459 per kapita. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan belanja daerah dan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

7. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota juga mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Tujuan pemberian Dana Bagi Hasil ini untuk memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, dan membantu daerah dalam meningkatkan pelayanan publik serta infrastruktur.

Realisasi dana bagi hasil Kota Parepare menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, total realisasi tercatat sebesar Rp 17.762.760.660, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp 25.515.870.536 pada tahun 2021 atau tumbuh sebesar 43,6%. Tren positif ini

berlanjut hingga tahun 2022 dengan realisasi mencapai Rp 27.222.873.945, meskipun pertumbuhan melambat menjadi 6,7%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis menjadi Rp 15.203.389.573 atau turun 44,1% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini kemudian mengalami stabilisasi pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp15.322.603.000, menunjukkan pertumbuhan minimal sebesar 0,8%. Realisasi dana bagi hasil pemerintah Kota Parepare tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel .....
Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Parepare Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.349.004.596	6.980.271.419	5.481.820.736	1.105.545.766	617.338.000
2	DBH PPh Pasal 21	9.569.523.547	10.020.250.180	8.090.016.776	8.569.540.043	8.531.322.000
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		853.976.915	954.584.674	-	316.770.000
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	178.658.130	185.623.499	184.673.262	287.815.362	284.020.000
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-	-	150.287	-	49.000
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	1.195.798.568	729.644.000	291.662.523	385.506.000
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.572.848.846	4.790.021.181	9.769.505.740	3.449.659.947	2.859.150.000
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	15.159.796	37.375.604	54.167.470	17.411.721	199.038.000
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	788.276.289	1.452.553.170	1.958.311.000	1.481.754.211	1.129.410.000
10	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	289.289.456	-	-	-	-
11	DBH Sawit	-	-	-	-	1.000.000.000
TOTAL		**17.762.760.660**	**25.515.870.536**	**27.222.873.945**	**15.203.389.573**	**15.322.603.000**

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan BPS, Data di olah (2025)

2.2.2.4. Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Berdasarkan data kontribusi PDRB menurut pengeluaran Kota Parepare tahun 2020-2024, dapat dianalisis bahwa perekonomian Kota Parepare menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama periode lima tahun. Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan signifikan dari 7.323,65 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 9.972,18 miliar rupiah pada tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan kumulatif sebesar 36,1% atau rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 7,9%.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kota Parepare, dengan nilai yang terus meningkat dari 3.980,90 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 5.393,50 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin membaik dan aktivitas konsumsi yang mengalami pertumbuhan relative stabil. Sementara itu, komponen pengeluaran pemerintah juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 982,74 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.511,74 miliar rupiah pada tahun 2024, ini mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja publik.

Pembentukan modal tetap domestik bruto menunjukkan fluktuasi yang cukup menarik, dimana setelah mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3.258,41 miliar rupiah dari 3.070,09 miliar rupiah pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan yang stabil hingga mencapai 4.066,32 miliar rupiah pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya upaya pemulihan dan peningkatan investasi infrastruktur serta modal produktif di Kota Parepare. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah komponen net ekspor barang dan jasa yang menunjukkan nilai negatif sepanjang periode 2020-2024, bahkan cenderung semakin defisit dari -760,11 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi -1.074,22 miliar rupiah pada tahun 2024, yang mengindikasikan

ketergantungan terhadap impor dibandingkan kemampuan ekspor daerah. Lebih jelasnya digambarkan pada tabel berikut :

Tabel .....
Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran
Kota Parepare Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

NO	KOMPONEN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.980,90	4.217,42	4.603,93	5.013,44	5.393,50
2	Pengeluaran Konsumsi LPNRT	44,28	45,96	52,72	58,88	68,77
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	982,74	1.127,11	1.216,62	1.324,17	1.511,74
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.070,09	3.258,41	3.449,27	3.729,22	4.066,32
5	Perubahan Inventori	5,75	2,69	5,95	5,35	6,07
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	- 760,11	- 825,35	- 631,22	- 819,45	- 1.074,22
TOTAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**7.323,65**	**7.826,24**	**8.697,27**	**9.311,61**	**9.972,18**

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2025

Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah Kota Parepare dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) pemerintah. Pada tahun 2020, kontribusi APBD terhadap konsumsi pemerintah mencapai 87,33 persen, yang kemudian meningkat menjadi 89,54 persen pada tahun 2021. Namun, setelah tahun 2021, terjadi penurunan bertahap hingga mencapai 63,34 persen pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen konsumsi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel ....
Kontribusi APBD terhadap PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020-2024

Tahun	Konsumsi Pemerintah (Milyar Rupiah)	Total Belanja APBD	Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah
2020	982,74	858.221.750.107,00	87,33
2021	1.127,11	1.009.205.271.281,00	89,54
2022	1.216,62	1.010.347.092.139,00	83,05
2023	1.324,17	991.927.398.552.00	74,91
2024	1.511,74	957.502.864.333,00	63,34

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan BPS, Data di olah (2025)

Kemudian, peran APBD dalam pembentukan modal tetap domestik bruto dalam 5 tahun terakhir belum mengalami peningkatan bahkan cendrung menurun. Belanja modal Pemerintah Parepare belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB yang dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD terhadap PMTB seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel ....
Kontribusi APBD terhadap PDRB
Pada Komponen PMTB Tahun 2020-2024

Tahun	Komponen PMTB (Milyar Rupiah)	Total Belanja Modal	Share Belanja Modal Terhadap Komponen PMTB
2020	3.070,09	142.706.494.342,00	4,65
2021	3.258,41	248.300.885.875,00	7,62
2022	3.449,27	250.031.117.444,00	7,25
2023	3.729,22	145.499.419.851,00	3,90
2024	4.066,32	91.724.376.039,00	2,26

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan BPS, Data di olah (2025)

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun mendatang, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik perlu dirumuskan secara cermat. Perumusan ini dilakukan dalam bentuk analisis kerangka pendanaan, yang dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan daerah beberapa tahun sebelumnya, serta kondisi strategis yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengalokasian sumber penerimaan ke dalam pos belanja dan pengeluaran antara lain :

a. Alokasi belanja yang pembiayaannya berasal dari penerimaan retribusi pajak diupayakan agar berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
c. Penerimaan Dana Alokasi Umum, pengalokasiannya diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintahan Daerah.
d. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik disesuaikan dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
e. Penerimaan Dana bagi Hasil pengalokasiannya dilakukan secara memadai untuk perbaikan pelayanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil tersebut didapat.

Penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, Indeks gini, Angka

Kemiskinan dan IPM, serta memperhatikan tingkat inflasi pada tahun berjalan.

Sedangkan pada aspek perumusan Kebijakan belanja Pemerintah Kota Parepare untuk tahun 2026-2030 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah periode sebelumnya, arahan dari pemerintah pusat dan provinsi serta menperhatikan kondisi strategis Kota Parepare berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya. Olehnya itu, maka prioritas belanja daerah diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
b. Memenuhi kebutuhan belanja dalam upaya pencapaian visi dan misi serta prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
c. Mendorong pemenuhan anggaran belanja yang cukup untuk memenuhi *mandatory spending;*
d. Mengakomodir belanja operasional yang merupakan belanja wajib dan mengikat karena terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang merupakan belanja kebutuhan aparatur yang wajib dipenuhi. Besarannya disesuaikan dengan jumlah pegawai dan pengaruh inflasi atas harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan operasional aparatur Negara
e. Mendorong peningkatan belanja modal setiap tahunnya.

Proyeksi belanja keseluruhan diprediksikan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, yang sejalan dengan upaya pencapaian visi, dan misi, kebijakan dan strategi Kepala Daerah.

2.2.4. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

2.2.4.1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2026-2030

Penetapan proyeksi pendapatan daerah didasarkan beberapa asumsi yang menyertainya yaitu asumsi makro ekonomi, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah daerah. Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan keuangan daerah. Indikator-indikator makro dan kondisi sosial tidak hanya berfungsi sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi yang diinginkan, tetapi juga berperan sebagai faktor utama dalam menciptakan potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh ke depan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, proyeksi indikator makro ekonomi dan sosial masyarakat mengemban fungsi yang saling berkaitan. Di satu sisi, indikator tersebut menjadi parameter kinerja pembangunan daerah yang menentukan besarnya alokasi kebutuhan belanja daerah. Di sisi lain, indikator yang sama menggambarkan kondisi yang mencerminkan berbagai peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan memperbesar pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Proyeksi indicator makro dan sosial Kota Parepare digambarkan pada tabel berikut :

Tabel ....
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kota Parepare
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09	5,29	5,99	6,28	6,42	7,69	7,99

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	PDRB per kapita (Rp. Juta)	(Rp. Juta)	61,97	65,25	69,16	76,63	82,24	85,49	92,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,23	5,14	5,05	4,48	4,26	4,78	4,68
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,27	4,84-4,25	4,63-3,93	4,41-3,62	4,20-3,30	3,98-2,98	3,62-2,80
5	Rasio Gini (Indeks)	Angka	0,376	0,370	0,363	0,360	0,355	0,345	0,338
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,97	81,26	81,60	82,52	83,21	82,69	83,02

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2025

Asumsi makro ekonomi dan sosial Kota Parepare diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kota Parepare lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Indeks rasio gini dan indeks pembangunan manusia (IPM). Keenam indikator makro ekonomi dan sosial daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekonomi sektor swasta.

2.2.4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah

Selama periode 2026-2030, target pendapatan daerah diperkirakan mengalami peningkatan dari Rp967,59 milyar di tahun 2025 menjadi Rp1.078,75 trilyun di tahun 2030. Sumber pembentuk pendapatan daerah terbesar masih diprediksikan berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat meskipun

kecendrungannya meningkat akan tetapi tidak terlalu signifikan dan peran PAD akan dimaksimalkan dengan kecenderungan mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan Pembangunan di Kota Parepare.

2.2.4.3. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

Seiring dengan target peningkatan pendapatan daerah Kota Parepare dan peningkatan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas, maka belanja daerah ditargetkan meningkat dari Rp960,79 milyar di tahun 2025 menjadi Rp 1.102,44 milyar di tahun 2030. Pembentuk belanja daerah terbesar masih didominasi oleh belanja operasional terutama belanja pegawai. Hampir separuh dari total belanja operasional dialokasikan untuk belanja pegawai yang diprediksikan mengalami peningkatan selama lima tahun ke depan.

2.2.4.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran pada periode tahun 2026-2030, pembiayaan netto Kota Parepare diproyeksikan mengalami penurunan.

Untuk lebih jelasnya proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.....
Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Parepare Tahun 2026-2030 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Base Line 2024 (Rp Milyar)	Pagu APBD 2025	Proyeksi (Rp Milyar)				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN DAERAH**							
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	248,07	291,79	302,01	313,68	320,09	327,98	335,27
1.2.	Pendapatan Transfer	662,60	675,80	669,71	695,59	709,83	727,30	743,48
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	**910,67**	**967,59**	**971,72**	**1.009,27**	**1.029,92**	**1.055,28**	**1.078,75**
2	**BELANJA DAERAH**							
2.1.	Belanja Operasi	802,41	890,97	892,04	926,51	945,48	968,74	990,29
2.2.	Belanja Modal	92,37	88,05	90,68	94,18	96,11	98,48	100,66
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,05	10,00	10,35	10,78	10,97	11,24	11,49
2.4	Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	**894,83**	**989,02**	**993,06**	**1.031,44**	**1.052,55**	**1.078,46**	**1.102,44**
	SURPLUS/DEFISIT	**15,83**	**(21,42)**	**(21,34)**	**(22,17)**	**(22,63)**	**(23,18)**	**(23,69)**
3	**Pembiayaan Daerah**							
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	12,89	24,69	0	0	0	0	0
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3,26	3,26	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Pembiayaan Netto	**9,62**	**21,42**	**(5,50)**	**(5,50)**	**(5,50)**	**(5,50)**	**(5,50)**

Sumber : Bappeda dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (data diolah), Tahun 2025

2.2.4.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Selama periode lima tahun ke depan, diprediksikan setelah memperhitungkan seluruh komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dan perkiraan perolehan pendapatan daerah, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2026-2030) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2025-2029. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Parepare lima tahun kedepan digambarkan pada tabel berikut :

Tabel .....
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026 – 2030

NO	URAIAN	PAGU	Proyeksi (Milyar Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	291,79	302,01	313,68	320,09	327,98	335,27
2	Dana Alokasi Umum	482,60	500,96	505,97	510,98	515,99	521,00
3	Dana Bagi Hasil	16,22	16,09	16,24	17,06	17,91	18,81
TOTAL PENERIMAAN		**790,61**	**825,12**	**847,46**	**847 ,47**	**871,45**	**902,38**
Dikurangi							
4	Belanja Pegawai	422,56	437,24	454,14	463,43	474,84	485,39
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN		**368,05**	**381,82**	**381,75**	**384,70**	**387,04**	**389,69**

Sumber : Bappeda dan Badan Keuangan Daerah (Data diolah), Tahun 2025

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya

ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

a. Prioritas Pertama. Rencana alokasi anggaran untuk prioritas I yang pengalokasian anggarannya untuk program yang berkaitan dengan dengan belanja wajib pelayanan dasar, prioritas nasional termasuk untuk memenuhi *mandatory spending* yang disyaratkan oleh pemerintah pusat, diantaranya:
   1. Belanja fungsi pendidikan, untuk memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   2. Belanja fungsi kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Kota Parepare berencana tetap mengalokasikan minimal 10 persen dari APBD;
   3. Belanja infrastruktur pelayanan publik, paling rendah 40 persen dari total belanja daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
   4. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya, dan;
   5. Belanja yang mendukung prioritas nasional.
b. Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Visi Misi Wali kota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2025 – 2029, dan
c. Prioritas ketiga digunakan untuk membiayai prioritas penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya berdasarkan pembagian urusan pemerintahan.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk menemukenali permasalahan dan isu strategis daerah. Identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah dapat lebih dipertajam dengan melakukan koordinasi antar SKPD maupun melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 45 dan 46, disebutkan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan

kinerja pembangunan daerah di masa lalu, yang dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Berdasarkan data dan fakta yang dipaparkan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, dapat identifikasi sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan pada periode perencanaan sebelumnya dan menjadi bagian dari permasalahan pembangunan daerah yang akan diselesaikan pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dibagi dalam 2 (dua) level/tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah memiliki nilai prioritas jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD. Identifikasi permasalahan pembangunan distrukturkan dalam bentuk pohon masalah, yang terdiri atas masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok yang dipecahkan melalui rumusan strategi. Sedangkan akar masalah adalah penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dapat dipecahkan melalui arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masalah

pokok pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah diuraikan sebagai berikut:

1. melambatnya pertumbuhan indeks pembangunan manusia;
2. melambatnya laju pertumbuhan ekonomi;
3. masih tingginga tingkat kemiskinan;
4. masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
5. masih rendahnya pendapatan per kapita;
6. masih tingginya ketimpangan pendapatan;
7. belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

Berdasarkan masalah pokok di atas, selanjutnya diuraikan masalah dan akar masalahnya, sebagai berikut:

1. Melambatnya Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kota Parepare selama 5 tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 angka IPM sebesar 77,86, yang meningkat menjadi 79,64 pada tahun 2024. Secara relatif, posisi IPM Kota Parepare berada pada peringkat ketiga teratas di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar (83,9) dan Palopo (79,94). Untuk wilayah Se-Ajatappareng, Kota Parepare berada pada posisi pertama. Namun dari sisi pertumbuhan atau kecepatannya, IPM Kota Parepare pertumbuhannya cenderung melambat. Tahun 2024 pertumbuhan IPM Kota Parepare hanya bertumbuh sebesar yaitu 0,77 persen, dibandingkan Kabupaten Pinrang, Barru, dan Enrekang yang tumbuh paling cepat yaitu 0,97 persen. Perlambatan pertumbuhan IPM menjadi perhatian agar dapat ditingkatkan dalam pencapaian yang ditargetkan provinsi dan nasional yaitu sebesar 82,69 pada tahun 2029. Perlambatan tersebut dipengaruhi komponen kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat.

Komponen kesehatan dapat dilihat pada dimensi umur panjang dan sehat diukur oleh variabel angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Meskipun capaian AHH cenderung meningkat (71,98 tahun) namun belum diiringi oleh peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini ditandai oleh meningkatnya angka kematian ibu dan anak, dimana angka kematian bayi mencapai 13 per 1000 kelahiran baru, angka kematian balita mencapai 13 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal mencapai 11 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu yang mencapai 183 per 100.000 kelahiran hidup, serta masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang sesuai standar kepada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Selain itu terjadi peningkatan kasus pengidap TBC dan kematian akibat TBC. Berbagai kendala dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak antara lain disebabkan oleh pemenuhan gizi pada ibu hamil, pemanfaatan pelayanan kesehatan yang kurang optimal, faktor medis seperti kekurangan energi kronis, berat badan lahir rendah, asfiksia, infeksi, stunting, dan anemia serta keterbatasan sumber daya kesehatan dan faktor sosial budaya. Selain itu peningkatan kasus TBC disebabkan oleh ketidakpatuhan pengobatan, keterbatasan infrastruktur serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengobatan TBC yang tuntas belum maksimal.

Komponen pendidikan dapat dilihat pada dimensi pengetahuan diukur oleh dua variabel yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). Capaian Kota Parepare Tahun 2024 untuk dimensi pendidikan selalu mengalami peningkatan, dimana RLS mencapai 10,88 tahun dan HLS mencapai 14,55 tahun. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Parepare, dimana target pelayanan minimum yang sudah ditentukan belum tercapai, baik untuk pendidikan anak usia dini (49,78%), pendidikan dasar (87,86%) dan pendidikan kesetaraan (98,23%). Angka pendidikan anak usia dini

memiliki capaian yang masih rendah dan mempengaruhi perlambatan indeks pendidikan. Indikasi lainnya ditandai oleh menurunnya angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi sekolah khususnya pada SMP dan SMA. Selain itu masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah baik karena putus sekolah, tidak lulus ataupun tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini diduga disebabkan adanya permasalahan ekonomi keluarga serta kurangnya minat siswa untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dari sisi ketersediaan sekolah, untuk SD terdapat 57 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar dimana sekolah dengan kondisi bangunan baik sebesar 70,19%. Sementara untuk SMP dan SMA, hanya terdapat 26 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah dimana sekolah dengan kondisi bangunan baik sebesar 70,69%.

Komponen daya beli dapat dilihat pada dimensi kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan Kota Parepare menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan perbaikan standar hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya PDRB per kapita. Namun jika melihat pengeluaran per kapita sebulan, terjadi penurunan untuk Kota Parepare.

Meskipun tingkat inflasi cenderung berada pada level yang terkendali dan pendapatan per kapita menunjukkan tren peningkatan, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan per kapita berpotensi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu sehingga belum merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Indikasi tersebut tercermin dari struktur pengeluaran per kapita sebulan yang sebagian besar masih terserap

pada komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, makanan dan minuman jadi, serta aneka barang dan jasa.

2. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan secara riil yang tidak dipengaruhi oleh inflasi dan digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa secara bruto yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan digunakan untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan ekonomi Parepare tahun 2024 mencapai 5,09 persen, meningkat dibanding tahun 2023 (3,88 persen). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada LU Jasa lainnya (9,21 persen), LU Jasa Kesehatan (7,94 persen), dan LU Transportasi dan Pergudangan (7,12 persen). Kegiatan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan mendorong tumbuh tingginya kegiatas LU Jasa Lainnya. Parepare berada pada posisi 8 teratas pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Jeneponto (6,03), Pinrang (5,71), Makassar (5,56), Bone (5,55), Gowa (5,39), Tana Toraja (5,20) dan Sinjai (5,09). Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung hal tersebut, setiap daerah, termasuk Parepare, diharapkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Parepare ditargetkan sebesar 7,69 persen pada tahun 2029.

Berdasarkan PDRB ADHB tahun 2024, struktur perekonomian Parepare masih didominasi oleh 3 sektor lapangan usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,04 persen), LU Konstruksi (15,32 persen), dan LU

Real Estate (9,09 persen). Meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi namun pengelolaan lapangan usaha potensial di Parepare belum dioptimalkan. Kontribusi dari LU Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menandakan bahwa sektor ini adalah penggerak utama ekonomi Kota Parepare. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan tidak didukung oleh peningkatan kontribusi sektor lainnya seperti industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa basis produksi lokal di Parepare masih terbatas dan lebih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah. Selain itu, sektor yang perlu dikembangkan adalah transportasi dan pergudangan karena lokasi Parepare yang strategis di jalur utama ke berbagai wilayah, Parepare menjadi pusat transit antar wilayah khususnya di Sulawesi Selatan. Hal ini seharusnya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial.

3. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka kemiskinan Kota Parepare menunjukkan dinamika yang cukup beragam, namun tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat kemiskinan berada pada angka 5 persen, yang berarti di tiap 100 orang penduduk Parepare, 5 orang diantaranya masuk dalam kategori miskin. Tingkat kemiskinan tahun 2024 semakin membaik dengan capaian 5,27 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,94 ribu orang. Membaiknya kinerja ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi yang terkendali, telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Namun demikian, capaian tingkat kemiskinan tersebut masih perlu ditekan untuk mencapai target yang ditetapkan provinsi dan nasional yaitu sebesar 3,98-2,98 pada tahun 2029. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

memastikan akses terhadap kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai 0% pada tahun 2024. Namun hal ini belum bisa dicapai oleh Kota Parepare dimana masih terdapat 171 orang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, menurun jika dibandingkan data tahun 2023 (182 orang). Pemerintah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut berupa penurunan beban pengeluaran masyarakat (seperti bantuan Cadangan Beras Pemerintah, bantuan sosial reguler Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, bantuan beasiswa kurang mampu, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dan miskin), peningkatan pendapatan masyarakat (seperti bantuan peralatan bagi keluarga tidak mampu untuk pemberdayaan masyarakat miskin, bantuan peralatan usaha untuk pelaku UMKM) dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (seperti bedah rumah dan rumah impian untuk rumah tidak layak huni, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang berupa sanitasi, air minum, jalan dan drainase).

Penanganan kemiskinan di Kota Parepare melalui berbagai program pemerintah memang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sinergi antar sektor dan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, bantuan sosial dan bantuan usaha yang diberikan masih belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga efektivitasnya rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mandiri juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan multisektor

yang terkoordinasi dan berkelanjutan, serta penguatan partisipasi aktif masyarakat.

4. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kota Parepare selama periode 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tahun 2024, TPT Kota Parepare mencapai 5,23 persen dan menjadi keempat tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Makassar (9,71 persen), Palopo (7,64 persen) dan Barru (6,42 persen). TPT Parepare juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan (4,19%) dan TPT Nasional (4,91%). TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

TPT berdasarkan pendidikan mempunyai pola distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Penganggur dari tamatan sekolah menengah masih merupakan yang paling tinggi (60,39 persen) dibandingkan tamatan jenjang pendidikan rendah (10,12 persen) dan pendidikan tinggi (29,49 persen). Hal ini bisa terjadi karena adanya persaingan di pasar kerja dimana lulusan pendidikan rendah bersedia menerima pekerjaan informal atau bergaji rendah sementara pekerjaan di sektor formal banyak mensyaratkan pendidikan tinggi. Selain itu keterampilan lulusan pendidikan menengah cenderung tidak bersesuaian dengan kebutuhan pasar kerja, dimana lulusan pendidikan menengah belum memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja tertentu, serta minimnya program pelatihan peningkatan keterampilan yang disediakan pemerintah daerah untuk mereka. Banyak lulusan menengah juga tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah karena keterbatasan ekonomi namun tidak memiliki modal atau

akses informasi untuk berwirausaha sehingga mereka stagnan dalam persaingan kerja.

5. Masih Rendahnya Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun pendapatan per kapita Kota Parepare selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun angka tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Data menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita Parepare periode 2020 hingga 2024 hanya sebesar 4,44 persen, menempatkannya sebagai terendah ke-8 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Sebagai kota yang memiliki potensi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi di Sulawesi Selatan, rendahnya pendapatan per kapita Parepare mencerminkan adanya permasalahan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Struktur perekonomian Parepare yang didominasi sektor perdagangan dan jasa menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih berfokus pada distribusi dan konsumsi, bukan pada produksi yang menciptakan nilai tambah tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan, mengingat sektor perdagangan umumnya memiliki produktivitas per pekerja yang lebih rendah dibandingkan sektor industri. Sementara itu, Parepare belum mengembangkan basis industri yang kuat yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Di sisi lain, aspek distribusi pendapatan juga menunjukkan tantangan tersendiri. Berdasarkan indikator ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio Gini, rata-rata rasio Gini Parepare pada periode 2020 hingga 2024 berada pada angka 0,378. Angka ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum

sepenuhnya inklusif, di mana peningkatan pendapatan belum merata dan masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, tantangan pembangunan ekonomi Parepare tidak hanya terletak pada aspek kuantitas pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas distribusi manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat.

6. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Parepare tahun 2020-2024 yang diukur dengan rasio gini memperlihatkan tren yang fluktuatif dengan tingkat ketimpangan sedang/moderat. Rasio gini tahun 2024 mencapai 0,376, turun dibandingkan tahun 2023 (0,381). Meskipun terjadi perbaikan kemerataan pendapatan, namun rasio gini Parepare tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (0,363) dan daerah lain di Sulawesi Selatan. Tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup inklusif untuk perbaikan capaian indikator lainnya. Meskipun nilai PDRB per kapita relatif tinggi mencapai 61,97 juta rupiah namun distribusi pendapatan masih belum merata dan lebih banyak dinikmati oleh segelintir penduduk. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin (7.940 orang) yang berada di bawah garis kemiskinan (Rp 467.151) dan pengangguran (4.358 orang) di Kota Parepare.

Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat disebabkan oleh adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar lapangan usaha. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, sementara sektor formal yang memberikan pendapatan lebih tinggi dan stabil didominasi oleh kelompok berpendidikan tinggi. Selain itu adanya perbedaan tingkat produktivitas antar kelompok penduduk serta ketimpangan produktivitas lapangan usaha

masyarakat masih tinggi yang didominasi sektor perdagangan menjadi penyebab lainnya.

7. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik

Tata kelola pemerintahan Kota Parepare menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih menyisakan sejumlah tantangan. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 65,57 persen menandakan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dari beberapa aspek. Hal ini sejalan dengan nilai SAKIP yang berada pada angka 62,76 (kategori B), yang menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja, selain itu masih diperlukan upaya-upaya peningkatan yang lebih keras dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal maupun pencapaian kinerja.

Dari sisi pelayanan publik, indeks pelayanan publik Kota Parepare tercatat sebesar 3,16 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan secara umum dinilai baik oleh masyarakat, namun capaian ini masih jauh dari target yang telah ditentukan (4,5). Nilai kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sebesar 81,61 juga mengindikasikan bahwa pemerintah berada dalam jalur yang baik dalam penyelenggaraan layanan publik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar mencapai kepatuhan penuh. Perlu perbaikan dalam pemenuhan dimensi penialaian yang dianggap kurang.

Selain itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 2,62 masuk dalam kategori baik, namun belum bisa mencapai target yang ditentukan (3,0). Aplikasi dan sistem belum terintegrasi sehingga terjadi inefisiensi dimana masih banyak yang belum menggunakan aplikasi berbagi pakai/belum memiliki fitur kolaborasi dengan sistem lainnya. Sementara itu, nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,02 memperlihatkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap layanan yang diberikan pemerintah, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas interaksi, ketepatan waktu, serta kemudahan akses layanan.

Secara keseluruhan, meskipun indikator tata kelola dan layanan publik menunjukkan kinerja yang cukup baik, Pemerintah Kota Parepare masih perlu memperkuat digitalisasi layanan, meningkatkan kualitas birokrasi, dan memastikan pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah.

2.3.2 Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas tiga urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar 4.1 Pembagian urusan pemerintahan

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselelenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib meliputi 24 urusan, urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 urusan dan urusan wajib yang berkaitan dengan non pelayanan dasar sebanyak 18 urusan. Berdasarkan Gambaran Umum Kondisi Daerah, maka identifikasi permasalahan pembangunan yang

berkaitan dengan urusan Pemerintahan Kota Parepare dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar diuraikan sebagai berikut:

1. PENDIDIKAN
   - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD);
   - Meningkatnya jumlah anak tidak sekolah akibat tuntutan ekonomi;
   - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
   - Belum akuratnya penentuan titik koordinat zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
   - Masih kurangnya upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   - Kurangnya sarana dan prasarana di satuan pendidikan.

2. KESEHATAN
   - Kurangnya kesadaran ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di sarana pelayanan kesehatan;
   - Kurangnya kesadaran masyarakat memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan ketika sudah mengalami batuk lebih dari 2 (dua) minggu;
   - Kurang intensifnya tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan pencarian orang dengan terduga Tuberkulosis;
   - Kurangnya keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan penyakit tuberkulosis;

- Masih tinggi Angka Prevalensi HIV/AIDS yang karena meningkatnya populasi beresiko (LSL, Waria, WPS, dan pelanggan seks);
- Masih adanya penderita penyakit Malaria, yang merupakan kasus akibat pasien pernah bepergian ke dareah endemis malaria;
- Masih perlu ditingkatkan Sarana dan Prasarana POSYANDU serta jumlah kunjungan;
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan kontrasepsi dalam pencegahan penyakit menular seksual.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Kurang akurasi data panjang jalan di area perumahan;
- Kurangnya pemenuhan pembangunan jalan baru;
- Belum maksimalnya pemeliharaan ruas jalan dan drainase yang rusak;
- Tidak optimalnya pengerukan sedimen di saluran pembuangan di trotoar;
- Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Pengolahan Limbah Domestik (RISPALD);
- Rendahnya pengawasan terhadap pemukiman yang berada di area sempadan sungai dan resapan sungai;
- Belum tersedianya dokumen Masterplan drainase;
- Banyaknya Kerusakan irigasi akibat bencana;
- Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- Belum tersedianya data rumah yang memiliki IMB/PBG secara akurat;
- Belum tercapainya target TPB dan SPM bidang PUPR;
- Belum terbangunnya infrastruktur air limbah diseluruh kecamatan.

4. PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

- Masih adanya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni;
- Belum maksimalnya penanganan kawasan kumuh;
- Kurang optimalnya pengawasan aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- Belum optimalnya proses penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari pengembang ke Pemerintah;
- Belum menjadi prioritas penyerahan aset dari pengembang ke pemerintah dan pemeliharaan PSU.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- Masih kurangnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat Dasar, Diklat teknis dan Diklat Fungsional Satpol PP;
- Belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perkada serta ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penertiban dan penegakan Perda dan Perkada serta ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas antar lembaga instansi vertikal pusat dan daerah dalam pembinaan pengawasan dan penanganan pelanggaran perda dan perkada, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Kurangnya jumlah dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Belum adanya perda penanggulangan bencana;

- Belum adanya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontigensi;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- Masih kurangnya SDM kebencanaan yang bersertifikat;
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran;
- Masih minimnya pos layanan pemedam kebakaran;
- Terbatasnya SDM damkar yang bersertifikat keahlian penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

6. SOSIAL

- Masih rendahnya Perhatian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan;
- Belum optimalnya pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial dalam pengentasan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Belum optimalnya pelayanan untuk bantuan sosial/logistik bagi korban bencana;
- Belum optimalnya penyaluran bantuan kepada penyandang Disabilitas dan lanjut usia.
- Belum optimalnya penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
- Belum tersedianya rumah singgah;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (Lansia).

2.3.1.8.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib dengan bukan pelayanan dasar sebanyak 18 urusan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. TENAGA KERJA

- Tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia;
- Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan dunia kerja modern;
- Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri;
- Masih tingginya persentase tenaga kerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial;
- Belum optimal Perlindungan hak-hak pekerja yang, termasuk hak cuti, jam kerja, dan keselamatan kerja;
- Masih kurangnya akses penyandang disabilitas ke pelatihan dan kesempatan kerja;
- Minimnya program pelatihan peningkatan keterampilan mereka yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- Minimnya program pelatihan peningkatan keterampilan mereka yang disediakan oleh pemerintah daerah.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Masih kurang perempuan yang menduduki level pengambilan keputusan strategis yang jabatan (eselon II, III, dan IV) masih diwarnai budaya patriarki;
- Relatif rendah Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan di DPRD Kota Parepare;
- Kurang Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi;
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus KDRT, KTP DAN KTA;

- Masih rendahnya pemenuhan hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- Belum optimal Penerapan Komponen prasyarat PUG;
- Belum optimal perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA.

3. PANGAN

- Masih tergantung pada produksi pangan dari daerah luar untuk ketersediaan pangan;
- Masih kurang pemahaman masyarakat tentang produk pangan yang aman dan bermutu;
- Belum meningkat kondisi ekonomi lokal yang berpengaruh pada akses pangan yang cukup;
- Belum merata pola distribusi pangan dan tidak memiliki konsistensi dalam ketersediaan pangan;
- Masih berfluktuasi inflasi pangan berakibat kerawanan pangan;
- Kurang beragam pola konsumsi pangan penduduk;
- Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan keamanan pangan

4. PERTANAHAN

- Kurangnya sumber daya menusia dalam proses kegiatan pensertifikatan pada lingkup Dinas Perkimtan;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ganti rugi untuk pembebasan lahan;
- Masih banyaknya lahan milik pemerintah dikuasai oleh masyarakat atau pihak lain.

5. LINGKUNGAN HIDUP

- Menurunya kualitas air permukaan (sungai KarajaE;
- Penurunan kualitas udara ambien;

- Menurunya nilai indeks tutupan lahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan;
- Kurangnya pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan;
- Masih rendahnya kapasitas PPLHD;
- Tidak dijaga dan diperbaharui Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan akan mempengaruhi volume timbulan sampah yang tertangani di masyarakat;
- Masih kurangnya upaya pengurangan sampah;
- Tidak optimalnya TPA yang dioperasikan tidak sesuai dengan kelayakannya (control landfill atau sanitary landfill) akan mempengaruhi kondisi dan daya tampung TPA;
- Peningkatan Produksi limbah B3 tiap tahun, sehingga Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 harus terus dilakukan;
- Tidak adanya database lahan kritis yang valid dan update serta kapasitas SDM yang terbatas sehingga upaya rehabilitasi lahan kritis tidak optimal;
- Keterbatasan SDM serta upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan tutupan vegetasi.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Belum memadai Sarana prasarana pelayanan adminduk;
- Tidak adanya Mobil Layanan dan Peralatan Layanan Adminduk untuk menjangkau masyarakat Rentan adminduk, Distabilitas, ODGJ dan berkebutuhan khusus;
- Masih kurangnya kuantitas SDM dalam mendukung pelayanan;
- Kurangnya sosialisasi ke masyarakat terhadap pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- Masih rendahnya pelaporan kematian dari tingkat RT/RW, Kelurahan, dan Pengelola Pemakaman;
- Belum maksimalnya Perjanjian Kerjasama Pemanfatan Data Kependudukan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Badan Hukum Indonesia;
- Masih rendahnya kesadaran Wajib KTP-el baru yang sebagian besar merupakan siswa Sekolah Menengah Atas untuk melakukan perekaman KTP-el begitu memasuki usia 17 tahun;
- Masih adanya bayi yang baru lahir di RSUD atau Faskes lainnya tidak langsung melaporkan peristiwa kelahirannya ke Dinas Dukcapil untuk langsung diterbitkan Akta Kelahirannya;
- Kurangnya kesadaran penduduk melaporkan pencatatan perkawinannya ke Dinas Dukcapil.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Keterbatasan Kader posyandu yang ahli dibidangnya, sehingga kesulitan mendapatkan petugas yang berkualitas;
- Masih minimnya fasilitas di beberapa Posyandu;
- Kurangnya sarana prasarana yang baik mencakup ketersediaan ruang rapat, dan kantor yang representatif;
- Kurangnya fasilitas komunikasi serta aksebilitas bagi masyarakat;
- Tidak ada kelompok binaan pemberdayaan masyarakat baik di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya;
- Kurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat khususnya kader dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- Rendahnya pengarusutamaan gender yang inklusif.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Masih adanya PUS (pasangan usia subur) yang menginginkan anak lebih dari dua;
- Belum tersosialisasikan 5 pilar yang termuat dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
- Masih tingginya pernikahan anak;
- Masih kurangnya SDM tenaga penyuluh KB

9. PERHUBUNGAN

- Banyaknya angkutan plat hitam yang tidak teridentifikasi;
- Kurangnya angkutan umum yang layak;
- Lebih tinggi Pertumbuhan kendaraan dari penambahan panjang jalan;
- Kurang penyediaan angkutan umum massal, yang layak dan ramah lingkungan;
- Belum optimalya penataan perpakiran;
- Belum optimalnya pendataan kendaraan bermotor
- Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Masih banyaknya anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang belum bisa mengelola informasi dengan baik sehingga kurang mampu untuk bertindak sebagai citizen jurnalism;
- Belum efektif pengembangan teknologi untuk diseminasi informasi oleh anggota KIM;
- Kurang mendukung letak geografi wilayah watang bacukiki sehingga terdapat blank spot untuk layanan gsm di wilayah tersebut;
- Kurangnya SDM penyelenggara Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang bersertifikat;

- Kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait penyampaian informasi tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID);
- Belum memadai Sarana pendukung yang digunakan untuk penyebarluasan informasi.

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- Kurangnya Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku berjalan;
- Banyaknya Koperasi tidak aktif;
- Kurangnya keterbukaan akses data LKM dan LKM Non BPR.

12. PENANAMAN MODAL

- Belum tersedianya dokumen profil investasi;
- Masih ada pelaku usaha yg belum melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya;
- Belum adanya investasi berskala besar di Kota Parepare yang bisa menyerap banyak tenaga kerja;
- Kurangnya kerjasama pemerintah daerah dalam mengintervensi ketaatan status pelaku usaha;
- Belum adanya kepastian lahan di Kawasan Industri, Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS);
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Tidak adanya kepastian hukum pada lahan-lahan yang berpeluang menjadi potensi strategis investasi.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan;
- Kurangnya kesadaran pemuda dalam kegiatan kepemudaan;
- Kurangnya jiwa kepeloporan pemuda;
- Masih kurangnya pelatihan pelaku wirausaha pemuda;

- Tenaga keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas;
- Kurangnya sarana prasarana olahraga yang memadai;
- Masih minimnya dukungan pengembangan industri olahraga;
- Masih terbatasnya event-event keolahragaan.

14. STATISTIK

- Belum optimalnya penyimpanan data secara tersentral;
- Masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di tngkat SKPD;
- Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah.

15. PERSANDIAN

- Masih kurang memadai pendukung keamanan Informasi;
- Tidak tersedianya CISRT dan Command centre sebagai tindakan aware terhadap anomali-anomali yang mencurikan;
- Masih terbatasnya peralatan persandian;
- Kurangnya SDM yang berkualifikasi sandi;
- Tidak maksimal Penggunaan Sistem perangkat sandi;
- Tidak berkembang dan tidak dilakukan Pembaruan Sistem Pengelolaan Sandi.

16. KEBUDAYAAN

- Belum maksimalnya peserta didik yang berpartisipasi pada festival seni dan budaya;
- Masih kurangnya minat peserta didik dalam pelestarian aksara lontara
- Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.

17. PERPUSTAKAAN

- Belum optimalnya layanan dan promosi perpustakaan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan;
- Belum optimalnya pembinaan kepada perpustakaan pada semua jenjang;
- Kurangnya minat baca masyarakat;
- Masih adanya perpustakaan yang belum terakreditasi.

18. KEARSIPAN

- Kurangnya Perangkat Daerah yang belum menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku;
- Kurangnya peningkatan SDM tenaga pengelola kearsipan;
- Masih kurangnya tanaga pengelola kearsipan di setiap SKPD;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

2.3.1.8.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat Pilihan sebanyak 6 urusan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PARIWISATA

- Kurang terbukanya pihak hotel terkait data kunjungan tamu;
- Belum optimalnya pengelolaan tempat/destinasi wisata;
- Kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata;
- Masih terbatasnya SDM/tenaga ahli pariwisata;
- Kurangnya media promosi pariwisata;
- Masih terbatasnya event-event pariwisata;
- Kurangnya pemasaran pariwisata berskala nasional;

- Tidak Tersedianya Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran/Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE);
- Kurangnya akomodasi bertaraf Internasional (Hotel Berbintang);
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas pariwisata;
- Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti penyediaan akses, serta angkutan transportasi di beberapa titik destinasi

2. PERTANIAN

- Masih rendahnya pengelolaan lahan pertanian yang menggunakan sistem irigasi (sistem tadah hujan);
- Belum optimalnya produksi sektor pertanian karena mutu produk pertanian masih rendah dan usaha pertanian masih berorientas pada on-farm;
- Belum tercukupinya pupuk dan benih dalam mendukung pengembangan sektor pertanian;
- Tingginya alih fungsi lahan perkebunan menjadi kawasan perumahan dan tidak adanya peremajaan tanaman perkebunan;
- Belum optimanya pendampingan dan pembinaan kepada para kelompok tani;
- Belum adanya kawasan pembenihan dalam mendukung program mandiri benih;
- Masih rendahnya penjaminan kualitas daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- Masih kurang sarana dan prasarana sektor peternakan;
- Masih rendahnya pengawasan lalu lintas ternak.

3. KEHUTANAN

- Data-data kehutanan sulit untuk diukur dan ditetapkan targetnya akibat bukan kewenangan pemerintah Kota Parepare.

4. PERDAGANGAN

- Tidak terdapat komoditi ekspor yang melalui Kota Parepare;
- Belum maksimalnya pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal;
- Belum memadainya sarana distribusi perdagangan;
- Masih rendahnya pengawasan dan penyuluhan metrologi legal;
- Belum adanya sarana dan prasarana utama pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- Belum optimalnya sosialisasi terkait metrologi legal;
- Perlunya peningkatan kompetensi jabatan fungsional perdagangan.

5. PERINDUSTRIAN

- Belum tersedianya dokumen dan evaluasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kota (RIPIK);
- Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri;
- Belum optimalnya layanan informasi industri;
- Masih rendah kompetensi jabatan fungsional perindustrian;
- Belum optimalnya pengawasan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
- Belum optimalnya sertifikasi halal bagi produk industri kecil dan menengah (IKM).

6. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Belum memadai sarana dan prasarana perikanan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat pola konsumsi ikan

- Belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya;
- Masih rendahnya penguasaan teknologi dan informasi perikanan;
- Kurangnya sarana dan prasarana perikanan dalam pendistribusian dan pemasaran ikan yang berkualitas;
- Belum tersedianya Solar Pecked Dealer Nelayan (SPDN).

2.3.1.8.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 6 urusan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- Belum optimalnya aplikasi SIPD Perencanaan;
- Kurang tepat waktu dalam implementasi tahapan perencanaan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM perencana.

2. KEUANGAN

- Kapasitas keuangan daerah yang cenderung masih rendah;
- Belum terpenuhi Mandatory spending dalam penganggaran daerah;
- Belum optimalnya identifikasi dan penentuan potensi riil pajak dan retribusi daerah;
- Masih minimnya sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk dapat mendanai anggaran domestik/belanja daerah;
- Masih rendahnya partisipasi aktif wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya;
- Belum optimalnya sistem pembayaran pajak secara online/ non- tunai.

3. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Belum optimalnya pengembangan kompetensi jabatan fungsional;
- Belum terpenuhi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang sesuai kebutuhan ASN;
- Belum optimalnya Pelaporan Pelaksanaan diklat teknis;
- Belum optimalnya pengembangan pendidikan formal ASN;
- Belum optimalnya pengukuran dan Pengembangan kompetensi;
- Belum optimalnya pemerataan penempatan ASN;
- Belum optimalnya manajemen talenta dan pola karier ASN;
- Belum optimalnya penempatan PNS JF Guru pada unit organisasi sekolah negeri;
- Belum optimalnya keamanan sistem informasi kepegawaian online;
- Kurangnya kesadaran PNS untuk memperbaharui data nya pada sistem informasi kepegawaian.

4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Tidak berkelanjutannya pelaksanaan inovasi perangkat daerah;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan.

5. PENGAWASAN

- Belum optimalnya peran dan layanan APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Belum terpenuhinya mandatory spending pengawasan;
- Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti Rekomendasi atas Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal;
- Belum optimalnya Sistem Informasi Pengawasan dan Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan;

- Masih lemahnya pengendalian internal perangkat daerah dalam mengindentifikasi dan menganalisis risiko yang berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- Masih perlunya peningkatan kompetensi AparaT Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Belum terpenuhinya kecukupan jumlah SDM APIP baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (JFA PPUPD) serta SDM Pendukung tugas pengawasan pada Sekretariat Inspektorat;
- Fasilitas sarana dan prasarana pengawasan yang belum mendukung.

6. SEKRETARIAT DAERAH

- Kurangnya tenaga teknis berkualifikasi yang berpengaruh pada optimalisasi pengadaan barang dan jasa;
- Belum sepenuhnya mengacu pada dokumen Analisasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja penempatan pegawai pada masing-masing SKPD;
- Masih perlu ditingkatkan pelaksanaan pelayanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
- Adanya kendala dalam pengukuran beberapa kriteria dan indikator penilaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Belum seimbang dan terintegrasi dengan baik Susunan organisasi dan tata kerja (SOTK);
- Kurangnya pengembangan kompetensi SDM dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing;

7. SEKRETARIAT DEWAN

- Kurang pagu yang disediakan dalam Pengakolasian anggaran;
- Keterlambatan pelaksanaan jadwal legislasi yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang ada di DPRD.

8. KESATUAN BANGSA

- Melemahnya wawasan kebangsaan yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- Maraknya penyalahgunaan narkoba, Kota Parepare berpotensi sebagai Kota transit narkoba melalui pelabuhan nusantara dan kecenderungan meningkatnya kasus narkoba;
- Masih adanya penolakan pendirian tempat ibadat yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama;
- Adanya potensi konflik sosial akibat perkembangan budaya, iptek dan teknologi;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan perkembangan politik;
- Munculnya potensi ajaran atau aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran agama.

2.3.3 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Penentuan isu strategis Kota Parepare dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global/internasional, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Parepare tahun 2025-2029.

2.3.2.1 Isu Global

2.3.2.1.1 Geopolitik dan Geoekonomi Dunia.

Dinamika geopolitik global ke depan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Konflik Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya,

seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, Timur Tengah dan Laut China Selatan. Konflik ini akan berdampak besar bagi kawasan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan lndo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan lndo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan lndo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan lndo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. lndo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Kondisi yang sama dengan mencermati Geoekonomi Global, dimana nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan. Peran negara maju, khususnya yang masuk G7 akan mengecil. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang, akan tetapi dalam jangka panjang pendapatan per kapita negara-negara berkembang diperkirakan akan terus melejit menyamai negara-negara maju. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang, termasuk Indonesia.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Indonesia dituntut untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang tepat, sehingga peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta

kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Dalam perspektif itulah, reformasi sosial, reformasi ekonomi dan reformasi tata kelola menjadi keniscayaan untuk Indonesia secara menyeluruh, hingga ke level pemerintahan terendah, agar mampu mengambil peran dalam perkembangan geo ekonomi global. Bila tidak, Indonesia hanya akan menjadi obyek perebutan sumberdaya negara-negara besar di dunia dan tidak akan pernah bisa keluar dari *middle income trap*.

2.3.2.1.2 Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity (VUCA).

Gabungan situasi dunia yang menggambarkan suatu keadaan yang mengalami perubahan secara cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), serba kompleks (complexity) dan menimbulkan kebingungan/keunikan (*ambiguity*). Kondisi yang menggambarkan lingkungan bisnis yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar, sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi, tantangan menjadi lebih rumit karena multifaktor yang saling terkait serta ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya yang membingungkan. Meskipun pada awalnya hal ini diawali dengan kondisi yang dialami oleh dunia bisnis, tetapi dalam perkembangannya justru memberi pengaruh dan dampak yang signifikan pada sektor publik. Bukan hanya pada tuntutan pelayanan publik yang harus disediakan dan diberikan, tetapi juga persfektif kebijakan dan dukungan infrastruktur yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga mampu memberikan jaminan kepastian kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pada semua lapangan usaha. Situasi VUCA menuntut pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk

merumuskan kebijakan dan layanan publik yang menjadi arahan pengembangan kegiatan bisnis dunia usaha dan masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan visi pembangunan diinginkan pada setiap tahapan pembangunan yang dijalankan.

2.3.2.1.3 Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak

perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

2.3.2.2 Isu Nasional

2.3.2.2.1 Bonus Demografi

Bonus Demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15 – 64 Tahun) yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 Tahun), Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di tahun 2025, dan selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka di atas 65% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada tahun 2020 sebesar 68,57% dari total jumlah penduduk dan diproyeksi pada tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29% dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

2.3.2.2.2 Pembangunan Belum Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pada konsep menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan Pembangunan maka parameter yang perlu dipertimbangkan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan antara lain: (a) Peningkatan aktivitas Pembangunan sangat penting untuk disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian ideal, yaitu: (i) 70% daerah

terbangun dan 30% daerah terbuka hijau serta 10% daerah terbuka hijau untuk lingkungan permukiman; (ii) Secara wilayah alih fungsi guna lahan sangat penting untuk dikendalikan dengan capaian yang diharapkan sebesar 60-70% merupakan kawasan lindung dan 30% Kawasan budidaya; (iii) Indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal yang perlu dipenuhi, yaitu (i) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (iv) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,00. (b) Indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah penilaian Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indikator penilaian yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Kemampuan aparatur daerah untuk memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80%, (ii) Terciptanya pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon sebesar 70%, (iii) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80%, dan (iv) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebencanaan sebesar 80%. (c) Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indeks ketahanan pangan ideal yang ditargetkan mencakup tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil reviu terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas berdasarkan

situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Sedangkan indeks ketahanan energi mencakup 4 parameter penting, yaitu: (i) Availability, yakni dari ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; (ii) Accessibility, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik; (iii) Affordability yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi; (iv) Acceptability yaitu berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat. (d) Indeks ketahanan air. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dengan demikian, capaian target yang diharapkan dapat terpenuhi yaitu sebesar 70-80% kebutuhan akan distribusi jaringan mampu terpenuhi. Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah : (i) Penggunaan sum berdaya energi surya untuk mengantisipasi

kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

2.3.2.2.3 Transformasi Teknologi Digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan Masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai indeks literasi digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang dikur berdasarkan kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital menjadi pijakan dalam melakukan

pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar program nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran.

Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian indeks literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada dibawa capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan indeks literasi digital terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

2.3.2.2.4 IKN dan Pemerataan Pembangunan

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN Dalam rangka mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Pare-Pare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan

kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan visual arts, kuliner)

2.3.2.2.5 Pentingnya riset dan inovasi dalam pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah

Kemajuan sebuah negara dan daerah tidak akan terjadi serta merta atau dengan sendirinya, melainkan harus dilakukan dengan mencari gagasan-gagasan baru. Pengembangan gagasan ini harus senantiasa dilakukan, baik oleh swasta maupun pemerintah, agar terciptanya inovasi yang dapat meningkatkan kinerja. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat saja yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi di segala bidang pemerintahanan, baik untuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan tatakelola pemerintahan daerah, maupun peningkatan produktivitas masyarakat. Pada dasarnya, inovasi dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggaraan pemerintahanan sehingga daerah-daerah dapat mengalami kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Berbagai peraturan perundangan yang ada menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan inovasi, memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan nasional. Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Inovasi merupakan buah dari sebuah proses kreatif, berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbanjirap) atau riset.

Oleh karena itu diperlukan adanya upaya memacu kreativitas di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah akan menjadi pembeda antardaerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Selanjutnya, di dalam UU No 11 tahun 2019, khususnya Pasal 6, menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional antara lain untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Sedangkan pada Pasal 41 menjelaskan bahwa hasil dari proses kreatif berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangun-an nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi landasan bagi penyelenggaraan, termasuk di dalamnya perencanaan, pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge based policy; atau dalam bentuk yang lebih operasional disebut kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Untuk menerapkan dan mengembangkan riset dan hasil riset serta inovasi dalam pembangunan, digunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi di daerah. Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah kondisi yang menjadi pendukung atau yang melatarbelakangi berkembangnya riset dan penggunaan hasil riset bagi pembangunan di daerah. Kerangka ini digunakan untuk mengelaborasi bagaimana memperkuat dan pengembangan faktor-

faktor yang mempengaruhi berkembangnya riset dan hasil riset serta inovasi dalam pembangunan di Kota Parepare.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.2.3.1 Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak

perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

2.3.2.3.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global, meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan transformasi pembangunan dengan memperkuat sinergi kebijakan di berbagai level pemerintahan, mulai pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga pada level pemerintah desa. Terdapat tujuh belas TPB yang harus menjadi fokus pemerintah daerah untuk diwujudkan secara bersama, yakni: (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik, (4) pendidikan bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi ketimpangan, (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga eksosistem darat, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan TPB ini, antara lain keterbatasan dalam penyediaan data sektoral yang diiringan dengan acuan metadata yang terus dilakukan pengembangan menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang memadai. Hal ini tidak hanya mengurangi kemampuan untuk memantau progres, tetapi juga mempersulit evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program

yang diterapkan. Sementara itu, sasaran pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih belum sepenuhnya menyasar kaum rentan sesuai prinsip 'tidak seorangpun yang tertinggal' sehingga hal tersebut akan menghambat upaya dalam memberi manfaat utuk semua. Tantangan lain juga agar sinergi kemitraan antara pemerintah provinsi dengan SDGs Center dapat lebih diperkuat dengan berbagai potensi yang dimiliki dalam mengakselerasi pencapaian TPB.

2.3.2.3.3 Pembangunan IKN dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai salah satu pusat pertumbuhan.

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Magnetnya, pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan *endowment factor* dan letak geografisnya

akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia.

Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah sebagai dampak *backward and forward linkage* dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut.

2.3.2.3.4 Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional.

Kebijakan nasional dalam penguatan sistem logistik nasional, salah satunya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional yang terjangkau untuk semua wilayah. Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik

nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

2.3.2.3.5 Pemanfaatan Bonus Demografi.

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2050. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan pelindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

2.3.2.3.6 Ekosistem Transformasi Digital.

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Berbagai aspek kehidupan manusia seakan-akan tercerabut dari akarnya akibat loncatan-loncatan teknologi. Loncatan teknologi tersebut terutama dengan berkembangnya teknologi digital, mulai dari masifnya penggunaan internet (*internet of things*/IoT) hingga *Artificial Intelligence* (AI). Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantang dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

2.3.2.3.7 Daya tampung dan Kerusakan Lingkungan.

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah hingga mencapai 65,32 persen. Meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Penurunan lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati menurun sebesar 54,58 persen. Selain itu, daya dukung air menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Walau secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori terlampaui dan melewati ambang batas antara

ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untu diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

2.3.2.3.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kebijakan pembangunan nasional tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya terkait urusan pelayanan dasar wajib sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM yang meliputi enam pelayanan dasar, yakni: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; serta (6) Sosial. Ketentuan pemenuhan standar minimal mencapai seratus persen pada layanan tertentu setiap urusan akan berdampak pada kebijakan alokasi penganggaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada satu sisi akan mendorong percepatan

pemenuhan layanan minimum untuk setiap urusan wajib bersangkutan, tetapi pada sisi yang lain dengan constraint anggaran akan berdampak pada alokasi anggaran yang berkurang pada urusan-urusan penting lainnya yang tidak tergolong dalam SPM pelayanan dasar wajib, padahal juga sangat penting untuk mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan.

2.3.2.3.9 Hilirisasi

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam suatu industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan dekat dengan rencana Ibu Kota Negara (IKN) berperan penting sebagai penyangga pangan IKN dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infratruktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan dan permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Akan tetapi, di sisi lain, beragamnya potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan peningkatan nilai tambah oleh masyarakat

menjadi potensi yang baik agar dapat mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat dan sektor unggulan daerah.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

2.3.2.4 Isu Strategis Kota Parepare

2.3.2.4.1 Manusia Unggul, Ketahanan Sosial dan Pangan.

Pembangunan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan ditengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, daerah dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan ditengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan

Kota Parepare sebagai kota maju dengan potensi bonus demografi dengan usia produktif yang besar.

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks dimana salah satu dimensi utamanya adalah Pembangunan manusia unggul yang selanjutnya menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu yang menjadi masalah di hampir seluruh daerah yaitu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah yaitu dengan pemberian bantuan usaha serta pelatihan kewirausahaan dan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam rangka mendorong kesejahteraan mereka. Dalam upaya penanganan kemiskinan dibutuhkan adanya keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Dengan partisipasi masyarakat secara aktif diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dapat berjalan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah yang berperan sebagai pelayan publik memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk Kesehatan, Akses dan kualitas pendidikan, dan Perlindungan Sosial.

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terkait erat dengan segala aspek kehidupan. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penghambat pembangunan manusia unggul, adalah kasus stunting pada anak yang diakibatkan oleh asupan gizi kurang, kesehata lingkungan buruk dan perkawinan anak.

Pembangunan pendidikan di Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Parepare dalam lima tahun terakhir (2019-2023). Rata-rata lama sekolah di Kota Parepare tahun 2019 sebesar 10,45 tahun meningkat di tahun 2023 menjadi 10,70 tahun, dengan kata lain bahwa lamanya anak bersekolah sampai kelas X (kelas 1 SMA). Berberapa permasalahan pelayanan dasar bidang pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti banyaknya siswa yang tidak bersekolah dan berhenti/putus bersekolah karena tuntutan ekonomi dan masih adanya orangtua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, pengaruh lingkungan, masalah ekonomi yang menyebabkan anak membantu orangtua mencari nafkah.

Sistem kurikulum pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia dan tuntutan pasar kerja. Kurikulum pendidikan harus memasukkan bidang ilmu yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya yang baik (pengembangan pendidikan moderasi beragama dan muatan budaya lokal). Dengan demikian, lulusan pendidikan dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, serta menjadi warga negara yang berkualitas.

Selain pendidikan, juga perlu adanya perlindungan sosial bagi Masyarakat. Perlindungan sosial sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, terutama kelompok Masyarakat yang paling miskin *(the poorest)* dan kelompok Masyarakat miskin *(the poor).* Gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat. Maka penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Di era modern ini, diskriminasi terkait gender masih kerap terjadi dan memiliki tingkat yang beragam. Namun, seringkali isu tersebut bertumpu pada permasalahan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tertuang dalam salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Sering kali terjadi *trade off*, wanita memilih untuk melepas karirnya demi merawat keluarganya. Padahal, tidak sedikit wanita di Kota Parepare yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang cemerlang. Ini yang harus perbaiki. Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti *budget tagging*, anggaran keterampilan dan kesehatan, alokasi beasiswa pendidikan, Program Keluarga Harapan, serta akses pembiayaan untuk usaha mikro menengah.

Disisi lain pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana penyandang disabilitas serta memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas. Untuk mengembangkan lingkungan yang inklusif diperlukan

pemenuhan hak bagi penduduk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah, oleh karena itu ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan.

Lembaga kajian Nagara Institute mencatat, ada fakta bahwa situasi pangan global sedang tidak baik-baik saja. Ancaman krisis pangan ini salah satunya tergambar dari populasi manusia yang terus meningkat signifikan, sementara volume produksi pangan penuh dengan ketidakpastian. Di saat yang sama, terus terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif. Lahan yang tersisa pun kualitasnya terus mengalami penurunan. Sehingga, defisit pangan dalam negeri bukan hal yang mustahil bisa terjadi. Tidak hanya itu, masalah lainnya yaitu kerap terjadi instabilitas dan disparitas antara pasokan dan harga pangan baik antar-wilayah maupun antar-waktu. Situasi tersebut tidak hanya merugikan petani di tingkat hulu, tapi juga memberatkan konsumen di tingkat hilir.

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi krisis pangan dan stabilisasi harga serta antisipasi bencana alam. Kerawanan bencana alam secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi pangan, bencana alam seperti banjir dan kekeringan akan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang akan mempengaruhi ketersediaannya untuk dikonsumsi. Dari sisi distribusi, bencana alam dapat merusak prasarana dan sarana

transportasi, serta sarana logistik pangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pasokan pangan ke lokasi bencana terganggu. Keadaan ini akan mengakibatkan hambatan akses fisik bagi masyarakat korban bencana. Disamping itu, bencana alam juga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda bagi masyarakat korban bencana, yang pada gilirannya akan menurunkan akses ekonomi terhadap bahan pangan karena menurunnya daya beli para korban bencana. Dalam konteks inilah cadangan pangan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi dampak dari bencana alam terhadap kerawanan pangan bagi para korban bencana.

Penguatan cadangan pangan juga dilakukan dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat rawan pangan. Kondisi kemiskinan masyarakat memperkuat justifikasi bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan pangan guna meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan, utamanya akses terhadap pangan pokok. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada semua tingkatan), cadangan pangan swasta dan cadangan pangan masyarakat agar pengelolaan cadangan pangan menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik kerawanan pangan yang bersifat transien (dampak bencana dan gejolak harga), maupun kerawanan pangan kronis (dampak kemiskinan).

Peran organisasi Masyarakat dan tokoh-tokoh agama di Kota Parepare juga sangat diperlukan. Dimana kota parepare ini adalah kota niaga, dimana perputaran roda ekonomi digerakkan oleh warganya yang merupakan penduduk urban, yakni berasal dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda-beda namun tetap harmonis dan hidup rukun berdampingan.

2.3.2.4.2 Infrastruktur Perkotaan, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup.

Perkembangan jumlah penduduk pada daerah perkotaan yang disertai dengan peningkatan arus urbanisasi membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti penyediaan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas pelayanan umum. Dari kondisi tersebut menuntut pula pembangunan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan sebagai langkah menjaga kelangsungan hidup masyarakat di daerah perkotaan dalam rangka menuju kota berkelanjutan (*sustainable city*).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana transportasi. Sarana dan prasarana tersebut menjadi pendorong bagi berputarnya roda perdagangan dan industri. Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi darat mempunyai arti yang sangat penting, mengingat fungsinya untuk memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dan arus barang dari sumber-sumber produksi ke pusat-pusat pemasaran. Kegunaan jembatan dan jalan raya antara lain memperlancar pertumbuhan perekonomian suatu daerah; pemerataan perekonomian; kelancaran lalu lintas; pertumbuhan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) daerah dan sebagainya. Adanya jembatan atau jalan raya juga memiliki fungsi sebagai penghubung; keamanan sebuah daerah dapat lebih merata; pertukaran budaya antar daerah dan mempercepat aktivitas masyarakat di wilayahnya. Akan tetapi Kota Parepare juga masih krisis transportasi darat dan laut, dimana diperlukan akses jalur angkutan umum masuk ke RS Hasri Ainun dan alternatif transportasi laut ke RS Hasri Ainun.

Salah satu akses utama jalur Trans Sulawesi di Parepare adalah Jembatan Sumpang Minangae, namun jembatan tersebut dinilai sudah sangat tidak memadai. Hal ini menimbulkan kemacetan dan berdampak pada ketidaknyamanan pengguna infrastruktur jalan dan jembatan pada umumnya. Pembangunan jembatan kembar sebagai alternatif jembatan Sumpang Minangae yang mulai dibangun sejak tahun 2022 diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan tersebut. Untuk lebih memudahkan akses dari daerah lain diperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi lainnya seperti pembangunan jalan dan pembangunan rel kereta api. Selain itu juga diperlukan rekayasa lalulintas khusus kendaraan bermuatan berat agar dapat menghindari kemacetan di tengah perkotaan.

Permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan pengelolaan perkotaan erat kaitannya dengan layanan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat. Menjamin ketersediaan pelayanan sanitasi dan air bersih untuk semua merupakan target SDG's 2030. Sanitasi dan air bersih yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi, dan produktivitas masyarakat, dan merupakan target eksplisit Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) keenam. Oleh karena itu, mencapai SDG 6 memerlukan strategi yang lebih dekat untuk menjangkau anak-anak dan keluarga Indonesia yang paling miskin dengan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pasokan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) yang dikelola dengan aman.

Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan perkotaan adalah penyediaan air minum karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air sungai yang melintas di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih.

Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan rumah tangga merupakan tujuan dari penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. masih terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Parepare dalam penyediaan air bersih dan layak adalah banyaknya permukiman baru yang lokasinya belum dapat diakses oleh jaringan air bersih dari PDAM Ketersediaan air baku sangat terbatas, terdapat penampungan air/ bak pembagi/ reservoar yang sudah tidak berfungsi/ difungsikan karena terkendala pengelolaan dan pemeliharaan. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen kuat dalam pemenuhan ketersediaan air bersih dan air minum yang layak dengan kualitas yang sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan disiapkannya pendanaan penyertaan modal ke PDAM Parepare untuk membangun sarana dan prasarana air bersih dengan membangun sistem jaringan perpipaan yang lebih baik, pembangunan reservoar dan penjernihan sumber air tanah dalam yang sudah dikaji dan diteliti kapasitas air bakunya. Untuk

program jangka panjang Pemerintah Kota Parepare beserta Pemerintah Kabupaten sekitar yang didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berupaya untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Sistem Pengelolaan Air Minum Skala Regional (SPAM Regional) Ajatappareng yang akan dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang, dan Pemerintah Kabupaten Sidrap.

Pemerintah Kota Parepare tengah merancang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu yang menjadi sasaran adalah percepatan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) seluas 104,486 hektar yang dibagi menjadi dua lokasi yaitu di kelurahan bukit harapan dan kelurahan lapadde serta revitalisasi Terminal Peti Kemas Cappa Ujung untuk mendukung logistik ke IKN nantinya.

Permasalahan sampah Kota Parepare masih belum selesai dan bisa semakin mengkhawatirkan sebab pertumbuhan jumlah sampah yang juga masih belum dapat dikendalikan. Dimana penyebabnya adalah sampah perumahan dibuang disembarang tempat, di jalan, selokan dan dilahan kosong bahkan di bakar, makin tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akibat laju pertambahan penduduk yang cepat dan aktivitas penduduk belum dapat didukung oleh keberadaan sarana persampahan (TPS), penanganan sampah selalu terfokus pada timbulan sampah (pengangkutan dari TPS ke TPA), masih kurang dilakukan pengelolaan sampah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah. TPS cenderung menjadi tempat penumpukan sampah yang memberi pencemaran udara dan bau pada masyarakat sekitar, mengganggu keindahan, sehingga masyarakat enggan jika disekitar lingkungannya terdapat TPS, moda pengangkutan sampah sudah tidak layak operasi sehingga

mempengaruhi jadwal pengambilan sampah jika moda angkutan rusak. Dan dalam hal perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan mengharuskan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dari degradasi lebih lanjut. Ini termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas udara dan air. Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan guna mendukung peningkatan kualitas kepemudaan di Kota Parepare.

2.3.2.4.3 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah kualitas infrastruktur ekonomi. Kualitas infrastruktur ekonomi perlu ditingkatkan termasuk mengembangkan dan memanfaatan kawasan industri dan pergudangan, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, transportasi umum, memperluas jaringan jalan dan meningkatkan kualitas jalan, menyediakan area parkir yang cukup untuk kendaraan pribadi dan bersepeda. Selain transportasi, Kota Parepare juga harus memastikan bahwa fasilitas wisata sudah tersedia dengan standar yang tinggi serta ramah lingkungan juga termasuk pengembangan hotel dan penginapan, pusat rekreasi, taman dan fasilitas umum lainnya.

Dalam hal pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Penyusunan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi memperhatikan perlindungan sumber daya alam dan memastikan keadilan sosial. Pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan

mensyaratkan masyarakat menciptakan institusi dan praktik inklusif yang memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan juga perlu memperhatikan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Rendahnya penerapan standar ekonomi hijau pada pilar lingkungan dimana pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau. Komitmen pemerintah dalam menerapkan konsep ekonomi hijau juga diwajibkan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dalam proses pembangunan yang dilakukan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan dan keterpaduan antara pembangunan manusia, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Potensi Kota Parepare yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan melalui bidang pertanian, peternakan, dan perikanan perlu meningkatkan sarana dan prasarananya. Untuk kawasan pertanian meliputi pengembangan pertanian tanaman pangan, holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, dengan luas kurang lebih 1.155 hektar yang terdapat di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang. Permasalahan terkait menurunnya kemandirian pangan disebabkan masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan; masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; masih terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; masih terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas SDM dan teknologi di sektor pertanian. Sementara untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, pemerintah juga perlu membenahi masalah

pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam jangka panjang, harus ada pembangunan/investasi pada fasilitas produksi bahan baku pupuk. Selain itu, harus ada perbaikan sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan produksi pemotongan hewan diperlukan pembangunan rumah pemotongan unggas (RPU) dan peningkatan rumah potong hewan (RPH) dikarenakan daya tampung RPH dalam melayani sudah melebihi kapasitas *(overload).* Untuk menjamin kesehatan hewan yang ada di Kota Parepare diperlukan penanganan dan pengawasan hewan ternak lintas daerah (pos jaga) di 3 (tiga) titik perbatasan Kota Parepare yaitu perbatasan Kota Parepare - Kabupaten Barru, Perbatasan Kota Parepare - Kabupaten Pinrang dan perbatasan Kota Parepare – Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menghindari penyebaran penyakit menular hewan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk mendorong berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pengembangan UKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Pembangunan UKM menjadi bagian integral dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri. Pengembangan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat semakin berkembang dan semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi

pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Tidak hanya itu, banyaknya lokasi wisata seperti Anjungan Cempae, Tonrangeng River Side, Monumen Cinta Habibie-Ainun, sampai Stadion Gelora BJ Habibie menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan bagi wisatawan dari luar daerah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare juga menyasar Pengembangan UMKM perdagangan, sektor jasa dan kuliner sebagai tumpuan investasi. Sektor tersebut dianggap strategis dalam mendorong perekonomian. Keberlanjutan ekonomi melihat bagaimana kita dapat mempertahankan ekonomi yang kuat dengan tetap menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan sosial. Ini berarti menciptakan lapangan kerja dalam rangka menurunkan angka pengangguran, mempromosikan inovasi, dan menggunakan sumber daya secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengembangan konsep *Sport Center* di Kecamtaan Bacukiki, tengah digalakkan sebagai bagian dari visi menjadikan kota ini sebagai pusat olahraga dan hiburan bertaraf internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberdayakan ekonomi lokal, serta menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Selanjutnya, Kota Parepare sebagai kota jasa dan niaga sudah tentu mempunyai aktivitas pelaku perjalanan penumpang kapal yang bervariasi. ada 4 pelabuhan di kota Pare-pare untuk mendukung industry dan perekonomian yaitu Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Lontange dan Pelabuhan Cempae Parepare. Namun Pelabuhan Nusantara menjadi salah satu pelabuhan utama yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal besar milik pelni. Keberadaan pelabuhan laut menjadikan Parepare sebagai sentra ekonomi terutama expor dan inpor komoditi di kawasan ajattapareng dan mendukung logistik ke IKN nantinya.

Pemerintah Kota Parepare telah mengadopsi Arah kebijakan pembangunan, sektor kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2021 -2024 telah berorientasi *blue economy* melalui perluasan wilayah konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak dan pengurangan sampah plastik di laut. Sebagai dasar penilaian ekonomi biru dapat digunakan melalui pengukuran indeks ekonomi biru yang diukur melalui beberapa komponen utama: 1). Pilar Ekonomi: Terdiri dari tiga subsektor yaitu: (a) Perikanan tangkap dan budidaya, (b) Manufaktur berbasis kelautan, (c) Pariwisata berbasis kelautan. 2). Pilar Sosial: Dibangun dari tiga subsektor yaitu: (a) Ketenagakerjaan, (b) Kesehatan, (c) R&D dan Pendidikan. 3) Pilar Lingkungan: Mencakup dua subsektor yaitu: (a) Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan (b) Energi terbarukan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Parepare perlu menggali potensi-potensi sumber pendapatan baru bagi peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta peningkatan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat.

Terdapat beberapa potensi produk unggulan daerah Kota Parepare yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. Potensi PUD didasarkan pada analisis kelompok usaha skala mikro (KBLI 5 digit), meliputi: jumlah pelaku usaha, jumlah investasi, dan jumlah serapan tenaga kerja, serta mempertimbangkan kontinyuitas produksi dan jangkauan pemasaran. Disamping itu juga memperhatikan arah kebijakan RPJPD 2025-2045 periode yang pertama (2025-2029),

yang memberikan arah transformasi ekonomi, antara lain fokus kepada Pengembangan industri berbasis usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif, dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta pembangunan kepariwisataan yang berbasis inovasi dan pemanfaatan teknologi.

2.3.2.4.4 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan adaptif

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Para pakar berpendapat bahwa desentralisasi dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain karena desentralisasi membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam memantau kebijakan pemerintah. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah (otda), sebagian besar kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan ke pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan otda jika dipraktikkan dengan benar dapat menjadi katalis bagi terbentuknya sistem tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Secara lebih spesifik adalah terbentuknya sistem pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum, penghapusan birokrasi yang menyulitkan, serta pemberantasan KKN dan adaptif.

Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyakarat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan. Pemerintah daerah harus lebih adaptis serta lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, produktif serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi

pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan.

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di Kota Parepare sejatinya telah berjalan cukup baik, ditandai dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang membaik dari kategori CC dengan nilai 55,96 pada tahun 2019 menjadi kategori B pada tahun 2022. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

Selanjutnya, diperlukan juga penguatan dan penegakan regulasi daerah. Dimana masih banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW, seperti pembangunan rumah di tempat kemiringan maupun di daerah resapan air.

2.3.2.4.5 Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena global karena penyebabnya bersifat global, disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain itu, dampaknya juga bersifat global, dirasakan oleh seluruh mahluk hidup di berbagai belahan dunia. Perubahan iklim yang ditandai dengan berubahnya temperatur, presipitasi dan kenaikan air laut yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, pertanian, hutan, area pesisir, sumber daya air, spesies dan area alami, permintaan energi, transportasi dan lain-lain menghendaki solusi yang bersifat global, namun dalam bentuk aksi lokal di seluruh dunia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya dalam mengantisipasi dan meminimalisasi dampak perubahan iklim.

Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak perubahan iklim maka Pemerintah Kota Parepare melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran

penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041, dimana dalam regulasi tersebut pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan/ mengedepankan aspek mitigasi bencana.

Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada titik lokasi yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh Pemerintah Kota Parepare, oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, dan pemerintah kabupaten tetangga sebagai hinterland Kota Parepare.

Wilayah Kota Parepare didominasi oleh perbukitan dan dataran rendah. Bencana yang terjadi di wilayah Kota Parepare umumnya dipengaruhi oleh bencana hidrometeoroligis seperti bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, cuaca ekstrim, dan abrasi pantai. Bencana hidrometeorologis dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena curah hujan tinggi, pendangkalan daerah aliran sungai, penggundulan hutan, alih fungsi lahan, dan terbatasnya daerah resapan air. Keseluruhan potensi bencana ini menjadikan pemerintah harus meningkatkan ketahanan bencana sekaligus meningkatkan kualitas penanggulangan dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerja sama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama daerah wilayah Ajatappareng dalam merumuskan langkah-langkah yang akan

dilakukan untuk penanganan bencana khususnya banjir, mulai dari sisi kebijakan sektor, kebijakan wilayah, dan juga pembagian kewenangan untuk target jangka menengah dan jangka panjang, memetakan daerah-daerah yang terdampak bencana dan punya potensi terkena bencana di aliran sungai, sinkronisasi program tata ruang, sampai dengan pembiayaannya.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana dibutuhkan strategi yang matang dan terencana dengan baik. Tindakan untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan konsep penanganan banjir yang terintegrasi dengan adanya keterpaduan pendekatan dari hulu ke hilir, serta pendekatan struktural dan non struktural menjadi suatu sistem pengendalian banjir sehingga dibutuhkan sebuah rencana induk sistem pengendalian banjir dan drainase perkotaan. Selain itu, dalam upaya mitigasi banjir dibutuhkan program normalisasi dan revitalisasi di Sungai Karajae dan Sungai Jawi-Jawi melalui pengerukan sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta penghijauan dan reboisasi. Pengerukan sungai dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai sumber air, pengendali banjir, mengoptimalkan fungsi sungai saat menghadapi air yang meningkat pada musim hujan, serta memperbaiki sempadan sungai. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pembangunan talud, bronjong, *sheetpile* dan dam pengendali (*check dam*) diperlukan untuk mengendalikan dan menahan debit air. Penghijauan dan reboisasi khususnya tanaman dan pepohonan yang berakar serabut, serta memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk lahan hijau juga sangat dibutuhkan untuk menyerap air.

Dalam rangka adaptasi dan mitigasi bencana banjir di Kota Parepare, dibutuhkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peran BPBD sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tahapan

penyelenggaraan bencana meliputi pencegahan bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD berperan untuk melakukan perencanaan atau melakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, melakukan serangkaian kegiatan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana serta melakukan perbaikan pasca terjadinya suatu bencana. Selain itu dibutuhkan sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapsiagaaan warga dalam menghadapi bencana.

Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Parepare sebagai kota ramah lingkungan dan ramah sumber daya alam. Tentunya dimulai dengan hal-hal kecil seperti mengembangkan serta merawat ruang terbuka hijau, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak berlebihan dalam menggunakan sampah plastik.

Tabel ..... Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Melambatnya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	meningkatnya angka kematian ibu dan anak
		meningkatnya kasus pengidap TBC dan kematian akibat TBC
	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	menurunnya Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah khususnya pada jenjang SMP
		masih ada anak yang tidak bersekolah karena putus sekolah, tidak lulus atau tidak melanjutkan sekolah
	Menurunnya daya beli masyarakat	menurunnya rata-rata pengeluaran per kapita sebulan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya lapangan usaha potensial	sektor perdagangan tidak didukung oleh peningkatan sektor lainnya seperti industri pengolahan.
		sektor transportasi dan pergudangan belum dikembangkan.
Masih tingginya tingkat kemiskinan	-Persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin masih tinggi. -Masih ada penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem	bantuan masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
		rendahnya kesadaran masyarakat untuk mandiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan sosial.
		belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar sektor.
Masih tingginya tingkat pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		kurangnya pelatihan peningkatan keterampilan yang disediakan
		terbatasnya modal dan akses untuk berwirausaha
Masih rendahnya pendapatan per kapita	Masih rendahnya rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita	struktur perkonomian masih didominasi sektor perdagangan dan jasa
		rendahnya produktivitas ekonomi
Masih tingginya ketimpangan pendapatan	Belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat	adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar lapangan usaha
		adanya perbedaan tingkat produktivitas antar kelompok penduduk
Belum optimalnya tata kelola	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kinerja	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pemerintahan dan layanan publik	instansi pemerintahan daerah	Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
		Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
	Pelaksanaan pelayanan publik yang belum maksimal	Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tabel ..... Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Melambatnya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar pendidikan, kesehant dan sosial secara merata bagi seluruh masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi Dunia	Bonus Demografi	Perubahan Iklim dan Risiko Bencana	Manusia Unggul, Ketahanan Sosial dan Pangan
	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity (VUCA)	Pembangunan Belum Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Infrastruktur Perkotaan, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup
	Masih tingginya tingkat kemiskinan	3. Meningkatnya risiko bencana dan perubahan iklim	Perubahan Iklim dan Risiko Bencana	Transformasi Teknologi Digital	Pembangunan IKN dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai salah satu pusat pertumbuhan	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
	Masih tingginya tingkat pengangguran	4. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam		IKN dan Pemerataan Pembangunan	Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan adaptif
	Masih rendahnya pendapatan per kapita	5. Belum optimalnya pengelolaan kawasan ekonomi dan penyediaan		Pentingnya riset dan inovasi dalam pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah	Pemanfaatan Bonus Demografi	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih tingginya ketimpangan pendapatan				Ekosistem Transformasi Digital	
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik				Daya tampung dan Kerusakan Lingkungan	
					Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
					Hilirisasi	

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya perumusan visi dan misi yang dapat memberikan landasan yang jelas bagi tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta penetapan program prioritas pembangunan daerah.

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

3.1.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang ingin diwujudkan pada Tahun 2029. Pernyataan visi yang menggambarkan kondisi ideal Kota Parepare 5 (lima) tahun mendatang merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi pembangunan daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2025-2029 adalah visi Walikota dan Wakil Walikota Parepare terpilih yang telah disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah serentak di Tahun 2024. Penyusunan rumusan Visi yang akan

memberikan arah bagi perencanaan strategis 5 (lima) tahun ke depan telah selaras dengan RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045 dan telah memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Rumusan Visi Pembangunan Kota Parepare pada Tahun 2025-2029 adalah :

"Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju"

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029 di atas, terdiri dari 3 (tiga) kata kunci, yang memiliki makna sebagai berikut :

a. ***Terbaik***, mengandung makna : Terwujudnya birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, responsif dan inovatif serta berorientasi pada pelayanan publik (*service oriented)* yang berkualitas dan berkeadilan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. **Parepare Kota Terbaik** ditandai dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance) dan* kapasitas sumber daya manusia ASN yang terus meningkat untuk menghadirkan layanan publik yang mudah dengan penerapan *e-government* dan inovasi daerah yang semakin berkualitas.
b. ***Sejahtera***, mengandung makna : Terwujudnya kondisi keluarga dan masyarakat Kota Parepare yang bahagia dengan kehidupan yang layak, aman, berakhlak, berbudaya dan religius serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara inklusif. **Parepare Kota Sejahtera** dicirikan dengan terbentuknya keluarga dan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal di seluruh aspek kehidupan, dengan distribusi pendapatan yang semakin merata. **Parepare Kota Sejahtera** juga ditandai dengan masyarakat yang unggul dengan derajat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, memiliki pekerjaan dengan penghasilan dan hunian yang layak serta memiliki akses

terhadap pangan.

c. ***Maju,*** mengandung makna : Kondisi Kota Parepare pada Tahun 2029 memiliki perekonomian yang kuat dan berkualitas serta infrastruktur daerah yang inklusif, merata dan berkeadilan. **Parepare Kota Maju** ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi yang terkendali, pelayanan perizinan dan investasi yang mudah serta pengembangan infrastruktur daerah yang modern. **Parepare Kota Maju** juga dicirikan dengan pembangunan berkelanjutan yang berdaya tahan lingkungan dan kemampuan dalam mitigasi becana.

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu, menjadi urgen untuk menjamin keselarasan visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Keselarasan tersebut tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Penyelarasan Visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas	Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter

3.1.1.2. Misi Pembangunan Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 merupakan reformulasi dari misi Walikota/Wakil Walikota terpilih

yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Parepare pada saat tahapan pemilihan kepala dareah/wakil kepala daerah tanpa mengurangi substansi yang terkandung didalamnya. Reformulasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah perencanaan dalam penyusunan misi sehinga dapat diturunkan secara tepat ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, termasuk dalam penentuan indikator keberhasilannya. Rumusan misi ini juga menggambarkan transformasi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Selain itu, misi pembangunan Kota Parepare merupakan penguatan komitmen pemetintah Kota Parepare untuk berkotribusi nyata dalam pencapaian Asta Cita dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta cita – cita nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Reformulasi rumusan Misi Kota Parepare Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Reformulasi Misi Berdasarkan Dokumen Visi dan Misi
Walikota/Wakil Walikota Terpilih Yang Diserahkan ke KPUD

Misi Sesuai Dokumen KPUD	Reformulasi Misi
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Parepare yang berakhlak dengan mengedepankan harmonisasi dan toleransi antar umat beragama, serta menguatkan budaya kearifan lokal	**Misi 1 :** Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang pintar (smart governance), untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, dan komunikatif serta peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Misi 2 :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance)
Misi 3 : Mewujudkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi masyarakat melalui pembangunan	**Misi 3 :** Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif

Misi Sesuai Dokumen KPUD	Reformulasi Misi
dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	
Misi 4 : Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan peluang investasi yang berkeadilan bagi masyarakat dengan prinsip kolaborasi antar daerah, kolaborasi dengan pihak swasta, dan lembaga lainnya untuk mengurangi angka pengangguran dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. (Ekonomi Hijau)	**Misi 4 :** Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif **Misi 5 :** Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan
Misi 5 : Mengembangkan industri berbasis usaha mikro, kecil dan menengah serta ekonomi kreatif, dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja	
Misi 6 : Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana bagi petani dan nelayan serta pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan dalam mendukung ketersedian pangan berkelanjutan. (ekonomi biru)	
Misi 7 : Terwujudnya rumah layak huni yang terpadu dengan layanan dasar pemukiman dan pemberian santunan kematian bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
Misi 10 : Mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Destinasi	
Misi 8 : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur publik yang inklusif	**Misi 6 :** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana
Misi 9 : Mengembangkan infrastrukur pengendalian banjir, pemenuhan akses air minum yang aman serta jaringan transportasi dan fasilitas antar moda dalam mendukung sistem perkeretaapian Parepare-Makassar	

Uraian misi tersebut perlu dijelaskan sehingga mudah dipahami dan dapat implementasikan, sebagai berikut :

a. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal.

Misi ini merupakan gambaran umum yang akan dilaksanakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan harmonisasi dan toleransi serta penguatan budaya daerah dan kearifan lokal. Misi ini juga merupakan upaya penguatan kualitas keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan di tengah arus globalisasi, termasuk peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance).

   Misi ini diarahkan untuk Meningkatkan kualitas Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong penguatan inovasi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Misi ini merupakan upaya umum yang dilaksanakan untuk meningkatkan Indek Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi daerah.

c. Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.

   Misi ini merupakan upaya umum yang dilaksanakan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu untuk mencapai derajat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi melalui pengembangan sarana dan prasarana serta penyelenggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Termasuk dalam misi ini adalah meingkatkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan tanpa diskriminasi. Misi ini dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.

   Misi ini merupakan gambaran umum dalam upaya meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat,

menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran.

e. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Mengembangkan perkonomian daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mensejahterakan seluruh masyarakat melalui penguatan struktur ekonomi yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, kemudahan investasi, penguatan kolaborasi berbagai pihak, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Misi dini merupakan upaya pemerintah untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

f. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana.

   Mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan modern untuk mendukung kemajuan kota, meningkatkan konektivitas wilayah dan aksessibilitas layanan publik serta meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan infrastruktur daerah dilaksanakan secara bijaksana dengan selalu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

   Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakatnya mengurangi dampak buruk dari bencana dan membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana yang mungkin terjadi. Misi ini merupakan gambaran umum upaya yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks infrastuktur daerah, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks resiko bencana.

Tabel 3.2.
Akselerasi Visi dan Misi Pembangunan Kota Parepare
Tahun 2025-2029

No.	Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance)	**Terbaik**
2	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal	**Sejahtera**
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.	
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan	**Maju**
6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	

Selanjutnya, visi dan misi pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029 juga dilengkapi dengan 18 Program Unggulan yang merupakan program operasional utama yang akan dilaksanakan guna menghadirkan layanan publik Terbaik, masyarakat yang Sejahtera dan Kota yang Maju.

3.1.1.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

RPJPD merupakan landasan operasional perencanaan pembangunan di daerah dalam suatu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu pendekatan dalam proses penyusunan RPJMD Kota Parepare adalah pendekatan teknokratik yang salah satu metode yang dilaksanakan adalah penyesuaian atau penyelarasan RPJMD dengan dokumen RPJPD Kota Parepare tahun 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar RPJMD dapat menjabarkan target-target pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2025-2045, Visi Pembangunan Kota Parepare adalah **"Kota Parepare Maju, Berdaya Saing, Tangguh, dan Berkelanjutan".** RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode pertama dari RPJPD tersebut.

Pernyataan visi Kota Parepare Tahun 2025-2045 memiliki makna, sebagai berikut:

Kota Parepare Maju diartikan sebagai kota yang memiliki perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas, pembangunan sosial yang berkeadilan dan merata, yang ditandai dengan masyarakat sejahtera, serta memiliki keunggulan dalam pengembangan infrastruktur daerah dan pelayanan jasa melalui pemanfaatan teknologi.

Kota Parepare Berdaya Saing diartikan sebagai kota yang memiliki sumber daya manusia yang religius, sehat, cerdas dan kompetitif melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menghasilkan produk layanan jasa yang unggul dan menopang perekonomian daerah serta menumbuhkembangkan inovasi dan

tata kelola pemerintahan yang baik.

Kota Parepare Tangguh diartikan sebagai kota yang berkemampuan dalam beradaptasi dengan segala perubahan kondisi, yang diakibatkan oleh perubahan iklim, bencana alam maupun non alam yang berpotensi mengurangi kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap setiap perubahan kondisi tersebut.

Kota Parepare Berkelanjutan diartikan sebagai kota yang berkomitmen untuk selalu memperhatikan peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam melaksanakan pembangunan daerah, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pembangunan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah dilakukan secara bijaksana dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan terus berkesinambungan untuk kesejahteraan seluruh generasi.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2045, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. **Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat**

   Memantapkan fungsi dan peran serta agama sebagai landasan moral dan etika dalam upaya meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan setiap individu serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terbinanya kerukunan, kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan dalam kehidupan umat beragama. Misi ini merupakan upaya umum yang dilaksanakan untuk meningkatkan indeks kerukunan umat beragam, dan kualitas kehidupan keluarga.

2. **Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berkualitas**

   Misi ini diarahkan untuk mengembangkan perekomian daerah agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan struktur ekonomi daerah, kemudahan layanan investasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan perluasan kesempatan kerja.

3. **Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah yang Strategis dan Merata**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana daerah yang inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan infrastuktur dasar masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung penguatan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan daya saing daerah dan mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

4. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul**

   Misi ini diarahkan untuk membangun masyarakat Kota Parepare yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, produktif dan inovatif serta memiliki kemampuan dan kompetensi untuk bersaing di era globalisasi. Misi ini merupakan upaya umum dalam mewujudkan derajat Pendidikan yang berkualitas, derajat Kesehatan yang tinggi, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang terbarukan dan perlindungan sosial yang adaptif.

5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)***

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan

kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misi ini juga merupakan agenda untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya sehingga pelaksanaan pembangunan dalam tiap tahapan akan menjadi landasan kokoh bagai pelaksanaan pembangunan tahapan selanjutnya.

6. ***Mewujudkan* Masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana**

   Misi ini diarahkan untuk menciptakan Masyarakat yang tahan terhadap bencana, meliputi kemampuan untuk mengurangi resiko bencana, kapasitas untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana serta kapasitas untuk memulihkan diri pasca kejadian bencana melalui adaptasi dan mitigasi bencana.

7. **Mewujudkan Pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya alam, kelestarian lingkungan hidup dalam upaya menciptakan Pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketahanan ekologi melalui peningkatan kapasitas ketahanan energi, air dan pangan yang merupakan sumber daya strategis dalam mendukung keberlangsungan kehidupan manusia.

8. **Mewujudkan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis**

   Meningkatkan iklim dan budaya politik yang demokratis serta kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta menjunjung supremasi hukum untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Parepare Tahun 2025-2045

No.	Misi RPJMD	Pokok Visi RPJPD	Misi RPJPD
1	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal.	**Berdaya Saing**	1. Mengembangkan religiusitas keagamaan dalam kehidupan masyarakat. 2. Mewujudkan stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat yang adil dan demokratis
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance)		Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance)*
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif		Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.	**Maju**	Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat dan berkualitas
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan		
6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	**Maju Tangguh Berkelanjutan**	1. Mengembangkan sarana dan prasarana daerah yang strategis dan merata 2. Mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap bencana 3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya tahan lingkungan

3.1.1.4. Keselarasan Visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Pemerintah Kota Parepare merupakan satu kesatuan dan bagian integral dalam Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Pemerintah Kota Parepare akan terus berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan tujuan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka vis pembangunan Kota Parepare harus selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan visi pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 adalah :

"Sulawesi Selatan MAJU dan **BERKARAKTER"**

MAJU adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2029 yang lebih berkembang dan meningkat pembangunannya secara berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat Sulawesi Selatan yang maju ditandai oleh perbaikan atau kemajuan dibandingkan kondisi sebelumnya, baik dari segi kualitas hidup, produktivitas, maupun inovasi. Kondisi maju ini ditandai oleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah secara merata, berkeadilan, dan inklusif; ketersediaan infrastruktur yang semakin memadai dan menjangkau wilayah sulit akses dan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan; pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing, serta berkembangnya usaha dan industri yang berkontribusi terhadap pendapatan per kapita masyarakat.

Sulawesi Selatan yang Maju juga dicirikan oleh meningkatnya komitmen penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, terjaganya kualitas lingkungan hidup, serta menguatnya ketahanan energi, air, dan pangan.

BERKARAKTER adalah kondisi keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan yang berakhlak, berbudaya dan religius. Keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkarakter dicirikan oleh semakin menguatnya sifat dan sikap positif serta moral yang tinggi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Keluarga dan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkarakter juga ditandai oleh menguatnya penerapan kearifan budaya local dan nilai- nilai agama secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, kesetaraan dan keadilan, kesesuaian antara kata dan perbuatan, memegang teguh akhlak, adab, dan sopan santun, serta memiliki daya saing yang tangguh dengan semangat pantang menyerah. Transformasi tatakelola pemerintahan yang lebih berintegritas, adaptif, dan responsive berbasis digital juga menjadi ciri karakter pelayanan publik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan yang berkarakter di Sulawesi Selatan akan memperkuat nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi masyarakat dan pemerintahan daerah, seperti getteng (teguh), lempu (jujur), ada tongeng (ucapan yang benar), temmapasilengeng (tidak memihak), dan "Ten dolong buntu puang, sisan sisu'ta kaiyako, bo'bo'ta kaiyako" yang berarti tidak ada yang tidak bisa dipecahkan dengan hati yang ikhlas dan semangat yang kuat (peribahasa Toraja) serta “Jarreki laloi siriknu siagang tappak nasalamak linonu siagang aheraknu. Punna nulakkakmo siriknu siagang tappaknu panrakmi antu linonu siagang aheraknu” yang berarti “tegakkanlah kehormatanmu dan kuatkan pula imanmu, hidupmu akan bahagia

di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, jika keduanya ditanggalkan, akan hancurlah dunia dan akhiratmu."

Keselarasan Visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Keselarasan Visi RPJMD Kota Parepare dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Visi RPJMD Kota Parepare	**Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan**
Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter
Pokok Visi RPJMD Kota Parepare	**Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan**
Terbaik	Berkarakter
Sejahtera	Maju
Maju	Maju

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, tertuang visi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 yaitu :

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesi Emas 2045"

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasa sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di Tahun 2045.

Gambar 3.1.
Keselarasan Visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Keselarasan Visi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kota Parepare	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	Visi RPJM Nasioanl
Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju	**Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter**	**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**
Pokok Visi RPJMD Kota Parepare	**Pokok Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan**	**Pokok Visi RPJM Nasional**
Terbaik	Berkarakter	Indonesia Emas
Sejahtera	Maju	Indoinesia Maju
Maju		

Sumber : Bappeda Kota Parepare, 2025 (Data diolah)

3.1.1.5. Keselarasan Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Keselarasan visi antara RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 harus ditindaklanjuti dengan

keselarasan misi. Keselarasan misi antara RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 akan menentukan kontribusi Kota Parepare dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Misi Sulawesi Selatan dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJM Nasional, yang dimaksdukan agar Sulawesi Selatan dapat berkontribusi signifikan terhadap tercapainya cita-cita nasional untuk menuju Indonesia emas. Rumusan misi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya saing;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani melalui transformasi birokrasi berbasis digital;.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Keselarasan misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Kelarasan Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance).	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani melalui

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029
		transformasi birokrasi berbasis digital
2	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal.	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.	
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.	Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan.	
6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

Untuk mencapai visi pembangunan nasional, maka dirumuskan 8 (delapan) misi presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),

Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan dibcrbagai sektor s€rta langkah-langkah bcrupa Program Hasil Terbaik Cepat/ Ouick Wins. Kescluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan bcrbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.2
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Selanjutnya, uraian keselarasan Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Misi Pembangunan Nasional yang tergambar dalam Delapan Asta Cita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Kelarasan Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 / Asta Cita
1	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal.	**Asta Cita 8**. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
		Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM)
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance)	**Asta Cita 7**. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.	**Asta Cita 4**. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.	**Asta Cita 6**. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan
		Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah	**Asta Cita 6**. Membangun dari Desa dan

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 / Asta Cita
	yang Berkualitas dan Berkeadilan.	dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan
		Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	**Asta Cita 3**. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
		Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Tabel 3.7

Kelarasan Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 / Asta Cita
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governanve), Adaptif, dan Inovatif.	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani melalui transformasi birokrasi berbasis digital	**Asta Cita 7**. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
2	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak,	**Asta Cita 8**. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 / Asta Cita
	Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal.	dan Berdaya Saing	yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
			Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM)
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	**Asta Cita 4**. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.	Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	**Asta Cita 6**. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan
			Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
			Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 / Asta Cita
			Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	**Asta Cita 6**. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan
			Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	**Asta Cita 3**. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
			Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta

No	Misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 / Asta Cita
			Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Untuk melaksanakan keenam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan pembangunan Kota Parepare dilakukan dengan memperhatikan kontribusi Kota Parepare terhadap pencapaian target pembangunan nasional yang termuat dalam ASTA CITA. Untuk itu, tujuan Pembangunan jangka menengah Kota Parepare Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan serta kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatnya kinerja birokrasi yang adaptif, responsif, dan inovatif.
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang inklusif.
4. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan masyarakat.
5. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berkualitas dengan memperhatikan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur strategis, berkualitas, merata, adaptif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, 6 (enam) tujuan pembangunan di atas, diturunkan menjadi 15 sasaran strategis, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Perumusan Sasaran stratetegis ini, juga dilakukan untuk menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota Parepare untuk berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian ASTA CITA yang telah dirumuskan dalam RPJMN Nasional Tahun 2029-2030. Sasaran RPJMD Kota Parepare sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas keluarga dalam era globalisasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang yang efektif, efisien, dan komunikatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Meningkatnya mutu dan akses Pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif;
5. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
6. Meningkatnya kualitas kesetaraan gender;
7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatnya Ketersediaan pangan masyarakat;
9. Meningkatnya Lapangan kerja dan kesempatan kerja;
10. Meningkatnya iklim investasi;
11. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan;
12. Meningkatnya produktivitas sektor Industri Pengolahan;
13. Meningkatnya produktivitas kepariwisataan daerah;
14. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah; dan
15. Meningkatnya ketangguhan adaptasi, mitigasi bencana dan

perubahan iklim.

Adapun Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029 dapat diihat dengan jelas pada tabel 3.8. berikut ini :

Tabel 3.8
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN / Asta Cita /Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Asta Cita / Prioritas Nasional
1	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan serta kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kualitas keluarga dalam era globalisasi serta keamanan den ketertiban masyarakat Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	**Asta Cita 8**. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur **Asta Cita 1**. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM)
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance), Adaptif, dan Inovatif.	Meningkatnya kinerja birokrasi yang adaptif, responsif, dan adaptif	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang	**Asta Cita 7**. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Asta Cita / Prioritas Nasional
			efektif, efisien, dan komunikatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi	**Asta Cita 1**. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM)
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang inklusif	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif;	**Asta Cita 4**. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau	
			Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender;	
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	**Asta Cita 6**. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan
			Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	**Asta Cita 2**. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi,

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Asta Cita / Prioritas Nasional
				Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
			Meningkatnya Lapangan kerja dan kesempatan kerja;	**Asta Cita 3**. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berkualitas dengan memperhatikan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya iklim investasi;	**Asta Cita 6**. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan pemberantasan Kemiskinan **Asta Cita 3**. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta
			Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan;	
			Meningkatnya produktivitas sektor Industri Pengolahan;	
			Meningkatnya produktivitas kepariwisataan daerah;	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Asta Cita / Prioritas Nasional
				Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
6	Mewujdukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur strategis, berkualitas, merata, adaptif dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	**Asta Cita 3**. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
			Meningkatnya Ketangguhan Adaptasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim	**Asta Cita 8**. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Tabel 3.9.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2030

No	Visi / Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Proyeksi
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Parepare Kota Terbaik, Sejahtera dan Maju										
1	**Misi 1**	**Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal**									
	Tujuan 1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan serta kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	77,00	77,71	78,10	78,48	78,87	79,25	79,64
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kualitas keluarga dalam era globalisasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,32	64,55	65,89	67,15	68,49	69,75	71,24
			Angka Kriminalitas	Kasus	530	500	450	400	350	300	275
2	**Misi 2**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*)**									
	Tujuan 2	Meningkatnya Kinerja Birokrasi yang Adaptif, Responsif, dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		65,00 (C)	67,50 (C)	70,00 (C)	72,50 (C)	75,50 (B)	77,50 (B)
			Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,09	4,17	4,25	4,34	4,42	4,50	4,58
			Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,88 (Inovatif)	58,00	59,75	61,50	63,25	65,00	66,75

No	Visi / Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Proyeksi
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 2.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Angka	62,76 (B)	63,34 (B)	63,93 (B)	64,52 (B)	67,43 (B)	70,46 (BB)	71,12 (BB)
	Sasaran 2.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Komunikatif Berbasis Teknoligi Informasi dan Komunikasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka		3,75 (B)	4,05 (A-)	4,25 (A-)	4,40 (A-)	4,51 (A)	4,55 (A)
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,62 (B)	2,84 (B)	2,95 (B)	3,06 (B)	3,17 (B)	3,27 (B)	3,38 (B)
3	**Misi 3**	**Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif**									
	Tujuan 3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,97	81,16	81,84	82,52	83,21	83,90	84,61
	Sasaran 3.1	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif	Indeks Pendidikan	Angka	76,50	76,85	77,21	77,56	77,92	78,28	78,64
	Sasaran 3.2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Indeks Kesehatan	Angka	82,72	83,72	84,73	85,75	86,79	87,83	88,89
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas	Indeks Ketimpangan	Angka	0,166	0,165	0,165	0,164	0,163	0,161	0,160

No	Visi / Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Proyeksi
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	3.3	Kesetaraan Gender;	Gender								
4	**Misi 4**	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif**									
	Tujuan 4	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan masyarakat	Gini Ratio	Angka	0,373	0,370	0,365	0,360	0,355	0,340	0,335
	Sasaran 4.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,27	5,01	4,76	4,52	4,29	4,08	3,87
	Sasaran 4.2	Meningkatnya ketersedian pangan masyarakat;	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,76	83,10	84,70	85,59	86,40	87,30	88,00
	Sasaran 4.3	Meningkatnya Lapangan kerja dan kesempatan kerja;	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,23	4,97	4,72	4,48	4,26	4,05	3,84
5	**Misi 5**	**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan**									
	Tujuan 5	Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang berkualitas dengan memperhatikan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	61,97	66,51	71,39	76,63	82,24	88,28	94,75
			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
			Kontribusi PDRB Kota Parepare Terhadap Prov. Sulawesi Selatan	Persen	1,43	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
			Inflasi	Skor	1,73	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Indeks Ekonomi	Angka	64,74	51,91	54,17	56,43	58,69	60,95	63,21

No	Visi / Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Proyeksi
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Hijau								
			Indeks Ekonomi Biru	Angka	71,30	79,86	88,42	96,97	105,53	114,08	122,64
	Sasaran 5.1	Meningkatnya Iklim Investasi;	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen		18,11	21,20	24,30	27,40	30,49	33,59
	Sasaran 5.2	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan;	Kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,96	6,10	6,25	6,40	6,55	6,71	6,87
	Sasaran 5.3	Meningkatnya produktivitas sektor Industri Pengolahan;	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen		3,05	3,40	3,75	4,09	4,44	4,79
	Sasaran 5.4	Meningkatnya produktivitas kepariwisataan daerah;	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, makanan dan Minuman	Persen	6,84	7,82	8,18	8,54	8,89	9,25	9,61
6	**Misi 6**	**Mewujdukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana**									
	Tujuan 6	Meningkatnya Pembangunan infrastruktur strategis, berkualitas, merata,	Indeks Pilar Infrastruktur (IDSD)	Angka	2,85	3,31	3,77	4,23	4,69	5,15	5,61
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,01	71,12	71,33	71,54	71,75	71,96	72,17

No	Visi / Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Proyeksi
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		adaptif dan berkelanjutan									
	Sasaran 6.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastuktur	Poin	3,95	4,07	4,86	5,65	6,43	7,22	8,01
	Sasaran 6.2	Meningkatnya Ketangguhan Adaptasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana		135,00	132,00	130,00	128,00	125,00	122,00	120,00
			Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen		14,46	17,33	20,19	23,06	25,92	28,79

3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Parepare Tahun 2025-2030 perlu disusun secara gradual sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini akan lebih memudahkan dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian sehingga akan mengurangi resiko dan meningkatkan keberhasilannya. Pentahapan pelaksanaan pembangunan dilakukan hingga tahun 2030, dengan catatan bahwa pada tahun 2030 merupakan periode transisi pemerintahan sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berkesinambungan antar satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya dengan baik. Adapun Tahapan pembangunan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Tahapan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2030

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
Peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing dan Penguatan Perekonomian serta Kesejahteraan Masyarakat Inklusif	*Peningkatan Kualitas SDM Unggul dan berakhlak Serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*	*Akselerasi Pengembangan SDM, Infrastruktur dan Digitalisasi pelayanan publik terbaik dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif*	*Pemantapan Pengembangan SDM, Infrastruktur dan Digitalisasi pelayanan publik terbaik dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif*	*Perwujudan Infrastruktur, perekonomian daerah, layanan publik terbaik, dan SDM yang unggul dan produktif untuk Parepare Sejahtera dan Maju*	*Optimalisasi Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing Untuk masyarakat yang lebih sejahtera*

Selanjutnya, agar tahapan pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dijalankan. Arah kebijakan RPJMD merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan Strategi RPJMD merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, serta dengan memperhatikan Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Parepare untuk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif melalui Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengintegrasian sistem dan data antar perangkat daerah, peningkatan kolaborasi dalam pengembangan pelayanan publik, pemanfaatan hasil kelitbangan serta peningkatan kapasitas ASN;
2. Meningkatkan kompetensi ASN dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang andal dan terpercaya serta digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan;

3. Mewujudkan ketahanan keluarga serta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Penguatan fungsi dan peran agama dan kearifan budaya lokal sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi serta mengembangkan harmonisasi dan toleransi dalam moderasi beragama;
4. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif;
5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang inklusi;
6. Mendorong peningkatan kualitas SDM, Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender serta meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
7. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pengurangan kantong-kantong kumuh;
8. Meningkatkan diversifikasi pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan penguatan sistem kewaspadaan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD);
9. Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi angkatan kerja, peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, menumbuhkembangkan wira usaha dikalangan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi kreatif dan peningkatan perlindungan tenaga kerja;
10. Menciptakan kemudahan perizinan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi perizinan dan investasi, peningkatan promosi potensi investasi daerah, optimalisasi pelayanan investasi dan perizinan berusaha, revitalisasi Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS), peningkatan kapasitas SDM serta menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak;

11. Pengembangan pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah melalui peningkatan kemudahan pelayanan perizinan dan investasi untuk Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan berkeadilan;
12. Meningkatkan kualitas dan akses bibit dan benih, penguatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasana, pemaanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi secara berkelanjutan;
13. Meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kualitas dan inovasi serta diversifikasi produk IKM;
14. Meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal, penguatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan industri olahraga yang mendukung kepariwisataan; peningkatan kualitas SDM dan ekosistem Pariwisata, serta peningkatan promosi, kegiatan dan kemitraan kepariwisataan;
15. Pengembangan kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
16. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta perubahan iklim, melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana serta pembentukan masyarakat tangguh bencana.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, dapat dilihat pada Tabel berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan, maka arah kebijakan pembangunan dirumuskan pada setiap sasaran RPJMD yang terinci pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota

Parepare
Tahun 2026 – 2029

Visi			
Parepare Kota Terbaik, Sejahtera dan Maju			
Misi ke – 1			
Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan serta kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan	1. Meningkatnya kualitas keluarga dalam era globalisasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat	Mewujudkan ketahanan keluarga serta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Penguatan fungsi dan peran agama dan kearifan budaya lokal sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi serta mengembangkan harmonisasi dan toleransi dalam moderasi beragama
Misi ke – 2			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governanve)			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
2	Meningkatnya kinerja birokrasi yang adaptif, responsive , dan adaptif	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kompetensi ASN dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang andal dan terpercaya serta digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan komunikatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif, Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengintegrasian sistem dan data antar perangkat daerah, peningkatan kolaborasi dalam pengembangan pelayanan publik, pemanfaatan hasil kelitbangan serta peningkatan kapasitas ASN

		3. Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kompetensi ASN dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang andal dan terpercaya serta digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan
Misi ke – 3			
Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
1.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender	1. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif
		2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang inklusi
		3. Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender	Mendorong peningkatan kualitas SDM, Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender serta meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
Misi ke – 4			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pengurangan kantong-kantong kumuh
		Meningkatnya ketersedian pangan masyarakat	Meningkatkan diversifikasi pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan masyarkata, dan penguatan sistem kewaspadaan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)

		Meningkatnya Lapangan kerja dan kesempatan kerja	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi angkatan kerja, peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, menumbuhkembangkan wirausaha di kalangan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi kreatif dan peningkatan perlindungan tenaga kerja
Misi ke – 5			
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang berkualitas dengan memperhatikan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	1. Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dan investasi	Menciptakan kemudahan perizinan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi perizinan dan investasi, peningkatan promosi potensi investasi daerah, optimalisasi pelayanan investasi dan perizinan berusaha, revitalisasi Kawasan Industri Parepare (KIPAS), peningkatak kapasitas SDM serta menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
		2. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan	Meningkatkan kualitas dan akses bibit dan benih, penguatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasana, pemaanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi secara berkelanjutan.
		3. Meningkatnya produktivitas sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan daya saing IKM, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kualitas dan inovasi serta diversifikasi produk IKM
		4. Meningkatnya produktivitas kepariwisataan daerah	Meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal, penguatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan industri olahraga yang mendukung kepariwisataan; peningkatan kualitas SDM dan ekosistem Pariwisata, serta peningkatan promosi, kegiatan dan kemitraan kepariwisataan

Misi ke – 6			
Mewujdukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
1.	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur strategis, berkualitas, merata, adaptif dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Pengembangan wilayah strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		2. Meningkatnya Ketangguhan Adaptasi, mitigasi bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta perubahan iklim, melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana serta pembentukan masyarakat tangguh bencana

Sumber : Ranhir RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029

3.2.1.2. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan merupakan rangkaian pendekatan terencana dan terpadu yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Dalam merumuskan strategi, hal yang penting untuk dilakukan adalah memperhatikan secara seksama strategi pembangunan nasional maupun provinsi, agar supaya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat bersinergi dan berkontribusi secara efektif terhadap target-target pembangunan provinsi dan pembangunan nasional yang digambarkan dalam Asta Cita. Strategi pembangunan ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, dan disajikan secara lengkap pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12.
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Kota Parepare Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Visi : Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju					
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*), Adaptif, dan Inovatif	Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang efektif, efisien, komunikatif serta inovatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang adaptif dan inovatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif, Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengintegrasian sistem dan data antar perangkat daerah, peningkatan kolaborasi dalam pengembangan pelayanan publik, pemanfaatan hasil kelitbangan serta peningkatan kapasitas ASN	1. Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government dan pembangunan command centre; 2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam penguasaan TIK dan standarisasi pelayanan publik; 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana digitalisasi layanan publik di SKPD termasuk kelurahan dan kecamatan; 4. Peningkatan kerjasama daerah dengan berbagai pihak dalam pengembangan / pembangunan layanan publik; 5. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan ASN; dan 6. Optimalisasi pemanfaatan hasil inovasi untuk layanan publik
			Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kompetensi ASN dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang andal dan terpercaya serta digitalisasi	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, adaptif dan melayani; 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran,

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
				penyelenggaraan pemerintahan	pengendalian dan evaluasi pembangunan daera; 3. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Peningkatan kualitas pengawasan APIP dalam pencegahan Korupsi, kolusi dan nepotisme
2	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan serta kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan	Meningkatnya kualitas keluarga dalam era globalisasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat	Mewujudkan ketahanan keluarga serta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Penguatan fungsi dan peran agama dan kearifan budaya lokal sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi serta mengembangkan harmonisasi dan toleransi dalam moderasi beragama	1. Penguatan implementasi nilai - nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari; 2. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan menuju keluarga sejahtera; 3. Optimalisasi peran organisasi keagamaan dalam membangun moderasi beragama; 4. Penguatan pendidikan keagamaan bagi generasi muda; 5. Menyemarakkan pelaksanaan kegiatan keagamaan; 6. Peningkatan kesejahteraan petugas agama di masyarakat; 7. Merevitalisasi kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					8. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh satuan pendidikan; 2. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kesejahteraan Tenaga pendidik serta pendistribusian yang merata di seluruh satuan pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan; 3. Peningkatan aksesibilitas dan layanan pendidikan melalui pemberian pakaian seragam dan kelengkapannya di tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA sederajat dan pemberian untuk siswa berprestasi dan beasiswa kurang mampu, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; 4. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk tercapainya proses pembelajaran yang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					lebih efektif dan berkualitas; dan 5. Peningkatan penanganan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) 6. Pembinaan Akhlak, Karakter siswa dan kebiasaan baik 7. Peningkatan Literasi disetiap jenjang pendidikan
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang inklusi	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan; 2. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan dan Posyandu; 3. Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 4. Peningkatan upaya penanganan dan pencegahan Stunting dan gizi buruk, HIV-Aids, TBC, DBD, dan penyakit menular dan tidak menular lainnya; 5. Peningkatan kualitas layanan kedaruratan; 6. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pemenuhan SDM tenaga kesehatan yang berkualitas termasuk

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					kebutuhan spesifik tenaga medis; 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penyehatan lingkungan; 8. Mendukung pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat; dan 9. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan universal bagi masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender	Mendorong peningkatan kualitas SDM, Kelembagaan dan penguatan kebijakan yang responsif gender serta meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Pengintegrasian *Gender Eguality, Dissability, and Sosial Inclusion* (GEDSI) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 2. Penyediaan data terpilah sebagai bahan perumusan kebijakan yang responsif gender; 3. Penguatan kelembagaan UPTD PPA dalam perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); 4. Peningkatan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					daerah yang responsif gender; dan 5. Penguatan kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dan anak
4	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif**	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pengurangan kantong-kantong kumuh	1. Peningkatan kualitas data kemiskinan; 2. Perluasan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan sosial tenaga kerja dan bantuan sosial yang tepat sasaran; 3. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan keterampilan berusaha; 4. Peningkatan akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
			Meningkatnya ketersedian pangan masyarakat	Meningkatkan diversifikasi pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan masyarkata, dan penguatan sistem kewaspadaan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	1. Edukasi konsumsi pangan bergizi dan beragam; 2. Penguatan pangan lokal; 3. Pemanfaatan pekarangan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan (OPLP); 4. Penguatan distribusi pangan; 5. Penguatan sistem informasi pangan;

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					6. Ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah; dan 7. Peningkatan kolaborasi multi pihak untuk program ketahanan pangan daerah dan nasional
			Meningkatnya Lapangan kerja dan kesempatan kerja	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi angkatan kerja, peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, menumbuhkembangkan wirausaha di kalangan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi kreatif dan peningkatan perlindungan tenaga kerja	1. Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kecamatan; 2. Pemberdayaan UMKM dan peningkatan pelatihan kewirausahaan dan implementasi PAREPARE KEREN (Kecamatan Entrepreneurship); 3. Pembangunan dan Pengembangan Creative Hub; 4. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja; 5. Memprioritaskan penempatan tenaga kerja lokal; 6. Peningkatan layanan bagi tenaga kerja; 7. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri; dan 8. Pembangunan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan karakter, keterampilan dan kepemimpinan 9. Pemberian Jaminan tenaga

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					kerja bagi Pekerja rentan
5	**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan**	Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang berkualitas dengan memperhatikan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dan investasi	Menciptakan kemudahan perizinan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi perizinan dan investasi, peningkatan promosi potensi investasi daerah, optimalisasi pelayanan investasi dan perizinan berusaha, revitalisasi Kawasan Industri Parepare (KIPAS), peningkatak kapasitas SDM serta menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.	1. Pemberian fasilitasi dan kemudahan investasi serta kepastian berusaha melalui kemudahan perizinan; 2. Penyediaan informasi dan peluang investasi daerah; 3. Melaksanakan roadshow investasi dan pengembangan promosi investasi melalui Digital Marketing; 4. Implementasi OSS (Online Single Submission) secara maksimal dan terpadu serta pengintegrasianny a dengan RDTR untuk percepatan layanan berusaha; 5. Pemberian layanan perizinan berusaha secara mobile; 6. Pemangkasan waktu penyelesaian perizinan; 7. Pengawasan pelaksanaan investasi daerah secara terpadu melaui pendekatan multi sektor; dan 8. Memberi jaminan Kepastian, Kenyamanan dan Keamanan Investasi/ berusaha di daerah
			Meningkatnya produktivitas sektor	Meningkatkan kualitas dan akses bibit dan benih,	1. Penyediaan benih/bibit dan pupuk yang

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			pertanian, kelautan dan perikanan	penguatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasana, pemaanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi secara berkelanjutan.	berkualitas dan terjangkau; 2. Peningkatan kualitas petani dan nelayan melalui pelatihan keterampilan, dan penyuluh pertanian/nelayan; 3. Modernisasi peralatan pertanian dan perikanan; 4. Pembangunan/rehabilitasi irigasi; 5. Penyediaan asuransi bagi petani, peternak dan nelayan; 6. Penguatan teknologi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan; 7. Diversifikasi usaha pertanian dan Perikanan; 8. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan; dan 9. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam penyediaan modal usaha pertanian/perikanan termasuk dengan Koperasi Merah Putih di kelurahan
			Meningkatnya produktivitas sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan daya saing IKM, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kualitas dan inovasi serta diversifikasi produk IKM	1. Penyediaan sarana dan prasarana produksi bagi IKM; 2. Peningkatan standarisasi, sertifikasi dan kualitas produk IKM; 3. Peningkatan kualitas

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					manajemen dan SDM Pelaku IKM sesuai kebutuhan industri 4.0; 4. Penguatan inovasi dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan (Diversifikasi produk); 5. Fasilitasi Pelaku IKM terhadap akses permodalan; 6. Peningkatan strategi pemasaran dan promosi produk yang efektif melalui paltform digital; 7. Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam peningkatan daya saing produk industri pengolahan
			Meningkatnya produktivitas kepariwisataan daerah	Meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal, penguatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan industri olahraga yang mendukung kepariwisataan; peningkatan kualitas SDM dan ekosistem Pariwisata, serta peningkatan promosi, kegiatan dan kemitraan kepariwisataan	1. Peningkatan pelaksanaan even seni, budaya dan olahraga berskala regional dan nasional; 2. Optimalisasi penyelenggaraan even tahunan "Salo KarajaE"; 3. Pembangunan sport centre pendukung kepariwisataan; 4. Pengembangan Ekonomi kreatif; 5. Revitalisasi Kebun Raya Jompie sebagai obyek wisata unggulan; 6. Penyediaan infrastruktur wisata yang memadai; 7. Penataan Kawasan pesisir dan pengembangan wisata bahari;

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
					8. Diversifikasi dan pengembangan produk wisata; 9. Promosi yang tepat sasaran melalui media sosial, platform digital, dan pameran wisata; 10. Peningkatan SDM Pelaku wisata; dan 11. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjamin pariwisata yang berkelanjutan
6	**Mewujdukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana**	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur strategis, berkualitas, merata, adaptif dan Berkelanjutan	3. Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Pengembangan wilayah strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kelancaran arus penumpang dan barang; 2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan air minum/air bersih dan sanitasi layak; 3. Peningkatan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis; 4. Peningkatan layanan transportasi darat dan peningkatan integrasi antar moda transportasi; dan 5. Peningkatan nilai tambah ekonomi untuk kawasan strategis dan cepat tumbuh
			Meningkatnya Ketangguhan Adaptasi, mitigasi bencana dan	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta perubahan iklim,	1. Pengembangan infrastruktur tahan bencana; 2. Pengembangan sistem peringatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			perubahan iklim	melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana serta pembentukan masyarakat tangguh bencana	dini (early warning system) berbasis masyarakat; 3. Pengurangan luas wilayah dari genangan / banjir melalui Rehabilitasi Drainase perkotaan; 4. Normalisasi Sungai KarajaE dan Jawi-jawi; 5. Penanggulangan, pemulihan dan pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, konservasi hutan serta rehabilitasi lahan kritis; 6. Penanggulangan bencana berbasis resiko bencana melalui pengembangan masyarakat tangguh bencana; 7. Peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang; 8. Peningkatan pengelolaan sampah dan 9. Penguatan kolaborasi stakeholder dalam upaya pengurangan risiko bencana alam:

Sumber : Bappeda, 2025 (data diolah)

3.2.2. Program-Progran Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Parepare, maka terdapat 18 Program unggulan Walikota / Wakil Walikota Parepare yang akan mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2025. 18 proghram unggulan tersebut terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Program Unggulan Kota Parepare

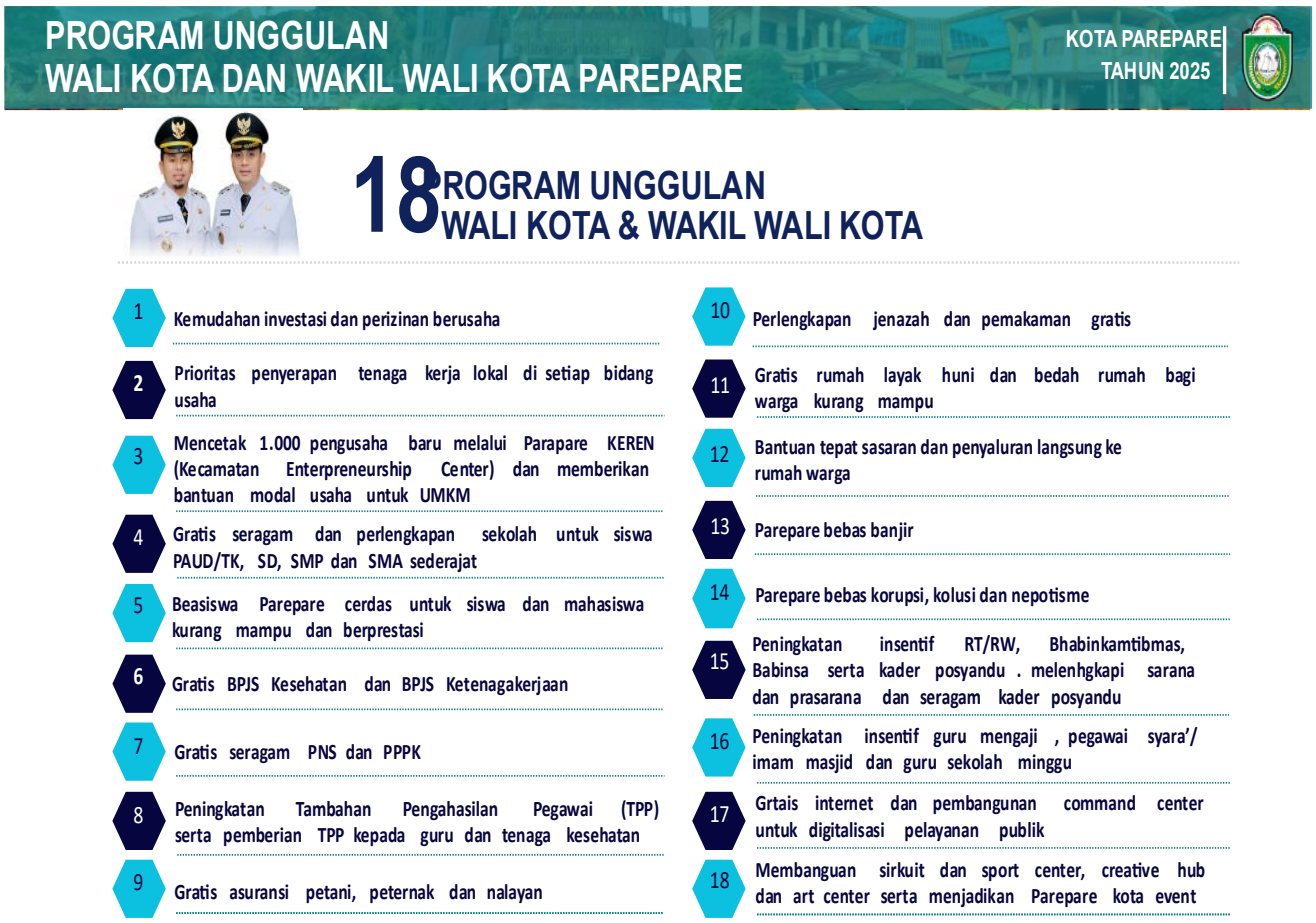

Pembiayaan 18 Proggram Unggulan tersebut tidak hanya bersumber dari APBD namun memungkinkan juga bersumber dari sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, *corporate Social Responsibility (CSR)* serta pihak swasta dan masyarakat/filantropi lainnya yang

berkepentingan untuk kemajuan Kota Parepare. Program-program unggulan ini perlu dijelaskan lebih mendetail agar dapat dipahami dengan baik sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang terkait.

1. Kemudahan Investasi dan Perizinan Berusaha

   Untuk menindaklanjuti program ini maka diperlukan aksi nyata secara holistik dan selaras di seluruh perangkat daerah terkait yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan perizinan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi perizinan dan investasi, peningkatan promosi potensi investasi daerah, optimalisasi pelayanan investasi dan perizinan berusaha, revitalisasi Kawasan Industri Parepare (KIPAS), peningkatak kapasitas SDM serta menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha dilakukan secara terpadu antar fungsi pengawasan dan fungsi fasilitasi kegiatan berusaha dalam menjaga iklim berusaha daerah yg kondusif. Hal-hal yang perlu dilaksanakan, antara lain :

   a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) periode 2026 – 2046 Tahun anggaran 2026.
   b. Klinik Investasi merupakan layanan konsultasi gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk membantu Masyarakat, pelaku usaha, maupun investor memahami dan memudahkan proses penanaman modal di Kota Parepare.
   c. Promosi Investasi berupa pertemuan penjajakan kerja sama(Business Matching) dan Leaflet Potensi investasi sebagai media promosi yang terkait peluang investasi yang ada di Kota parepare.

d. Implementasi Peta dan Peluang Investasi berbasis GIS (Geografic Information System) yang dapat diakses melalui website DPMPTSP Kota Parepare.

2. Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di setiap bidang usaha

   Program ini direncanakan sebagi respon terhadap masih tingginya angka pengangguran di Kota Parepare, padaha, tenaga kerja lokal memiliki potensi besar yang belum dimobilisasi secara optimal. Tujuan strategis dari program ini, adalah :

   - Memastikan minimal 70% tenaga kerja di setiap perusahaan berasal dari warga lokal, sesuai Perda No. 8 Tahun 2023.
   - Meningkatkan jumlah lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja bagi warga Parepare.
   - Meningkatkan akses warga terhadap informasi lapangan kerja.
   - Penguatan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban serapan tenaga kerja lokal.
   - Mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat

3. Mencetak 1.000 pengusaha baru melalui Parepare KEREN (Kecamatan Entrepreneurship Center) dan memeberikan bantuan modal usaha untuk UMKM

   Program ini bertujuan untuk : i) Menumbuhkan wirausaha baru yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing; ii) Memperkuat ekosistem UMKM di tingkat kecamatan; dan iii) Mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pelaksanaan program ini direncanakan selama 4 tahun yaitu tahun 2026-2029 dengan merekrut peserta sebanyak 250 orang setiap tahunnya. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Pelatihan dasar dan lanjutan kewirausahaan
b. Bimbingan teknis sesuai jenis usaha
c. Pendampingan dan mentoring usaha
d. Fasilitasi perizinan dan akses pemasaran

Adapun bantuan modal usaha yang dimaksud adalah Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap akses permodalan bagi pelaku UMKM kepada perbankan ataupun Lembaga keuangan lainnya serta bantuan peralatan usaha.

4. Gratis seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa PAUD/TK, SD, SMP dan SMA sederajat (4)

   Pemberian seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa PAUD/TK, SD, SMP dan SMA sederajat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kota Parepare terhadap Pendidikan dasar yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Pemberian seragam dan perlengkapan sekolah dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku termasuk kewenangan pemerintah daerah.

   Untuk SD dan SMP akan dimulai tahun 2025 dengan terlebih dahulu memprioritaskan sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dan cakupannya dapat diperluas di tahun-tahun berikutnya mencakup sekolah negeri di lingkungan kementerian agama dan sekolah swasta, tentu saja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

   Sedangkan untuk SMA, pemberian seragam dan perlengkapan sekolah dilakukan secara seksama dengan memperhatikan regulasi yang berlaku. Sekolah menengah dan kejuruan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, maka Pemerintah Kota Parepare akan mempertimbangkan sumber pembiayaan

alternatif selain APBD Kota Parepare, termasuk bersinergi dengan prioritas pembangunan provinsi sehingga pembiayaannya dapat berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, atau juga dapat dipertimbangkan sumber pembiayaan dari CSR dan pihak swasta serta masyarakat/ filantropi lainnya.

5. Beasiswa Parepare cerdas untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.

   Pemberian Beasiswa Parepare cerdas untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi dimaksudkan sebagai stimulan bagi siswa dan mahasiswa dalam melanjutkan pendidikannya. Beasiswa diprioritaskan kepada siswa tingkat SD dan SMP yang tergolong kurang mampu dan atau berprestasi, yang dibuktikan dengan sertifikat ataupun keterangan dari pihak yang berkompeten. Prestasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada prestasi akademik tapi juga termasuk prestasi di bidang olahraga, keagamaan, dan prestasi lainnya.

   Untuk pemberian beasiswa bagi siswa pada jenjang SMA dan mahasiswa pada perguruan tinggi tetap akan diupayakan, meskipun jenjang Pendidikan ini bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah namun siswa dan mahasiswa tersebut merupakan masyarakat Parepare. Pemerintah Kota Parepare akan mengupayakan sumber pembiayaan alternatif lain, selain dari APBD Kota Parepare. Sumber pembiayaan ini dapat berasal dari bantuan pemerintah provinsi, nasional, CSR maupu pihak swasta dan masyarakat/filantropi yang mempunyai perhatian dalam pengembangan Pendidikan di Kota Parepare.

6. Gratis BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

   Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam

mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC), program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Pada tahun anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.000.000.000 guna menjamin keberlanjutan perlindungan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan dan tidak termasuk dalam segmen peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja maupun yang membayar iuran secara mandiri. Tujuan dari program ini adalah untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN yang didanai oleh pemerintah daerah (PBI Daerah), sehingga seluruh penduduk Parepare dapat terintegrasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang adil, inklusif, dan berkesinambungan. Langkah-langkah yang ditempuh mencakup kegiatan pemadanan dan validasi data kependudukan serta data kepesertaan JKN secara terintegrasi, yang melibatkan koordinasi aktif antara Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Cabang Parepare guna memastikan keakuratan sasaran serta optimalisasi alokasi anggaran, serta peluasan akses bagi masyakarat untuk melakukan pendaftaran kepesertaan JKN Segment BP dan PBPU Pemda. Diproyeksikan hingga bulan Desember 2025, jumlah jiwa yang dibiayai melalui program ini mencapai 51.765 jiwa, dengan estimasi rata-rata kenaikan peserta sebesar ±464,75 jiwa per bulan berdasarkan tren data sebelumnya yang dianalisis menggunakan metode regresi linear sederhana. Evaluasi yang diharapkan dari program ini adalah

tercapainya target UHC secara penuh, meningkatnya kepesertaan aktif JKN dari masyarakat yang belum terdaftar, serta berkurangnya hambatan ekonomi dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Parepare secara menyeluruh.

Adapun Gratis BPJS Ketenagakerjaan merupakan kepedulian pemerintah daerah untuk memberikan asuransi kecelakaan kerja bagi pekerja rentan. Program ini telah terlaksana sejak Tahun 2024 dan akan terus dilanjutkan dengan menambah jumlah pekerja rentan yang memperoleh bantuan BPJS ketenagakerjaan secara gratis.

7. Gratis Seragam PNS dan PPPK

   Program gratis seragam PNS dan PPPK merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kedisipilan ASN, khususnya dalam berpakaian sesuai aturan yang berlaku. Program ini akan dimulai pada Tahun 2025 dengan mengadakan sayembara untuk menentukan motif batik bernuansa lokas (Batik Bugis), sedangkan pengadaannya akan dimulai pada Tahun 2026 untuk semua ASN.

   Adapun pengadaan pakaian seragam Baju kheky, Putih, Korpri dan Pakaian olahraga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas daerah.

8. Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta Pemberian TPP Kepada Guru dan Tenaga Kesehatan

   Program ini akan dilaksanakan dengan melakukan perubahan peraturan walikota terkait tambahan pernghasilan PNS yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Gratis asuransi petani, peternak dan nelayan (9)

   Profesi Petani, peternak dan nelayan merupakan profesi yang rentan mengalami kecelakaan kerja dan kerusakan akibat bencana alam. Oleh karenanya Pemerintah Kota Parepare berpandangan bahwa negara wajib hadir untuk melindungi, memberikan rasa aman dalam mengelolah usaha dan memperhatikan kesinambungan kehidupan yang layak bagi para petani, peternak dan nelayan. Oleh karena itu, setiap warga yang berprofesi sebagai petani, peternak dan nelayan wajib untuk diberi perlindungan melalui Program Gratis Asuransi Jiwa.

   Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota dengan Gratis Asuransi petani, peternak dan nelayan, yang terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut :

   b. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dimana pada kegiatan ini dapat memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi petani, peternak dan nelayan.
   c. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sebuah program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada petani padi dari resiko gagal panen akibat banjir, kekeringan dan serangan hama penyakit tanaman dengan tujuan untuk mengurangi kerugian petani dan menjaga stabilitas produksi padi.
   d. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK), sebuah program pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada peternak sapi dan kerbau dari resiko kerugian akibat kematian atau kehilangan ternak mereka.

10. Perlengkapan Jenazah dan Pemakaman Gratis (10)

Pelayanan yg dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat prasejahtra yg didasarkan pada :

a. Masyarakat yg berdomisili di buktikan dengan KTP dan KK;
b. Masyarakat yg berpenghasilan di bawa 1 juta di buktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau RT dan RW;
c. Masyarakat yang tidak mempunyai keluarga sanak saudara menjadi tanggungjawab pemerintah;

Bantuan Diberikan dalam bentuk Perlengkapan Jenazah diantaranya ; Batu Nisan, Kain Kafan, Sarung, Papan, dan Perlengkapan Mandi Jenazah.

Untuk pemakaman gratis berlaku khusus bagi jenazah yang akan dikebumikan di pekuburan umum milik pemerintah daerah dengan memberikan biaya penggalian kubur sebesar Rp. 500.000. Sedangkan jenazah yang dikebumikan ditempat lain maka biaya pemakamannya (termasuk lahan) tidak menjadi tanggungan pemerintah daerah.

11. Gratis Rumah Layak Huni dan Bedah Rumah Bagi Warga Kurang Mampu

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat dengan peningkatan kualitas rumah (PKR) melalui Gratis Rumah Layak Huni dan Bedah Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang lebih tepat sasaran. Adapun kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;
b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
c. Sudah berkeluarga;

d. Memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan hak kepemilikan;
e. Memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
f. Belum pernah mendapatkan bantuan perumahan sejenis dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Adapun Kriteria objek Kegiatan yaitu rumah tidak layak huni yang berada diatas tanah :

a. Dikuasai secara fisik dan jelas batasnya;
b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
c. Tidak dalam *status sengketa*;
d. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka PKR dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau terkena bencana alam dan kerusakan sosial.

12. Bantuan tepat sasaran dan penyaluran langsung ke rumah warga

    Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Pemerintah Daerah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) di tiap kelurahan yang bertugas mengantarkan bantuan sampai ke rumah sasaran (penerima) sekaligus menilai kelayakan penerima memperoleh bantuan sosial. Hal ini juga akan menjamin bahwa bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Disamping itu, pemda juga akan menjajaki kemungkinan penyusunan data kemiskinan Kota Parepare dengan indikator-indikator yang disesuaikan dengan kondisi Kota Parepare. Data ini akan digunakan untuk program percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Parepare.

13. Parepare Bebas Banjir

    Program Parepare Bebas Banjir akan dimulai pada Tahun 2025.

Kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai, pemeliharaan drainase, Penyusunan Dokumen Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) Penanganan Banjir Kota Parepare, Pembangunan drainase penanggulangan banjir dan Penyusunan Masterplan Drainase Kota Parepare termasuk pengadaan excavator mini untuk pengerukan sedimen drainas. Selain itu dilakukan permohonan bantuan alat berat ke Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sebagai bentuk kolaborasi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sungai di Kota Parepare. Pengusulan kegaitan-kegiatan struktural dan non-struktural sebagai strategi utama dalam mengurangi bencana, mengurangi keterpaparan dan mengurangi kerentanan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Program Unggulan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang menjadi janji politik Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih.

Kegiatan-kegiatan struktural yang dimaksud seperti: Peningkatan kapasitas sungai dengan melakukan pengerukan, Pembangunan tanggul, perbaikan drainase kota, Rehabilitasi/Pembangunan bendung, Pembangunan kolam retensi/embung/Sabo dam. Sedangkan kegiatan non-struktural yang dimaksud seperti: Melaksanakan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemberdayaan stakeholders dan Masyarakat, pemeliharaan Restorasi Sungai dengan pemeliharaan sungai secara non fisik (software) berupa pengaturan pemanfaatan dengan perizinan, adanya regulasi dan kebijakan terkait penataan ruang dan penataan bangunan dalam mengurangi keterpaparan bencana, serta adanya

pemetaan risiko banjir.

14. Parepare bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

    Parepare bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan harapan dari seluruh masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Program ini dititikberatkan pada peningkatan kualitas pengawasan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diwijudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM APIP serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

    Untuk mewujudkan hal tersebut maka akan dilaksanakan beberapa strategi, antara lain : :

    a. Pencegahan Lebih Utama dari Penindakan

       Melalui penguatan pengawasan pendahuluan *(early warning system)* dan pendampingan secara berkala pada proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaporan.

    b. Audit Berbasis Risiko *(Risk-Based Audit)*

       Menyasar area rawan KKN pada pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia.

    c. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Setiap perangkat daerah

       Pendampingan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi.

    d. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

       Menjadikan SPIP sebagai budaya kerja dan alat cegah dini, bukan sekadar dokumen formal.

    e. Penerapan *Whistle Blowing System* (WBS)

       Mendorong pelaporan pelanggaran secara aman dan terintegrasi dengan sistem pelaporan nasional (LAPOR! dan

Saber Pungli).

f. Audit Investigatif dan Reviu Khusus
   Menindaklanjuti indikasi KKN berdasarkan pengaduan masyarakat atau temuan pengawasan.
g. Kolaborasi dengan Stakeholder Strategis
   Bersinergi dengan BPKP, BPK, KPK, dalam pengawasan.

15. Peningkatan insentif RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta kader posyandu, melengkapi sarana dan prasarana dan seragam kader posyandu.
    Peningkatan insentif RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta kader posyandu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan. Peningkatan insentif ini akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
    Demikian pula untuk peningkatan sarana dan prasarana posyandu juga dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan posyandu yang sifatnya urgen dan mendesak.
16. Peningkatan insentif guru mengaji, pegawai syara'/imam masjid dan guru sekolah minggu (16)
    Guru mengaji tercatat sebanyak 900 orang terdiri atas 650 orang Guru Mengaji TPA dan 250 orang Guru Mengaji Peduli, dan Guru Sekolah Minggu sebanyak 150 orang. Insentif yang diperoleh selama ini masing-masing sebesar Rp. 150.000 /bulan. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Guru mengaji dan Guru Sekolah Minggu dengan menaikkan insentif yang diterima, dimana pada Tahun 2025 telah ditingkatkan menjadi Rp. 200.000 / Bulan. Di samping kenaikan insentif tersebut, Pemerintah Kota

Parepare juga memberikan jaminan perlindungan kerja dengan menanggung premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing pekerja agama yakni, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu dan Muballigh. Jumlah guru mengaji rencananya akan ditingkatkan jumlah penerimanya dengan mengakomodir semua guru mengaji yang belum terakomodir tahun ini. Demikian pula insentif pegawai syara' dan imam masjid akan diupayakan peningkatan insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

17. Gratis internet dan pembangunan command center untuk digitalisasi pelayanan publik.

    Program GRATIS INTERNET diselenggaran dengan tujuan memberikan kemudahan akses dan hak Informasi bagi masyarakat dengan sasaran masyarakat usia sekolah, pelaku UMKM, kegiatan keagamaan dan golongan rentan terhadap akses informasi. Diharapkan dengan adanya program ini maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Spot-spot internet gratis akan mencakup beberapa rumah ibadah (antara lain Mesjid Nurul Yaqin, Mesjid Al-Manar, Mesjid Al-Abrar, Mesjid Nurul Iman, Masjid Rahmatan Lumpue), area publik seperti Lapangan Andi Makkasau, Monumen Korban 40.000 Jiwa, Taman Syariah, Taman Mattirotasi, Taman Aisa, Taman La Mario, Pelataran Pasar Sumpang Minangae dan Kebun Raya Jompie, dan Internet gratis kelurahan yang ditempatkan di berbagai titik strategis dan area publik lainnya seluruh wilayah Parepare bertujuan.

    Sedangkan *COMMAND CENTER* sebagai pusat pengendali (monitoring) dan informasi menyediakan data dan kondisi terkini secara sosial, ekonomi, budaya dan kegiatan pelayanan pemerintahan yang berbasis aplikasi dapat menjadi ikon Kota Parepare sebagai SMART CITY. Implemnetasi program ini

dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2025 hingga tahun 2029..

18. Membangun sirkuit dan sport centre, creative hub dan art centre, serta menjadikan Parepare kota event

    Pembangunan sirkuit dan sport centre bertujuan untuk menyediakan fasilitas olahraga terpadu untum pembinaan atlet, penyelenggaraan event, dan pengembangan sprot tourism. Sport centre menjadi pusat kegiatan olahraga dan ekonomi local berbasis event dan komunitas. Pembangunan sirkuit dan sport centre memerlukan biaya yang cukup besar sehingga Pemerintah Kota Parepare akan mengupayakan sumber pembiayaan lain, selain dari APBD. Pembiayaan dimaksud dapat bersumber dari kerjsama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, nasional, dan termasuk investasi dari pihak ketiga.

    Selanjutnya pembangunan creative hub dan art centre bertujuan untuk menjadi pusat ekonomi kreatif dan ruang ekspresi seni budaya masyarakat. Creative hub akan berfungsi sebagai co- working space, pelatihan digital UMKM dan inkubasi usaha kreatif. Sedangkan art centre berfungsi sebagai galeri seni, panggung seni pertunjukan, dan ruang komunita budaya. Diharapkan keberadaan creative hub dan art centre akan Mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, pemberdayaan pemuda, dan pelestarian budaya local.

    Pemerintah Kota Parepare juga merencanakan untuk menjadikan Parepare sebagai kota tujuan berbagai even bertaraf regional dan nasional. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan beberapa strategi, antara lain :

    - Menyusun Kalender *Event* olahraga, seni budaya, musik, dan religi.
    - Menata ruang publik menjadi venue ramah *event*.

- Kolaborasi dengan penggiat *event*, komunitas, pelaku seni, dan pelaku usaha pariwisata.
- Menyisir Tempat Wisata sebagai *venue event* sebagai upaya Promosi Potensi Pariwisata Daerah

Parepare Kota event akan memberikan manfaat terhadap pariwisata daerah dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, sehingga akan mempengaruhi perekonomian daerah secara menyeluruh.

18 Program unggulan ini merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian nomenklatur program Walikota/Wakil Walikota Parepare terpilih dengan nomenklatur program yang berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyesuaian nomenklatur program ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun program prioritas pada rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel 3.13. sebagai berikut:

Tabel 3.13
Penyelarasan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Parepare
pada RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance), Adaptif, dan Inovatif	Gratis internet dan pembangunan command center untuk digitalisasi pelayanan publik (17)	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
		Gratis Seragam PNS dan PPPK (7)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Seluruh Perangkat Daerah
		Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta Pemberian TPP Kepada Guru dan Tenaga Kesehatan (8)		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Parepare Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (14)	Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat Daerah
		Peningkatan Insentif RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta Kader Posyandu (15)	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Seluruh Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan insentif guru mengaji, pegawai syara'/imam masjid dan guru sekolah minggu (16)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat Seetdako
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Seluruh Kecamatan

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
3	Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Gratis seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa PAUD/TK, SD, SMP dan SMA sederajat (4)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
		Beasiswa Parepare cerdas untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi (5)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
		Melengkapi sarana, prasarana dan seragam kader posyandu (15)	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Seluruh Kecamatan
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif	Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di setiap bidang usaha (2)	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Perluasan Kesempatan Kerja	

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Mencetak 1.000 pengusaha baru melalui Parepare KEREN (Kecamatan Entrepreneurship Center) dan memeberikan bantuan modal usaha untuk UMKM (3)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Tenaga Kerja
		Gratis BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (6)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Penyelenggaraan pendataan dan Informasi sarana hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Dinas Tenaga Kerja

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Kabupaten/Kota		
		Perlengkapan Jenazah dan Pemakaman Gratis (10)	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial
		Gratis Rumah Layak Huni dan Bedah Rumah Bagi Warga Kurang Mampu (11)	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					10 Ha	
		Bantuan tepat sasaran dan penyaluran langsung ke rumah warga (12)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan daerah
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kemudahan Investasi dan Perizinan Berusaha (1)	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	
			Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kab/Kota	
			Pelayanan	Pelayanan Perizinan	Penyediaan Pelayanan	

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Penanaman Modal	dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
					Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
					Pemantauan, analisas, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
		Gratis asuransi petani, peternak dan nelayan (9)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
					Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
			Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
		Membangun sirkuit	Pengembangan	Pembinaan dan	Penyediaan prasarana	Dinas

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		dan sport centre, creative hub dan art centre, serta menjadikan Parepare kota event (18)	Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Olahraga Rekreasi	dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	Parepare Bebas Banjir (13)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/bendung Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	
					Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (anggaran 2025	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	

No	Misi RPJMD	18 Program Prioritas Walikota / Wakil Walikota	Nomenklatur Dalam RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		

Program unggulan Walikota / Wakil Walikota terpilih menjadi dasar dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda strategis yang dipilih berdasarkan urgensi dan potensi dampaknya yang akan berpengaruh besar dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Prioritas Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14

Prioritas Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029

No	18 Program Unggulan Walikota/Walikota Sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Peningkatan insentif guru mengaji, pegawai syara'/imam masjid dan guru sekolah minggu (16)	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif dan berakhlak
2	Gratis seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa PAUD/TK, SD, SMP dan SMA sederajat (4)	
3	Beasiswa Parepare cerdas untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi (5)	
4	Mencetak 1.000 pengusaha baru melalui Parepare KEREN (Kecamatan Entrepreneurship Center) dan memeberikan bantuan modal usaha untuk UMKM (3)	Pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan Iklim Usaha dan Iklim Investasi yang kondusif
5	Kemudahan Investasi dan Perizinan Berusaha (1)	
6	Gratis asuransi petani, peternak dan nelayan (9)	

No	18 Program Unggulan Walikota/Walikota Sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah
7	Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di setiap bidang usaha (2)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan Penanggulangan Kemiskinan daerah
8	Gratis BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (6)	
9	Perlengkapan Jenazah dan Pemakaman Gratis (10)	
10	Gratis Rumah Layak Huni dan Bedah Rumah Bagi Warga Kurang Mampu (11)	
11	Bantuan tepat sasaran dan penyaluran langsung ke rumah warga (12)	
12	Membangun sirkuit dan sport centre, creative hub dan art centre, serta menjadikan Parepare kota event (18)	1. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah; 2. Pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan Iklim Usaha dan Iklim Investasi yang kondusif
13	Parepare Bebas Banjir (13)	1. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah; 2. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana
14	Gratis internet dan pembangunan command center untuk digitalisasi pelayanan publik (17)	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel
15	Gratis Seragam PNS dan PPPK (7)	
16	Peningkatan Tambahan	

No	18 Program Unggulan Walikota/Walikota Sesuai Dokumen KPUD	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penghasilan Pegawai (TPP) serta Pemberian TPP Kepada Guru dan Tenaga Kesehatan (8)	
17	Parepare Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (14)	
18	Peningkatan Insentif RT/RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, melengkapi sarana dan prasarana dan seragam kader posyandu	

Penetapan 6 (enam) prioritas pembangunan ini, juga telah selaras dengan permasalahan dan kondisi strategis Kota Parepare. Diharapkan, prioritas pembangunan ini dapat mewujudkan tercapainya misi pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan sebelumnya. Keselarasan misi dengan prioritas pembangunan tergambar pada tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15

Keselarasan Misi Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Misi Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance), Adaptif, dan Inovatif	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif dan berakhlak
3	Mewujudkan Kualitas dan	

	Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan Penanggulangan Kemiskinan daerah
5	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan Iklim Usaha dan Iklim Investasi yang kondusif
6	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah
		Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pemerintah Kota Parepare menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sevagaimana terlihat dalam Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Prioritas Pembangunan Prov. Sulsel	Prioritas Pembangunan Kota Parepare	Prioritas Pembangunan Nasional / Asta Cita
1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif dan berakhlak	
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif dan berakhlak	

Prioritas Pembangunan Prov. Sulsel	Prioritas Pembangunan Kota Parepare	Prioritas Pembangunan Nasional / Asta Cita
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan Penanggulangan Kemiskinan daerah	
	Pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan Iklim Usaha dan Iklim Investasi yang kondusif	
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan Iklim Usaha dan Iklim Investasi yang kondusif	
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan Iklim Usaha dan Iklim Investasi yang kondusif	
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan Penanggulangan Kemiskinan daerah	
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	
	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah	
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	

Tabel 3.13.
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Parepare

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
Parepare Kota Terbaik, Sejahtera dan Maju																	
1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governanve), Adaptif, dan Inovatif**																
1.1	Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang efektif, efisien, komunikatif serta inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,11	3,20		3,29		3,38		3,47		3,56		3,65		
		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	2,99	3,08		3,18		3,28		3,37		3,47		3,57		
		Indeks Inovasi Daerah	Poin	10,88	58		58,75		59,5		60,25		61		62		
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	14,55													
1.1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat															
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen														
		Persentase Warga negara yang memproleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Persen														
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen														
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Persen														
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pengawasan mutu pangan	Persen														
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Angka														
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	Perse														
		Rasio bayi ber akte kelahiran	Angka														

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		Rasio pasangan nikah berakte nikah	Persen														
		Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	Persen														
		Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Persen														
		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Persen														
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persen														
	Program Pembinaan Keluarga Berencana KB	Ratio Akseptor KB	Persen														
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB),BKR, BKL, ber-KB	Persen														
	Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen														
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen														
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen														
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen														
		Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen														
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon	Persen														

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
		genggam															
		Proporsi penduduk terlayani mobile broadband															
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang														
		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Barang														
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun	Orang/Barang														
		Panjang jalur kereta api	Km														
		Persentase rambu dan Apill dalam kondisi baik	Persen														
		Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota																
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan																
1.1.2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi serta penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Angka	B	B		B		BB		BB		BB				
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	2,73	2,84		2,95		3,06		3,16		3,27		3,38		
	Program Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pmbangunan	Persentase konsistensi program RPJMD/RPD terhadapRKPD	Persen														

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
	Daerah																
		Persentase konsitensi program RKPD terhadap APBD	Persen														
		Rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah	Persen														
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA,RKPD,Renja) lingkup bidang PPM	Persen														
		Persentase keselarasan antardokumen perencanaan (RPJMD,RENSTRA,RKPD,Renja) lingkup bidang	Persen														
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, Renja) lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen														
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persen														
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan bukti kepemilikan yang sah	Persen														
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	Persen														
	Program Penyelenggaran Pengawasan	Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	Persen														
		Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen														
	Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level														

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
	dan Asistensi	(APIP)															
	Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen														
		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen														
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen														
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen														
		Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen														
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen														
		Proporsi penduduk terlayani mobile broadband															
2	**Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal**																
2.1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan serta kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	n.a	77,7-77,72		78,08-78,10		78,45-78,49		78,83-78,87		79,20-79,25		79,56-79,63		
2.1.1	Meningkatnya kualitas keluarga dalam era globalisasi	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	n.a	85,95		87,43		88,90		90,38		91,85		93,33		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
2.1.2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Tindak Kriminalitas yang tertangani	Angka	n.a	45		50		65		80		100		100		
3	**Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif**																
3.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,97	79,91		80,46		81,02		81,57		82,12		82,67		
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat;	Indeks Pendidikan	Angka	76,83	77,41		78,19		78,80		79,20		79,60		80,00		
		Indeks Kesehatan	Angka	80,12	80,34		80,64		81,00		81,45		81,90		82,40		
		Indeks Paritas Daya Beli	Angka	81,39	81,86		82,27		82,67		83,07		83,57		84,00		
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender;	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,21	0,20		0,20		0,20		0,20		0,19		0,19		
4	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif**																
4.1	Meningkatkan	Gini Ratio	Angka		0,377		0,375		0,372		0,370		0,367		0,364		

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
	Pemerataan Pendapatan masyarakat																
4.1.1	Berkurangnya Masyarakat Miskin;	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,27	3,08		2,94		2,80		2,65		2,51		5,27		
4.1.2	Meningkatnya rumah layak huni yang terpadu bagi masyarakat berpenghasilan rendah;	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen		83,79		86,82		89,84		92,87		95,89		98,92		
4.1.3	Meningkatnya ketersedian pangan masyarakat;	Indeks Ketahanan Pangan	Persen		86,15		87,69		89,23		90,76		92,30		91,43		
4.1.4	Meningkatnya Lapangan kerja dan kesempatan kerja;	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,23	4,94		4,83		4,72		4,60		4,49		4,72		
5	**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan**																
5.1	Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah yang berkualitas dengan memperhatikan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	61,97	66,74		87,70		108,67		129,63		150,59		108,67		
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09	5,98		6,13		6,28		6,42		6,57		6,28		
		Kontribusi PDRB Kota Parepare Terhadap Prov. Sulawesi Selatan	Persen		1,42		1,45		1,48		1,51		1,54		1,48		
		Inflasi	Skor	2,21	2,20		2,19		2,18		2,17		2,16				
		Indeks Ekonomi Hijau		50,10	51,91		54,17		56,43		58,69		60,95		63,21		
		Indeks Ekonomi Biru	Poin	71,30	79,86		88,41		96,97		105,53		114,08		122,64		
5.1.1	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dan investasi;	Persentase Peningkatan Investasi Daerah			18,11		21,21		24,31		27,40		30,49		33,59		
5.1.2	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan;	Kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Poin														
5.1.3	Meningkatnya produktivitas sektor	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen		3,05		4,44		6,18		7,92		10,0				

No	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerang Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
	Industri Pengolahan;																
5.1.4	Meningkatnya produktivitas kepariwisataan daerah;	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, makanan dan Minuman	Persen		7,82		8,18		8,53		8,89		9,25		9,61		
6	**Mewujdukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Publik yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana**																
6.1	Mengembangkan infrastruktur strategis, berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur	Angka	n.a	4,07		4,86		5,65		6,43		7,22		8,01		
6.1.1	Meningkatnya luas wilayah bebas dari genangan/banjir;	Persentase luas wilayah bebas dari genangan / banjir	Angka														
6.1.2	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman;	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan	Angka	63,81	68,34		72,86		77,38		81,91		81,91		81,91		
		Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	n.a	52,88		57,87		62,85		67,84		72,83		77,81		
6.1.3	Meningkatnya Konektivitas Wilayah; dan	Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah	Poin	n.a													
6.2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi bencana.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			71,12		71,33		71,54		71,75		71,96				
		Indeks Resiko Bencana		144,21	142,97		141,72		140,47		139,22		137,98		136,73		
6.2.1	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketahanan Terhadap Bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen		14,46		17,33		20,19		23,06		25,92				

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Pada RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat 132 program perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun kedepan.

Adapun program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel IV.1

Tabel IV.1

PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA PAREPARE

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TOTAL PAGU ANGGARAN				**960.281.756.938**		**993.063.618.428**		**1.031.442.888.706**		**1.052.551.487.357**		**1.078.457.494.795**		**1.102.444.538.718**	
1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**626.173.775.298**		**644.079.858.266**		**669.307.468.519**		**678.734.858.569**		**698.248.160.541**		**726.153.629.344**	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**221.718.027.662**		**201.081.206.236**		**203.855.926.191**		**206.714.229.932**		**205.821.954.435**		**206.017.232.906**	
1.01.01 - ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA				171.404.649.362		172.811.774.591		173.884.774.591		174.969.774.591		174.941.274.591		174.950.274.591	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	171.404.649.362	100	172.811.774.591	100	173.884.774.591	100	174.969.774.591	100	174.941.274.591	100	174.950.274.591	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				50.256.590.800		28.207.431.645		29.871.151.600		31.624.455.341		30.780.679.844		30.964.958.315	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun (Persentase)	86,78	100	50.256.590.800	89,74	28.207.431.645	92,71	29.871.151.600	95,26	31.624.455.341	97,81	30.780.679.844	100	30.964.958.315	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun (Persentase)	995,65	1045,95		998,95		1.002,25		1005,55		1008,85		1012,15		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun (Persentase)	993,55			996,85		1.000,15		1003,45		1006,75		1010,05		
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				56.787.500		62.000.000		100.000.000		120.000.000		100.000.000		102.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	59	65	56.787.500	69,00	62.000.000	73	100.000.000	76	120.000.000	79	100.000.000	81	102.000.000	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN diedit				**335.090.055.006**		**313.073.010.408**		**334.819.557.624**		**354.923.840.941**		**375.244.393.020**		**401.771.752.609**	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	270.236.499.438	100	257.297.961.568	100	276.930.338.684	100	290.175.130.301	100	308.023.613.220	100	325.618.686.557	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	*100*	*100*	*35.216.196.239*	*100*	*38.882.041.197*	*100*	*39.490.144.778*	*100*	*39.728.071.454*	*100*	*39.728.071.454*	*100*	*39.728.071.454*	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	*100*	*100*	*1.601.007.326*	*100*	*1.526.016.294*	*100*	*1.546.671.335*	*100*	*1.574.541.143*	*100*	*1.585.428.711*	*100*	*1.614.524.236*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAKESSI)*
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	*Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.*	*100*	*100*	*1.964.274.992*	*100*	*1.885.519.248*	*100*	*1.779.603.303*	*100*	*1.811.228.766*	*100*	*1.831.526.810*	*100*	*1.865.450.970*	*UPTD PUSKESMAS CEMPAE*
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	*Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.*	*100*	*100*	*1.915.466.799*	*100*	*1.782.961.132*	*100*	*1.796.833.234*	*100*	*1.814.653.395*	*100*	*1.830.246.592*	*100*	*1.854.966.823*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAPADDE)*

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	*Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.*	*100*	*100*	*1.769.042.225*	*100*	*1.511.872.961*	*100*	*1.617.060.206*	*100*	*1.646.703.751*	*100*	*1.663.809.977*	*100*	*1.660.467.248*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO)*
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	*Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.*	*100*	*100*	*1.622.617.642*	*100*	*1.707.906.833*	*100*	*1.832.853.528*	*100*	1.851.829.193	*100*	*1.853.629.489*	*100*	*1.902.881.935*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LOMPOE)*
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	*Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.*	*100*	*100*	*2.071.653.016*	*100*	*1.899.076.329*	*100*	*1.777.826.272*	*100*	*1.789.565.864*	*100*	*1.809.504.463*	*100*	*1.847.841.786*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LUMPUE)*
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.	*Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.*	*100*	*100*	*445.000.000*	*100*	*541.418.680*	*100*	*552.954.826*	*100*	*568.520.527*	*100*	*578.510.998*	*100*	*595.208.092*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN)*

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah melalui perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pelayanan BLUD, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutanÃ danÃ inklusif.	*Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.*	*100*	*100*	*436.700.000*	*100*	*470.000.000*	*100*	*517.000.000*	*100*	*530.000.000*	*100*	*550.000.000*	*100*	*570.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LEMOE)*
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan		*100*	*100*	*56.922.118.974*	*100*	*50.554.231.575*	*100*	*51.112.546.864*	*100*	*51.865.880.616*	*100*	*52.444.389.807*	*100*	*53.252.479.616*	*RUMAH SAKIT HASRI AINUN HABIBIE*
Persentase penyelesaian kegiatan penunjang pemerintah daerah yang sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan.		*100*	*100*	*166.272.422.225*	*100*	*156.536.917.319*	*100*	*174.906.844.338*	*100*	*186.994.135.592*	*100*	*204.148.494.919*	*100*	*220.726.794.397*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN 9RSUD. A. MAKKASAU0*
1 02 02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**100**	**100**	**59.759.095.380**	**100**	**51.267.611.650**	**100**	**53.306.081.750**	**100**	**60.163.873.450**	**100**	**62.585.442.610**	**100**	**71.517.028.862**	**PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN**
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*36.671.459.709*	*47,37*	*30.693.536.959*	*47,37*	*30.693.536.959*	*47,37*	*31.276.123.283*	*47,37*	*31.802.749.861*	0	*32.682.901.840*	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*830.706.500*	*47,37*	*662.502.800*	*47,37*	*662.502.800*	*47,37*	*662.502.800*	*47,37*	*669.502.800*	0	*670.302.800*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAKESSI)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*858.414.000*	*47,37*	*680.645.600*	*47,37*	*810.000.000*	*47,37*	*810.000.000*	*47,37*	*810.000.000*	0%	*810.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS CEMPAE)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*988.948.000*	47,37 per 100.000 KH	*807.600.000*	*47,37*	*817.600.000*	*47,37*	*832.200.000*	*47,37*	*837.500.000*	0%	*847.600.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAPADDE)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07 per 100.000 KH	183,07 per 100.000 KH	*982.205.000*	*47,37*	*949.125.000*	*47,37*	*866.000.000*	*47,37*	*866.125.000*	*47,37*	*868.125.000*	0 per 100.000 KH	*903.400.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*910.611.000*	*47,37*	*587.906.600*	*47,37*	*487.207.000*	*47,37*	*495.900.000*	*47,37*	*512.500.000*	0 per 100.000 KH	*494.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LOMPOE)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*1.072.035.600*	*47,37*	*908.618.000*	*47,37*	*1.028.455.600*	*47,37*	*1.052.455.600*	*47,37*	*1.055.455.600*	0 per 100.000 KH	*1.055.455.600*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LUMPUE)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*918.488.628*	47,37 per 100.000 KH	*687.422.368*	*47,37*	*687.422.368*	*47,37*	*687.422.368*	*47,37*	*687.422.368*	0 per 100.000 KH	*687.422.368*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*1.099.836.200*	*47,37*	*928.556.830*	*47,37*	*894.343.571*	*47,37*	*898.766.556*	*47,37*	*889.813.264*	0 per 100.000 KH	*888.509.906*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LEMOE)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45	11,45		17,49		16,29		15,19		14,19		13,19		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegras	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*1.970.616.000*	*47,37*	1.775.345.712	*47,37*	1.790.793.000	*47,37*	1.811.635.996	*47,37*	1.825.013.573	0 per 100.000 KH	1.847.371.542	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD CALL CENTRE 112)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45%	11,45%		17,49%		16,29%		15,19%		14,19%		13,19%		
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang sensitif gender melalui fasilitas inklusif, layanan rujukan yang lebih baik, dan sistem informasi kesehatan terintegrasi.	Angka kematian ibu (AKI) ((per 100.000 Kelahiran Hidup))	183,07	183,07	*204.208.340*	47,37	214.765.071	47,37	216.633.742	47,37	219.155.137	*47,37*	220.773.434	0 per 100.000 KH	223.478.096	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	11,45%	11,45%		17,49%		16,29%		15,19%		14,19%		13,19%		
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	*Persentanse Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	*89*	*100*	*11.351.566.403*	*100*	*10.601.586.710*		*10.551.586.710*		*10.551.586.710*		*10.406.586.710*		*10.406.586.710*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT HASRI AINUN HABIBIE)*
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP*	*100*	*100*	*1.900.000.000*	*100*	*1.770.000.000*		*3.800.000.000*		*10.000.000.000*		*12.000.000.000*		*20.000.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (RSUD. A. MAKKASAU)*
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	*Persentase Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan*	40,24	40,24	3.533.844.200	50	3.134.105.200	50	3.184.305.200	50	3.184.505.200	50	3.234.605.200	50	3.234.805.200	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
terwujudnya izin praktik yang sah, penyusunan dokumen perencanaan SDM untuk UKP/ UKM, dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi yang menghasilkan tenaga kesehatan terlatih serta terdistribusi merata guna mendukung pelayanan kesehatan berkualitas, inklusif, dan merata.	*Persentase Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan*	*40,24*	*40,24*	*159.201.500*	*50*	*173.330.000*	*50*	*173.330.000*	*50*	*173.330.000*	*50*	*173.330.000*	*50*	*173.330.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN*
uujudnya izin praktik yang sah, penyusunan dokumen perencanaan SDM untuk UKP/ UKM, dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi yang menghasilkan tenaga kesehatan terlatih serta terdistribusi merata guna mendukung pelayanan kesehatan berkualitas, inklusif, dan merata	*Persentase Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan*	*40,24*			*50*	*10.000.000*		*10.200.000*		*10.400.000*	*50*	*10.500.000*	*50*	*10.700.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAPADDE)*
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kesehatan	*Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan*	*100*	*100*	*3.374.642.700*	*100*	*2.950.775.200*	*100*	*3.000.775.200*	*100*	*3.000.775.200*	*100*	*3.050.775.200*	*100*	*3.050.775.200*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT HASRI AINUN HABIBIE)*
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				223.933.988	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Sediaan Cakupan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	223.933.988	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan produk makanan minuman yang aman, higienis, serta sensitif gender melalui pemberian izin, sertifikasi, stiker, dan pengawasan post market guna mendukung fasilitas kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan merata.															
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		37	37	1.336.682.000		1.334.331.990		1.359.831.990		1.361.331.990		1.361.731.990		1.362.231.990	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif.	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	37	37	-	38	101.000.000	40	101.000.000	43	101.000.000	46	101.000.000	46	101.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*205.130.000*	*38*	*185.350.000*	*40,00*	*185.350.000*	*43*	*185.350.000*	*46*	*185.350.000*	*46*	*185.350.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAKESSI)*
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*180.575.500*	*38*	*127.600.000*	*40,00*	*127.600.000*	*43*	*127.600.000*	*46*	*127.600.000*	*46*	*127.600.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS CEMPAE)*
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*237.816.000*	*38*	*212.000.000*	*40,00*	*212.400.000*	*43*	*212.800.000*	*46*	*213.000.000*	*46*	*213.400.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAPADDE)*
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*78.948.000*	*38*	*74.600.000*	*40,00*	*74.600.000*	*43*	*74.600.000*	*46*	*74.600.000*	*46*	*74.600.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO)*
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*163.345.000*	*38*	*146.100.000*	*40*	*143.100.000*	*43*	*144.100.000*	*46*	*144.100.000*	*46*	*144.100.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LOMPOE)*

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*257.400.000*	*38*	*236.500.000*	*40,00*	*264.400.000*	*43*	*264.400.000*	*46*	*264.400.000*	*46*	*264.400.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LUMPUE)*
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan melalui pemberdayaan, kemitraan, dan pengembangan UKBM yang mendukung perilaku sehat dan akses layanan kesehatan inklusif	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*100.113.000*	*38*	*97.000.000*	*40,00*	*97.000.000*	*43*	*97.000.000*	*46*	*97.000.000*	*46*	*97.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN)*
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan*	*37*	*37*	*104.733.000*	*38*	*94.000.000*	*40,00*	*94.200.000*	*43*	*94.300.000*	*46*	*94.500.000*	*46*	*94.600.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (UPTD PUSKESMAS LEMOE)*
Cakupan PromosiKesehatan RS	*Cakupan Promosi Kesehatan RS*	*15*	*15*	*8.621.500*	*15*	*60.181.990*		*60.181.990*		*60.181.990*		*60.181.990*		*60.181.990*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT HASRI AINUN HABIBIE)*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**34.246.123.539**		**82.395.939.946**		**84.163.810.528**		**70.320.337.628**		**69.044.878.555**		**69.764.975.573**	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	proporsi layanan adminstrasi perkantoran			7.854.365.872		9.343.970.422		8.042.132.300		7.942.132.300		7.942.132.300		7.942.132.300	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persente layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	7.854.365.872	100	9.343.970.422	100	8.042.132.300	100	7.942.132.300	100	7.942.132.300	100	7.942.132.300	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-		1.707.370.450		8.240.682.224		14.685.142.428		7.118.982.428		5.228.686.755		5.215.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	26,87	93	1.707.370.450	93,5	8.240.682.224	94	14.685.142.428	94	7.118.982.428	94	5.228.686.755	95	5.215.000.000	
	Rasio jaringan irigasi				27										
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (ASTA CITA)		-		50.000.000		900.000.000		4.500.000.000		6.700.000.000,00		3.500.000.000		3.500.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	-	98,50	50.000.000	99,00	900.000.000	99,50	4.500.000.000	99	6.700.000.000,00	99,50	3.500.000.000	99,50	3.500.000.000	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	96	300.000.000	97	400.000.000	98	300.000.000	98	-	98	400.000.000	98,00	400.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Proporsi rumah tangga bersanitasi	-	96	300.000.000	97	400.000.000	98	300.000.000	98	-	98	400.000.000	98,00	400.000.000	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	-		11.365.002.842		10.302.500.000	550	9.736.350.000	550	2.520.000.000	550	2.942.035.200	550	3.675.818.973	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		1100	11.365.002.842	550	10.302.500.000	550	9.736.350.000	550	2.520.000.000	550	2.942.035.200	550	3.675.818.973	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	-		118.100.500	63,50	110.000.000,0		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			118.100.500	63,50	110.000.000,0		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase capaian fasilitas perkotaan	100	100	362.500.000	100	8.900.000.000		8.500.000.000		3.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase capaian fasilitas perkotaan	100	100	362.500.000	100	8.900.000.000		8.500.000.000		3.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi jalan dalam kondisi baik		80%	12.124.831.875	83%	42.593.787.300	86%	36.785.185.800	86%	41.989.222.900	86%	39.717.024.300	86%	39.717.024.300	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Proporsi jalan dalam kondisi baik		80%	12.124.831.875	83%	42.593.787.300	86%	36.785.185.800	86%	41.989.222.900	86%	39.717.024.300	86%	39.717.024.300	
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		1,71		1,69		1,67		1,67		1,67		1,67		
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembungan air (minimal1,5m)		17,50%		18,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		
	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		0,38%		0,38%		0,38%		0,38%		0,38%		0,38%		

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		60%		62%		65%		65%		65%		65%		
	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)		65%		67%		70%		70%		70%		70%		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	57,5	60	120.000.000	63	140.000.000	65	140.000.000	65	140.000.000	65	140.000.000	65	140.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	57,5	60	120.000.000	63	140.000.000	65	140.000.000	65	140.000.000	65	140.000.000	65	140.000.000	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		-		631.162.000		1.465.000.000		1.365.000.000		800.000.000		1.065.000.000		1.065.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Bangunan tidak melanggar tata ruang	-	97,30	631.162.000	97,6	1.465.000.000	98	1.365.000.000	98	800.000.000	98	1.065.000.000	98	1.065.000.000	
	Ketaatan terhadap RTRW		96,5		97		98		98		98		98		
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		51		52		53		53		53		53		
	Persentase bangunan yang terdata		90		93		96		96		96		96		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**6.040.372.672**		**13.725.393.918**		**13.955.760.996**		**13.845.386.594**		**15.211.242.307**		**15.748.828.539**	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.126.008.672		5.031.998.918		5.373.865.996		5.271.491.594	100	6.014.347.307	100	6.571.933.539	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	4.126.008.672	100	5.031.998.918	100	5.373.865.996	100	5.271.491.594	100	6.014.347.307	100	6.571.933.539	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		100		137.316.500	100	311.895.000	100	373.895.000	100	370.895.000	100	468.895.000	100	438.895.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	137.316.500	100	311.895.000	100	373.895.000	100	370.895.000	100	468.895.000	100	438.895.000	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				787.031.500		2.575.000.000	35	2.565.000.000	40	2.565.000.000	40	3.065.000.000	40	3.065.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Tertangani Kewenangan Kabupaten/Kota	100	35	787.031.500	35	2.575.000.000	35	2.565.000.000	40	2.565.000.000	40	3.065.000.000	40	3.065.000.000	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		100	100	703.054.500	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	100	100	703.054.500	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	100	2.538.000.000	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				286.961.500	100	3.268.500.000	100	3.105.000.000	100	3.100.000.000	100	3.125.000.000	100	3.135.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Lingkungan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	286.961.500	100	3.268.500.000	100	3.105.000.000	100	3.100.000.000	100	3.125.000.000	100	3.135.000.000	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**21.750.303.978**		**26.824.585.604**		**25.467.665.915**		**25.800.606.172**		**25.748.870.530**		**25.575.828.265**	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	19.383.702.782	100	24.250.829.873	100	22.803.980.846	100	22.821.514.864	100	23.008.681.118	100	22.920.848.475	
Tertunjangnya Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	*100*	*100*	*7.762.485.558*	*100*	*9.045.997.890*	*100*	*9.094.460.014*	*100*	*9.147.460.014*	*100*	*9.150.490.014*	*100*	*9.178.490.014*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT*
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	*100*	*100*	*7.682.058.548*	*100*	*10.367.781.030*	*100*	*8.725.838.407*	*100*	*8.685.643.925*	*100*	*8.725.210.179*	*100*	*8.609.377.536*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT*
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	*100*	*100*	*3.939.158.676*	*100*	*4.837.050.953*	*100*	*4.983.682.425*	*100*	*4.988.410.925*	*100*	*5.132.980.925*	*100*	*5.132.980.925*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT*

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	100	357.579.284	100	628.102.731	100	663.814.983	100	724.391.308	100	644.395.793	100	586.979.790	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	357.579.284	100	628.102.731	100	663.814.983	100	724.391.308	100	644.395.793	100	586.979.790	
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	37,91	37,91		37,91		37,91		37,91		38,00		38,00		
	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	5,56	8,33		8,33		11,11		11,11		13,89		13,89		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.388.620.412	100	563.473.000	100	769.000.000	100	794.700.000	100	745.400.000	100	623.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	1.388.620.412	100	563.473.000	100	769.000.000	100	794.700.000	100	745.400.000	100	623.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya kualitas pelayanan pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya respon penanganan tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya tata kelola administrasi penanggulangan bencana	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana (Daerah)	0	100		100		100		100		100		100		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban			620.401.500		1.382.180.000		1.230.870.086		1.460.000.000		1.350.393.619		1.445.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakara	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	620.401.500	100	1.382.180.000	100	1.230.870.086	100	1.460.000.000	100	1.350.393.619	100	1.445.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15		15		15		15		15		15		
	Persentase Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**7.328.892.441**		**6.979.722.154**		**7.044.747.265**		**7.130.457.302**		**7.176.821.694**		**7.275.011.452**	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA				3.807.276.691		3.954.350.000		4.019.375.111		4.057.550.000		4.093.050.000		4.097.011.452	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	3.807.276.691	100	3.954.350.000	100	4.019.375.111	100	4.057.550.000	100	4.093.050.000	100	4.097.011.452	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100	100	70.456.000	100	113.372.154	100	113.372.154	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	100	70.456.000	100	113.372.154	100	113.372.154	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	100		100		100		100		100		100		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				36.525.500	100	40.000.000	100	40.000.000	100	58.000.000	100	58.000.000	100	68.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	36.525.500	100	40.000.000	100	40.000.000	100	58.000.000	100	58.000.000	100	68.000.000	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	100	1.266.901.750	100	838.000.000	100	838.000.000	100	844.000.000	100	856.771.694	100	936.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	63.06	100	1.266.901.750	100	838.000.000	100	838.000.000	100	844.000.000	100	856.771.694	100	936.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	11.21	75		75		75		75		75		75		
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	48.21	95		100		100		100		100		100		
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2.065.577.500		1.947.000.000		1.947.000.000		1.948.907.302		1.947.000.000		1.952.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	2.065.577.500	100	1.947.000.000	100	1.947.000.000	100	1.948.907.302	100	1.947.000.000	100	1.952.000.000	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				50.950.500		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	50.950.500	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				31.204.500		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik (%)	100	100	31.204.500	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**101.679.226.459**		**105.446.817.723**		**108.537.917.080**		**111.448.458.566**		**112.832.219.644**		**113.890.759.160**	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**8.330.044.300**		**6.547.098.753**		**6.802.133.700**		**7.101.602.730**		**7.284.626.600**		**7.429.065.767**	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran			5.145.443.700		5.320.000.000		5.503.380.700		5.665.851.830		5.751.437.810		5.839.065.767	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	5.145.443.700	100	5.320.000.000	100	5.503.380.700	100	5.665.851.830	100	5.751.437.810	100	5.839.065.767	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-	1	12.000.000	1	-	1	-	1	15.000.000	1	-	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	1	-	1	12.000.000	1	-	1	-	1	15.000.000	1	-	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2.860.569.100		717.368.000		764.217.000		814.172.000		859.912.000		870.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	69,94	64,94	2.860.569.100	69,90	717.368.000	64,95	764.217.000	65	814.172.000	65,1	859.912.000	65,15	870.000.000	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				102.325.500		97.260.753		104.494.000		111.378.900		117.917.720		120.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	85,51	84,59	102.325.500	85,41	97.260.753	85,46	104.494.000	85,56	111.378.900	85,62	117.917.720	85,75	120.000.000	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				221.706.000		400.470.000		430.042.000		510.200.000		540.359.070		600.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	87,1	87,1	221.706.000	87,10	400.470.000	84,5	430.042.000	85	510.200.000	85,5	540.359.070	87	600.000.000	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**4.390.018.895**		**5.275.448.216**		**5.342.110.023**		**5.430.310.611**		**5.531.483.832**		**5.802.976.084**	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.519.963.195		4.142.758.216		4.204.420.023		4.275.620.611		4.331.793.832		4.399.976.084	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	3.519.963.195	100	4.142.758.216	100	4.204.420.023	100	4.275.620.611	100	4.331.793.832	100	4.399.976.084	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				229.947.500		533.000.000		533.000.000		555.000.000		585.000.000		609.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya Kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran Responsif Gender (ARG)	4.5	5	229.947.500	5.2	533.000.000	5.3	533.000.000	5.4	555.000.000	5.5	585.000.000	5.6	609.000.000	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan	50.03	50.05		50.06		50.07		50.09		50.15		51		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif			248.138.700		220.690.000		220.690.000		220.690.000		220.690.000		300.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	248.138.700	100	220.690.000	100	220.690.000	100	220.690.000	100	220.690.000	100	300.000.000	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				27.749.000		60.000.000		65.000.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar (%)	0	0	27.749.000	85	60.000.000	90	65.000.000	90	60.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000	90	35.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan atau penyususnan kebijakan	80	82	-	85	20.000.000	86	20.000.000	87	20.000.000	88	25.000.000	90	35.000.000	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				47596500		94.000.000		94.000.000		94.000.000		94.000.000		94.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Terjaminmya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63.54	63.55	47.596.500	63.66	94.000.000	63.67	94.000.000	63.70	94.000.000	63.72	94.000.000	63.75	94.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				316.624.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		210.000.000		300.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	316.624.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	210.000.000	100	300.000.000	
	Indeks Perlindungan khusus Anak (IPKHA)	77.11	77.12		77.15		77.18		77.20		77.25		77.25		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**3.917.287.800**		**3.936.101.523**		**4.267.784.256**		**4.201.559.556**		**4.197.978.999**		**4.295.682.359**	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.417.331.232		3.762.721.523		3.748.124.256		3.772.779.556		3.778.953.999		3.811.623.390	DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	3.417.331.232	100	3.762.721.523	100	3.748.124.256	100	3.772.779.556		3.778.953.999		3.811.623.390	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PANGAN
Meningkatnya pengelolaan sumber daya untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ratio ketersediaan Pangan Utama	204,9	208,9	-		5.000.000		5.000.000	208,9	5.000.000		5.000.000	208,9	5.000.000	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein			418.039.500		131.880.000		331.660.000		316.280.000		304.025.000		320.558.969	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PANGAN
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein (%)	100	100	418.039.500	100	131.880.000	100	331.660.000	100	316.280.000	100	304.025.000	100	320.558.969	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				31.519.500		9.000.000		100.000.000		50.000.000		55.000.000		86.500.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PANGAN
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Tingkat Penanganan Rawan Pangan	100	100	31.519.500	100	9.000.000	100	100.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	86.500.000	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pengawasan mutu pangan			50.397.568		27.500.000		83.000.000		57.500.000		55.000.000		72.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PANGAN
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu	100	100	50.397.568	100	27.500.000	100	83.000.000	100	57.500.000	100	55.000.000		72.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dan keamanan pangan (%)														
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				**831.592.000**		**4.400.000.000**		**4.500.000.000**		**4.500.000.000**		**4.500.000.000**		**4.500.000.000**	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian pengaduan sengketa tanah			28.930.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	28.930.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				688.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	688.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (ASTA CITA)				-		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	0	0	10	150.000.000	20	200.000.000	30	200.000.000	50	200.000.000	100	200.000.000	
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	-	50	114.662.000		200.000.000	35	250.000.000	50	250.000.000	80	250.000.000	100	250.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	-	10	-	20	200.000.000	35	250.000.000	50	250.000.000	80	250.000.000	100	250.000.000	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**19.698.627.952**		**20.292.346.059**		**20.782.050.915**		**20.985.581.688**		**21.047.562.446**		**20.923.832.689**	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.849.581.202	100	7.119.146.059	100	7.339.050.915	100	7.492.581.688	100	7.471.562.446	100	7.498.832.689	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	6.849.581.202	100	7.119.146.059	100	7.339.050.915	100	7.492.581.688	100	7.471.562.446	100	7.498.832.689	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti			-		-	100	100.000.000		-	100	100.000.000	100	-	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	-	100,00	-	100	100.000.000	100	-	100	100.000.000	100	-	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				72.991.000		188.000.000		191.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Terpenuhinya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pemenuhan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (%)	100	100	72.991.000	100	188.000.000	100	191.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	
	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,005	0,005	-	0,005	-	0,005	-	0,005		0,005	-	0,005		
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.646.569.300		1.768.000.000		1.877.000.000		1.880.000.000		1.880.000.000		1.880.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	12,63	12,63	1.646.569.300	12,64	1.768.000.000	12,65	1.877.000.000	12,65	1.880.000.000	12,65	1.880.000.000	12,65	1.880.000.000	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				7.000.000		12.000.000		14.000.000		25.000.000		20.000.000		25.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	30	35,00	7.000.000	35	12.000.000	40	14.000.000	40	25.000.000	40	20.000.000	40	25.000.000	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				-		20.000.000		15.000.000		30.000.000		15.000.000		30.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	100	100	-	100	20.000.000	100	15.000.000	100	30.000.000	100	15.000.000	100	30.000.000	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemenuhan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0	0	-		30.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Pemenuhan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (%)	0	0		40	30.000.000	60	60.000.000	80	60.000.000	100	60.000.000	20	60.000.000	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			104.983.000		130.000.000		140.000.000		155.000.000		155.000.000		165.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	20	20	104.983.000	40	130.000.000	60	140.000.000	80	155.000.000	100	155.000.000	20	165.000.000	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				-		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	-	100	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				11.017.503.450		11.025.200.000		11.026.000.000		11.128.000.000		11.131.000.000		11.045.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan sampah yang ditangani (%)	89	87,1	11.017.503.450	100	11.025.200.000	100	11.026.000.000	100	11.128.000.000	100	11.131.000.000	100	11.045.000.000	
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi 3R (%)	15,18	13,73		20		23,33		26,67		30		30		
	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	73,9	73,37		80		76,67		73,33		70		70		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**4.406.050.001**		**4.228.322.223**		**4.361.570.648**		**4.483.476.054**		**4.524.672.846**		**4.588.031.117**	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	4.335.718.501	100	4.033.332.517	100	4.132.549.548	100	4.075.971.548	100	4.075.971.549	100	4.125.971.548	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	4.335.718.501	100	4.033.332.517	100	4.132.549.548	100	4.075.971.548	100	4.075.971.549	100	4.125.971.548	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				25.267.000		59.239.000		77.339.000		185.204.506		189.697.500		189.697.500	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	24.81	25.00	25.267.000	27.00	59.239.000	29.00	77.339.000	31.00	185.204.506	33.00	189.697.500	35.00	189.697.500	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	99.90	90.92		90.93		90.94		90.95		90.96		90.97		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				21.685.000	100	77.468.606	100	83.231.000	100	127.600.000	100	164.303.797	71	164.303.797	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	21.685.000	100	77.468.606	100	83.231.000	100	127.600.000	100	164.303.797	71	164.303.797	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)														
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)														
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)														
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			21.758.500		53.789.000		63.958.000		84.700.000		84.700.000		98.058.272	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	21.758.500	100	53.789.000	100	63.958.000	100	84.700.000	100	84.700.000	100	98.058.272	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				1.621.000		4.493.100		4.493.100		10.000.000		10.000.000		10.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	1.621.000	100	4.493.100	100	4.493.100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**5.456.723.147**		**7.077.184.616**		**6.873.270.851**	100	**7.003.727.939**		**7.250.746.343**		**7.029.901.455**	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.714.883.020	100	4.762.144.616	100	4.266.230.851	100	4.506.687.939		4.703.706.343		4.667.861.455	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang baik	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	2.714.883.020	100	4.762.144.616	100	4.266.230.851	100	4.506.687.939		4.703.706.343		4.667.861.455	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				146.333.000		345.000.000		435.000.000		452.000.000		491.000.000		397.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Terkendalinya pertambahan Jumlah Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.34	2.14	146.333.000	2,13	345.000.000	2.12	435.000.000	2,11	452.000.000	2,10	491.000.000	2,00	397.000.000	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	-	21,4		22,80		21.66-		20,57		19,54		18,56		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.157.114.127		1.069.000.000		1.166.000.000		1.019.000.000		1.060.000.000		964.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceotive (mCPR)	58,9	60,20	1.157.114.127	61,40	1.069.000.000	62,62	1.166.000.000	63,87	1.019.000.000	65,14	1.060.000.000	66,44	964.000.000	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,9	11,50		11,20		11,00		10,70		10,30		9,80		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.438.393.000		901.040.000		1.006.040.000		1.026.040.000		996.040.000		1.001.040.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	11,19	12,20	1.438.393.000	14,30	901.040.000	15,70	1.006.040.000	16,78	1.026.040.000	17,90	996.040.000	18,80	1.001.040.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**16.267.096.223**		**13.633.861.231**		**14.556.904.060**		**15.509.331.311**		**15.945.603.520**		**15.988.043.610**	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.644.158.213		10.452.159.662		10.857.190.190		11.174.898.216		11.456.314.330		11.725.543.610	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	7.644.158.213	100	10.452.159.662	100	10.857.190.190	100	11.174.898.216	100	11.456.314.330	100	11.725.543.610	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.622.938.010		3.181.701.569		3.699.713.870		4.334.433.095		4.489.289.190		4.262.500.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		100	8.622.938.010	100	3.181.701.569	100	3.699.713.870	100	4.334.433.095	100	4.489.289.190	100	4.262.500.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**12.530.979.224**		**13.403.760.958**		**13.729.056.551**		**14.090.096.178**		**14.189.402.247**		**14.368.806.747**	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	4.924.376.724	100	6.343.760.958	100	6.450.013.966		6.625.588.845	(0)	6.636.934.876	0	6.598.806.747	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)														
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100	100	5.052.395.000	100	4.225.000.000	100	4.344.042.585	100	4.424.507.333	100	4.507.467.371	100	4.495.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	15	5		3		3		3		3		3		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		-		2.554.207.500		2.835.000.000		2.935.000.000		3.040.000.000		3.045.000.000		3.275.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Perangkat Daerah yang Terintegrasi (%)	100	100	2.554.207.500	100	2.835.000.000	100	2.935.000.000	100	3.040.000.000	100	3.045.000.000	100	3.275.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	46.67	50		50		50		50		50		50		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**4.546.966.200**		**4.741.164.601**		**4.898.458.000**		**5.154.878.040**		**5.234.529.000**		**5.475.236.510**	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				155.533.700		163.310.000		171.470.000		180.000.000		187.404.000		168.500.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi aktif	44.80	45,6	155.533.700	47,6	163.310.000	49,6	171.470.000	51,6	180.000.000	53,6	187.404.000	55,6	168.500.000	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			-	-		120.000.000		126.000.000		132.300.000		137.900.000		145.860.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Koperasi yang berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	61.6	64.52	-	68.55	120.000.000	72	126.000.000	76	132.300.000	80	137.900.000	84	145.860.000	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN sdisin			-	-		362.000.000		391.489.000		509.355.000		528.900.000		549.637.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	32,26	36,29	-	40,32	362.000.000	44,35	391.489.000	48,38	509.355.000		528.900.000	56.44	549.637.000	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			-	-		90.000.000		94.500.000		99.300.000	34,19	101.600.000		109.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	20.15	22.58		24.19	90.000.000	25.8	94.500.000	27.41	99.300.000	29.02	101.600.000	30.63	109.000.000	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			-	4.391.432.500		3.505.854.601		3.589.999.000		3.682.673.040		3.700.000.000		3.894.489.510	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (%)	45.18	45.20	4.391.432.500	45.24	3.505.854.601	45.26	3.589.999.000	45.28	3.682.673.040	45.30	3.700.000.000	45.32	3.894.489.510	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		-	-	-		500.000.000		525.000.000		551.250.000		578.725.000		607.750.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang Memanfaatkan Platform Digital (%)	20.07	20.32		20.57	500.000.000	20.82	525.000.000	21,07	551.250.000	21.32	578.725.000	21.57	607.750.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**5.514.772.979**		**5.797.127.715**		**5.937.036.337**		**6.098.031.260**		**6.143.060.660**		**6.218.318.380**	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA				5.191.430.479		5.417.127.715		5.277.036.337		5.338.031.260		5.363.060.660		5.398.318.380	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	79	80	5.191.430.479	81	5.417.127.715	82	5.277.036.337	83	5.338.031.260	84	5.363.060.660	85	5.398.318.380	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				114.993.500		100.000.000		220.000.000		240.000.000		245.000.000		255.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	80.00	80.00	114.993.500	81	100.000.000	82	220.000.000	83	240.000.000	83.50	245.000.000	84	255.000.000	
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	100	100	40.726.500		50.000.000		90.000.000		120.000.000		125.000.000		135.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	94.25	94.25		94.25	50.000.000	94.27	90.000.000	94.28	120.000.000	94,29	125.000.000	94.30	135.000.000	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				118.147.000		135.000.000		180.000.000		210.000.000		215.000.000		225.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	95.46	95.46	118.147.000	95.47	135.000.000	95.48	180.000.000	95.49	210.000.000	95.50	215.000.000	95.51	225.000.000	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		-		-		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	99.08	99.08	-	99.09	30.000.000	99.10	50.000.000	99.11	50.000.000	99.12	50.000.000	99.13	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				49.475.500		65.000.000		120.000.000		140.000.000	100	145.000.000	100	155.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	73.00	73.00	49.475.500	73.25	65.000.000	73.26	120.000.000	73.50	140.000.000	74.00	145.000.000	74.25	155.000.000	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**8.684.973.020**		**8.628.191.635**		**8.850.821.574**		**9.018.215.958**		**9.078.662.111**		**9.209.152.075**	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.264.303.020		6.113.191.635		6.273.821.574		6.403.215.958		6.433.662.111		6.469.152.075	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	5.264.303.020	100	6.113.191.635	100	6.273.821.574	100	6.403.215.958	100	6.433.662.111	100	6.469.152.075	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				347.416.000		390.000.000		385.000.000		385.000.000		415.000.000		410.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	100	100	347.416.000	100	390.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	415.000.000	100	410.000.000	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2.932.603.000		1.935.000.000		2.002.000.000		2.040.000.000		2.040.000.000		2.140.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	100	100	2.932.603.000	100	1.935.000.000	100	2.002.000.000	100	2.040.000.000	100	2.040.000.000	100	2.140.000.000	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				140.651.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	100	100	140.651.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100,00	190.000.000	100	190.000.000	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**41.592.500**		**85.008.651**		**85.748.311**		**91.311.930**		**95.130.021**		**94.844.327**	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				41.592.500	100	85.008.651	100	85.748.311	100	91.311.930	100	95.130.021	100	94.844.327	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN STATISTIK

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	41.592.500	100	85.008.651	100	85.748.311	100	91.311.930	100	95.130.021	100	94.844.327	
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**19.459.000**		**71.586.232**		**72.209.104**		**82.180.737**		**81.540.018**		**81.295.137**	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-		19.459.000		71.586.232		72.209.104		82.180.737		81.540.018		81.295.137	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERSANDIAN
Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	91	91	19.459.000	91	71.586.232	91	72.209.104	91	82.180.737	91	81.540.018	91	81.295.137	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**2.645.385.350**		**2.641.534.958**		**2.705.286.101**		**2.731.581.761**		**2.751.752.449**		**2.785.463.757**	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			588.538.000		647.600.000		649.108.743		651.608.743		653.608.743		655.608.743	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	78.56	80	588.538.000	81	647.600.000	82	649.108.743	83	651.608.743	84	653.608.743	85	655.608.743	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			30.001.000		145.000.000		147.500.000		154.000.000		156.000.000		162.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian lokal	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	60	61	30.001.000	62	145.000.000	63	147.500.000	64	154.000.000	65	156.000.000	66	162.000.000	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				51.843.000		100.000.000		105.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	40	41	51.843.000	42	100.000.000	43	105.000.000	43	115.000.000	44	120.000.000	45	125.000.000	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.290.857.600		1.128.257.600		1.133.000.000		1.136.000.000		1.139.000.000		1.153.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	1.290.857.600	0	1.128.257.600	0	1.133.000.000	0	1.136.000.000	0	1.139.000.000	0	1.153.000.000	
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	34.09	35		36		37		38		39		40		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang dikelola			684.145.750		620.677.358		670.677.358		674.973.018		683.143.706		689.855.014	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	59.99	61	684.145.750	62	620.677.358	63	670.677.358	64	674.973.018	65	683.143.706	66	689.855.014	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**4.353.658.743**		**4.562.080.352**		**4.689.623.872**		**4.834.790.231**		**4.888.705.955**		**4.967.119.668**	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.811.390.192	100	4.322.080.352,00	100	4.408.521.959	100	4.496.692.398	100	4.586.626.246	100	4.678.358.771	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	77	79	3.811.390.192	79	4.322.080.352,00	79,50	4.408.521.959	81	4.496.692.398	83	4.586.626.246,19	85	4.678.358.771	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca			542.268.551		195.000.000,0		235.000.000		275.000.000,0		275.000.000,0		260.000.000,0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	76,87	77	542.268.551	79	195.000.000,0	79,50	235.000.000	80,00	275.000.000,0	85,00	275.000.000,0	85,00	260.000.000,0	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan			-		45.000.000,0		46.101.913		63.097.833,0		27.079.709,0		28.760.897,0	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0		40	45.000.000,0	40	46.101.913	50	63.097.833,0	50,0	27.079.709,0	50,0	28.760.897,0	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				**43.999.125**		**126.000.000**		**83.852.777**		**131.782.582**		**86.762.597**		**132.989.478**	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				43.999.125		126.000.000		65.000.000		85.000.000		86.762.597		90.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	100	100	43.999.125	100	126.000.000	100	65.000.000	100	85.000.000	100	86.762.597	100	90.000.000	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan			-		-		18.852.777		46.782.582		0		42.989.478	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100		0		100	18.852.777	100	46.782.582	0		100	42.989.478	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**16.885.502.602**		**19.155.571.504**		**19.809.168.308**		**20.044.001.081**		**20.320.775.561**		**20.610.623.616**	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**554.624.000**		**803.242.264**		**822.627.816**		**844.935.057**		**851.174.271**		**861.603.879**	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap			301.103.000		461.921.264		469.306.816		479.509.057		482.606.816		487.558.816	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3913,9	3914,3	301.103.000	3914,7	461.921.264	3915,1	469.306.816	3915,5	479.509.057	3915,9	482.606.816	3916,2	487.558.816	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				197.500.000		281.000.000		292.000.000		303.105.000		305.246.455		309.724.063	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	90,800	90,891	197.500.000	90,982	281.000.000	91,071	292.000.000	91,164	303.105.000	91,255	305.246.455	91,347	309.724.063	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				56.021.000		60.321.000		61.321.000		62.321.000		63.321.000		64.321.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	25,00	25,13	56.021.000	25,25	60.321.000	25,38	61.321.000	25,5	62.321.000	25,63	63.321.000	25,76	64.321.000	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**891.257.000**		**1.074.000.000**		**1.080.000.000**		**1.085.000.000**		**1.095.000.000**		**1.085.000.000**	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				259.097.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000		330.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PARIWISATA
meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	100	100	259.097.000	100	335.000.000	100	335.000.000	100	335.000.000	100	335.000.000	100	330.000.000	
3.26.03 -PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB			497.448.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		610.000.000		605.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PARIWISATA
meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100	100	497.448.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	610.000.000	100	605.000.000	
3.26.04 -PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		-		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	100	100	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				134.712.000		119.000.000		125.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PARIWISATA
meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100	100	134.712.000	100	119.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**9.364.625.409**		**10.441.799.342**		**10.736.013.994**		**10.945.561.049**		**10.919.114.410**		**10.908.904.106**	
03.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.069.201.909		8.826.799.342		9.355.003.994		9.616.291.049		9.262.834.410		9.542.614.106	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	8.069.201.909	100,0	8.826.799.342	100,0	9.355.003.994	100,0	9.616.291.049	100	9.262.834.410	100,0	9.542.614.106	
03.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				960.641.500		698.900.000		700.900.000		702.000.000		704.000.000		706.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0.15	0.15	960.641.500	0.70	698.900.000	1.50	700.900.000	1.50	702.000.000	1.50	704.000.000	1.50	706.000.000	
	Peningkatan Produksi Hortikultura	0.40	0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2.00	2.00		2.01		2.02		2.03		2.04		2.08		
03.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B			52.029.500		61.000.000		81.000.000		100.000.000		111.000.000		121.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	305.07	305.07	52.029.500	305.07	61.000.000	305.07	81.000.000	305.07	100.000.000	305.07	111.000.000	305.07	121.000.000	
03.27.04 - PROGRAM PENGE4DALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				74.790.000		261.850.000		262.850.000		190.000.000		193.000.000		200.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	41,73	41,73	74.790.000	42,31	261.850.000	44,42	262.850.000	45,13	190.000.000	46,54	193.000.000	47,95	200.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	25	37,5		37,5		37,5		37,5		50,0		50,0		
03.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				19.333.500		148.250.000		148.260.000		148.270.000		148.280.000		148.290.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	22,38	19.333.500	22,99	148.250.000	26,93	148.260.000	30,65	148.270.000	34,35	148.280.000	38,05	148.290.000	
03.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				188.629.000		445.000.000		188.000.000		189.000.000		500.000.000		191.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	188.629.000	100	445.000.000	100	188.000.000	100	189.000.000	100	500.000.000	100	191.000.000	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**6.024.019.193**		**6.626.529.898**		**6.975.526.498**		**6.893.504.975**		**7.165.486.880**		**7.405.115.631**	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.278.730.903		6.026.529.898		6.370.526.498		6.206.504.975		6.458.486.880		6.613.115.631	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	5.278.730.903	100	6.026.529.898	100	6.370.526.498	100	6.206.504.975	100	6.458.486.880	100	6.613.115.631	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				418.067.500		70.000.000		65.000.000		115.000.000		125.000.000		150.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	100	418.067.500	100	70.000.000	100	65.000.000	100	115.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				285.784.000		390.000.000		395.000.000		407.000.000		407.000.000		457.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	285.784.000	100	390.000.000	100	395.000.000	100	407.000.000	100	407.000.000	100	457.000.000	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang			-		40.000.000		40.000.000		50.000.000		55.000.000		50.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	0	0	-	0	40.000.000	0	40.000.000	0	50.000.000	0	55.000.000	0	50.000.000	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				41.436.790		100.000.000		105.000.000		115.000.000		120.000.000		135.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100	41.436.790	100	100.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	135.000.000	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**50.977.000**		**210.000.000**		**195.000.000**		**275.000.000**		**290.000.000**		**350.000.000**	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri			50.977.000		155.000.000		135.000.000		210.000.000		220.000.000		280.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERINDUSTRIAN
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	100	100	50.977.000	100	155.000.000	100	135.000.000	100	210.000.000	100	220.000.000	100	280.000.000	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan			-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERINDUSTRIAN
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	20	0	-	20	20.000.000	25	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				-		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERINDUSTRIAN
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	0	0	-	65	35.000.000	70	40.000.000	75	45.000.000	80	50.000.000	85	50.000.000	
												-		-	
4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**94.043.533.026**		**97.982.564.544**		**100.341.769.765**		**103.051.459.829**		**103.797.303.691**		**105.056.098.769**	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				**47.192.005.090**		**42.554.167.164**		**43.588.547.244**		**44.772.494.684**		**45.101.324.156**		**45.654.535.988**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				40.512.210.090		35.057.283.479		35.692.599.559		36.427.169.559		36.667.999.031		37.164.407.863	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	40.512.210.090	100	35.057.283.479	100	35.692.599.559	100	36.427.169.559	100	36.667.999.031	100	37.164.407.863	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				6.020.397.000		6.820.332.185		6.930.332.185		7.208.935.708		7.248.935.708		7.305.738.708	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan hasil fasilitasi hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Terselenggaranya Fasilitasi Bina Mental Spiritual (%)	90	90	6.020.397.000	92	6.820.332.185	94	6.930.332.185	96	7.208.935.708	98	7.248.935.708	98	7.305.738.708	
	Terselenggaranya Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Daerah (Dokumen)	25	25		30		35		40		45		45		
	Terselenggaranya Pemerintahan Daerah (Nilai)	3100	3100		3200		3300		3400		3500		3500		
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	87	87		90		92		95		97		98		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				659.398.000		676.551.500		965.615.500		1.136.389.417		1.184.389.417		1.184.389.417	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan hasil koordinasi, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (Laporan)	8	8	659.398.000	10	676.551.500	12	965.615.500	14	1.136.389.417	16	1.184.389.417	16	1.184.389.417	
	Terselenggaranya Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran terhadap Dokumen DPA dan RUP (%)	95	95		95		96		96		98		98		
	Terselenggaranya e-Procurement Pemerintah Daerah (%)	90	90		92		94		95		97		97		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				**46.851.527.936**		**55.428.397.380**		**56.753.222.521**		**58.278.965.145**		**58.695.979.535**		**59.401.562.781**	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	27.128.752.436	100	25.157.543.880	100	26.518.707.021	100	26.554.449.645	100	28.461.464.035	100	25.089.047.281	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Hearing,Persentase Pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat,Persentase ranperda yang disahkan	100	100	19.722.775.500	100	30.270.853.500	100	30.234.515.500	100	31.724.515.500	100	30.234.515.500	100	34.312.515.500	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD
5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**63.034.668.907**		**63.693.215.047**		**66.834.840.013**		**71.132.649.485**		**74.374.484.334**		**67.099.961.890**	
5.01 - PERENCANAAN				**5.725.991.592**		**7.402.764.908**		**8.124.085.711**		**8.943.174.756**		**9.744.339.128**		**10.665.299.808**	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.472.240.092,00		5.756.873.113		6.292.560.424		6.928.816.466		7.570.948.113		8.277.292.924	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Bappeda	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	4.472.240.092,00	100	5.756.873.113	100	6.292.560.424	100	6.928.816.466	100	7.570.948.113	100	8.277.292.924	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				590.958.500,00		789.159.045		889.118.148		977.708.192		1.033.003.888		1.133.625.142	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	590.958.500,00	100	789.159.045	100	889.118.148	100	977.708.192	100	1.033.003.888	100	1.133.625.142	
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD														
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				662.793.000,00		856.732.750		942.407.139		1.036.650.098		1.140.387.127		1.254.381.742	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	662.793.000,00	100	856.732.750	100	942.407.139	100	1.036.650.098	100	1.140.387.127	100	1.254.381.742	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Perekonomian dan SDA														
5.02 - KEUANGAN				**52.137.378.347**		**50.651.713.070**		**53.150.617.862**		**56.434.870.454**		**58.771.972.028**		**50.441.068.503**	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.598.231.797		39.893.537.170,00		42.129.533.167,00		45.032.830.910,00		47.104.340.705,00		39.682.892.603,00	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEUANGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	36.598.231.797	100	39.893.537.170,00	100	42.129.533.167,00	100	45.032.830.910,00	100	47.104.340.705,00	100	39.682.892.603,00	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				11.861.690.500		7.566.692.000,00		7.670.026.600,00		7.819.758.438,00		7.924.147.568,00		7.566.692.000,00	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEUANGAN
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	11.861.690.500	100	7.566.692.000,00	100	7.670.026.600,00	100	7.819.758.438,00	100	7.924.147.568,00	100	7.566.692.000,00	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap			779.371.500		837.573.000,00		879.451.650,00		940.133.815,00		982.439.837,00		837.573.000,00	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEUANGAN
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	100	100	779.371.500	100	837.573.000,00	100	879.451.650,00	100	940.133.815,00	100	982.439.837,00	100	837.573.000,00	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.898.084.550		2.353.910.900,00		2.471.606.445,00		2.642.147.291,00		2.761.043.918,00		2.353.910.900,00	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEUANGAN
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	98	100	2.898.084.550	100	2.353.910.900,00	100	2.471.606.445,00	100	2.642.147.291,00	100	2.761.043.918,00	100	2.353.910.900,00	
5.03 - KEPEGAWAIAN				**4.708.836.468**		**4.398.846.785**		**4.505.009.116**		**4.627.171.682**		**4.661.339.884**		**4.718.445.264**	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.132.263.968		4.248.846.785		4.330.009.116		4.427.171.682		4.436.339.884		4.468.445.264	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	4.132.263.968	100	4.248.846.785	100	4.330.009.116	100	4.427.171.682	100	4.436.339.884	100	4.468.445.264	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				576.572.500		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi, pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya, pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya, dan pegawai dengan SKP bernilai baik	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai Dengan Formasi	98,36	100,00	576.572.500	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	78,77	90,00		90		90	-	90		90		90		
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	87,96	87,96		88,89		89,83	-	90,77		92		93		
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	91,63	86,63		85,7		88,1	-	89,742		92		93		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**95.085.000**		**444.890.284**		**455.627.324**		**467.982.593**		**471.438.294**		**477.213.815**	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				95.085.000		444.890.284		455.627.324		467.982.593		471.438.294		477.213.815	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional, realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan, ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi, dan ASN yang mendapatkan pengembangan komptensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	90	96	95.085.000	96	444.890.284	96	455.627.324	96	467.982.593	96	471.438.294	96	477.213.815	
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	92,31	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kmpetensi Teknis	11,01	3,39		3,41		3,58		3,76		3,95		4,13		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**367.377.500**		**795.000.000**		**599.500.000**		**659.450.000**		**725.395.000**		**797.934.500**	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				367.377.500		755.000.000		555.500.000		611.050.000		672.155.000		739.370.500	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementassi Pembangunan	0	0	367.377.500	100	755.000.000	100	555.500.000	100	611.050.000	100	672.155.000	100	739.370.500	
	Persentase Fasilitasi Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan pengkajian dan penerapan didaerah	0	0		100		100								
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				0		40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	0	0		100	40.000.000	100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	58.564.000	
6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				**8.744.253.406**		**14.600.766.366**		**16.574.948.136**		**17.016.688.562**		**17.155.818.655**		**17.368.008.869**	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				**8.744.253.406**		**14.600.766.366**		**16.574.948.136**		**17.016.688.562**		**17.155.818.655**		**17.368.008.869**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA				8.271.830.406		13.268.349.801		15.082.779.086		15.344.815.155		15.281.697.337		15.493.887.551	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	8.271.830.406	100	13.268.349.801	100	15.082.779.086	100	15.344.815.155	100	15.281.697.337	100	15.493.887.551	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				293.101.000		802.200.000		882.420.000		970.662.000		1.067.728.200		1.067.728.200	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Internal oleh Inspektorat	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	56.86	55	293.101.000	55	802.200.000	60	882.420.000	60	970.662.000	65	1.067.728.200	65	1.067.728.200	
	Persentase Rekomendasi Temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	51.12	55		55		60	-	60	-	65	-	65	-	

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				179.322.000		530.216.565		609.749.050		701.211.407		806.393.118		806.393.118	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan oleh APIP	Persentase Instansi Pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) â‰¥ B (%)	94.12	100	179.322.000	100	530.216.565	100	609.749.050	100	701.211.407	100	806.393.118	100	806.393.118	
7 - UNSUR KEWILAYAHAN				**43.418.450.317**		**41.342.308.047**		**43.115.195.502**		**44.292.224.008**		**44.847.142.194**		**45.048.147.455**	
7.01 - KECAMATAN				**43.418.450.317**		**41.342.308.047**		**43.115.195.502**		**44.292.224.008**		**44.847.142.194**		**45.048.147.455**	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	31.111.243.417	100	29.394.921.447	100	30.927.353.902	100	31.979.904.472	100	32.551.668.594	100	32.712.857.855	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	*Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)*	*100*	*100*	*6.180.950.862*	*100*	*5.287.985.529*	*100*	6.047.658.820	*100*	*6.258.900.188*	*100*	*6.533.528.930*	*100*	*6.272.040.089*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI*
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	*Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)*	*100*	*100*	*8.631.196.194*	*100*	*8.329.066.357*	*100*	*8.570.269.414*	*100*	*8.801.518.399*	*100*	*8.951.504.391*	*100*	*9.090.763.541*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT*
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	*Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)*	*100*	*100*	*8.779.825.422*	*100*	*7.303.760.679*	100	7.572.957.008	100	7.882.725.207	100	7.969.365.679	100	8.114.168.061	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN SOREANG*
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja yang memadai dan kepuasan internal pegawai	*Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)*	*100*	*100*	*7.519.270.939*	*100*	*8.474.108.882*	*100*	*8.736.468.660*	*100*	*9.036.760.678*	*100*	*9.097.269.594*	*100*	*9.235.886.164*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN UJUNG*

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	100	117.664.500	100	148.811.000	100	151.500.000	100	151.500.000	100	151.500.000	100	151.500.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	*100*	*100*	*36.053.500*	*100*	*52.000.000*	*100*	*52.000.000*	*100*	*52.000.000*	*100*	*52.000.000*	*100*	*52.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI*
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	*100*	*100*	*42.311.000*	*100*	*42.311.000*		*45.000.000*		*45.000.000*		*45.000.000*		*45.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT*
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	*100*	*100*	*4.500.000*	*100*	*4.500.000*	*100*	*4.500.000*	*100*	*4.500.000*	*100*	*4.500.000*	*100*	*4.500.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN SOREANG*
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	*100*	*100*	*34.800.000*	*100*	*50.000.000*		*50.000.000*		*50.000.000*		*50.000.000*		*50.000.000*	*KECAMATAN UJUNG*
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN...sampai disni				**12.064.262.400**		**11.666.695.600**		**11.904.461.600**		**12.028.939.536**		**12.012.093.600**		**12.051.909.600**	**PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN**
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	*100*	*100*	*2.420.836.800*	*100*	*2.423.482.800*	*100*	*2.606.432.800*	*100*	2.619.432.800	*100*	2.629.432.800	*100*	2.629.432.800	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI*
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	*100*	*100*	*3.267.427.600*	*100*	*2.319.840.800*	*100*	*2.334.840.800*	*100*	*2.401.502.736*	*100*	*2.334.840.800*	*100*	*2.334.840.800*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT*
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	*100*	*100*	*3.585.225.000*	*100*	*3.803.236.000*	*100*	*3.803.236.000*	*100*	*3.803.236.000*	*100*	*3.803.236.000*	*100*	*3.803.236.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN SOREANG*
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	*100*	*100*	*2.790.773.000*	*100*	*3.120.136.000*	*100*	*3.159.952.000*	*100*	*3.204.768.000*	*100*	*3.244.584.000*	*100*	*3.284.400.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN UJUNG*
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**	**100**	**100**	**125.280.000**	**100**	**131.880.000**	**100**	**131.880.000**	**100**	**131.880.000**	**100**	**131.880.000**	**100**	**131.880.000**	**PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN**

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	*100*	*100*	*24.700.000*	*100*	*24.700.000*	*100*	*24.700.000*	*100*	*24.700.000*	*100*	*24.700.000*	*100*	*24.700.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI*
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	*100*	*100*	*29.400.000*	*100*	*36.000.000*	*100*	*36.000.000*	*100*	*36.000.000*	*100*	*36.000.000*	*100*	*36.000.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT*
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	*100*	*100*	*42.680.000*	*100*	*42.680.000*	*100*	*42.680.000*	*100*	*42.680.000*	*100*	*42.680.000*	*100*	*42.680.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN SOREANG*
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	*100*	*100*	*28.500.000*	*100*	*28.500.000*	*100*	*28.500.000*	*100*	*28.500.000*	*100*	*28.500.000*	*100*	*28.500.000*	*PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KECAMATAN UJUNG*
8 - UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				**6.302.346.923**		**6.762.516.931**		**6.921.581.383**		**6.831.147.257**		**6.881.590.175**		**7.217.309.615**	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**6.302.346.923**		**6.762.516.931**		**6.921.581.383**		**6.831.147.257**		**6.881.590.175**		**7.217.309.615**	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA				3.872.810.051		4.173.683.559		4.169.773.011		4.169.338.885		4.079.781.803		4.220.188.743	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100	100	3.872.810.051	100	4.173.683.559	100	4.169.773.011	100	4.169.338.885	100	4.079.781.803	100	4.220.188.743	
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)														
	Survei kepuasan internal (Nilai)														
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				747.930.000		847.025.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		1.025.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persentase)	100	100	747.930.000	100	847.025.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	1.025.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN/ROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNGJAWAB
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030 (TRANSISI)		
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				995.862.372		1.015.833.372		1.015.833.372		1.025.833.372		1.165.833.372		1.049.052.372	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	995.862.372	100	1.015.833.372	100	1.015.833.372	100	1.025.833.372	100	1.165.833.372		1.049.052.372	
8.01.4 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				80.137.500		129.250.000		139.250.000		139.250.000		139.250.000		159.250.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75,00	75,08	80.137.500	77,50	129.250.000	80,00	139.250.000	82,50	139.250.000	85,00	139.250.000	87,50	159.250.000	
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				107.213.000		141.725.000		241.725.000		141.725.000		141.725.000		200.000.000	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	107.213.000	100	141.725.000	100	241.725.000	100	141.725.000	100	141.725.000	100	200.000.000	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				498.394.000		455.000.000		455.000.000		455.000.000		455.000.000		563.818.500	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	498.394.000	100	455.000.000	100	455.000.000	100	455.000.000	100	455.000.000	100	563.818.500	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Parepare telah tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat.

Indikator makro daerah adalah data statistik yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi riil suatu daerah, menjadikannya fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta digunakan secara berkala untuk memantau, mengevaluasi, dan mengukur kemajuan pembangunan. Indikator Makro Kota Parepare periode 2025-2030.

4.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Parepare periode 2025-2030 yang tertuang dalam table beriku :

Tabel IV.2
Indikator Kinerja Utama
Kota Parepare Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Tahun	65,67	67,00 (C)	68,50 (C)	70,00 (C)	72,50 (C)	75,50 (B)	77,50 (B)	
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	79,04	79,89	80,76	81,63	82,51	83,40	84,43	
3	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,97	81,26	81,60	81,96	82,32	82,69	83,02	
4	Rasio Gini (Indeks)	Angka	0,376	0,370	0,363	0,357	0,351	0,345	0,338	
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,27	4,84-4,25	4,70-3,80	4,41-3,62	4,20-3,30	3,98-2,98	3,62-2,80	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,23	5,14	5,05	4,96	4,87	4,78	4,68	
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09	5,29	5,99	6,56	7,13	7,69	7,99	
8	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	61,97	65,25	69,16	74,60	80,04	85,49	92,32	
9	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	0,98	2,86	3,43	4,11	5,57	6,54	7,62	
10	Indeks Infrastruktur	Angka	2,85	4,07	4,86	5,65	6,43	7,22	8,01	
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,01	71,12	71,33	71,54	71,75	71,96	72,17	
12	Indeks Resiko Bencana	Angka	135,00	132,00	130,00	128,00	125,00	122,00	120,00	
13	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	n.a	14,46	16,62	18,87	21,12	23,36	25,80	

4.2.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahaan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD) yang memuat Indikator tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Parepare yang dimasukan kedalam IUP (Indikator Utama Pembangunan) aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah Kota sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta penetapan target indikator kinerja daerah Kota Parepare Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada table-tabel berikut :

Tabel IV.3
Indikator Kinerja Daerah Kota Parepare Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan									
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	6,31	6,25	6,18	6,12	6,06	6,00	5,93	
	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	82,76	83,10	84,70	85,59	86,40	87,30	88,00	
	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh		29	29,5	30,0	30,5	31	31,5	
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Liter/Detik	261,58	270,55	279,53	288,50	297,47	306,44	315,42	
	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Perpipaan (%)	Persen	63,81	68,34	72,86	77,38	81,91	81,91	81,91	
	Indeks Pertanaman (IP) padi	Persen	1,56	1,62	1,65	1,73	1,77	1,78	1,82	
	Proporsi Sawah irigasi	Persen	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	90,824	90,891	90,982	91,071	91,164	91,255	91,347	
	Lingkungan Hidup Berkualitas									
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	Kg/Kapita	25	25,13	25,25	25,38	25,50	25,63	25,76	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,01	71,12	71,33	71,54	71,75	71,96	72,17	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,75	10,2	12,7	15,1	17,55	20	22	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/Tahun	4.483,22	4.094,45	6.047,75	7.153,46	8.292,06	9.457,99	9.590,40	
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan	Persen	97,76	97,92	98,09	98,25	98,42	98,58	98,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)									
	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia									
	Risilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	n.a	14,46	16,62	18,87	21,12	23,36	25,80	
	Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)									
	a. Kumulatif	Persen		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	b. Tahunan	Persen		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	
	Indeks Risiko Bencana	Poin	135,00	132,00	130,00	128,00	125,00	122,00	120,00	
	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	n.a	3,04	3,09	3,14	3,19	3,24	3,29	
	Demografi									
	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,63	1,53	1,50	1,45	1,43	1,35	1,31	
	Rasio Penduduk (Rasio jenis Kelamin)	Jiwa	99,00	99,02	99,04	99,06	99,08	99,10	99,12	
	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km^2	1.649	1.663,12	1.679,79	1.693,95	1.718,11	1.741,27	1.764,02	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
	Kesejahteraan Ekonomi									
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,09	5,29	5,99	6,56	7,13	7,69	7,99	
	PDRB per kapita (Rp. Juta)	(Rp. Juta)	61,97	65,25	69,16	74,60	80,04	85,49	92,32	
	Rasio Gini (Indeks)	Persen	0,376	0,370	0,363	0,357	0,351	0,345	0,338	
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,27	4,84-4,25	4,70-3,80	4,41-3,62	4,20-3,30	3,98-2,98	3,62-2,80	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,23	5,14	5,05	4,96	4,87	4,78	4,68	
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,97	81,26	81,60	81,96	82,32	82,69	83,02	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Proporsi Kontribusi PDRB terhadap provinsi	Persen	1,43	1,44	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	
	Kesehatan Untuk Semua									
	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,63	75,08	75,53	75,98	76,43	76,88	77,31	
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	183,06	153,74	168,40	161,07	164,74	162,91	163,83	
	Prevalensi Stunting	Persen	11,45	18,79	17,49	16,29	15,19	14,19	13,19	
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Persen	90	90,05	90,10	90,10	90,04	90,06	90,11	
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	72,24	70,04	70,12	70,06	70,02	70,12	70,16	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,42	97,78	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00	
	Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan		99,77	100	100	100	100	100	100	
	Pendidikan Berkualitas Yang Merata									
	Kemampuan Literasi/ Numerasi pada Assesment Tingkat Nasional									
	i) Literasi membaca									
	SD	Persen	62,81	65,31	67,81	70,31	72,81	75,31	77,81	
	SMP	Persen	69,90	71,00	72,10	73,20	74,30	75,40	76,50	
	ii) Numerasi									
	SD	Persen	54,81	57,71	60,61	63,51	66,41	69,31	72,21	
	SMP	Persen	61,61	63,11	64,61	66,11	67,61	69,11	70,61	
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	i) Literasi membaca	Persen	86,18	86,83	87,49	88,15	88,81	89,47	90,13	
	ii) Numerasi	Persen	76,96	78,06	79,15	80,25	81,35	82,45	83,54	
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,88	11,05	11,10	11,13	11,16	11,19	11,21	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,55	14,56	14,58	14,60	14,62	14,64	14,66	
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	63,85	64,84	65,82	66,81	67,80	64,79	69,78	
	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang di tamatkan	Persen	30,84	31,62	32,40	33,17	33,95	34,73	35,51	
	Perlindungan Sosial Adiptif									
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	5,62	6,01	6,40	6,79	7,19	7,58	7,97	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	24,73	25,68	26,64	27,59	28,55	29,50	30,46	
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,04	79,89	80,76	81,63	82,51	83,40	84,43	
	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif									
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,32	64,55	65,89	67,15	68,49	69,75	71,24	
	Indeks Perlindungan Anak	Angka	rilis bulan November 2025 dari	66,567	66,678	66,679	66,680	66,682	66,685	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KemenP3A							
	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,166	0,163	0,160	0,157	0,154	0,151	0,150	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
	Daya Saing Sumber Daya Manusia									
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,97	81,26	81,60	81,96	82,32	82,69	83,02	
	Angka Ketergantungan Penduduk	Angka	47,32	47,53	47,81	47,92	48,44	48,99	49,45	
	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi									
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,03	3,05	3,40	3,75	4,09	4,44	4,79	
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	6,84	7,82	8,18	8,54	8,90	9,25	9,61	
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)	Persen	2.113	599	661	724	787	850	913	
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Unit	77	54,00	56,75	59,5	62,25	65	67,75	
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	Unit	100	100	100	100	100	100	100	
	Return on Assets (ROA) BUMD	Persen	-7,09	0,70	-5,46	-4,65	-3,83	0,75	-5,46	
	Nilai Tukar Petani Pangan	Persen	125,95	132,53	139,11	145,69	152,27	158,85	165,43	
	Nilai Tukar Nelayan	Persen	111,92	112,37	113,26	114,14	115,02	115,90	116,78	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,67	69,93	70,19	70,45	70,72	70,98	71,24	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	53,61	53,85	54,10	54,34	54,58	54,82	55,07	
	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	2,88	3,28	3,37	3,46	3,55	3,64	3,73	
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,88 (Inovatif)	60,00	60,50	61,00	62,00	63,50	65,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru									
	Indeks Kualitas Air (BOD)	ppm	2,53	2,45	2,38	2,31	2,24	2,16	2,09	
	Indeks Kualitas udara (No2)	µgr/Nm3	5,22	5,02	4,82	4,62	4,42	4,21	4,01	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	35,31	54,41	54,48	54,55	54,62	54,69	54,76	
	Indeks Ekonomi Hijau	Persen	50,10	51,91	54,17	56,43	58,69	60,95	63,21	
	Produktivitas Perikanan Tangkap	Ton	223,49	236,65	249,82	262,99	276,16	289,32	302,49	
	Produktivitas Perikanan Budidadaya	Ton	115,26	128,82	142,38	155,94	169,50	183,05	196,61	
	Indeks Ekonomi Biru	Skor	71,30	79,86	88,41	96,97	105,53	114,08	122,64	
	Transformasi Digital									
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	Angka	20,94	24,23	27,52	30,80	34,09	37,38	40,67	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia, Bappenas)	Persen	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Persen	40,78	40,95	41,41	41,86	42,31	42,76	43,22	
	Net Ekspor Barang dan Jasa (Milyar Rupiah)	RP. (milyar)	-754,76	-714,05	-673,35	-632,65	-591,94	-551,24	-510,54	
	Perkotaan dan Perdesaan Sebagi Pusat Pertumbuhan ekonomi									
	Proporsi Kontribusi PDRB terhadap provinsi	Persen	1,43	1,44	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	79,86	80,00	82,25	83,50	84,30	85,00	86,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	2,85	4,07	4,86	5,65	6,44	7,22	8,01	
	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah									
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,85	0,95	1,06	1,16	1,26	1,36	1,47	
	Tingkat Inflasi	Persen	2,21	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	Persen	15,08	18,11	21,20	24,30	27,39	30,49	33,58	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	61,59	63,41	65,24	67,07	68,90	70,73	72,56	
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	6,40	6,40	6,41	6,41	6,41	6,42	6,42	
	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklajuti	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif									
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,77	78,83	79,89	80,94	82,00	83,06	84,12	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,62 (Baik)	2,70 (Baik)	2,80 (Baik)	2,90 (Baik)	3,00 (Baik)	3,50 (Sangat Baik)	4,00 (Sangat Baik)	
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,11	3,20	3,29	3,38	3,47	3,56	3,65	
	Indeks Survey Penilaian Integritas	Angka	72.44% (Zona Merah/Rentan)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	
	Nilai MCP KPK	Angka	87.18% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	78%-100% (Zona Hijau/Terjaga)	
	Indeks Maturitas SPIP	Angka	Rintisan (Level 1	Terdefenisi (Level 3	Terdefenisi (Level 3	Terdefenisi (Level 3	Terdefenisi (Level 3	Terdefenisi (Level 3	Terdefenisi (Level 3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Skor 1,874)	Skor 3,00-3,99)	Skor 3,00-3,99)	Skor 3,00-3,99)	Skor 3,00-3,99)	Skor 3,00-3,99)	Skor 3,00-3,99)	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Tahun	65,67	67,00 (C)	68,50 (C)	70,00 (C)	72,50 (C)	75,50 (B)	77,50 (B)	
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n.a	85,00	86,50	88,68	90,18	92,50	94,0	
	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	n.a	76,50	77,50	78,50	79,50	81,00	82,50	
	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, dan Demokrasi Substansial									
	Persentase Penegakan Perarutan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	99,85	94,58	95,27	95,35	95,43	95,51	96,69	
	Persentase tindak kriminal yang ditangani	Persen	33,06	45	46,25	47,50	48,75	50,00	51,25	
	Persentase Permpuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	Persen	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	26,43	31,57	
	Persentase Perempuan pengurus Partai Politik	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
	Perda yang merupakan Inisiatif DPRD		14	10	10	10	10	10	10	
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan									
	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	4,09	3,08	3,18	3,28	3,37	3,47	3,57	

Tabel IV.5
Indikator Kinerja Kunci Kota Parepare
Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
I	**PENDIDIKAN**									
1.1	Tingkat Partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpastisipasi dalam PAUD	Persen	45,87	63,20	78,89	81,59	82,66	83,70	84,71	
1.2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	82,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	65,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	41,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
II	**KESEHATAN**									
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Orang	4,46	4,46	4,87	4,80	4,79	4,72	4,66	
2.2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	80,63	90,89	92,10	93,64	95,46	96,94	97,40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	91,07	91,41	91,73	92,03	93,17	93,74	95,18	
2.5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	87,56	96,50	96,61	96,70	96,80	96,89	96,97	
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	71,04	97,83	97,88	98,21	98,52	99,01	99,36	
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	96,34	97,58	98,02	98,49	98,66	99,12	99,53	
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	89,46	90,94	91,15	91,29	91,46	91,53	91,69	
2.9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	93,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	69,65	87,79	98,93	99,19	99,48	99,58	99,71	
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	113,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	92,41	98,30	98,55	98,83	99,11	99,38	99,69	
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	113,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota	Persen	Indikator tersebut tidak dapat ditentukan targetnya karena tidak ada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kota Parepare							
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah pendudu Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kota	Persen	76,97	75,83	72,93	73,55	72,42	71,28	70,12	
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	59,21	59,21	66,12	73,36	80,59	84,54	94,41	
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Persen	93,65	94,30	94,93	95,53	96,11	96,67	97,21	
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	86,06	87,49	88,87	90,20	91,48	92,71	93,89	
3.6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.7	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	58,81	64,78	70,76	76,73	82,71	88,68	94,66	
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang ditangani	Persen	44,63	49,81	55,69	62,42	70,21	79,33	90,12	
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,03	5,65	5,18	4,75	4,33	3,97	3,55	
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	29,23	45,00	47,50	50,00	52,50	55,00	60,00	
V	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.3	Jumlah warga Negara yang memperolah layanan informasi	Persen	418,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	rawan bencana									
5.4	Jumlah warga Negara yang memperolah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	78,43	91,34	93,44	94,93	95,83	96,55	97,26	
5.5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	9,81 menit	9,13 menit	8,44 menit	7,76 menit	7,07 menit	6,39 menit	5,70 menit	
VI	**SOSIAL**									
6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	43,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
I	**TENAGA KERJA**									
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	57,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	19,07	19,24	19,83	20,41	20,98	21,55	22,11	
1.3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Persen	44,53	46,52	48,33	50,12	51,88	53,62	55,33	
1.4	Persentase perusahaan yang merapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Persen	73,53	85,82	85,86	85,90	85,94	85,98	86,02	
1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Persen	84,26	84,34	84,82	85,26	85,67	86,08	86,46	
II	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	5,85	5,62	6,02	6,39	6,76	7,13	7,50	
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait instansi kabupaten	Persen	100,00	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	54,41	50,50	50,25	49,50	49,32	49,25	49,00	
III	**PANGAN**									
3.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras /jagung sesuai kebutuhan)	Persen	231,69	230,48	233,97	237,10	239,93	242,49	244,84	
IV	**PERTANAHAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Angka	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.4	Tersediannya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang bersal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00	100,00	
4.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
V	**LINGKUNGAN HIDUP**									
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Persen	67,01	71,12	71,33	71,54	71,75	71,96	72,17	
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	Persen	73,90	73,37	80,00	76,67	73,33	70,00	70,00	
5.3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VI	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.2	Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	92,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	48,48	48,48	
VII	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,34	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	
8.2	Persentase pemakaian Kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	66,71	60,20	61,40	62,62	63,87	65,14	66,44	
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,9	11,5	11,2	11,00	10,7	10,3	9,8	
IX	**PERHUBUNGAN**									
9.1	Rasio konektifitas kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9.2	V/C Rasio di Jalan Kota	Persen	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,48	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
X	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
10.1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	97,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10.2	Persentase Layananan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	46,67	46,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
XI	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
11.1	Meningkat koperasi yang berkualitas	Persen	33,61	33,61	29,17	29,45	29,93	30,41	30,87	
11.2	Meningkatnya Usaha Mikron yang menjadi wirausaha	Persen	44,24	44,22	44,18	44,14	44,11	44,08	44,03	
XII	**PENANAMAN MODAL**									
12.1	Persentase peningkatan investasi di kota	Persen	0,98	2,28	3,43	4,11	5,57	6,54	7,62	
XIII	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**									
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,61	2,65	2,83	2,90	2,99	3,06	3,32	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasrakatan	Persen	11,98	9,39	9,53	9,65	9,74	9,99	10,37	
13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	82	84	86	88	94	96	101	
XIV	**STATISTIK**									
14.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
XV	**PERSANDIAN**									
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	
XVI	**KEBUDAYAAN**									
16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	80,00	83,33	85,71	100,00	100,00	100,00	
XVII	**PERPUSTAKAAN**									
17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	76,87	77,36	77,85	78,35	78,84	79,33	79,82	
17.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Persen	94,68	95,02	95,36	95,71	96,05	96,39	96,73	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
XVIII	**KEARSIPAN**									
18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	
18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggunjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	
LAYANAN URUSAN PILIHAN										
I	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Persen	95,59	96,13	97,68	97,94	98,18	99,02	99,79	
	Produktivitas Perikanan Tangkap	Ton	223,49	236,65	249,82	262,99	276,16	289,32	302,49	
	Produktivitas Perikanan Budidadaya	Ton	115,26	128,82	142,38	155,94	169,50	183,05	196,61	
II	**PARIWISATA**									
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-24,70	13,04	11,54	10,37	9,39	8,57	7,91	
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	Persen	4,19	4,17	3,91	3,96	2,59	2,86	3,74	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kota									
2.3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	822,79	833,70	844,51	855,50	866,39	8772,95	888,20	
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	6,84	7,00	7,14	7,27	7,38	7,48	7,58	
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,73	3,05	3,25	3,70	4,05	4,26	4,55	
III	**PERTANIAN**									
3.1	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	Persen	5,70	5,73	5,77	5,85	5,91	5,98	6,05	
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-16,63	-19,95	-1,58	-1,33	-1,35	-1,37	-1,39	
IV	**PERDAGANGAN**									
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	46,08	95,69	96,23	96,67	97,21	97,59	98,28	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	95,50	95,91	96,27	96,50	96,77	96,90	97,03	
V	**PERINDUSTRIAN**									
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	Persen	16,28	6,73	6,31	5,93	5,60	5,30	5,04	
5.2	Persentase pencapaian sasaran	Persen	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP									
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Induusri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasaan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pemgawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.6	Tersediaanya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	65,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
I	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**									
1.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	14,67	18,91	19,16	19,56	20,00	20,57	21,06	
1.2	Rasio PAD	Persen	21,61	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	
1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	Rintisan (Level 1 Skor 1,874)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,00-3,99)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,00-3,99)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,00-3,99)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,00-3,99)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,00-3,99)	Terdefenisi (Level 3 Skor 3,00-3,99)	
1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persen	Terintegrasi (Level 3 Skor	Terintegrasi (Level 3 Skor	Terintegrasi (Level 3 Skor	Terintegrasi (Level 3 Skor	Terintegrasi (Level 3 Skor	Terintegrasi (Level 3 Skor	Terintegrasi (Level 3 Skor	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(APIP)		3,00-3,99)	3,00-3,99)	3,00-3,99)	3,00-3,99)	3,00-3,99)	3,00-3,99)	3,00-3,99)	
1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transper expenditures)	Persen	2,71	76,12	76,39	76,53	76,78	77,18	77,48	
1.6	Opini Laporan Keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
II	**PENGADAAN**									
2.1	Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ketahun berikutnya. yang ditanda tangani pada kuartal pertama		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode komperatif	Persen	63,14	64,66	66,29	67,92	69,58	71,25	72,84	
2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	15,30	16,14	17,19	18,30	19,26	20,54	21,09	
2.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan		-22,95	49,12	54,72	55,39	56,46	57,32	58,70	
III	**KEPEGAWAIAN**									
3.1	Rasio Pegawai pendidikan Tinggi dan menengah /dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jp/Tahun	0,83	0,69	0,71	0,74	0,78	0,81	0,82	
3.2	Rasio Pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persen	0,18	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	
3,3	Rasio jabatan funsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk	Persen	11,02	14,89	18,92	22,51	25,77	28,74	31,46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	guru dan tenga kesehatan									
IV	**MANAJEMEN KEUANGAN**									
4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-5,58	-3,38	-3,67	-3,96	-4,24	-4,53	-4,81	
4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	21,61	19,42	18,87	18,40	17,92	16,76	14,08	
4.3	Manajemen Aset		YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		2,84	2,85	2,89	2,99	3,15	3,27	3,74	
V	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**									
5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersdia untuk pelayanan	Persen	99,69	99,73	99,77	99,80	99,82	99,84	99,87	
5.2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

4.2.3. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagaimana yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang dimaksud adalah :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan
f. sosial

SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target Indikator SPM Tahun 2025-2030 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel IV.6
Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENAGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Bidang Pendidikan										
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan PAUD	100	83,81	86,78	89,74	92,71	95,26	97,81	100	OPD yang menangani SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Dasar	Persentase warga negara usia 7 -15 tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar	100	97,8	98,08	98,37	98,66	98,99	99,24	99,52	
	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	SD = 62,81 SMP = 69,90	100	100	100	100	100	100	
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional		SD = 54,81 SMP = 61,61	1,9	2	100	100	100	100	
Pendidikan Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7 -18 tahun yang belum yang menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	23,15	27,25	31,35	35,45	39,55	34,65	37,75	
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya	literasi = 85.70 numerasi = 100	1,55	1,6	100	100	100	100	
Bidang Kesehatan										
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	88,16	100	100	100	100	100	100	OPD yang menangani SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan	100	89,91	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENAGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kesehatan									
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	87,52	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	129,83	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	178,13	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	145,61	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	132,51	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100	229,79	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke tas yang mendapatkan Layanan kesehatan	100	105,14	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	107,12	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	106,61	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENAGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	114,03	100	100	100	100	100	100	
Bidang Pekerjaan Umum										
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	92,34	100	100	100	100	100	100	OPD yang menangani SPM Bidang Pekerjaan Umum
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	93,24	100	100	100	100	100	100	
Bidang Perumahan Rakyat										
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	OPD yang menangani SPM Bidang Perumahan rakyat
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100	100	100	100	
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat										
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	OPD yang menangani SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENAGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Perlindungan Masyarakat
Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	124,98	100	100	100	100	100	100	OPD yang menangani SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Penaggulangan bencana)
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	137,50	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	OPD yang menangani SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Damkar)
Bidang Sosial										
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	OPD yang menangani SPM Bidang Sosial
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100	100	100	100	100	100	100	100	

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD PENAGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
terlantar di luar panti	memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti									
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	

4.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Suistainable Develpoment Goals (SDG's)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Suistainable Development Goals (SDGs)* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan target pencapaian TPB/SDGs tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel IV.6
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Parepare Tahun 2025-2030

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN										
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persen	5,27	5,12	5,19	5,41	5,74	5,46	5,63	Dinas Sosial
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	98,42	97,78	98	98	98	99	99	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen		99,51	100	100	98,34	99,36	100	Dinas Tenaga Kerja
1.3.1.(c)	Jumlah Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tepenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persen	63,06	18	18	19	19	19	19	Dinas Sosial

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	KPM	4.213	4.352,80	4.357,61	4.473,37	4.304,64	4.522,23	4.651,61	Dinas Sosial
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	100	97,01	96,62	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	66,71	66,80	67,15	67,50	67,75	67,90	68,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air layak dan berkelanjutan	Perseen	93,65	95,9	97,91	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4.1(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutam	Persen	86,06	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persen		11, 26	11,36	11,44	12,19	12,77	12,93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Persen	81,64	79,77	79,74	81,10	79,64	78,20	80,16	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipas Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Persen	58,92	38,66	44,10	41,81	29,70	35,64	37,92	Dinas Pendidikan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Rumah Tangga		56.319,24	58.326,13	58.326,16	63.294,60	53.336,08	57.243,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Persen		0,35	0,15	0,49	4,87	4,94	4,76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi		5	4	3	2	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Rupiah		1.181.471.487	1.229.752.951	1.256.696.362	1.272.293.563	1.282.627.486	1.304.541.361	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social) sebagai total belanja pemerintah	Persen		43,84	43,34	43,25	42,39	41,55		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN										
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	4,02	4,15	4,85	4,99	5,59	5,76	5,92	Dinas Ketahanan Pangan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	13,820	15	14	12,99	11,99	10,99	10,99	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari			7,43	8,48	9,61	11,56	13,29	15,46	Dinas Ketahanan Pangan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	11,450	18,79	17,49	16,29	15,19	14,19	13,19	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Persen	10,260	18,79	17,48	16,29	15,18	14,17	14,17	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	6,48	7,99	7,49	6,99	6,49	5,00	5,00	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	8,94	26,00	24,97	23,97	21,98	19,98	19,98	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen	69,34	72,95	75,99	78,95	81,99	84,95	84,95	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	84,7	91,14	90,45	91,61	91,71	93,16	93,46	Dinas Ketahanan Pangan
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kasus	183,066	153,74	168,40	161,07	164,74	162,91	163,83	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persen	99,91	80,06	81,02	82,03	82,98	84,03	85,04	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 KH	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 KH	8,24	7,11	6,16	5,21	4,74	4,26	3,79	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	2,29	0,8	0,4	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kecamatan yang mencapai 80Persen imunisasi dasar lengkap bayi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	per 1000	0,31	0,37	0,40	0,43	0,45	0,47	0,5	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100000	432,91	428,71	366,77	314,80	278,48	250,39	228,57	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Per 1000	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang	Orang	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terabaikan (Filariasis dan Kusta).									
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Persen	2,07	2,10	2,58	2,70	3,27	3,49	3,57	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Per 1000 penduduk usia >15 tahun	226,78	205,01	191,35	174,14	168,96	159,94	147,07	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	10,83	13,23	15,64	17,98	20,25	22,46	22,14	Dinas Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan Kesehatan sekseual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi dan Pendidikan dan integrasi Kesehatan reproduksi kedalam strategi dalam program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persen	66,71	66,80	67,15	67,50	67,75	67,90	68,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persen	66,71	66,80	67,15	67,50	67,75	67,90	68,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Jumlah	4.521	4.550	4.575	4.600	4.625	4.650	4.675	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Persen	26,5	18,25	16,5	14,75	13	11,25	10,18	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Persen	2,34	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1.(a)	Unmet need pelayan kesehatan	Persen	4,27	3,97	3,68	3,38	3,09	2,80	2,50	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Per 1000	984	987	980	980	980	990	990	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	98,42	97,78	98	98	98	99	99	Dinas Kesehatan
3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen	0,67	1,41	1,53	1,64	1,75	1,85	1,82	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama beengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	72,3	75,6	79,5	83,4	87,2	92,6	97,4	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen	93	96,6	98,14	103,5	108,5	109,21	110,14	Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	47,12	25,49	20,19	15,73	12,25	9,9	8,43	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	31,43	89,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Persen	94,77	95,02	95,50	96,82	96,46	96,10	95,53	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Persen	81,86	92,04	84,46	81,37	81,30	75,64	74,36	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	10,88	15	17,61	19,75	22,45	26,29	31,54	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Sekolah TK/Paud Negeri	39,60	44,75	48,38	52,23	57,25	62,17	68,63	Dinas Pendidikan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	95	93,56	92,95	94,01	94,89	96,23	97,83	Dinas Pendidikan
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	56,77	65,95	65,82	66,93	69,56	71,1	73,04	Dinas Pendidikan
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen		426,43	590,13	811,65	1.117	1.570	1.602	Dinas Tenaga Kerja
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Masyarakat / Orang tidak mampu	100	100,67	101,08	98,71	97,29	96,79	95,83	Dinas Pendidikan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Persen	100	100,67	97,48	96,18	93,15	94,34	95,76	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN										
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan	14	33	46	67	96	137	148	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik,seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen	0,065	0,07	0,07	0,02	0,01	0,01	0,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.1.(a)	Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan	Persen	0,097	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik,seksual, atau emosional) oleh pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen	0,065	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komperensif	Persen	100	98,32	99,17	98,14	97,89	96,49	95,27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat Perempuan										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persen	1,977	1,63	2,26	3,15	4,27	5,88	6,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Umur	22,8	22	22	22	23	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Persen	26,5	20,74	21,73	22,71	22,92	22,76	22,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Orang	24	18,35	17,14	17	15,89	14,93	13,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Persen	38,3	36,00	35,50	35,30	34,20	34,10	33,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan Perempuan										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen		94,19	95,18	95,97	94,92	96,2	97,51	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen[1]dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15 49 tahun yang membuat keputusan sendiri	Persen	n.a	67,2	98,4	129,6	160,8	192	197	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi									Perlindungan Anak
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Persen	11,9	11,5	11,2	11	10,7	10,3	9,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Persen	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA										
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persen	93,65	95,9	97,91	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	ltr/dtk	355,91	358,84	362,38	365,14	367,77	371,07	385,61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	93,65	95,9	97,91	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persen	97,79	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persen	86,06	100	100	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah	22	22	22	22	22	22	22	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah	22	22	22	22	22	22	22	Dinas Kesehatan
6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kota	4	4	4	4	4	4	4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persen	4,4	52	46	40	35	31	29	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persen	86,06	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Nilai	56,67	61,63	60,96	60,43	59,9	59,37	38,71	Dinas Lingkungan Hidup
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Ada/Tidak Ada	Ada Regulasi	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
6.5 Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya										
TUJUAN 8. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA										
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen		3,91	3,91	3,86	3,81	3,66	3,24	Dinas Komunikasi dan Informatika
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Juta		60,01	60,75	56,69	57,02	55,42	53,27	Dinas Komunikasi dan Informatika
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Persen		60,32	61,76	61,56	56,63	53,17	50,64	Dinas Komunikasi dan Informatika
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persen		37,08	38,2	39,95	36,94	33,92	30,72	Dinas Tenaga Kerja
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rupiah		25.556	26.438	28.483	26.726	23.385	21.693	Dinas Tenaga Kerja
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen		6,02	6,26	6,92	6,45	5,69	5,17	Dinas Tenaga Kerja
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen		9,31	9,63	11,03	9,92	8,88	7,91	Dinas Tenaga Kerja
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Persen	6,84	7,06	7,02	8,41	7,39	6,69	8,12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	2.086	2.953	2.963	3.568	3.001	2.974	3.185	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	971.401	991.615	1.007.289	1.168.247	1.020.027	1.044.362	1.105.911	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rupiah		9.167.392.430	9.425.552.542	1.621.478.056	9.755.344.502	10.210.464.289	10.210.478.502	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Orang	Tidak ada pendataan terkait pekerja	565	568	708	582	630	547	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI										
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit		3	3	3	3	3	3	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	Persen		3,35	3,57	4,24	3,54	3,58	3,64	Dinas Perdagangan
9.2.1.(a)	Laju Pertumbuhan PDRB industry maufaktur	Persen		9,45	9,86	12,01	9,77	9,28	10,07	Dinas Perdagangan
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Persen		13.647	15.047	18.388	14.684	14.680	15.680	Dinas Tenaga Kerja
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Persen		58,87	58,8	58,74	58,66	58,59	58,43	Dinas Perdagangan
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Persen		75,88	89,08	105,16	84,02	84,46	84,73	Dinas Perdagangan
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA										
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40Persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
10.1.1*	Koefisien Gini.	Angka	0,376	0,370	0,363	0,357	0,351	0,345	0,338	Dinas Sosial
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persen	5,27	5,34	5,12	5,19	5,41	5,74	5,46	Dinas Sosial
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah		0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar										
10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan social bidang ketenagkerjaan	Persen		99,51	100	100	98,34	99,36	100	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN										
11.b Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level										
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persen		0,01	0,01	0,01	0	0	0	Dinas Perhubungan
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Persen		0,35	0,25	0,49	4,87	4,94	5,27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks	135,00	132,00	130,00	128,00	125,00	122,00	120,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jumlah		1	1	1	2	2	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Juta		1.181.471.487	1.229.752.951	1.256.696.362	1.272.293.536	1.282.627.486	1.291.746.132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	73,90	73,37	80	76,67	73,33	70,00	70,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	1.150	1.155	1.160	1.165	1.170	1.175	1.180	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persen	15,18	13,73	20	23,33	26,67	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Fasilitas Publik		7	9	7	9	16	16	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah.	Dokumen		1	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per100.000		0,35	0,15	0,49	4,87	4,94	5,73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14: MENGKONSERVASI DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDRA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN										
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.										
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.									
TUJUAN 15. MELINDUNGI RESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARAT, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI										
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	12,63	12,63	12,64	12,65	12,65	12,65	12,65	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	Dinas Lingkungan Hidup
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.										
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Regulasi	Ada Regulasi	1	1	1	1	1	1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.										
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan	Kasus	0	1	1	1	1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pembunuhan pada satu tahun terakhir.									
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0,11	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen	99,85	94,58	95,27	95,35	95,43	95,51	96,69	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak										
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Persen	0,076	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-	Persen	0	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	Dinas Pemberdayaan perempuan dan

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	laki dan anak perempuan									perlindungan anak
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persen	0,02	0,059	0,074	0,11	0,11	0,10	0,10	Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Nilai	N/A	98,79	98,63	95,27	93,66	98,87	96,51	Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat										
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Persen		76,96	76,76	84,31	82,97	84,78	84,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Opini		94,33	98,02	91,25	98,66	96,93	98,02	Inspektorat Daerah

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen		27,8	30,36	30,47	28,5	29,37	29,71	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah (SKPD) yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Persen	65,67	62,08	61,64	65,62	62,69	68,65	66,37	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	6	19,09	19,88	19,93	20,1	19,18	19,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen		35,14	37,24	39,71	39,64	38,38	38,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	100	107,33	92,61	101,81	96,49	99,83	102,94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Persen	N/A	98,87	96,4	96,77	98,36	94,16	96,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	100	100	97,7	100	98,04	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Orang		2	2	2	2	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dlm 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan	N/A	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persen		8,78	8,47	8,32	7,88	7,47	7,03	Badan Keuangan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen		0,55	0,58	0,59	0,61	0,62	0,63	Badan Keuangan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen		6,05	6,57	7,16	7,84	8,37	8,71	Badan Keuangan Daerah
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen		91,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang teilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen		97,35	94,47	94,33	95,08	96,86	97,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meta data		40	77	115	153	191	124	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Indikator	INDIKATOR SDGs	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						OPD Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persen		90,23	90,11	89,52	87,92	87,76	88,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Jumlah		7.173	8.650	10.032	11.661	13.265	15.421	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Pengunjung		14.799	17.206	20.476	23.620	27.573	31,119	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen		100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V
PENUTUP

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program–program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.

RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang ingin diwujudkan pada Tahun 2029. Rumusan Visi Pembangunan Kota Parepare tahun 2025 - 2029 adalah **“ Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju “.** Sedangkan Misi merupakan rumusan umum dalam upaya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Parepare tahun 2025 - 2029 tersebut diatas dengan rumusan Visi sebagai berikut :

a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance), Adaptif, dan Inovatif.
b) Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dengan Mengedepankan Harmonisasi dan Toleransi Antar Umat Beragama, serta Menguatkan Kearifan Budaya Lokal.
c) Mewujudkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.
d) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.

e) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berkeadilan.

f) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur daerah yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Parepare periode Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Parepare. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Parepare harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalampenyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
2. RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Parepare yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota Parepare dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun

pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.

4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Parepare, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.
6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Wali Kota Parepare dan Ketua DPRD Kota Parepare serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas.
7. RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

8. Sebagai salah satu wujud pengendalian RPJMD Kota Parepare tahun 2025 - 2029 maka akan diterapkan manajemen resiko sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 yang mencakup proses identifikasi, analisis, dan Penanggulangan Resiko dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA

bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 76, KOTA PAREPARE
website : bappeda.pareparekota.go.id
bappeda@pareparekota.go.id